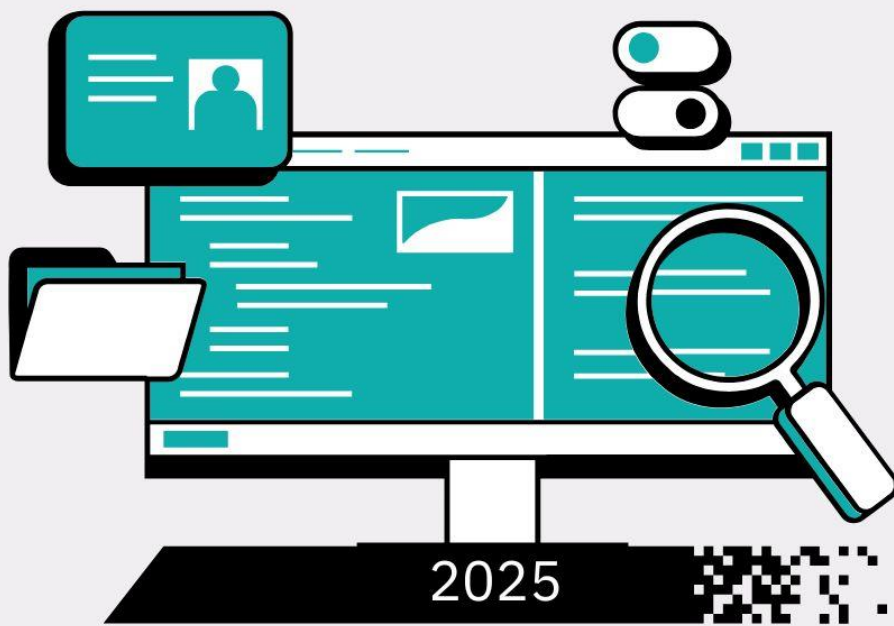


**BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAMBI**

**LAPORAN
KINERJA (LKJ)**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 yang memuat pelaporan kinerja Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang perumusan kebijakan dan fasilitasi pengelolaan perekonomian daerah.

Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta selaras dengan dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan. Laporan ini menyajikan capaian kinerja program dan kegiatan selama Tahun 2025, termasuk analisis terhadap tingkat keberhasilan, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Biro Perekonomian.

Diharapkan laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan informasi yang bermanfaat bagi pimpinan daerah dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, perencanaan, serta peningkatan kinerja Biro Perekonomian pada tahun-tahun berikutnya. Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2026

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAMBI,



M. ALEFIANSYAH, S.Pi, ME
Pembina Tk.I

NIP. 19690124 200003 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LKjIP) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Jambi. Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mengacu pada Rencana Strategis Biro Perekonomian Tahun 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sasaran strategis Biro Perekonomian dalam Renstra Tahun 2021–2026 diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan perekonomian daerah, penguatan koordinasi dan fasilitasi perekonomian, serta peningkatan tata kelola pengelolaan BUMD dan BLUD yang akuntabel. Dalam Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan pada upaya pencapaian sasaran tersebut melalui penyusunan rekomendasi kebijakan, fasilitasi koordinasi lintas perangkat daerah, serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang perekonomian.

Pengukuran kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja utama serta indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja Biro Perekonomian berada pada kategori baik, dengan sebagian besar indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Dari sisi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, pelaksanaan anggaran Biro Perekonomian Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan prinsip value for money serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat realisasi anggaran secara umum selaras dengan capaian kinerja yang dihasilkan, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja (money follows program).

Evaluasi kinerja menunjukkan adanya beberapa faktor pendukung, antara lain meningkatnya sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah serta dukungan pimpinan. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi, seperti dinamika kebijakan nasional, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi. Terhadap kendala tersebut, telah dirumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2021–2026. LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan daerah dan Inspektorat dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
Ikhtisar Eksekutif.....	2
DAFTAR ISI	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Struktur Organisasi.....	6
1.2 Tugas dan Fungsi.....	14
1.3 Sumber Daya Aparatur	29
1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	32
1.5 Sumber Daya Keuangan	39
1.6 Isu-isu Strategis	41
1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	43
BAB II.....	45
PERENCANAAN KINERJA.....	45
2.1 Perencanaan Strategis.....	45
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	71
2.1 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	73
2.3.1 Target Belanja Biro Perekonomian Provinsi Jambi.....	76
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	76
BAB III.....	78
AKUNTABILITAS KINERJA	78
3.1 Capaian Kinerja 2025	78
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	84
3.3 Realisasi Anggaran.....	88
3.4 Analisis Efisiensi	93
BAB IV	95
PENUTUP.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur staf yang mempunyai peran strategis dalam membantu Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi, serta fasilitasi di bidang perekonomian daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Perekonomian berperan sebagai penghubung antarperangkat daerah, BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan tersusunnya kebijakan perekonomian yang terarah, terpadu, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara strategis, Biro Perekonomian memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan perekonomian daerah melalui penyediaan bahan perumusan kebijakan ekonomi makro daerah, fasilitasi pengembangan dan penguatan peran BUMD dan BLUD, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di sektor-sektor strategis perekonomian. Peran tersebut menuntut Biro Perekonomian untuk mampu menjembatani kepentingan lintas sektor serta memastikan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan kebijakan nasional.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan tugas Biro Perekonomian dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan strategis, baik yang bersumber dari perubahan kebijakan nasional maupun kondisi perekonomian regional dan global. Dinamika tersebut berdampak pada perlunya penyesuaian kebijakan perekonomian daerah agar tetap responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, sekaligus mampu menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi daerah.

Permasalahan utama (strategic issues) yang dihadapi Biro Perekonomian antara lain masih perlunya peningkatan kualitas perumusan kebijakan perekonomian daerah

yang berbasis data dan analisis yang komprehensif, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi, serta optimalisasi peran BUMD dan BLUD agar lebih berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan dalam penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja juga menjadi perhatian utama dalam mendukung penerapan SAKIP secara konsisten.

Selain permasalahan tersebut, Biro Perekonomian juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, serta kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kebijakan yang dinamis. Kondisi ini menuntut adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan agar kinerja yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan perekonomian daerah.

Pendahuluan ini menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025, yang selanjutnya menyajikan gambaran capaian kinerja, analisis atas hasil yang diperoleh, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akuntabel dan komprehensif bagi pimpinan daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan dan pengelolaan perekonomian daerah di Provinsi Jambi.

1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah, menetapkan bahwa Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut adanya pengaturan organisasi dan sistem kerja yang efektif guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2024 tentang *Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi* (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 9).

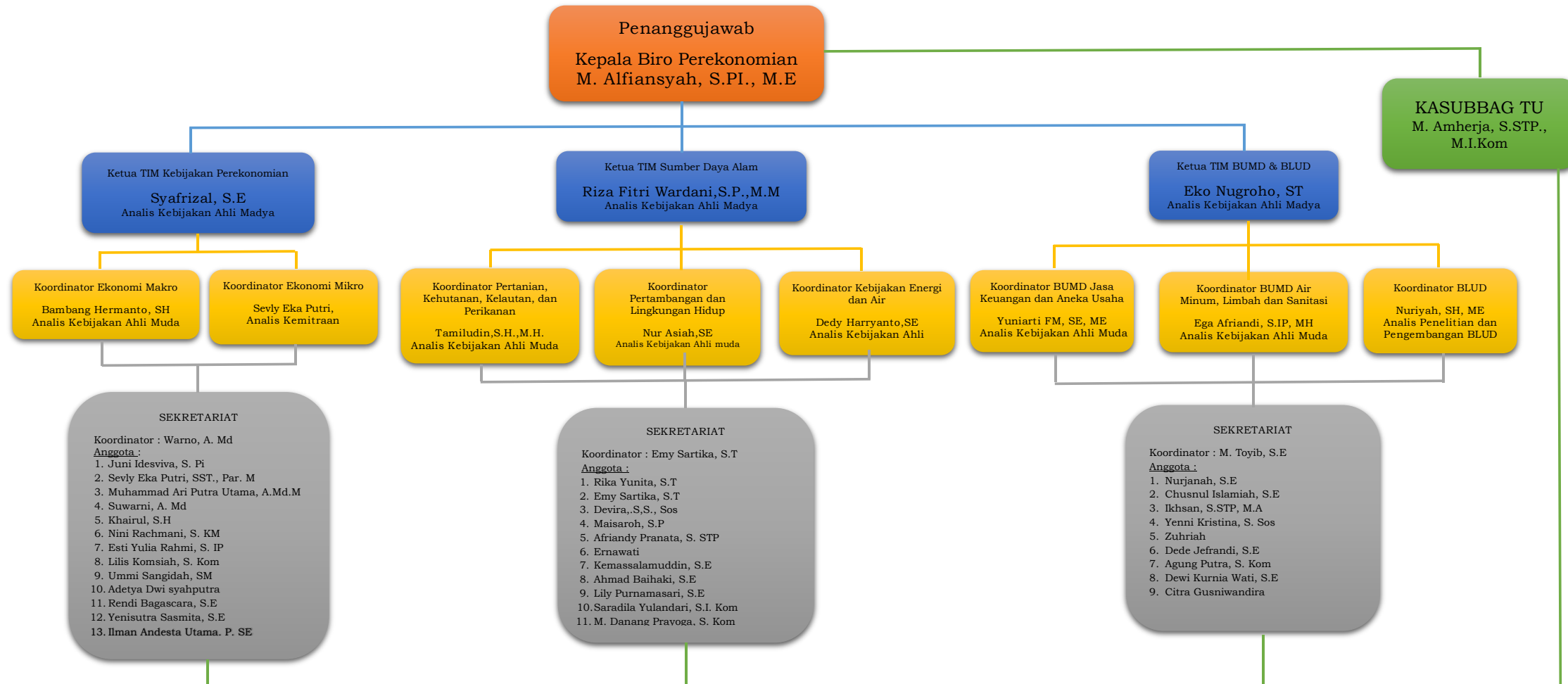
Peraturan ini mengatur pola kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis kinerja melalui pembentukan tim kerja sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Nomor : 28/KEP.PRKM/2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 sebagai sarana pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih terarah, terintegrasi, dan akuntabel. Pembentukan tim kerja dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi internal, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pembentukan Tim Kerja Tahun 2025 di lingkungan Biro Perekonomian diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui pola kerja yang kolaboratif dan berbasis hasil. Dengan dukungan sistem kerja yang terstruktur dan berorientasi pada kinerja, Biro Perekonomian diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perekonomian daerah di Provinsi Jambi.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**



1.2 Tugas dan Fungsi

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah, menetapkan bahwa Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi juga menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dijabarkan melalui Surat Keputusan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Nomor : 28/KEP.PRKM/2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 adanya pengaturan organisasi dan sistem kerja yang efektif dan efisien. Hal ini mencakup pembagian tugas yang jelas, alur kerja yang terstruktur, mekanisme koordinasi yang baik, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten yang di jelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Uraian Kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	POKJA	Indikator POKJA	Sasaran POKJA
1.	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	1. Menyiapkan regulasi/ kebijakan/Tim 2. Menyusun Roadmap / Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Jambi 3. Melaksanakan Koordinasi Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal Terkait serta Pemerintah Pusat yang terkait 4. Menyiapkan bahan Rapat Koordinasi/HLM kegiatan Pengendalian Inflasi (Surat, Notulen, Sambutan, bahan paparan, Dokumentasi dll) 5. Menyiapkan bahan kinerja 1 (satu) tahun pengendalian inflasi untuk TPID award 6. Menyusun laporan pengendalian inflasi (notulen, laporan bulanan, laporan triwulan) 7. Menyiapkan bahan untuk Monev implementasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Tersusunnya regulasi/ kebijakan/Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2. Tersusunnya Roadmap / Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi 3. Memfasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi dan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi 4. Tersusunnya laporan pengendalian inflasi 5. Melaksanakan kegiatan Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengendalian Infalsi
		Percepatan Ekspor	1. Menyiapkan regulasi (Keputusan Gubernur) 2. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan kementerian/ lembaga 3. Melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait 4. Menyiapkan bahan dan data evaluasi pelaksanaan progres kegiatan percepatan ekspor	1. Tersusunnya kebijakan kegiatan Percepatan Ekspor 2. Memfasilitasi kegiatan percepatan Ekspor (pelepasan ekspor dan rapat koordinasi) 3. Melaksanakan kegiatan Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi kegiatan Percepatan Ekspor

			5. Menyiapkan bahan untuk Monev implementasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
		Investasi	1. Memfasilitasi penyusunan regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan SK Gubernur) 2. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Vertikal dan Instansi Terkait 3. Menyusun kajian produk unggulan Provinsi Jambi atau laporan terkait Investasi di Provinsi Jambi 4. Melaksanakan monev terkait investasi di Provinsi Jambi 5. Mefasilitasi Rapat Koordinasi terkait dengan Investasi di Provinsi Jambi	1. Tersusunnya kebijakan kegiatan Investasi. 2. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan investasi di Provinsi Jambi. 3. Melaksanakan kegiatan Pemantauan /Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan investasi/penanaman modal. 4. Tersusunnya laporan/kajian yang berkaitan dengan investasi di Provinsi Jambi.
		Mendorong Percepatan Hilirisasi	1. Memfasilitasi penyusunan regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan SK Gubernur) 2. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Vertikal dan Instansi Terkait 3. Melaksanakan monev 4. Mefasilitasi Rapat Koordinasi terkait dengan Investasi di Provinsi Jambi	1. Tersusunnya kebijakan untuk mendorong percepatan hilirisasi. 2. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan investasi di Provinsi Jambi. 3. Melaksanakan kegiatan Pemantauan /Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan Percepatan Hilirisasi. 4. Tersusunnya laporan kegiatan Percepatan Hilirisasi.
2.	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Fasilitasi	Ekonomi dan Keuangan Syariah	1. Menyiapkan regulasi (Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur) 2. Menyusun rencana kerja KDEKS Provinsi Jambi 3. Melaksanakan	1. Tersusunnya kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jambi. 2. Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jambi. 3. Memfasilitasi kegiatan

	Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Koordinasi dan konsultasi dengan kementerian/lembaga perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota serta KNEKS - Melakukan pertemuan terkait penyelenggaraan KDEKS - Melaksanakan Monev implementasi kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah - Mendokumentasikan pelaksanaan kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah - Memfasilitasi dukungan sarana dan prasarana untuk operasional KDEKS Provinsi Jambi - Menyusun laporan penyelenggaraan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Jambi	pertemuan/rakor/FGD terkait dengan KDEKS - Terlaksananya Monev kegiatan KDEKS - Tersusunnya bahan/dokumen terkait KDEKS - Tersusunnya laporan KDEKS
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	- Memfasilitasi penyusunan regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan SK Gubernur) - Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Vertikal dan Instansi - Menyusun laporan penggunaan produk dalam negeri pada Biro Perekonomian - Melaksanakan monev penggunaan produk dalam negeri	Menyusun regulasi atau kebijakan terkait P3DN Memfasilitasi pertemuan/ Rakor/FGD terkait kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tersusunnya laporan Pelaksanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Terlaksananya Monev kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tersusunnya laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
		Pembinaan UMKM (Bantuan Modal Usaha DUMISAKE)	- Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi UMKM di Provinsi Jambi - Melaksanakan monev implementasi pelaksanaan program bantuan modal usaha DUMISAKE	- Tersusunnya regulasi/kebijakan terkait inventarisasi dan identifikasi UMKM serta implementasi pelaksanaan program bantuan modal usaha DUMISAKE - Terlaksananya Monev kegiatan inventarisasi dan identifikasi UMKM serta implementasi

			3. Melakukan koordinasi pelaksanaan program bantuan modal usaha DUMISAKE dengan perangkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya 4. Menyiapkan bahan kebijakan, data dan laporan pelaksanaan bantuan modal usaha DUMISAKE	pelaksanaan program bantuan modal usaha DUMISAKE 3. Tersusunnya laporan implementasi dan monev pelaksanaan bantuan modal usaha DUMISAKE di Provinsi Jambi
		Percepatan Akses Keuangan Daerah	1. Menyiapkan regulasi (Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur) 2. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan kementerian/lembaga 3. Melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait 4. Menyiapkan bahan dan data evaluasi pelaksanaan progres penyelenggaraan TPAKD 5. Menyelenggarakan pertemuan TPAKD 6. Melaksanakan monev progress percepatan akses keuangan daerah 7. Mendokumentasikan implementasi kebijakan dan progres percepatan akses keuangan daerah	1. Memfasilitasi pertemuan/Rakor/FGD Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2. Tersusunnya program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jambi 3. Tersusunnya laporan realisasi triwulan TPAKD Provinsi Jambi 4. Tersusunnya laporan tahunan TPAKD Provinsi Jambi 5. Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang TPAKD Provinsi Jambi
		Pengembangan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Menyiapkan regulasi (Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur) 2. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Vertikal dan Instansi Terkait 3. Melaksanakan monev pengembangan pariwisata dan	1. Tersusunnya kebijakan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi 2. Terlaksananya monev pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif 3. Memfasilitasi pertemuan/Rakor/FGD pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Tersusunnya laporan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

			ekonomi kreatif 4. Menyusun analisis pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi	
3.	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kebijakan Sumber Daya Alam - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Pertanian Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Tim Percepatan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah (TPP-KPD)	1. Menyiapkan regulasi/ Kebijakan (Tim TPP-KPD) 2. Memfasilitasi tersusunnya Roadmap / Peta Jalan Percepatan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jambi 3. Melaksanakan Koordinasi Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal Terkait serta Pemerintah Pusat yang terkait 4. Menyiapkan bahan Rapat Koordinasi Percepatan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah (Undangan, Pointer Rapat, Notulen, Sambutan, bahan paparan, Dokumentasi dll) 5. Menyiapkan bahan kinerja 1 (satu) tahun Percepatan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah. 6. Merumuskan Kebijakan Percepatan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah (SK, Surat, Nota Dinas dan Tela'ah Staf) 7. Menyiapkan bahan untuk Monev Kegiatan Percepatan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah.	1. Tersusunnya regulasi/ Kebijakan/Tim TPP-KPD) Provinsi Jambi 2. Tersusunnya Roadmap / Peta Jalan Percepatan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jambi 3. Terselenggaranya Fasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jambi 4. Tersedianya data Produktivitas Pertanian Provinsi Jambi
		Tim Percepatan Ekspor SDA Provinsi Jambi	1. Menyiapkan regulasi/ Kebijakan (Tim Percepatan Ekspor SDA). 2. Memfasilitasi tersusunnya Roadmap	1. Tersusunnya kebijakan kegiatan Tim Percepatan Ekspor SDA Provinsi Jambi. 2. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan Launching Ekspor SDA Provinsi Jambi

			/ Peta Jalan Percepatan Ekspor SDA Provinsi Jambi. 3. Menyiapkan bahan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Ekspor SDA Provinsi Jambi (Undangan, Pointer Rapat, Notulen, Sambutan, bahan Paparan, Dokumentasi dll) 4. Merumuskan Kebijakan Percepatan Ekspor SDA Provinsi Jambi (SK, Surat, Nota Dinas dan Tela'ah Staf) 5. Menyiapkan bahan untuk Koordinasi Monev Kegiatan Percepatan Ekspor SDA Provinsi Jambi.	3. Terlaksananya Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi kegiatan Ekspor SDA Provinsi Jambi. 4. Tersedianya data Ekspor SDA Provinsi Jambi
		TIM Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi (KP3)	1. Menyiapkan regulasi/ Kebijakan (Tim KP3) Provinsi Jambi. 2. Memfasilitasi RAKOR KP3 Tingkat Provinsi Jambi. 3. Merumuskan Kebijakan Evaluasi dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi Jambi (SK, Surat, Nota Dinas dan Tela'ah Staf) 4. Menyiapkan bahan untuk Koordinasi Monev Kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi (KP3)	1. Tersusunnya kebijakan kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi (KP3) 2. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi (KP3). 3. Terlaksananya Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi (KP3). 4. Tersedianya data Alokasi Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi
		Sekretariat Panitia Hari Krida Pertanian Provinsi Jambi (Event Tahunan Provinsi)	1. Menyiapkan SK Kepanitiaan HKP Tk. Provinsi Jambi 2. Memfasilitasi RAKOR Penyelenggaraan HKP Tingkat Provinsi Jambi 3. Menyiapkan bahan Rakor HKP Tingkat Provinsi Jambi (Undangan, Pointer Rapat, Notulen, Sambutan, bahan Paparan,	1. Terbentuknya susunan Kepanitiaan HKP HKP Tk. Provinsi Jambi 2. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan RAKOR HKP Tingkat Provinsi Jambi 3. Terlaksananya Peringatan HKP Tingkat Provinsi Jambi

			Dokumentasi dll). 5. Merumuskan Kebijakan Penyelenggaraan HKP Tk Provinsi Jambi (SK, Surat, Nota Dinas DLL)	
		Kehutanan, Kelautan Prikanan	1. Memfasilitasi RAKOR Kegiatan OPD Terkait Perumusan Kebijakan Kehutanan, Kelautan Prikanan. 2. Menyiapkan bahan Rakor Perumusan Kebijakan Kehutanan, Kelautan Prikanan (Undangan, Pointer Rapat, Notulen, Sambutan, bahan. 3. Menyiapkan bahan untuk Koordinasi dan Monev Kegiatan Kebijakan Kehutanan, Kelautan Prikanan	1. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan Kehutanan, Kelautan Prikanan. 2. Terlaksananya Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi kegiatan Kehutanan, Kelautan Prikanan. 3. Tersedianya data Kebijakan Kehutanan, Kelautan Prikanan
4.	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya alam - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tim Evaluasi Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg	1. Menyiapkan regulasi/ Kebijakan (Tim Evaluasi Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg) 2. Menyusun telaah staf atas Harga Eceran Tertinggi Tabung 3 Kg yang berlaku 3. Melaksanakan Koordinasi Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal Terkait serta Pemerintah Pusat terkait Evaluasi atas HET LPG Tabung 3 Kg yang berlaku. 4. Menyiapkan bahan Rapat Koordinasi evaluasi atas Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg yang berlaku (Undangan, Pointer Rapat, Notulen, Sambutan, bahan paparan, Dokumentasi dll) 5. Merumuskan Kebijakan Merumuskan	1. Tersusunnya kebijakan Pengendalian Harga LPG Tabung 3 Kg 2. Tersusunnya Keputusan Gubernur Jambi tentang Harga Eceran LPG Subsidi Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi 3. Terlaksananya monitoring dan Evaluasi HET LPg Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi

			Kebijakan pengendalian Harga LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi (SK, Surat, Nota Dinas dan Tela'ah Staf) 6. Menyiapkan bahan untuk Monev Kegiatan Percepatan dan Penguatan Ketahanan Pangan Daerah.	
		Tim Koordinasi Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg	1. Menyiapkan regulasi/Kebijakan (Tim Koordinasi Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi). 2. Menyiapkan bahan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi (Undangan, Pointer Rapat, Notulen, Sambutan, bahan Paparan, Dokumentasi dll) 3. Merumuskan Kebijakan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg (SK, Surat, Nota Dinas dan Tela'ah Staf) 4. Menyiapkan bahan untuk Koordinasi Monev Kegiatan Percepatan Ekspor SDA Provinsi Jambi.	1. Tersusunnya kebijakan kegiatan Tim Koordinasi Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg. 2. Terselenggaranya fasilitas kegiatan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi 3. Terlaksananya Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi 4. Tersedianya data LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jambi
		Tim Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus penugasan di Daerah	1. Menyiapkan regulasi/ Kebijakan (Tim Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus penugasan di Daerah) Provinsi Jambi. 2. Memfasilitasi Rapat koordinasi pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan	1. Tersusunnya kebijakan Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Provinsi Jambi 2. Terselenggaranya fasilitas kegiatan Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Provinsi Jambi. 3. Terlaksananya Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Provinsi Jambi

			Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. 3. Merumuskan Kebijakan Evaluasi dan Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan (SK, Surat, Nota Dinas dan Tela'ah Staf) 4. Menyiapkan bahan untuk Koordinasi Monev Kegiatan Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan	4. Tersedianya data Alokasi Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di Provinsi Jambi
		Tim Evaluasi Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian JBT dan JBKP Sektor Nelayan, Pertanian dan Sektor Lainnya.	1. Menyiapkan Regulasi/ Kebijakan (Tim evaluasi Penerbitan Surat Rekomendasi pembelian JBT dan JBKP Sektor Nelayan, Pertanian dan Sektor Lainnya. 2. Memfasilitasi Sosialisasi Penerbitan Surat Rekomendasi menggunakan Aplikasi Xstar 3. Menyiapkan bahan Sosialisasi penerbitan Surat Rekomendasi menggunakan Aplikasi Xstar (Undangan, Pointer Rapat, Notulen, Sambutan, bahan Paparan, Dokumentasi dll). 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerbitan Surat rekomendasi pembelian JBT dan JBKP sektor Nelayan, Pertanian dan Sektor Lainnya)	1. Terlaksananya pengendalian Pendistribusian JBT dan JBKP untuk sektor Nelayan, Pertanian dan Sektor Lainnya 2. Terlaksananya sosialisasi penerbitan Surat Rekomendasi menggunakan Aplikasi XSTAR 3. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian JBT dan JBKP bagi Nelayan, Pertanian dan Sektor Lainnya di Provinsi Jambi
5.	Kegiatan Pengelolaan	Tim Percepatan Pembangunan	1. Menyiapkan regulasi/ Kebijakan (Tim TPP-	1. Tersusunnya regulasi/ Kebijakan(Tim TPP-JKB) Provinsi

	Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya alam - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jalan Khusus Batubara	JKB) Prov. Jambi 2. Memfasilitasi tersusunnya Roadmap / Peta Jalan Percepatan Jalan Khusus Batubara. 3. Melaksanakan Koordinasi Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal Terkait serta Pemerintah Pusat yang terkait. 4. Menyiapkan bahan Rapat Koordinasi Percepatan Jalan Khusus Batubara. (Undangan, Pointer Rapat, Notulen, Sambutan, bahan paparan, Dokumentasi dll) 5. Menyiapkan bahan kinerja 1 (satu) tahun Percepatan Jalan Khusus Batubara. 6. Merumuskan Kebijakan Percepatan Jalan Khusus Batubara. (SK, Surat, Nota Dinas dan Tela'ah Staf) 7. Menyiapkan bahan untuk Monev Kegiatan Jalan Khusus Batubara.	Jambi 2. Tersusunnya Roadmap / Peta Jalan Jalan Khusus Batubara Provinsi Jambi. 3. Terselenggaranya Fasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Jalan Khusus Batubara Provinsi Jambi 4. Tersedianya peta Jalan Khusus Batubara Provinsi Jambi.
		Tim Pengendalian Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).	1. Menyiapkan regulasi/ Kebijakan (TPP-PETI). 2. Memfasilitasi tersusunnya Roadmap Pengendalian Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Provinsi Jambi. 3. Menyiapkan bahan Rapat Koordinasi Pengendalian Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Provinsi Jambi (Undangan, Pointer Rapat, Notulen, Sambutan, bahan Paparan, Dokumentasi dll)	5. Tersusunnya kebijakan kegiatan Pengendalian Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Provinsi Jambi. 6. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan Pengendalian Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Provinsi Jambi 7. Terlaksananya Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Provinsi Jambi. 8. Tersedianya data Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Provinsi Jambi.

			4. Merumuskan Kebijakan Pengendalian Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Provinsi Jambi (SK, Surat, Nota Dinas dan Tela'ah Staf) 5. Menyiapkan bahan untuk Koordinasi Monev Kegiatan Pengendalian Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Provinsi Jambi.	
		TIM Pengelolaan Mesin Insinerator	1. Menyiapkan regulasi/ Kebijakan (TPMI) Provinsi Jambi. 2. Memfasilitasi TIM Pengelolaan Mesin Insinerator Provinsi Jambi. 3. Merumuskan Kebijakan TIM Pengelolaan Mesin Insinerator Provinsi Jambi (SK, Surat, Nota Dinas dan Tela'ah Staf) 4. Menyiapkan bahan untuk Koordinasi Monev Kegiatan TIM Pengelolaan Mesin Insinerator Provinsi Jambi (KP3)	1. Tersusunnya kebijakan kegiatan Pengelolaan Mesin Insinerator Provinsi Jambi. 2. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan Pengelolaan Mesin Insinerator. 3. Terlaksananya Pemantauan/ Monitoring dan Pengelolaan Mesin Insinerator. 4. Tersedianya data limbah B3 se Provinsi Jambi
6.	Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan, Aneka Usaha - Sub Kegiatan BUMD Jasa Keuangan, Aneka Usaha	Pembinaan dan Pengawasan BUMD Jasa Keuangan, Aneka Usaha	1. Jumlah Pengkoordinasian perumusan kebijakan dibidang kebijakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2. Jumlah pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang kebijakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Melaksanakan Koordinasi Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal Terkait serta	1. Meningkatnya implementasi kebijakan perekonomian di Provinsi Jambi Indikator : Persentase rekomendasi kebijakan pada BUMD dan BLUD yang dilaksanakan Tersusunnya Roadmap / Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi 2. Meningkatnya implementasi kebijakan perekonomian di Provinsi Jambi Indikator : Persentase rekomendasi kebijakan pada BUMD dan BLUD yang dilaksanakan Tersusunnya laporan pengendalian inflasi 3. Meningkatnya implementasi kebijakan perekonomian di Provinsi Jambi Indikator :

			Pemerintah Pusat yang terkait 3. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang kebijakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 4. Jumlah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya	Persentase rekomendasi kebijakan pada BUMD dan BLUD yang dilaksanakan 4. Meningkatnya implementasi kebijakan perekonomian di Provinsi Jambi Indikator : Persentase rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan
7.	Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi - Sub Kegiatan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Pembinaan dan Pengawasan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1. Terlaksananya Informasi Kebijakan Kegiatan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi 2. Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi 3. Terlaksananya Rapat,FGD dan Sosialisasi Kegiatan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi 4. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Kegiatan BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1. Meningkatnya implementasi kebijakan perekonomian di Provinsi Jambi Indikator : Persentase rekomendasi kebijakan pada BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi 2. Meningkatnya implementasi kebijakan perekonomian di Provinsi Jambi Indikator : Persentase rekomendasi kebijakan pada BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi 3. Meningkatnya implementasi kebijakan perekonomian di Provinsi Jambi Indikator : Persentase rekomendasi kebijakan pada BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi 4. Meningkatnya implementasi kebijakan perekonomian di Provinsi Jambi Indikator : Persentase rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi jambi
8.	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah	Tim Penilai Permohonan Penerapan BLUD Provinsi Jambi	1. Menyiapkan regulasi/ kebijakan/Tim 2. Menyusun instrumen Penilaian bagi Tim Penilai sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. 3. Menyiapkan Pedoman	1. Tersusunnya regulasi/ kebijakan/Tim Penilai Permohonan Penerapan BLUD 2. Tersusunnya Dokumen Persyaratan administratif dalam penilaian permohonan penerapan BLUD 3. Terbentuknya Tim Pokja yang

			yang dapat digunakan oleh Tim Penilai dalam melakukan penilaian atas usulan penerpan BLUD 4. Melaksanakan Koordinasi dengan OPD terkait dengan usulan penerpan BLUD 5. Menyusun Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Penerapan BLUD	bertugas melakukan penilaian dokumen administratif 4. Tersusunnya laporan hasil koordinasi dengan OPD terkait 5. Tersedianya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Penerapan BLUD
		Tim Pembahasan Rancangan Pergub Ttg Dokumen Penerpan BLUD	1. Menyiapkan regulasi (Keputusan Gubernur) 2. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi Biro Hukum dan Biro Organisasi 3. Melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah dan OPD terkait 4. Menyiapkan Draf dan bahan Rancangan Pergub bekerjasama dengan OPD terkait	1. Tersusunnya Surat Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Pergub Dokumen Penerapan BLUD 2. Memfasilitasi dan mengakomodir rapat 3. Melaksanakan Pemantauan/ Monitoring proses Pergub yang sedang diajukan ke Kemendagri
		Tim Monev Pelaporan BLUD Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi	1. Menyiapkan bahan koordinasi untuk monev ke Kabupaten/ Kota terkait 2. Menginventarisir Laporan Tahunan BLUD Kabupaten/ Kota	1. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan BLUD 2. Tersusunnya Laporan Tahunan BLUD Kabupaten/ Kota

Dengan organisasi dan sistem kerja yang tertata dengan baik, Biro Perekonomian diharapkan mampu bekerja secara optimal dalam mendukung kinerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Pada akhirnya, pengaturan organisasi dan sistem kerja yang efektif tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya di bidang perekonomian, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan Provinsi Jambi. Berikut tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi :

1. **Penanggungjawab** mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan observasi, monitoring, memberikan masukan dan saran perbaikan terkait kinerja Tim.
2. **Kasubbag Tata Usaha** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 2. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
 3. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
 4. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 5. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan lingkup Biro;
 6. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Biro;
 7. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
 8. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Biro;
 9. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 10. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
3. **Ketua** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target kinerja;
 - b. membagi peran anggota Tim Kerja sesuai dengan kompetensi, keahlian dan keterampilan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - d. memberikan umpan balik penyelesaian tugas/pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada anggota;
 - e. mengevaluasi kinerja anggota tim;
 - f. melakukan pertemuan/rapat Tim Kerja secara berkala; dan

- g. melaporkan hasil kinerja yang dihasilkan kepada Pejabat Penilai / Penanggungjawab.
4. **Koordinator** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menyusun target kerja yang ingin dicapai;
 - d. melakukan koordinasi, pengawasan, dan memberikan arahan implementasi pelaksanaan tugas kepada anggota;
 - e. memastikan bahwa setiap anggota memiliki beban pekerjaan sesuai dengan porsinya masing-masing;
 - f. memberikan bimbingan kepada anggota;
 - g. melakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah dilakukan;
 - h. memberikan solusi atau saran pada anggota dalam melakukan pekerjaannya; dan
 - i. melaporkan hasil kinerja anggota kepada Ketua.
5. **Anggota** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun rencana kerja individu;
 - b. melaksanakan kinerja sesuai rencana kerja yang disusun oleh Koordinator;
 - c. melakukan perubahan atau perbaikan atas hasil evaluasi kerja oleh koordinator; dan melaporkan hasil kinerja kepada Koordinator.

1.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Biro Perekonomian memiliki peran strategis dalam membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, khususnya dalam penyiapan serta pengoordinasian perumusan kebijakan daerah. Selain itu, Biro Perekonomian juga bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terkait, melakukan pemantauan, serta melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian daerah. Ruang lingkup tugas tersebut meliputi kebijakan perekonomian, pengelolaan sumber daya alam, penanaman modal, pengawasan dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut secara optimal, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi membutuhkan dukungan

sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, profesional, dan berkualitas. Keberadaan SDM yang memadai menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas koordinasi, ketepatan perumusan kebijakan, serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program di bidang perekonomian daerah.

Adapun kondisi SDM di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pegawai. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas 2 (dua) orang pejabat struktural, 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Madya, 5 (lima) orang Analis Kebijakan Muda, 14 (empat belas) orang Penelaah Teknis Kebijakan, 1 (satu) orang Pengelola Layanan Operasional, 1 (satu) orang Operator Layanan Operasional, serta 1 (satu) orang Penata Laksana Barang Terampil. Seluruh pegawai tersebut tersebar dan menjalankan tugasnya pada instansi induk Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dengan peran dan tanggung jawab yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas organisasi secara menyeluruh.

Tabel 1.4.1 Sumber Daya Manusia aparatur Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi :

No	Jabatan	Klasifikasi/Jenjang	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	-	2
2	Analis Kebijakan Madya	Madya	3
3	Analis Kebijakan Muda	Muda	5
4	Penelaah Teknis Kebijakan	-	14
5	Pengelola Layanan Operasional	-	1
6	Operator Layanan Operasional	-	1
7	Penata Laksana Barang	Terampil	1
Total			27

Tabel 1.4.2 Sumber Daya Manusia PPPK Paruh Waktu Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi :

No	Jabatan	Klasifikasi/Jenjang	Jumlah (Orang)
1	Penata Layanan Operasional	-	10

Tabel 1.4.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	SKPD					JML				JML	TOTAL
		S.2	S.1	D.4	D.3		S.2	S.1	SLTA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BIRO PEREKONOMIAN	6	13	1	1	21	3	12	1	16	37
TOTAL		6	7	1	1	21	3	12	1	16	37

Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan, kondisi sumber daya manusia di Biro Perekonomian Provinsi Jambi menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Komposisi pegawai didominasi oleh lulusan Sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 25 orang, disusul oleh lulusan Sarjana Strata Dua (S2) sebanyak 9 orang. Tingkat pendidikan tersebut mencerminkan kapasitas intelektual dan kompetensi aparatur yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas biro, khususnya dalam perumusan kebijakan, koordinasi, serta analisis di bidang perekonomian daerah.

Sementara itu, apabila dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki tercatat sebanyak 21 orang, sedangkan pegawai perempuan sebanyak 16 orang. Keterlibatan pegawai laki-laki dan perempuan secara proporsional diharapkan dapat menciptakan dinamika kerja yang harmonis, memperkaya sudut pandang dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi secara keseluruhan.

1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain faktor sumber daya manusia, keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana tersebut meliputi inventaris kantor serta barang habis pakai yang digunakan dalam menunjang kegiatan administrasi dan operasional sehari-hari. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Biro Perekonomian secara berkelanjutan mengupayakan penambahan serta pembaruan sarana dan prasarana secara bertahap atau per semester. Penambahan ini terutama difokuskan pada penggantian barang-barang inventaris yang telah mengalami penurunan fungsi atau tidak lagi layak pakai. Melalui upaya tersebut, diharapkan kondisi sarana dan prasarana, khususnya prasarana berupa meubelair, dapat terus ditingkatkan sehingga berada pada kondisi yang cukup memadai dan mampu menunjang kenyamanan serta produktivitas kerja pegawai.

Sementara itu, untuk mendukung rutinitas kerja sehari-hari, seperti pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), fotokopi, dan kebutuhan operasional lainnya, penganggaran dan belanja dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan pada masing-masing kegiatan. Penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan pagu yang telah dialokasikan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi dapat dikatakan cukup memadai, meskipun belum sepenuhnya lengkap. Hal ini antara lain disebabkan belum tersusunnya layout dan tata ruang kantor yang sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Selain itu, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masih menghadapi keterbatasan anggaran, sehingga tidak seluruh usulan kebutuhan dari unit kerja di lingkungan Biro Perekonomian dapat terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana secara menyeluruh.

Adapun rincian barang inventaris yang dimiliki oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1.4.1 Keadaan Sarana dan Prasarana

DAFTAR BARANG BIRO PEREKONOMIAN									
No. Urut	Kode Barang	SPESIFIKASI BARANG		Tahun Perolehan	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Nilai Buku
		Nama/Jenis Barang	Merk/Type				Jumlah Barang	Harga Perolehan	
1	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11,00
1	1.3.2.05.01.01.001	Mesin Ketik	Olympia	2.012	Unit	B	1	1.800.000,00	-
2	1.3.2.05.01.01.001	Mesin Ketik	Brother	2.014	Unit	B	1	5.400.000,00	-
3	1.3.2.05.01.01.001	Mesin Ketik	Olympia SM 18	2.014	Unit	B	1	5.400.000,00	-
4	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Arsip	LOKAL	2.011	Unit	B	1	3.380.000,00	-
5	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Arsip	LOKAL	2.011	Unit	B	1	3.380.000,00	-
6	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Arsip	LOKAL	2.011	Unit	B	1	3.830.000,00	-
7	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Arsip	LOKAL	2.011	Unit	B	1	3.830.000,00	-
8	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Arsip	LOKAL	2.011	Unit	B	1	3.380.000,00	-
9	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Arsip	LOKAL	2.012	Unit	B	1	3.830.000,00	-
10	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Arsip	LOKAL	2.016	Unit	B	1	4.800.000,00	-
11	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Arsip	LOKAL	2.016	Unit	B	1	4.800.000,00	-
12	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Arsip	LOKAL	2.016	Unit	B	1	4.800.000,00	-
13	1.3.2.05.01.04.001	Lemari /Almari	LOKAL	2.013	Unit	B	1	2.250.000,00	-
14	1.3.2.05.01.04.001	Lemari Arsip	LOKAL	2.014	Unit	B	1	3.820.000,00	-
15	1.3.2.05.01.04.005	Filing Kabinet	Top	2.019	Unit	B	1	2.396.000,00	-
16	1.3.2.05.01.04.005	Filing Kabinet	Top	2.019	Unit	B	1	2.396.000,00	-
17	1.3.2.05.01.04.005	Filing Kabinet	Top	2.019	Unit	B	1	2.396.000,00	-
18	1.3.2.05.01.04.005	Filing Kabinet	Top	2.019	Unit	B	1	2.396.000,00	-
19	1.3.2.05.01.04.005	Filing Kabinet	Top	2.019	Unit	B	1	2.396.000,00	-
20	1.3.2.05.01.04.005	Filing Kabinet	Top	2.008	Unit	B	1	5.400.000,00	-
21	1.3.2.05.01.04.007	Brankas	Sister	2.010	Unit	B	1	10.400.000,00	-
22	1.3.2.05.01.05.043	Infokus	Epson	2.013	Unit	B	1	9.600.000,00	-
24	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.013	Unit	B	1	1.335.000,00	-
25	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja 1 Biro	Lokal	2.014	Unit	B	1	2.450.000,00	-
26	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja 1 Biro	Lokal	2.014	Unit	B	1	2.450.000,00	-
27	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja 1 Biro	Lokal	2.011	Unit	B	1	3.050.000,00	-
28	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja 1 Biro	Lokal	2.014	Unit	B	1	2.450.000,00	-
29	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja 1 Biro	Lokal	2.014	Unit	B	1	2.450.000,00	-
30	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja 1 Biro	Lokal	2.018	Unit	B	1	8.498.000,00	-

31	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.018	Unit	B	1	3.615.500,00	-
32	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.019	Unit	B	1	3.619.000,00	-
33	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.019	Unit	B	1	3.619.000,00	-
34	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.019	Unit	B	1	3.619.000,00	-
35	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.019	Unit	B	1	3.619.000,00	-
36	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.019	Unit	B	1	3.619.000,00	-
37	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja 1 Biro	Lokal	2.020	Unit	B	1	4.202.700,00	-
38	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja 1 Biro	Lokal	2.020	Unit	B	1	4.202.700,00	-
39	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja 1 Biro	Lokal	2.020	Unit	B	1	4.202.700,00	-
40	1.3.2.05.02.01.008	Meja rapat	LOKAL	2.011	Unit	B	1	20.000.000,00	-
41	1.3.2.05.02.01.008	Meja rapat	LOKAL	2.011	Unit	B	1	32.345.000,00	-
42	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.014	Unit	B	1	1.450.000,00	-
43	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.014	Unit	B	1	1.450.000,00	-
44	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.014	Unit	B	1	1.450.000,00	-
45	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.012	Unit	B	1	2.400.000,00	-
46	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.011	Unit	B	1	1.873.000,00	-
47	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.011	Unit	B	1	1.450.000,00	-
48	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.011	Unit	B	1	1.450.000,00	-
49	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.011	Unit	B	1	1.450.000,00	-
50	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.011	Unit	B	1	1.450.000,00	-
51	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.014	Unit	B	1	1.450.000,00	-
52	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.014	Unit	B	1	1.450.000,00	-
53	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.014	Unit	B	1	1.450.000,00	-
54	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.011	Unit	B	1	1.485.000,00	-
55	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.011	Unit	B	1	1.485.000,00	-
56	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.016	Unit	B	1	1.950.000,00	-
57	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.016	Unit	B	1	1.950.000,00	-
58	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.016	Unit	B	1	1.950.000,00	-
59	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.016	Unit	B	1	1.950.000,00	-
60	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.016	Unit	B	1	1.950.000,00	-
61	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.016	Unit	B	1	1.950.000,00	-
62	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.019	Unit	B	1	1.788.500,00	-
63	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.019	Unit	B	1	1.788.500,00	-
64	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.019	Unit	B	1	1.788.500,00	-
65	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.019	Unit	B	1	1.788.500,00	-
66	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.019	Unit	B	1	1.788.500,00	-
67	1.3.2.05.02.01.024	Meja Kerja	Lokal	2.019	Unit	B	1	1.788.500,00	-
68	1.3.2.05.02.01.048	Kursi Sofa/tamu	Lokal	2.012	Unit	B	1	10.000.000,00	-
69	1.3.2.05.02.01.048	Kursi Sofa/tamu	Lokal	2.008	Unit	B	1	9.850.000,00	-
70	1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	LOKAL	2.011	Unit	B	1	10.000.000,00	-

71	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja	Hing Point	2.021	Unit	B	1	1.940.000,00	355.666,67
72	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja	Hing Point	2.021	Unit	B	1	1.940.000,00	355.666,67
73	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja	Hing Point	2.021	Unit	B	1	1.940.000,00	355.666,67
74	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja	Hing Point	2.021	Unit	B	1	1.940.000,00	355.666,67
75	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Tinggi	Indarchi	2.013	Unit	B	1	3.528.000,00	-
76	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Tinggi	Indarchi	2.013	Unit	B	1	3.528.000,00	-
77	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Sedang	Fronline	2.011	Unit	B	1	1.560.000,00	-
78	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Tinggi	Fronline	2.014	Unit	B	1	1.470.000,00	-
79	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Tinggi	Fronline	2.014	Unit	B	1	1.470.000,00	-
80	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Tinggi	Fronline	2.012	Unit	B	1	1.450.000,00	-
81	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Tinggi	Fronline	2.014	Unit	B	1	1.470.000,00	-
82	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Tinggi	Fronline	2.014	Unit	B	1	1.874.000,00	-
83	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Sedang	Fronline	2.011	Unit	B	1	1.560.000,00	-
84	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Tinggi	Fronline	2.014	Unit	B	1	1.470.000,00	-
85	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Sedang	Fronline	2.011	Unit	B	1	1.560.000,00	-
86	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Sedang	Fronline	2.011	Unit	B	1	1.560.000,00	-
87	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Sedang		2.016	Unit	B	1	1.450.000,00	-
88	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Sedang		2.016	Unit	B	1	1.450.000,00	-
89	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Sedang		2.016	Unit	B	1	1.450.000,00	-
90	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Sedang		2.016	Unit	B	1	1.450.000,00	-
91	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Sedang		2.016	Unit	B	1	1.450.000,00	-
92	1.3.2.05.02.01.033	Kursi Biasa/Kursi Kerja Sandaran Sedang		2.016	Unit	B	1	1.450.000,00	-
93	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	Lokal	2.019	Unit	B	1	1.400.000,00	-
94	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	Lokal	2.019	Unit	B	1	1.400.000,00	-
95	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	Lokal	2.019	Unit	B	1	1.400.000,00	-
96	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	Lokal	2.019	Unit	B	1	1.400.000,00	-
97	1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	Lokal	2.019	Unit	B	1	1.400.000,00	-
98	1.3.2.05.02.04.004	AC	LG	2.013	Unit	B	1	4.970.000,00	-
99	1.3.2.05.02.04.004	AC	Sanken	2.012	Unit	B	1	3.155.000,00	-
100	1.3.2.05.02.04.004	AC	Aucma	2.008	Unit	B	1	4.950.000,00	-
101	1.3.2.05.02.04.004	AC	Gree	2.015	Unit	B	1	9.900.000,00	-
102	1.3.2.05.02.04.004	AC	Gree	2.015	Unit	B	1	6.400.000,00	-
103	1.3.2.05.02.04.004	AC	Gree	2.018	Unit	B	1	5.950.000,00	-
104	1.3.2.05.02.04.004	AC	Gree	2.019	Unit	B	1	8.651.000,00	-
105	1.3.2.05.02.04.004	AC	Gree	2.019	Unit	B	1	8.651.000,00	-
106	1.3.2.05.02.04.004	AC	Panasonic	2.023	Unit	B	1	11.630.000,00	6.590.333,33
107	1.3.2.05.02.04.004	AC	Panasonic	2.021	Unit	B	1	16.800.000,00	3.080.000,00
108	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	Sanyo	2.012	Unit	KB	1	2.162.500,00	-
109	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	Sanyo	2.012	Unit	KB	1	2.162.500,00	-
110	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	LG 21 Inchi	2.014	Unit	KB	1	2.400.000,00	-

111	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	LG	2.011	Unit	KB	1	1.580.000,00	-
112	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	LG	2.011	Unit	KB	1	1.580.000,00	-
113	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	Sony	2.013	Unit	KB	1	8.450.000,00	-
114	1.3.2.05.02.06.002	Televisi	Samsung	2.018	Unit	KB	1	4.522.500,00	-
115	1.3.2.05.02.06.002	Televisi		2.019	Unit	KB	1	6.965.000,00	-
116	1.3.2.05.02.06.080	stabilizer / UPS	ICA	2.012	Unit	B	1	1.900.000,00	-
117	1.3.2.05.02.06.080	stabilizer / UPS	ICA	2.012	Unit	B	1	1.900.000,00	-
118	1.3.2.05.02.06.080	stabilizer / UPS	ICA	2.012	Unit	B	1	1.900.000,00	-
119	1.3.2.05.02.06.080	stabilizer / UPS	ICA	2.012	Unit	B	1	1.900.000,00	-
120	1.3.2.05.02.06.029	Gambar Presiden		2.019	Unit	B	1	1.250.000,00	-
121	1.3.2.05.02.06.029	Gambar Wakil Presiden		2.019	Unit	B	1	1.250.000,00	-
122	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	Sanken	2.011	Unit	B	1	1.735.000,00	-
123	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	Sanken	2.011	Unit	B	1	1.735.000,00	-
124	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	Sanken	2.011	Unit	B	1	1.735.000,00	-
125	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	Polytron Type 103	2.013	Unit	B	1	1.750.000,00	-
126	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	Sanyo	2.011	Unit	B	1	1.700.000,00	-
127	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	Arisa	2.018	Unit	B	1	2.900.000,00	-
128	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	Arisa	2.018	Unit	B	1	2.900.000,00	-
129	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	GEA	2.021	Unit	B	1	3.650.000,00	304.166,67
130	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	GEA	2.021	Unit	B	1	3.650.000,00	304.166,67
131	1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam	SONY	2.012	Unit	B	1	4.300.000,00	-
132	1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam	SONY	2.012	Unit	B	1	4.300.000,00	-
133	1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam	SONY	2.012	Unit	B	1	4.300.000,00	-
134	1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam	SONY	2.012	Unit	B	1	4.300.000,00	-
135	1.3.2.05.02.06.057	Karpet	Lokal	2.012	Unit	B	1	13.800.000,00	-
136	1.3.2.05.02.06.057	Karpet	Lokal	2.012	Unit	B	1	13.800.000,00	-
137	1.3.2.05.02.06.057	Karpet	Lokal	2.012	Unit	B	1	13.800.000,00	-
138	1.3.2.05.02.06.080	stabilizer / UPS	Matsugawa	2.012	Unit	B	1	5.425.000,00	-
139	1.3.2.05.02.06.080	stabilizer / UPS	Matsugawa	2.012	Unit	B	1	5.425.000,00	-
140	1.3.2.05.02.06.080	stabilizer / UPS	Matsugawa	2.012	Unit	B	1	5.425.000,00	-
141	1.3.2.05.02.06.080	stabilizer / UPS	Matsugawa	2.012	Unit	B	1	5.425.000,00	-
142	1.3.2.05.02.06.080	stabilizer / UPS	ICA	2.012	Unit	B	1	5.325.000,00	-
143	1.3.2.05.02.06.080	stabilizer / UPS	Prolink	2.019	Unit	B	1	3.215.000,00	-
144	1.3.2.05.03.01.004	MEJA KERJA PJB.ESELON II	Frontline	2.009	Unit	B	1	3.650.000,00	-
162	1.3.2.05.03.03.005	Kursi kerja eselon III		2.018	Unit	B	1	2.700.000,00	-
163	1.3.2.05.03.03.005	Kursi kerja eselon III		2.018	Unit	B	1	2.700.000,00	-
164	1.3.2.05.03.03.005	Kursi kerja eselon III		2.018	Unit	B	1	2.700.000,00	-
165	1.3.2.05.03.03.006	Kursi kerja eselon IV		2.018	Unit	B	1	2.025.000,00	-
166	1.3.2.05.03.03.006	Kursi kerja eselon IV		2.018	Unit	B	1	2.025.000,00	-
167	1.3.2.05.03.03.006	Kursi kerja eselon IV		2.018	Unit	B	1	2.025.000,00	-
168	1.3.2.05.03.03.004	Kursi Kerja Pjb		2.019	Unit	B	1	7.420.000,00	-
169	1.3.2.05.03.03.005	Kursi kerja eselon III		2.019	Unit	B	1	2.689.000,00	-
170	1.3.2.05.03.03.005	Kursi kerja eselon III		2.019	Unit	B	1	2.689.000,00	-

171	1.3.2.05.03.03.005	Kursi kerja eselon III		2.019	Unit	B	1	2.689.000,00	-
172	1.3.2.05.03.03.005	Kursi kerja eselon III	Lokal	2.019	Unit	B	1	2.689.000,00	-
188	1.3.2.05.03.06.004	Kursi tamu diruang pejabat	Lokal	2.019	Unit	B	1	7.480.000,00	-
200	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	SONY	2.012	Unit	B	1	3.750.000,00	-
201	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	Olympus	2.007	Unit	B	1	3.000.000,00	-
202	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	Sony Cybershot	2.012	Unit	B	1	2.940.000,00	-
203	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	Panasonic Lumic	2.009	Unit	B	1	4.000.000,00	-
204	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	Sony	2.012	Unit	B	1	3.750.000,00	-
205	1.3.2.06.01.02.126	Camera Digital	Sony	2.012	Unit	B	1	3.800.000,00	-
241	1.3.2.10.01.01.003	Kabel LAN	Lokal	2.011	Unit	B	1	2.000.000,00	-
245	1.3.2.10.01.02.001	Komputer PC	Acer	2.012	Unit	B	1	6.200.000,00	-
246	1.3.2.10.01.02.001	Komputer	Hp Deskop 110	2.014	Unit	B	1	7.975.000,00	-
247	1.3.2.10.01.02.001	Komputer PC	Acer	2.012	Unit	B	1	6.200.000,00	-
248	1.3.2.10.01.02.001	Komputer	Hp Deskop 110	2.014	Unit	B	1	7.975.000,00	-
249	1.3.2.10.01.02.001	Komputer + Meja Komputer	Samsung	2.009	Unit	B	1	10.330.000,00	-
250	1.3.2.10.01.02.001	Komputer PC	Dell	2.011	Unit	B	1	9.450.000,00	-
251	1.3.2.10.01.02.001	Komputer	Asus	2.018	Unit	B	1	8.975.000,00	-
252	1.3.2.10.01.02.001	Komputer	Asus	2.018	Unit	B	1	8.975.000,00	-
253	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	Toshiba	2.005	Unit	B	1	15.950.000,00	-
254	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	Toshiba	2.010	Unit	B	1	9.427.000,00	-
255	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	Acer	2.009	Unit	B	1	15.000.000,00	-
256	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	HP	2.013	Unit	B	1	9.870.000,00	-
257	1.3.2.10.01.02.002	Laptop	Asus	2.022	Unit	B	1	19.500.000,00	7.475.000,00
265	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Canon E-500	2.012	Unit	B	1	1.850.000,00	-
266	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Canon E-500	2.012	Unit	B	1	1.850.000,00	-
267	1.3.2.10.02.03.003	Printer	HP 1102	2.014	Unit	B	1	1.375.000,00	-
268	1.3.2.10.02.03.003	Printer	HP 1102	2.014	Unit	B	1	1.375.000,00	-
269	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Hp Laser Jet IP 1006	2.009	Unit	B	1	2.200.000,00	-
270	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Canon E-500	2.012	Unit	B	1	1.850.000,00	-
271	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Canon E-500	2.012	Unit	B	1	1.850.000,00	-
272	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Canon IP 1980	2.011	Unit	B	1	1.780.000,00	-
273	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Brother	2.018	Unit	B	1	3.450.000,00	-
274	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Brother	2.018	Unit	B	1	3.450.000,00	-
275	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Brother DCP-T10w	2.020	Unit	B	1	3.137.970,00	-
276	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Brother DCP-T10w	2.020	Unit	B	1	3.137.970,00	-
277	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Brother DCP-T10w	2.020	Unit	B	1	3.137.970,00	-
278	1.3.2.10.02.03.003	Printer	BROTHER	2.020	Unit	B	1	3.137.970,00	-
279	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Brother	2.021	Unit	B	1	3.268.000,00	272.333,33
280	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Brother	2.022	Unit	B	1	4.475.000,00	1.715.416,67
281	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Brother	2.023	Unit	B	1	4.498.500,00	2.249.250,00
282	1.3.2.10.02.03.003	Printer	Canon	2.025	Unit	B	1	4.478.850,00	3.657.727,50

1	1.5.4.01.01.01.002	CPU	Power Up	1.998	Unit	RB	1	11.500.000,00	
2	1.5.4.01.01.01.002	Mesin Fotocopy	Bizhub 303	2.012	Unit	RB	1	89.000.000,00	
3	1.5.4.01.01.01.002	Filling Kabinet	Lion	1.998	Unit	RB	1	1.700.000,00	
4	1.5.4.01.01.01.002	Brandkas	Sarcentsafe	2.000	Unit	RB	1	5.500.000,00	
5	1.5.4.01.01.01.002	Brandkas	Gon	2.000	Unit	RB	1	5.500.000,00	
6	1.5.4.01.01.01.002	Alat Studio LCD Projekt Or	Acer	2.010	Unit	RB	1	7.700.000,00	
7	1.3.2.05.02.04.004	AC	LG	2.013	Unit	RB	1	7.380.000,00	-
8	1.3.2.05.02.04.004	AC	LG	2.013	Unit	RB	1	7.380.000,00	-
9	1.3.2.05.02.04.004	AC	LG	2.013	Unit	RB	1	7.380.000,00	-
10	1.3.2.05.02.04.004	AC	LG	2.013	Unit	RB	1	4.970.000,00	-
11	1.3.2.05.02.04.004	AC	LG	2.013	Unit	RB	1	7.380.000,00	-
12	1.5.4.01.01.01.002	AC	Panasonic	2.006	Unit	RB	1	2.013.000,00	
13	1.5.4.01.01.01.002	AC Split	1 1/2 PK LG	2.012	Unit	RB	1	7.500.000,00	
14	1.5.4.01.01.01.002	AC	1 1/2 PK LG	2.012	Unit	RB	1	7.500.000,00	
15	1.5.4.01.01.01.002	Ac	Toshiba	2.005	Unit	RB	1	6.000.000,00	
16	1.3.2.05.02.04.004	AC	Panasonic	2.022	Unit	B	1	7.720.000,00	2.959.333,33
17	1.5.4.01.01.01.002	Wireles		2.010	Unit	RB	1	8.470.000,00	
18	1.5.4.01.01.01.002	Asbak Stainles		2.011	Unit	RB	1	1.650.000,00	
19	1.5.4.01.01.01.002	Camera + Attachment	Olympus	2.007	Unit	RB	1	3.000.000,00	
20	1.5.4.01.01.01.002	Camera + Attachment	Nicon	2.010	Unit	RB	1	3.500.000,00	
21	1.5.4.01.01.01.002	Kamera Digital	Sony	2.009	Unit	RB	1	3.880.000,00	
22	1.5.4.01.01.01.002	Komputer PC	Dell	2.011	Unit	RB	1	9.450.000,00	
23	1.5.4.01.01.01.002	PC Unit	Lenovo	2.007	Unit	RB	1	9.800.000,00	
24	1.5.4.01.01.01.002	PC Unit	LG	2.009	Unit	RB	1	10.500.000,00	
25	1.5.4.01.01.01.002	Laptop	Toshiba	2.010	Unit	RB	1	12.000.000,00	
26	1.5.4.01.01.01.002	Laptop/Notebook	Acer Aspire 1	2.010	Unit	RB	1	11.990.000,00	
27	1.5.4.01.01.01.002	Printer	Canon MP 258	2.011	Unit	RB	1	1.780.000,00	
28	1.5.4.01.01.01.002	Printer	HP Laserjet P.1006	2.009	Unit	RB	1	2.184.000,00	
29	1.5.4.01.01.01.002	Komputer (CPU)	Simbada	1.999	Unit	RB	1	11.500.000,00	

1.5 Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi untuk Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) dengan Nomor: DPA/A-1/ 4.01.0.00.0.00.01.0000 /001/2025 Tanggal 14 Januari 2025 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1.679.884.826,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluhsembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dan dilakukan perubahan berdasarkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PDPA – SKPD) dengan Nomor: DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 06 November 2025 menjadi sebesar Rp. 1.008.486.333,00 (satu milyar delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Adapun rincian terhadap penggunaandana tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 1.5.1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perekonomian Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	MURNI	PERUBAHAN DAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.679.884.826	1.008.486.333
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	1.679.884.826	1.008.486.333
4.01. 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	464.043.000	483.298.433
4.01. 01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.953.000	20.145.000
4.01. 01. 1.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.430.000	12.445.000
4.01. 01. 1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.045.000	6.500.000
4.01. 01. 1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.478.000	1.200.000
4.01. 01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.090.000	463.153.433
4.01. 01. 1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.360.000	36.049.300
4.01. 01. 1.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.730.000	16.023.050
4.01. 01. 1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	272.000.000	411.081.083
4.01. 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.215.841.826	525.187.900
4.01. 06. 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	334.201.826	122.116.800
4.01. 06. 1.01. 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	195.000.000	73.716.800
4.01. 06. 1.01. 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	139.201.826	48.400.000
4.01. 06. 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	440.000.000	179.183.600
4.01. 06. 1.02. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	201.280.000	85.264.800
4.01. 06. 1.02. 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	104.360.000	36.329.000
4.01. 06. 1.02. 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	134.360.000	57.589.800
4.01. 06. 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	441.640.000	223.887.500
4.01. 06. 1.03. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	205.360.000	129.277.900
4.01. 06. 1.03. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	95.000.000	25.004.800
4.01. 06. 1.03. 04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	141.280.000	69.604.800
Jumlah Belanja		1.679.884.826	1.008.486.333

Secara teknis, alokasi anggaran tersebut didistribusikan secara strategis untuk mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan melalui struktur kerja yang terorganisir. Anggaran ini memayungi pelaksanaan 2 program besar yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 kegiatan dan 14 sub-kegiatan. Melalui

pembagian pagu yang mendetail ke setiap sub-kegiatan tersebut, Biro Perekonomian berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi.

I. Program Administrasi Umum

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3 Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - 1.1 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - 1.2 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
2. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - 2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - 2.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - 2.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - 3.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
 - 3.2 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah, dan Sanitasi
 - 3.3 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

1.6 Isu-isu Strategis

Pembangunan ekonomi Jambi pada tahun 2025 dihadapkan pada beberapa isu strategis yang langsung atau tidak langsung berdampak terhadap perkembangan perekonomian di Jambi sehingga mempengaruhi capaian target makro ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sebagai implementasi dari tupoksinya, Biro Perekonomian membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Layanan Umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa isu strategis dibidang perekonomian yang berkembang di Provinsi Jambi antara lain meliputi isu dibidang kurangnya infrastruktur, perlambatan pertumbuhan ekonomi, lemahnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan serta pengembangan potensi energi dan sumber daya alam.

Isu yang berkembang di bidang infrastruktur antara lain :

1. Masih kurangnya infrastruktur penunjang transportasi,
2. Terbatasnya akses perhubungan kedaerah,
3. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian.
4. Pembuatan Jalan khusus batu bara

Akibat dari masih kurangnya infrastruktur penunjang transportasi dan terbatasnya akses perhubungan daerah mempengaruhi tingkat perkembangan industri kecil di Provinsi Jambi. Padahal peranan industri kecil dalam perekonomian daerah sangat penting karena mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan. Sementara itu industri kecil kenyataannya adalah sangat heterogen karena meliputi berbagai kegiatan sektor ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, angkutan dan perdagangan serta jasa. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi juga sangat mempengaruhi taraf perekonomian masyarakat jambi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut khususnya juga akan meningkatkan produksi padi sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jambi.

Pembangunan jalan khusus batu bara adalah proyek strategis nasional karena mempunyai dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, agar distribusi barang dan jasa pada daerah-daerah penghasil batu bara, sawit, CPO, dan hasil bumi lainnya menuju pelabuhan dapat berjalan dengan lancar. Dampak lain dari jalan khusus ini adalah berkurangnya kemacetan dan tingkat kecelakaan dapat teratasi.

Isu yang berkembang di bidang perlambatan pertumbuhan ekonomi antara lain :

1. Perlambatan lapangan usaha,
2. Penurunan kinerja ekspor akibat pemberlakuan lockdown di negara tujuan,
3. Pembatasan sosial yang berdampak terhadap penurunan aktivitas ekonomi,

4. Terganggunanya aktivitas di industri pengolahan,
5. Penurunan ekonomi akibat melemahnya daya beli masyarakat
6. Masih rendahnya realisasi belanja Pemerintah (government spending) akibat refocusing anggaran.
7. Kenaikan Inflasi

Pengendalian inflasi sangat penting, karena inflasi yang tidak terkendali akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Maka dari itu, upaya sinergis semua *stakeholder* (pemangku kepentingan), termasuk sinergisitas yang kuat Pemerintah Provinsi Jambi/Kabupaten/Kota dengan stakeholder harus terus dibangun, yang tentunya sangat bermanfaat dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Isu yang berkembang di bidang pengembangan potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi antara lain penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupun budaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

Isu yang berkembang di bidang struktur perekonomian Provinsi Jambi masih bertumpu pada kemampuan mengeksploitasi potensi sumber daya alam meliputi : 1) Sumber Daya Lahan (Hutan, kebun, pertanian dan tambang/galian); 2) Sumber Daya Mineral dan; 3) Sumber daya air dan Kelautan (perikanan, pengairan dan air baku dan air bersih). Didasari dari hal-hal tersebut diatas, agar pengelolaan sumber daya mineral antara aspek pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resources based economic*) dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*) dan upaya meningkatkan rasio desa yang dialiri listrik, maka perlu dirumuskan kebijakan energi daerah dan pengelolaan pertambangan di Provinsi Jambi.

Begitu juga dengan era reformasi, kesadaran masyarakat sudah meningkat untuk menuntut hak-hak atas lahan yang sudah digarapnya, sehingga banyak tuntutan baik berupa surat pengaduan maupun berupa aksi massa, untuk pengembalian hak mereka tidak saja di lahan perkebunan juga pada lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Dalam hal ini pihak pemerintah provinsi sebagai pihak yang menjadi sasaran tempat pengaduan, sehingga memerlukan berbagai kebijakan untuk dapat menemukan inti permasalahan. Oleh karena itu dengan menyadari kondisi dan permasalahan serta tantangan tersebut, sangat relevan ada peran Biro Perekonomian kedepannya, dalam rangka untuk dapat menjembatani permasalahan antara pihak yang berkepentingan melalui fungsi Fasilitator, Koordinasi dan Pemantauan.

Dengan Fasilitasi dari Biro Perekonomian melalui kebijakan yang tepat serta manajemen yang benar, efektif dan terkendali diharapkan dapat menghasilkan output yang memiliki daya saing, terencana serta berkelanjutan. Setelah mengetahui arti penting dari peranan Biro Perekonomian, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menilai keadaan faktor-faktor lingkungan strategis organisasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diberdayakan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran. Instrumen utama yang digunakan dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunity, and threat*). Pada pokoknya, teknik analisis SWOT membedah kondisi organisasi berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Identifikasi kondisi Internal Biro Perekonomian, diantaranya :

Kekuatan (strengths)

1. Adanya dukungan yang kuat dari Pimpinan (Asisten, Sekda dan Gubernur).
2. Adanya Kuantitas Sumber Daya Manusia yang cukup.
3. Adanya kewenangan memfasilitasi, koordinasi dan pemantauan serta mengevaluasi pada bidang ekonomi pembangunan dan sumber daya alam.
4. Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi.
5. Sarana dan prasarana penunjang kerja cukup memadai.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Masih adanya personil yang kurang menguasai Tupoksinya
2. Mekanisme kerja yang kurang efektif
3. Komitmen SKPD terhadap hasil evaluasi yang cenderung rendah.
4. Anggaran penunjang Tupoksi terbatas.

Identifikasi kondisi eksternal Biro Perekonomian antara lain :

Peluang (Opportunities)

2. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup memadai.
3. Adanya kerjasama dengan unit kerja terkait.
4. Upaya peningkatan kompetensi SDA aparatur di daerah yang cukup besar.
5. Adanya informasi / data perekonomian yang mudah diakses.

Ancaman (Threat)

1. Belum optimalnya koordinasi antar dinas/instansi terkait
2. Produk/hasil fasilitasi permasalahan belum dapat memuaskan stake holders
3. Perubahan kebijakan pemerintah
4. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
5. Eksploitasi Sumber Daya Alam yang berlebihan

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1.7.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Biro Perekonomian, yaitu :
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator dalam meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi

1.7.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi pada Tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan nilai tambah sektor Perkonomi pada Struktur Ekonomi Daerah.
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik

1.7.3 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Fungsi dan Tugas
- 1.3. Sumber Daya Aparatur
- 1.4. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.5. Sumber Daya Keuangan
- 1.6. Isu-isu Strategis
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2025
- 2.3. Realisasi Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan terukur. Penyusunan perencanaan strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang maupun jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun yang memiliki karakteristik khusus dalam pelaksanaan pembangunan daerah karena berada pada masa transisi pemerintahan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pelaporan kinerja Tahun 2025 mengacu pada dua periode perencanaan, yaitu periode akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 dan periode awal transisi menuju RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut menuntut adanya kesinambungan kebijakan pembangunan agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tetap tercapai sekaligus menjadi fondasi bagi arah pembangunan pada periode berikutnya.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah (sesuai RPJMD 2021-2026)

Visi dan misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi disusun untuk menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan daerah antara periode lima tahun sebelumnya (2016–2021) dengan periode perencanaan selanjutnya (2021–2026). Visi dan misi Gubernur Provinsi Jambi pada periode 2021–2026 dirancang untuk melanjutkan serta memperkuat keberhasilan capaian pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya, sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu:

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (JAMBI MANTAP)”

- Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman** : Tercipta mampu dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah** : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.
- Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan tiga misi pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e government yang terintegrasi
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu melakukan Langkah langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Selanjutnya, visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah yang secara rinci dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.1
Ringkasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi
2021-2026 Dengan Biro Perekonoian Setda Provinsi Jambi

Visi: TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan tata kelola Pemerintahan	terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Sakip
				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan public yang prima	Indeks Pengelola Keuangan Daerah
					Skor Tingkat kematangan perangkat daerah Provinsi Jambi
					Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan	Kontribusi sector pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB
				Meningkatnya industry pengeloaan	Kontribusi industry pengelolaan terhadap PDRB
				Meningkatnya peran sector pariwisata serta industry kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB
				Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infastruktur dasar	Rasio Konektivitas
					Akses terhadap air minum layak
					Rasio Elektrifikasi
					Persentase luas sawah beririgasi
					Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses internet
			Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indek kualitas lingkungan hidup
					Penurunan emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK) (jutan CO2 eq)
				Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka
				Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks ketahanan pangan

Memantapkan kualitas Sumber daya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indek pembangunan manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan hidup
			Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
			Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indek kebebasan dari diskriminasi
			Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indek pemberdayaan gender

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi berupaya memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan peran koordinatif terhadap Perangkat Daerah di tingkat provinsi, serta sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Melalui koordinasi yang terencana dan berkelanjutan, Biro Perekonomian berperan dalam memastikan keterpaduan kebijakan dan keselarasan pelaksanaan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, penanaman modal, pengelolaan sumber daya alam, serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Selain penguatan koordinasi, pelaksanaan tugas Biro Perekonomian juga diarahkan pada berbagai kegiatan strategis yang mendukung penciptaan model dan pola pengembangan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut difokuskan pada prioritas pembangunan Provinsi Jambi dengan tujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran, adaptif terhadap dinamika ekonomi, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, Biro Perekonomian diharapkan dapat menjadi fasilitator dan penggerak dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor guna memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Penjabaran program dan kegiatan Biro Perekonomian disusun secara konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Biro Perekonomian itu sendiri. Penyusunan program

dan kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola kerja yang efektif, serta pembagian peran yang jelas di setiap bagian. Dalam proses pengalokasian program dan kegiatan, Biro Perekonomian mempertimbangkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, dengan memperhatikan tingkat intensitas dan beban kerja yang diemban. Dengan pengalokasian yang proporsional dan terukur tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi secara keseluruhan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 maka tujuan dan sasaran strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam kurun waktu lima tahun diarahkan pada upaya **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan”**. Sasaran ini diwujudkan melalui penguatan peran koordinatif Biro Perekonomian dalam mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah yang terintegrasi dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jambi. Fokus utama diarahkan pada penciptaan iklim ekonomi yang kondusif melalui sinergi antar Perangkat Daerah, peningkatan efektivitas kebijakan di bidang penanaman modal, optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam, serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

Selain itu, pencapaian sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan ekonomi daerah. Biro Perekonomian berperan dalam mendorong kebijakan yang berbasis data dan analisis yang komprehensif, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah. Dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keberlanjutan, dan daya saing, sasaran strategis ini diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi Provinsi Jambi dalam jangka menengah dan panjang. Berikut Sasaran Strategis Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan 2026 - 2030:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN			INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai Akip/Predikat Akip		B	B	B	BB	BB	A	A	
				Skor IKM Biro Perekonomian		80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik			Persentase Percepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		428.239.850	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran	79.482.250	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.403.000	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	Biro Perekonomian
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.150.000	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.929.250	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	Biro Perekonomian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran	348.757.600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian

				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.711.000	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	Biro Perekonomian
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38.030.000	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Biro Perekonomian
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25.973.860	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Biro Perekonomian
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58.042.740	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
	Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	Persentase Sektor Ekonomi pada Pertumbuhan Ekonomi				295.760.000	4,80%	5,00%	5,00%	5,50%	5,50%	5,50%	
		Persentase Sektor SDA pada Struktur Ekonomi				399.559.450	27%	30%	35%	35%	35%	35%	

		Perekonomian dan Pembangunan		Persentase laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan		1.388.760.040	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
			Pengelola Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Persentasi percepatan kebijakan masalah perekonomian	295.760.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	126.980.000	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	168.780.000	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Biro Perekonomian
			Pengelola kebijakan koordinasi SDA		Persentasi percepatan kebijakan masalah SDA	399.559.450	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian

				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	142.692.700	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	146.066.750	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	110.800.000	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Biro Perekonomian
	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan				693.440.590	70%	70%	75%	75%	80%	80%	80%
			Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi		Persentasi percepatan kebijakan masalah BUMD dan BLUD	693.440.590							Biro Perekonomian

			BUMD dan BLUD										
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	155.840.000	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	Biro Perekonomian
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	426.800.590	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Biro Perekonomian

				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan	Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi	110.800.000	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	Biro Perekonomian
--	--	--	--	--	--	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2026-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Kegiatan					Unit Kerja Penanggung Jawab	Ket
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,94 Nilai	85,78 Nilai	86,62 Nilai	87,47 Nilai	88,31 Nilai	Biro Perekonomian	
				Nilai AKIP	73,85 Nilai	75,4 Nilai	76,95 Nilai	78,5 Nilai	80,05 Nilai	Biro Perekonomian	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi fisik	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	Biro Perekonomian	
				Persentase realisasi keuangan	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	Biro Perekonomian	
				Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	Biro Perekonomian	
				Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	Biro Perekonomian	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Biro Perekonomian	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Biro Perekonomian	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Biro Perekonomian	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	Biro Perekonomian	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Biro Perekonomian	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Biro Perekonomian	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Biro Perekonomian	

			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Biro Perekonomian	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Biro Perekonomian	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Biro Perekonomian	
			<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>100 Persentase</i>	Biro Perekonomian	
				<i>Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>100 Persentase</i>	Biro Perekonomian	
				<i>Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>100 Persentase</i>	<i>100 Persentase</i>	Biro Perekonomian	

			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Biro Perekonomian	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Biro Perekonomian	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Biro Perekonomian	

Dalam Renstra 2021–2026, fokus Perencanaan Strategis Biro Perekonomian diarahkan pada peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan efektivitas koordinasi antar Perangkat Daerah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi yang diterapkan meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pengelolaan dan pembinaan BUMD dan BLUD, serta peningkatan

peran pemerintah daerah dalam mendorong investasi dan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Seluruh strategi tersebut dirancang untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan Strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian selama periode perencanaan. Perencanaan strategis ini diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi melalui penguatan peran koordinatif, fasilitatif, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian daerah. Penyusunan perencanaan strategis dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kebijakan nasional dan daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang di bidang perekonomian, sumber daya alam, penanaman modal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Selanjutnya, Perencanaan Strategis Biro Perekonomian juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur dan berkelanjutan, diharapkan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, serta selaras dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021–2026. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, serta perumusan tindak lanjut guna meningkatkan kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi secara berkelanjutan dapat dilihat dari tabel dibawah ini .

Tabel 2.4
Renstra

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI																			
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026																			
TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAN DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					175	2492	2.217.930.098	2291	2.834.719.207	2520	3.543.399.009	2772	4.429.248.759	3050	5.536.560.948	13125	6.609.367.339		
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	411	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akip/ Predikat Akip		B (65)	593.660.126	B (75)	669.124.766	BB (80)	836.405.958	BB (80)	1.045.507.446	A (85)	1.306.884.307	A (85)	1.306.884.307		
		4E+05	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran	79.482.250	100%	157.713.126	100%	124.191.016	100%	155.238.770	100%	194.048.462	100%	242.560.577	100%	242.560.577	Biro Perencanaan	Jambi
		4	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.403.000	4 Dok	81.879.688	4 Dok	81.879.688	4 Dok	102.349.609	4 Dok	127.937.012	4 Dok	159.921.265	4 Dok	159.921.265	Biro Perencanaan	Jambi
		4	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.150.000	5 Lap	29.921.875	5 Lap	29.921.875	5 Lap	37.402.344	5 Lap	46.752.930	5 Lap	58.441.162	5 Lap	58.441.162	Biro Perencanaan	Jambi
		4	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.929.250	2 Lap	45.911.563	2 Lap	12.389.453	2 Lap	15.486.816	2 Lap	19.358.521	2 Lap	24.198.151	2 Lap	24.198.151	Biro Perencanaan	Jambi
		4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran	348.757.600	100%	435.947.000	100%	544.933.750	100%	681.167.188	100%	851.458.984	100%	1.064.323.730	100%	1.064.323.730	Biro Perencanaan	
		4	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.711.000	5 Lap	354.235.938	5 Lap	354.235.938	5 Lap	442.794.922	5 Lap	553.493.652	5 Lap	691.867.065	5 Lap	691.867.065	Biro Perencanaan	Jambi
		4	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38.030.000	1Paket	72.537.500	1Paket	59.421.875	1Paket	74.277.344	1Paket	92.846.680	1Paket	116.058.350	1Paket	116.058.350	Biro Perencanaan	Jambi
		4	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25.973.860	1Paket	42.467.325	1Paket	40.584.156	1Paket	50.730.195	1Paket	63.412.744	1Paket	79.265.930	1Paket	79.265.930	Biro Perencanaan	Jambi
		4	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58.042.740	1Paket	90.691.781	100%	90.691.781	100%	113.364.727	100%	141.705.908	100%	177.132.385	100%	177.132.385	Biro Perencanaan	Jambi

Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian	4	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase laporan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	1.388.760.040	100%	1.624.269.972	100%	1.620.660.691	100%	2.025.825.863	100%	2.532.282.329	100%	3.165.352.911	100%	4.238.159.302	Biro Perekonomian	Jambi
	4	Meningkatnya Pengelola Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase percepatan kebijakan masalah perekonomian	295.760.000	100%	462.125.000	100%	462.125.000	100%	577.656.250	100%	722.070.313	100%	902.587.891	100%	902.587.891	Biro Perekonomian	
	4	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	126.980.000	18 Dok	198.406.250	18 Dok	198.406.250	18 Dok	248.007.813	18 Dok	310.009.766	18 Dok	387.512.207	18 Dok	387.512.207	Biro Perekonomian	Jambi
	4	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	168.780.000	12 Dok	263.718.750	12 Dok	263.718.750	12 Dok	329.648.438	12 Dok	412.060.547	12 Dok	515.075.684	12 Dok	515.075.684	Biro Perekonomian	Jambi
	4	Pengelola kebijakan koordinasi S DA	Persentase percepatan kebijakan masalah S DA	399.559.450	100%	599.720.172	100%	624.311.641	100%	780.389.551	100%	975.486.938	100%	1.219.358.673	100%	1.219.358.673	Biro Perekonomian	
	4	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	142.692.700	15 Dok	198.365.875	15 Dok	222.957.344	15 Dok	278.696.680	15 Dok	348.370.850	15 Dok	435.463.562	15 Dok	435.463.562	Biro Perekonomian	Jambi
	4	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	146.066.750	10 Dok	228.229.297	10 Dok	228.229.297	10 Dok	285.286.621	10 Dok	356.608.276	10 Dok	445.760.345	10 Dok	445.760.345	Biro Perekonomian	Jambi
	4	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	110.800.000	12 Dok	173.125.000	12 Dok	173.125.000	12 Dok	216.406.250	12 Dok	270.507.813	12 Dok	338.134.766	12 Dok	338.134.766	Biro Perekonomian	Jambi
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	4	Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase percepatan kebijakan masalah BUMD dan BLUD	693.440.590	100%	562.424.800	100%	534.224.050	100%	667.780.062	100%	834.725.078	100%	1.043.406.347		2.116.212.738	Biro Perekonomian	
	4	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	155.840.000	15 Dok	243.500.000	15 Dok	243.500.000	15 Dok	304.375.000	15 Dok	380.468.750	15 Dok	475.585.938	15 Dok	475.585.938	Biro Perekonomian	Jambi
	4	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	426.800.590	12 Dok	145.799.800	12 Dok	117.599.050	12 Dok	146.998.812	12 Dok	183.748.515	12 Dok	229.685.643	12 Dok	229.685.643	Biro Perekonomian	Jambi
	4	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan	Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi	110.800.000	10 Dok	173.125.000	10 Dok	173.125.000	10 Dok	216.406.250	10 Dok	270.507.813	10 Dok	338.134.766	10 Dok	338.134.766	Biro Perekonomian	Jambi

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan kualitas perumusan dan fasilitasi kebijakan perekonomian daerah yang efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Tujuan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang ekonomi, khususnya dalam pengendalian inflasi, penguatan perekonomian daerah, optimalisasi peran BUMD, serta pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi daerah secara optimal.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi kebijakan ekonomi makro daerah, meningkatnya efektivitas pengendalian inflasi daerah, serta meningkatnya kinerja dan kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yang disusun secara terukur dan relevan, seperti persentase ketercapaian program kebijakan ekonomi, tingkat konsistensi pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah, serta capaian kinerja kelembagaan dan operasional BUMD yang difasilitasi oleh Biro Perekonomian.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Biro Perekonomian melaksanakan program utama yaitu Program Perekonomian dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program tersebut dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan strategis, antara lain fasilitasi perumusan kebijakan ekonomi makro, koordinasi pengendalian inflasi daerah, pembinaan dan pengawasan BUMD, serta kegiatan pendukung administrasi dan manajemen biro. Setiap kegiatan dirancang untuk memperkuat peran Biro Perekonomian sebagai koordinator dan fasilitator kebijakan ekonomi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam subkegiatan yang bersifat operasional, seperti pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi kebijakan ekonomi, penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan perekonomian, fasilitasi kerja sama ekonomi daerah, serta monitoring dan evaluasi kinerja BUMD. Masing-masing subkegiatan memiliki indikator kinerja yang jelas, antara lain jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, jumlah kegiatan koordinasi yang terlaksana, tingkat tindak lanjut hasil koordinasi, serta kualitas laporan evaluasi yang disusun setiap tahun.

Indikator kinerja dan target capaian disusun secara bertahap untuk setiap tahun perencanaan dari tahun 2021 hingga 2026. Target kinerja menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan penguatan kapasitas kelembagaan, kualitas perencanaan, dan efektivitas koordinasi kebijakan ekonomi daerah. Peningkatan target kinerja ini mencerminkan komitmen Biro Perekonomian dalam mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sejalan dengan target kinerja, target keuangan pada setiap program, kegiatan, dan subkegiatan juga direncanakan secara proporsional dan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Alokasi anggaran dari tahun ke tahun disesuaikan dengan prioritas pembangunan ekonomi daerah, kebutuhan pelaksanaan kegiatan, serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan anggaran diharapkan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2021–2026. Dan pada tahun 2025 Biro Perekonomian melakukan perubahan Renstra seperti tabel berikut:

Tabel 2.5

Perubahan Renstra

TABEL. 3.4. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BIRO PEREKONOMIAN PROVINSI JAMBI																			
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2026-2030																			
TUJUAN	SASARAN	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAN DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2025)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		TARGET	(Rp)		
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Efektivitas Pembangunan Perencanaan				Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tematik Perencanaan (Inflasi dan	BB (79,00)	100%	930.306.729	100%	1.023.337.402	100%	1.125.671.142	100%	1.238.238.256	100%	1.362.062.082	100%	1.362.062.082	Biro Perencanaan	Jambi
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan			Efektivitas pelaksanaan Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	925.486.333	100%	930.306.729	100%	1.023.337.402	100%	1.125.671.142	100%	1.238.238.256	100%	1.362.062.082	100%	1.362.062.082	Biro Perencanaan	Jambi
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	250.670.363	84,94	502.109.129	85,78	552.320.042	86,62	607.552.046	87,47	668.307.251	88,31	735.137.976	88,31	735.137.976	Biro Perencanaan	Jambi
				Nilai AKIP	58.865.470	73,85	50.800.000	75,4	55.880.000	76,95	61.468.000	78,5	67.614.800	80,05	74.376.280	80,05	74.376.280		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase capaian realisasi fisik 2. Persentase realisasi keuangan 3. Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan 4. Persentase tindak lanjut atas evaluasi	58.865.470	100%	50.800.000	100%	55.880.000	100%	61.468.000	100%	67.614.800	100%	74.376.280	100%	74.376.280	Biro Perencanaan	Jambi
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.150.000	4Dok	31.200.000	4Dok	34.320.000	4Dok	37.752.000	4Dok	41.527.200	4Dok	45.679.920	4Dok	45.679.920	Biro Perencanaan	Jambi
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.01.01.1.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.220.000	5Dok	13.600.000	5Lap	14.960.000	5Lap	16.456.000	5Lap	18.101.600	5Lap	19.911.760	5Lap	19.911.760	Biro Perencanaan	Jambi
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.495.470	2Dok	6.000.000	2Lap	6.600.000	2Lap	7.260.000	2Lap	7.986.000	2Lap	8.784.600	2Lap	8.784.600	Biro Perencanaan	Jambi

Meningkatnya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	250.670.363	100%	502.109.129	100%	552.320.042	100%	607.552.046	100%	668.307.251	100%	735.137.976	100%	735.137.976	Biro Perencanaan	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.01.01.106.000.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.772.013	4Dok	411.022.954	4Dok	452.125.249	4Dok	497.337.774	4Dok	547.071.552	4Dok	601.778.707	4Dok	601.778.707	Biro Perencanaan	Jambi
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4.01.01.106.000.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12.522.750	1Paket	11.004.250	1Paket	12.104.675	1Paket	13.315.143	1Paket	14.646.657	1Paket	16.111.322	1Paket	16.111.322	Biro Perencanaan	Jambi
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan	4.01.01.106.000.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27.375.600	1Paket	80.081.925	1Paket	88.090.118	1Paket	96.899.129	1Paket	106.589.042	1Paket	117.247.946	1Paket	117.247.946	Biro Perencanaan	Jambi
Meningkatnya Kualitas Kebijakan	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas pelaksanaan Kebijakan	615.950.500	100%	377.397.600	100%	415.137.360	100%	456.651.096	100%	502.316.206	100%	552.547.826	100%	552.547.826	Biro Perencanaan	Jambi
Meningkatnya Implementasi Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan			Persentase Dokumen Kebijakan Perencanaan Yang		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase Dokumen kebijakan SDA Yang di laksanakan		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase Dokumen kebijakan BUMD dan BLUD Yang		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Meningkatnya pengelolaan Kebijakan dan koordinasi Perencanaan yang disusun	4.01.06.1.01	Kegiatan Pengelola Kebijakan dan Koordinasi Perencanaan	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Kebijakan Perencanaan Ekonomi Makro 2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Kebijakan Perencanaan Ekonomi Mikro	149.292.800	100%	59.936.800	100%	65.930.480	100%	72.523.528	100%	79.775.881	100%	87.753.469	100%	87.753.469	Biro Perencanaan	
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4.01.06.1.01.000.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	90.268.800	4Dok	33.567.800	4Dok	36.924.580	4Dok	40.617.038	4Dok	44.678.742	4Dok	49.146.616	4Dok	49.146.616	Biro Perencanaan	Jambi
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4.01.06.1.01.000.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	59.024.000	4Dok	26.369.000	4Dok	29.005.900	4Dok	31.906.490	4Dok	35.097.139	4Dok	38.606.853	4Dok	38.606.853	Biro Perencanaan	Jambi

Meningkatnya Pengelolaan kebijakan dan koordinasi Sumber Daya Alam (SDA) yang disusun	4.01.06.1.0 2	Kegiatan Pengelola kebijakan koordinasi SDA	1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, dan Perikanan 2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan 3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dokumen Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	199.434.100	100 %	144.135.600	100 %	158.549.160	100 %	174.404.076	100 %	191.844.484	100 %	211.028.932	100 %	211.028.932	Biro Perencanaan	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	4.01.06.1.02.000 1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	93.396.300	3 Dok	69.272.800	3 Dok	76.200.080	3 Dok	83.820.088	3 Dok	92.202.097	3 Dok	101.422.306	3 Dok	101.422.306	Biro Perencanaan	Jambi
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4.01.06.1.02.000 2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	40.374.000	3 Dok	27.446.000	2 Dok	30.190.600	2 Dok	33.209.660	2 Dok	36.530.626	2 Dok	40.183.689	2 Dok	40.183.689	Biro Perencanaan	Jambi
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	4.01.06.1.02.000 3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	65.663.800	2 Dok	47.436.800	2 Dok	52.158.480	2 Dok	57.374.328	2 Dok	63.111.761	2 Dok	69.422.937	2 Dok	69.422.937	Biro Perencanaan	Jambi
Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD yang disusun	4.01.06.1.0 3	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	1. Persentase pemenuhan Kebutuhan dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 2. Persentase pemenuhan Kebutuhan dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 3. Persentase pemenuhan Kebutuhan dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	267.223.600	100 %	173.325.200	100 %	190.657.720	100 %	209.723.492	100 %	230.695.841	100 %	253.765.425	100 %	253.765.425	Biro Perencanaan	

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	4.01.06.1.03.000 1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	140.500.000	2 Dok	71.526.600	2 Dok	78.679.260	2 Dok	86.547.186	2 Dok	95.201.905	2 Dok	104.722.095	2 Dok	104.722.095	Biro Perekonomian	Jambi
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	4.01.06.1.03.000 2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	74.204.800	2 Dok	35.361.800	2 Dok	38.897.980	2 Dok	42.787.778	2 Dok	47.066.556	2 Dok	51.773.211	2 Dok	51.773.211	Biro Perekonomian	Jambi
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	4.01.06.1.03.000 4	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi	52.518.800	1Dok	66.436.800	1Dok	73.080.480	1Dok	80.388.528	1Dok	88.427.381	1Dok	97.270.119	1Dok	97.270.119	Biro Perekonomian	Jambi

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menentukan pendekatan dan langkah strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Penentuan strategi menjadi pedoman utama bagi organisasi dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Strategi organisasi juga berfungsi sebagai jembatan antara tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan serta tindakan nyata yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Dalam konteks tersebut, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta peran dan fungsi Biro Perekonomian sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas koordinatif, fasilitatif, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian. Strategi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja birokrasi, melalui pembenahan sistem manajemen administrasi di bidang perekonomian dan sumber daya alam, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi, penguasaan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait dalam penyediaan data sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat.
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, khususnya dalam pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi Provinsi Jambi, guna memastikan keterpaduan, sinkronisasi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
3. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang tertib administrasi serta berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, baik dalam pemanfaatan sumber daya manusia maupun pengelolaan sumber pendanaan yang tersedia.
4. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

5. Meningkatkan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), guna mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
6. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur, melalui keikutsertaan dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, baik yang diselenggarakan di lingkungan Provinsi Jambi maupun oleh kementerian atau lembaga yang membidangi.

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Biro Perekonomian Setda
Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Perekonomian di Provinsi Jambi	Persentase rekomendasi kebijakan pada BUMD dan BLUD yang dilaksanakan
			Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang dilakukan
2.		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip
			Skor IKM Biro Perekonomian

Pada Tahun 2025 ada Perubahan Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi untuk Tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 2.7
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Biro Perekonomian Setda
Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektifitas Pembangunan Perekonomian	Meningkatnya Kualitas Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan instrumen manajemen kinerja yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan tertentu, yang disertai dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaannya. Melalui Perjanjian Kinerja ini, terbangun komitmen bersama antara pemberi dan penerima amanah dalam mewujudkan kinerja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diemban serta dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja juga berfungsi sebagai dasar dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta dukungan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja menjadi alat pengendalian sekaligus sarana evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja instansi mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan, yaitu Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Pohon Kinerja. Keterkaitan antar dokumen tersebut dimaksudkan agar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja berjalan secara selaras dan terintegrasi, sehingga tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dicapai secara optimal.

Pada Tahun 2025, dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap indikator kinerja serta Dokumen Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan pemerintah daerah, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas nasional. Penyesuaian indikator kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi, kejelasan, dan keterukuran capaian kinerja, sehingga lebih mencerminkan hasil (outcome) yang ingin dicapai.

Berdasarkan acuan dokumen perencanaan tersebut serta dengan mempertimbangkan perubahan indikator kinerja pada Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi disusun sebagai komitmen kinerja pimpinan dan seluruh jajaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan ekonomi daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 2.8
Indikator Kinerja 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Perekonomian di Provinsi Jambi	Persentase rekomendasi kebijakan pada BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	80%
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang dilakukan	80%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	80
		Skor IKM Biro Perekonomian	85

Tabel 2.9
Indikator Kinerja 2025 Perubahan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	100 %

2.1 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada awal tahun pelaksanaan anggaran, Biro Perekonomian mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar **Rp1.679.884.826,-** (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah). Pagu awal ini diproyeksikan untuk mendanai seluruh program kerja reguler, operasional biro, serta perumusan rekomendasi kebijakan di sektor BUMD, BLUD, SDA, dan pengendalian perekonomian daerah.

Seiring berjalannya tahun anggaran dan dinamika kebutuhan daerah, dilakukan rasionalisasi serta efisiensi fiskal yang signifikan pada APBD Perubahan Tahap Pertama. Melalui penyesuaian ini, pagu anggaran Biro Perekonomian mengalami penurunan menjadi sebesar **Rp925.486.333,-** (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Penurunan ini menuntut organisasi untuk melakukan penajaman skala prioritas, memastikan program-program yang bersifat krusial tetap berjalan optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.

Pada perkembangan berikutnya, guna mengakomodasi pergeseran kebutuhan taktis dan memastikan efektivitas penyerapan di akhir tahun, pemerintah daerah melakukan penyesuaian kembali melalui APBDP Tahap Kedua. Pada fase ini, anggaran Biro Perekonomian kembali mengalami penambahan menjadi sebesar **Rp1.008.486.333,-** (Satu Miliar Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah). Penambahan anggaran pada tahap akhir ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan yang bersifat mendesak sekaligus

memastikan seluruh target kinerja makro dapat terselesaikan dengan predikat sangat baik.

Fluktuasi anggaran dari APBD Murni yang terkoreksi cukup dalam pada APBDP I, namun berhasil mengalami pemulihan parsial pada APBDP II sebesar Rp83.000.000,-, mencerminkan komitmen Biro Perekonomian dalam menerapkan prinsip fleksibilitas fiskal. Meskipun ruang belanja mengalami dinamika dan kontraksi secara keseluruhan jika dibandingkan dengan pagu murni, Biro Perekonomian tetap mampu menjaga kualitas *output* kerja secara akuntabel demi kemajuan tata kelola perekonomian daerah.

Tabel 2.10
Rencana Belanja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi APBD dan APBDP tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	APBD	APBDP 1	APBDP 2
1	2	3	4	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.679.884.826	925.486.333	1.008.486.333
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	1.679.884.826	925.486.333	1.008.486.333
4.01. 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	464.043.000	309.535.833	483.298.433
4.01. 01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.953.000	58.865.470	20.145.000
4.01. 01. 1.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.430.000	33.150.000	12.445.000
4.01. 01. 1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.045.000	15.220.000	6.500.000
4.01. 01. 1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.478.000	10.495.470	1.200.000
4.01. 01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.090.000	250.670.363	463.153.433
4.01. 01. 1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.360.000	27.375.600	36.049.300
4.01. 01. 1.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.730.000	12.522.750	16.023.050
4.01. 01. 1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	272.000.000	210.772.013	411.081.083
4.01. 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.215.841.826	615.950.500	525.187.900
4.01. 06. 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	334.201.826	149.292.800	122.116.800
4.01. 06. 1.01. 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	195.000.000	90.268.800	73.716.800
4.01. 06. 1.01. 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	139.201.826	59.024.000	48.400.000
4.01. 06. 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	440.000.000	199.434.100	179.183.600
4.01. 06. 1.02. 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	201.280.000	93.396.300	85.264.800
4.01. 06. 1.02. 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	104.360.000	40.374.000	36.329.000
4.01. 06. 1.02. 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	134.360.000	65.663.800	57.589.800
4.01. 06. 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	441.640.000	267.223.600	223.887.500
4.01. 06. 1.03. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	205.360.000	140.500.000	129.277.900
4.01. 06. 1.03. 02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	95.000.000	74.204.800	25.004.800
4.01. 06. 1.03. 04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	141.280.000	52.518.800	69.604.800
Jumlah Belanja		1.679.884.826	925.486.333	1.008.486.333

2.3.1 Target Belanja Biro Perekonomian Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Biro Perekonomian Provinsi Jambi menetapkan target belanja sebesar Rp1.008.486.333,- dengan rincian sebagai berikut ;

2.11

Target Belanja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi APBD dan APBDP tahun 2025

Kode Reg	Uraian	Jumlah	Realisasi	Persentase
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.008.486.333,-	Rp. 926.765.932	91,90%

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Biro Perekonomian Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

2.12

Target Belanja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi APBD dan APBDP tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH	PRESENTASE	Keterangan
1	2	4		3
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Rp1.008.486.333,-	91,90%	1. Tersusunnya rekomendasi dan bahan kebijakan di bidang perekonomian sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan daerah. 2. Terlaksananya rapat koordinasi, forum sinkronisasi, dan fasilitasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah. 3. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BUMD dan BLUD sebagai bahan perbaikan tata kelola dan peningkatan pelayanan. 4. Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. 5. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan dan percepatan pelaksanaan program strategis di bidang perekonomian. 6. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan

				perencanaan pembangunan ekonomi daerah. i. Terbangunnya sinergi dan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
--	--	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Bab ini menyajikan gambaran capaian kinerja Biro Perekonomian selama periode pelaporan sebagai dasar penilaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

3.1 Capaian Kinerja 2025

Capaian Kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2024 dinilai dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian kinerja tersebut dilaksanakan secara sistematis oleh tim pengelola kinerja sebagai bagian dari upaya pengukuran dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan.

Penilaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, selanjutnya dilakukan kategorisasi atau penentuan posisi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diperoleh, sebagai dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Baik	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Perekonomian Provinsi Jambi dilakukan melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai selama periode pelaporan. Proses pengukuran ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi secara terukur dan objektif.

Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur utama dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Perekonomian Provinsi Jambi. Setiap indikator kinerja dilengkapi dengan target yang telah ditetapkan serta capaian realisasi yang diperoleh, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat capaian kinerja.

Perbandingan rincian indikator kinerja beserta target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 disajikan dengan mempertimbangkan adanya perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta upaya penyempurnaan sistem pengukuran kinerja agar lebih relevan, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Pada Tahun 2024, sasaran dan indikator kinerja masih mengacu pada struktur perencanaan yang berlaku pada periode sebelumnya, dengan penekanan pada pencapaian output program dan kegiatan. Target kinerja ditetapkan berdasarkan kebijakan dan kapasitas sumber daya yang tersedia, sedangkan realisasi capaian kinerja mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran berjalan.

Memasuki Tahun 2025, dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap sasaran serta indikator kinerja. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian rumusan sasaran strategis, perubahan indikator kinerja, serta pergeseran fokus pengukuran dari output menuju outcome yang lebih menggambarkan dampak pelaksanaan kebijakan. Sejalan dengan perubahan tersebut, target kinerja Tahun 2025 disusun kembali agar selaras dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan terkait.

Dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja tersebut, perbandingan capaian kinerja antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak

sepenuhnya dapat dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, penyajian perbandingan dilakukan secara deskriptif dan komparatif dengan menampilkan indikator, target, dan realisasi capaian kinerja masing-masing tahun, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai perkembangan kinerja serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan perbaikan perencanaan kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ke depan. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024		CAPAIAN (%)	KINERJA
			Target	Realisasi		
1	2	3	5	6	7	8
1.	Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah	Persentase sektor ekonomi pada pertumbuhan ekonomi	5,00%	4,15%	83,00	Baik
		Persentase sektor SDA pada struktur ekonomi	30%	25,0%	83,33	Baik
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD	Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan	75%	51,67%	68,89	Sedang
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Akip	80	77,79%	97,24	Sangat Baik
		Skor IKM Biro Perekonomian	85%	83,25%	97,94	Sangat Baik

Tabel 3.3
Realisasi Capaian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Perekonomian di Provinsi Jambi	Persentase rekomendasi kebijakan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	80 %	80 %	Sangat Baik
		Persentase rekomendasi kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan	80 %	80 %	Sangat Baik
2.	Menikatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	80		-
		IKM	85	83,42	Baik

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
Tahun 2025 Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	100%	100%	Sangat Baik

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilakukan analisis terhadap perkembangan capaian kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi pada Tahun 2024, Tahun 2025 (Murni), dan Tahun 2025 (Perubahan). Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi perubahan arah kebijakan, fokus pembangunan, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun.

Perbandingan capaian kinerja tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, prioritas pembangunan daerah, serta upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pada Tahun 2024, pengukuran kinerja masih berfokus pada aspek kontribusi sektor perekonomian, pengelolaan BUMD dan BLUD, serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, pada Tahun 2025 (Murni) dilakukan penajaman indikator yang lebih berorientasi pada implementasi kebijakan perekonomian dan penguatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, pada Tahun 2025 Perubahan dilakukan penyederhanaan sasaran strategis dengan menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan secara lebih terintegrasi.

Adapun hasil analisis capaian kinerja pada masing-masing tahun anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, evaluasi kinerja difokuskan pada tiga sasaran strategis utama dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Peningkatan nilai tambah sektor Perekonomian pada Struktur Ekonomi Daerah
 - Indikator Persentase sektor ekonomi pada pertumbuhan ekonomi mencapai realisasi sebesar 4,15% dari target 5,00% (tingkat capaian 83,00% / Kategori Baik).
 - Indikator Persentase sektor SDA pada struktur ekonomi terealisasi sebesar 25,0% dari target 30% (tingkat capaian 83,33% / Kategori Baik).
- b. Sasaran 2: Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian BUMD dan BLUD
 - Indikator Persentase capaian kinerja BUMD dan BLUD sesuai perencanaan hanya mencapai realisasi 51,67% dari target 75%. Capaian ini berada pada angka 68,89% dengan Kategori Sedang, menjadikannya satu-satunya indikator yang memerlukan perhatian khusus dan evaluasi mendalam pada tahun tersebut.
- c. Sasaran 3: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik
 - Indikator Nilai AKIP berhasil terealisasi sebesar 77,79 dari target 80 (tingkat capaian 97,24% / Kategori Sangat Baik).
 - Indikator Skor IKM Biro Perekonomian mencatatkan realisasi 83,25% dari target 85% (tingkat capaian 97,94% / Kategori Sangat Baik).

II. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 (Murni)

Memasuki tahun 2025, terjadi restrukturisasi formulasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja untuk lebih mempertajam orientasi hasil pelaksanaan kebijakan:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya Implementasi Kebijakan Perekonomian di Provinsi Jambi

Kinerja pada sektor ini menunjukkan efisiensi yang optimal. Baik indikator Persentase rekomendasi kebijakan BUMD dan BLUD yang dilaksanakan maupun Persentase rekomendasi kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan berhasil memenuhi target secara mutlak, yaitu terealisasi 80% dari target 80% (Kategori Sangat Baik).

- b. Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) memperoleh nilai realisasi 83,42 dari target 85 (Kategori Baik).

Nilai SAKIP pada tahun 2025 murni ditargetkan sebesar 80, namun belum memuat angka realisasi pada laporan berjalan (-).

III. Analisis Kinerja Tahun 2025 Perubahan

Pada tahap Perubahan Tahun 2025, dilakukan simplifikasi dan penajaman sasaran strategis menjadi satu muara indikator makro yang merepresentasikan efektivitas birokrasi secara menyeluruh:

- a. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan

- Diukur melalui indikator Efektivitas pelaksanaan Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan.
- Indikator ini mencatatkan hasil yang sempurna dengan realisasi 100% dari target 100%, sehingga berpredikat Sangat Baik.

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja Tahun 2024, Tahun 2025 Murni, dan Tahun 2025 Perubahan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Biro Perekonomian menunjukkan tren yang positif. Perubahan formulasi sasaran strategis dan indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun 2025 tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pengukuran kinerja organisasi agar lebih berorientasi pada hasil (outcome). Hal ini terlihat dari semakin terfokusnya indikator kinerja pada implementasi kebijakan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Salah satu perkembangan yang menonjol terlihat pada aspek pengelolaan dan pengendalian BUMD dan BLUD. Pada Tahun 2024, indikator Persentase Capaian Kinerja BUMD dan BLUD sesuai Perencanaan hanya mencapai tingkat capaian sebesar 68,89 persen dengan kategori Sedang. Namun, setelah dilakukan penyesuaian indikator pada Tahun 2025 yang berfokus pada implementasi rekomendasi kebijakan, capaian kinerja berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan kategori Sangat Baik. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Biro Perekonomian.

Dari aspek pelayanan publik, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Pada Tahun 2024 nilai IKM tercatat sebesar 83,25 dan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 83,42. Meskipun peningkatannya tidak terlalu besar, capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pemangku kepentingan tetap dapat dipertahankan dengan baik di tengah berbagai penyesuaian kebijakan dan perubahan sasaran strategis organisasi.

Selain itu, terjadi perkembangan dalam pendekatan pengukuran kinerja organisasi. Jika pada Tahun 2024 pengukuran kinerja masih dilakukan melalui beberapa indikator yang bersifat sektoral dan terpisah, maka pada Tahun 2025 Perubahan dilakukan penyederhanaan sasaran strategis menjadi lebih terintegrasi melalui indikator efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kontribusi organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa Biro Perekonomian terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat implementasi kebijakan, serta mempertahankan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, khususnya dalam mendukung pengelolaan dan pemanfaatan potensi perekonomian daerah. Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan realisasi kinerja

yang dicapai pada akhir tahun anggaran. Dalam konteks Provinsi Jambi, evaluasi ini juga memperhatikan keterkaitan antara pengelolaan sumber daya alam dengan dinamika perekonomian daerah sebagai salah satu faktor utama penggerak pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, capaian kinerja sasaran strategis Biro Perekonomian Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup optimal. Hal ini tercermin dari tercapainya sebagian besar indikator kinerja yang berkaitan dengan fasilitasi kebijakan ekonomi makro, pengendalian inflasi daerah, serta penguatan peran BUMD dalam mengelola potensi ekonomi berbasis sumber daya alam. Pemanfaatan komoditas unggulan daerah, seperti sektor perkebunan, pertambangan, dan energi, telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, pendapatan daerah, serta stabilitas harga, yang selanjutnya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target secara maksimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas sumber daya alam, ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor primer, serta tantangan dalam mendorong peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan pengolahan hasil sumber daya alam. Selain itu, keterbatasan kewenangan Biro Perekonomian dalam implementasi teknis, serta perlunya penguatan sinergi lintas sektor, menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya alam.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi akan terus mendorong penguatan kebijakan perekonomian daerah yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berdaya saing. Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan meliputi peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, optimalisasi peran BUMD dalam pengelolaan komoditas unggulan, serta penguatan kebijakan yang mendorong peningkatan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kontribusi sektor sumber daya alam terhadap perekonomian daerah dapat semakin optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara agregat persentase capaian kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menunjukkan kategori baik hingga sangat baik. Rata-rata capaian indikator

kinerja sasaran strategis berada pada kisaran ≥ 90 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program serta efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung stabilitas perekonomian dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah.

Lebih lanjut, indikator-indikator yang berkaitan dengan fasilitasi kebijakan ekonomi makro, koordinasi pengendalian inflasi daerah, serta pembinaan dan evaluasi kinerja BUMD menunjukkan tingkat capaian yang relatif tinggi. Sebagian indikator bahkan mencapai 100 persen atau melampaui target yang direncanakan, yang menandakan meningkatnya kinerja kelembagaan dan kualitas tata kelola perekonomian daerah. Sementara itu, indikator dengan capaian di bawah target menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada tahun berikutnya melalui penajaman target, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Output 1:

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerjanya yakni:

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output 2 :

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Tersedianya Bahan Logistik Kantor, Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerjanya yakni:

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
3. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
4. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Output 3:

Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro, dengan indikator kinerjanya yakni:

1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
2. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

Output 4:

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, dengan indikator kinerjanya yakni:

1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Output 5 :

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan, dengan indikator kinerjanya yakni:

1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
 2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air minum, Limbah dan Sanitase
 3. Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi
- Sasaran ini dicapai melalui 2 program 5 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

II. Program Perekonomian dan Pembangunan

3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - 3.1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
 - 3.2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
4. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - 4.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - 4.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - 4.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
5. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - 5.1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
 - 5.2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah, dan Sanitasi
 - 5.3. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan Anggaran pada Tahun 2025 setelah APBDP sebesar Rp. Rp1.008.486.333,- dari Total Anggaran yang dialokasikan serta realisasi anggaran Tahun 2025 Rp. 926.765.932 dengan presentase 91,90 %.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Belanja Daerah APBD Provinsi Jambi Tahun 2025
Posisi : Desember 2025

No	Program / Kegiatan	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.918.600	98,88	100,00	226.400	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.445.000	100,00	100,00	0	Tersedianya Dokumen Perencanaan Beruoa Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Rencana Aksi Kinerja, RKA, DPA Perubahan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.450.000	99,23	100,00	50.000	Tersedianya Dokumen Perencanaan berupa LPPD dan Laporan LKjIP
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.023.600	85,30	100,00	176.400	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		420.151.658	90,72	100,00	43.001.775	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.151.920	94,74	100,00	1.897.380	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yag memadai sehingga mendukung peningkatan produktivitas kerja pegawai serta kelancaran pelaksanaan operasional dan administrasi perkantoran
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.022.750	87,52	100,00	2.000.300	Tersedianya dokumen dan materi pendukung yang memadai untuk menunjang kelancaran administrasi

						dan pelayanan
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	371.976.988	90,49	100,00	39.104.095	Tersedianya Laporan SIRUP
II. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
I. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		107.198.390	87,78	100,00	14.918.410	
1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	62.301.098	84,51	100,00	11.415.702	Tersedianya Dokumen Ekonomi Makro (Dokumen Inflasi, TPID, Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Laporan Perkembangan Harga)
2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	44.897.292	92,76	100,00	3.502.708	Tersedianya Dokumen Ekonomi Mikro (Dokumen Investasi, Perkembangan UMKM, Perdagangan)
2. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		175.715.998	98,06	100,00	3.467.602	
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	83.214.800	97,60	100,00	2.050.000	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	36.027.400	99,17	100,00	301.600	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	56.473.798	98,06	100,00	1.116.002	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		203.781.286	91,02	100,00	20.106.214	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi	113.476.386	87,78	100,00	15.801.514	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring,

	Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha					dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	24.934.800	99,72	100,00	70.000	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	65.370.100	93,92	100,00	4.234.700	Tersedianya Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
TOTAL :		926.765.932	91,90	100,00	81.720.401	

Realisasi anggaran Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2025 menunjukkan capaian penyerapan belanja langsung sebesar Rp 926.765.932, atau sebesar 91,90 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.008.486.333. Selama tahun anggaran tersebut, seluruh anggaran yang dikelola bersumber dari APBDP dan dialokasikan pada belanja langsung. Capaian realisasi ini mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan di bidang perekonomian daerah.

Dalam rangka mencapai target kinerja Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2025, pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi biro, khususnya dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan berbagai instrumen pendukung, termasuk pengembangan dan penggunaan sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta memperkuat koordinasi dan pengendalian kinerja. Pemanfaatan sistem informasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan serta ketepatan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, Biro Perekonomian Provinsi Jambi terus berupaya memanfaatkan kemajuan tersebut secara optimal guna mendukung proses perencanaan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi juga ditujukan untuk membuka akses informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat, sehingga mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan daerah. Melalui upaya pembenahan dan inovasi yang berkelanjutan, Biro Perekonomian Provinsi Jambi berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan di bidang perekonomian.

3.4 Analisis Efisiensi

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 telah melampaui target capaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan,

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Biro Perekonomian Provinsi Jambi Tahun 2025
(Periode 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan Kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	100%	91,90%	8,10 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, sasaran strategis **“Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan”** berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan **capaian kinerja sebesar 100%**. Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif serta pengelolaan sumber daya yang optimal. Dari sisi keuangan, realisasi penyerapan anggaran mencapai **91,90%**, sehingga diperoleh **tingkat efisiensi sebesar 8,10%**.

Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan bahwa seluruh target kinerja sudah tercapai tanpa menggunakan seluruh alokasi anggaran yang tersedia. Dengan kata lain, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi mampu menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target melalui penggunaan anggaran yang lebih hemat, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan maupun manfaat yang dihasilkan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Efisiensi tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain perencanaan kegiatan yang matang, penentuan prioritas program secara tepat, koordinasi yang baik dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia secara maksimal, serta pengendalian belanja yang disiplin turut memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.

Meskipun target kinerja telah tercapai sepenuhnya, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi tetap melakukan berbagai langkah perbaikan berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi kendala pada periode berikutnya. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian program, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif, percepatan tindak lanjut atas hasil evaluasi, serta penyempurnaan mekanisme penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan kondisi terkini. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi

pencapaian kinerja sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program di masa mendatang.

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi sebesar 8,10% mencerminkan bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi telah mampu mengelola sumber daya dan anggaran secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis. Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa tata kelola organisasi telah berjalan dengan baik dan mendukung terwujudnya kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan yang semakin berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi biro dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perekonomian. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi instrumen evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja biro secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja, dapat disimpulkan bahwa secara umum Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi telah mampu melaksanakan sebagian besar sasaran strategis yang ditetapkan dengan capaian kinerja yang baik. Berbagai indikator kinerja menunjukkan hasil yang positif, terutama pada aspek fasilitasi kebijakan ekonomi makro, pengendalian inflasi daerah, serta penguatan peran BUMD dalam mendukung perekonomian daerah. Capaian tersebut turut ditopang oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah yang berkontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah.

Namun demikian, laporan ini juga menunjukkan masih adanya beberapa keterbatasan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Ketergantungan perekonomian daerah pada sektor berbasis sumber daya alam, fluktuasi harga komoditas, serta belum optimalnya peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi menjadi faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pada sebagian indikator. Selain itu, dinamika kebijakan dan keterbatasan kewenangan Biro Perekonomian dalam implementasi teknis turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi perlu terus melakukan penyempurnaan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengukuran kinerja. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, peningkatan kualitas data dan sistem pelaporan kinerja, serta penajaman indikator kinerja yang lebih terukur dan relevan menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja biro pada tahun-tahun mendatang.

Sebagai saran, Biro Perekonomian diharapkan dapat mendorong kebijakan perekonomian daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Optimalisasi peran BUMD dan BLUD, penguatan dukungan terhadap sektor-sektor unggulan, serta fasilitasi hilirisasi dan diversifikasi ekonomi perlu terus ditingkatkan agar struktur perekonomian daerah menjadi lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam pengambilan kebijakan di bidang perekonomian daerah. Dengan komitmen dan sinergi seluruh pihak terkait, Biro Perekonomian optimistis dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Provinsi Jambi.



Provinsi Jambi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ALFIANSYAH, S.PI., M.E
Jabatan : KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI

Pihak Pertama

M. ALFIANSYAH, S.PI., M.E
PEMBINA TK. I (IV/B)
NIP. 196901242000031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**SEKRETARIAT DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Perekonomian di Provinsi Jambi	Persentase rekomendasi kebijakan pada BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	80 Persen
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	80 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	IKM	85 Nilai
		Nilai Sakip	80 Nilai

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.215.841.826	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	464.043.000	

Jambi, 31 Januari 2025

GUBERNUR JAMBI

**DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H**

GUBERNUR JAMBI

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

**M. ALFIANSYAH, S.PI., M.E**

PEMBINA TK. I (IV/B)

NIP. 196901242000031002



Provinsi Jambi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : M. ALFIANSYAH, S.PI., M.E
Jabatan : KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI

Jambi, September 2025

Pihak Pertama,

M. ALFIANSYAH, S.PI., M.E
PEMBINA TK. I (IV/B)
NIP. 196901242000031002

LAPORAN KINERJA (LKj)



Biro Pengadaan Barang & Jasa
Setda Provinsi Jambi

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan laporan penyusunan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Instansi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indicator – indicator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj-PD ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisiensi dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jambi, 22 Desember 2025

Kepala Biro Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Jambi



M. ALI ZAINI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 2000121002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang memuat rencana capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran strategis dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan rencana strategis, kebijakan, program, dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan
2. Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
3. Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ

Evaluasi atas pencaian kinerja dan permasalahan yang ditemui menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya sinergis setiap level manajemen untuk berkontribusi memecahkan masalah.
2. Perlunya meningkatnya intensitas komunitas dan kerjasama dengan para pemangku kebijakan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan kinerja Istansi Pemerintah ini penting digunakan sebagai dasar bagi Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi	2
1.2. Tugas dan Fungsi	3
1.3. Isu-Isu Strategis	7
1.4. Keadaan Pegawai	9
1.5. Sarana dan Prasarana.....	12
1.6. Keuangan	13
1.7. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	18
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	21
2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan	23
2.2. Perjanjian Kinerja 2025	24
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	25
2.3.1. Target Belanja Tahun Anggaran 2025	26
2.3.2. Alokasi Anggaran Persasaran Strategis.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	28
3.2. Evaluasi Kinerja Tahun 2025	30
3.2.1 Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan.....	31
3.2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Kompetensi SDM PBJ.....	35
3.2.3 Sasaran Meningkatnyatingkat Kematangan UKPBJ.....	36
3.3. Realisasi Sasaran Strategis.....	36
3.4. Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

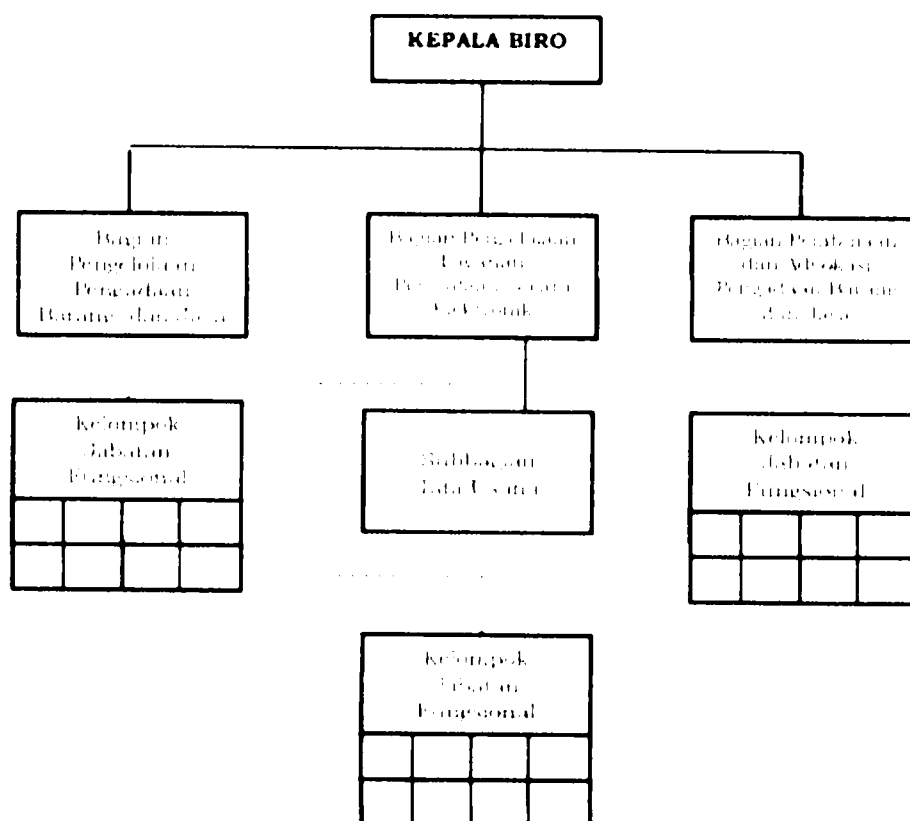
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.
2. Mendorong Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi terakhir diubah menjadi Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian – Bagian pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

A. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan tugas membantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,

pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi.
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

B. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas membantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa, dan tata usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, pengelolaan informasi.
2. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa, dan tata usaha;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa, dan tata usaha;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, pengelolaan Informasi pengadaan barang dan jasa, dan tata usaha; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Tata Usaha, merupakan subbagian dari bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/ aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;

- g. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. Melaksanakan pembinaan pegawai ASN; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

C. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan /atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;

- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, dan pendampingan, konsultasi, dan /atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya

1.3 ISU – ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis pada masing-masing bagian dapat dijelaskan, antara lain sebagai berikut:

2.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Secara umum isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang terjadi pada bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa meliputi permasalahan sebagai berikut:

- a. Jumlah Anggota Pokja relatif tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan;
- b. Perangkat Daerah terlambat mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SiRUP dan segera mengajukan Tender, seharusnya dilaksanakan setelah Rancangan Perda APBD disetujui oleh Pemda dan DPRD;
- c. Data informasi tentang pelaksanaan program kegiatan dari OPD sering terlambat dan berubah-ubah;
- d. Kurang aktifnya OPD melaksanakan pencatatan penyelesaian transaksi Pengadaan Barang dan Jasa pada aplikasi SPSE;
- e. Sarpras pendukung Tupoksi terbatas;
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berupa nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;

2.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sebagian umum isu strategis pada bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik terdapat permasalahan baik secara sistem, data dan manajemen kegiatan yang meliputi permasalahan sebagai berikut:

- a. Terbatasnya SDM Pengelola LPSE dan Aplikasi pendukung lainnya.
- b. Rendahnya tingkat kepedulian OPD dalam memahami dan melaksanakan informasi tugas-tugas selaku pengguna akun pada Aplikasi SPSE/LPSE.
- c. Sarana dan Prasarana pendukung Tusi Pengelolaan LPSE belum memadai.
- d. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung layanan informasi kepada pengguna/pelaku usaha.
- e. Terbatasnya hak akses teknis dalam menghadapi trouble shooting pada Aplikasi SPSE/Gangguan Layanan LPSE pasca Migrasi Database dan Aplikasi dari LKPP ke Telkom.
- f. Pelatihan dan Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan knowledge bagi Tim Pengelola LPSE masih belum memadai.

2.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Secara umum isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang terjadi pada bagian Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa meliputi permasalahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ
- b. Kurangnya Sarpras dalam Tingkat kematangan UKPBJ yang terdiri atas 4 domain yaitu Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi yang didetailkan lagi ke dalam 9 variabel (Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, Pengorganisasian, Tugas & Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM dan Sistem Informasi).
- c. Kurangnya Sarpras dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis dalam peningkatan kualitas SDM dan Pengembangan SDM.

1.4 KEADAAN PEGAWAI

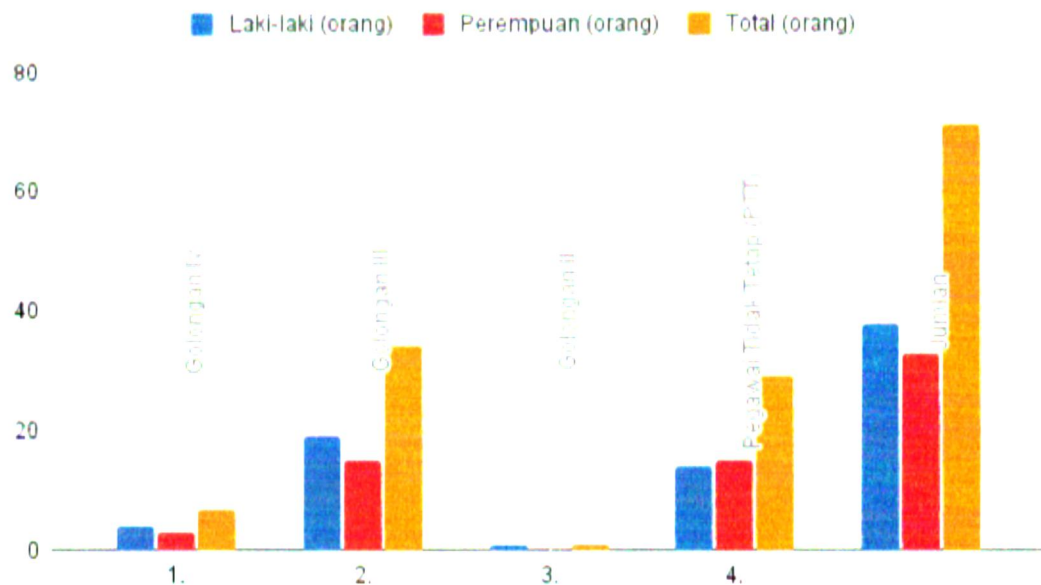
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi ditunjang oleh jumlah sumber daya aparatur Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi keadaan pada tanggal 01 Desember 2025 adalah sebanyak 68 Orang ASN sebanyak 45 orang, PPPK penuh waktu sebanyak 3 orang dan PPPK paruh waktu sebanyak Tenaga sebanyak 20 orang.

Tabel 1.4.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan (PNS /PTT)
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

No	Golongan ruang	Jumlah Menurut Kelamin		Total (orang)
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
1.	Golongan IV	5	3	8
2.	Golongan III	20	16	36
3.	Golongan II	1		1
4.	PPPK Penuh Waktu	2	1	3
5.	PPPK Paruh Waktu	9	11	20
	Jumlah	37	30	68

Dari tabel 1 diatas dapat diketahui Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai sumberdaya manusia sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang yang terdiri dari 37 (Tiga puluh tujuh) orang laki-laki dan 30 (Tiga puluh) orang perempuan. Pada tabel tersebut juga dapat di lihat kelompok jenis kelamin berdasarkan golongan ruang.

Gambar 1.4.2
Diagram Jumlah PNS Berdasarkan Golongan



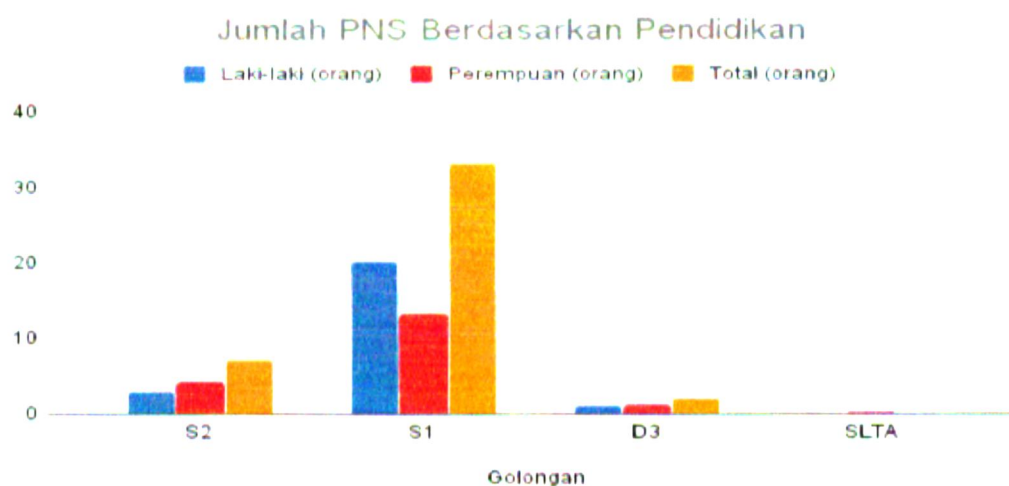
Gambar 2 memberikan informasi bahwa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dengan jumlah karyawan / karyawan 68 orang yang terdiri ASN sebanyak 45 orang, PPPK Penuh Waktu 3 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 20 orang.

Tabel 1.4.3
Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

No	Golongan	Jumlah Menurut Kelamin		Total (orang)
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
1.	S2	4	4	8
2.	S1	22	32	54
3.	D3	1	1	2
4.	SLTA	3	1	4
	Jumlah	30	38	68

Tabel 2 menyajikan laporan komposisi pegawai berdasarkan golongan ruang yang terdiri dari pegawai yang berpendidikan diploma hingga pasca sarjana.

Gambar 1.4.4
Diagram Jumlah PNS Berdasarkan Golongan



Gambar 3 menyajikan laporan komposisi pegawai berdasarkan golongan ruang yang terdiri dari pegawai yang berpendidikan diploma hingga pasca sarjana yang merupakan penjelasan dari tabel sebelumnya.

Gambar 1.4.5
Diagram Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan



Pada gambar 4, menjelaskan diagram dengan jumlah ASN, PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu 68 orang yang terdiri S2 sebanyak 8 orang dengan jumlah laki – laki 4 orang dan perempuan 4 orang, untuk jenjang pendidikan S1 dengan jumlah 54 laki-laki 22 orang dan perempuan 32 orang, untuk jenjang pendidikan Diploma (DIII) dengan jumlah 3 orang, untuk laki-laki 1 orang dan perempuan 2 orang untuk pendidikan setingkat SMA sebanyak 4 orang.

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan computer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sejauh ini dirasa masih sangat minim untuk menunjang optimalisasi capaian kinerja.

Saat ini asset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5

Sarana Prasarana di Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Komputer Pribadi (PC)	59	Kurang Baik
2	Notebook/Laptop	75	Kurang Baik
3	Printer	97	Kurang Baik
4	Pendingin Ruangan	84	Baik
5	Mesin Fotocopy	3	Baik

Sarana dan Prasarana yang dimiliki walaupun masih terbatas dan diantaranya masih produk tahun lama yang speknya belum sepenuhnya mendukung operasional aplikasi-aplikasi terbaru, tapi secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Biro

Pengadaan dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2025 berasal dari APBD Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2025 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.482.513.381,- (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan tahun 2025
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran
A	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.786.994.811
I	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	555.935.503
1.	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	101.103.300
2.	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	348.576.103
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	106.256.100
II	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	798.944.010
1.	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	597.260.955
2.	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	99.952.925
3.	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	101.730.139
III	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	432.115.298
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia	84.440.741
2.	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	135.020.022
3.	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	212.654.535
B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	695.518.570
	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	695.518.570
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.299.502
2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	380.219.068
	Jumlah	2.482.513.381

Tabel 1.6
Alokasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2025. Penyusunan LKj dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan Tujuan/ Sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk Program/ Kegiatan, dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi Sasaran/ Program/ Kegiatan dengan Rencananya, yaitu Capaian Kinerja (Performance Result) tahun sebelumnya diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi atau OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja,

ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/ kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance gap) yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan / kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LKJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj-PD/ manfaat LKj-PD, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj-PD.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Lampiran berisi dokumen pendukung perencanaan dan pengukuran kinerja dan evidence lainnya yang berhubungan dengan laporan kinerja ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2025, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menyusun Review Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Sekretariat Daerah merupakan manifestasi komitmen organisasi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2021-2025).

RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan

oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu:

"Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT" Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Jambi Maju:

Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman:

Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman:

Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib:

Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah:

Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional:

Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) isi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Biro Pengadaan Barang dan Jasa selama 5 tahun anggaran adalah:

"Terwujudnya tata kelola pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berkualitas".

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dapat dijelaskan melalui tabel 5 dibawah ini:

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2022	2023	2024	2025
1.	Terwujudnya tata kelola pengadaan barang/jasa yang berkualitas	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan	90%	20 (Skor)	23 (Skor)	25 (Skor)
		Meningkatnya Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Skor Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	90%	12 (Skor)	14 (Skor)	16 (Skor)
		Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor Tingkat Kematangan UKPBJ	10%	10% (Skor)	38 (Skor)	40 (Skor)

Pada tabel 2.1.1 dijelaskan bahwa tujuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah “terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dengan tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan
2. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ
3. Meningkatnya tingkat kematangan UKPBJ

Sedangkan Penyajian Indikator Kinerja Utama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi terdapat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Sasaran Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan	a) K/L/Pemda sudah menerapkan > 50% (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) E-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian. b) K/L/Pemda sudah menerapkan < 50% (kurang dari lima puluh persen) E-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol). c) Menggunakan hasil data yang diolah dari Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia.
2.	Meningkatnya Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Skor Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	a) Database salinan SK Pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan/ditembuskan ke LKPP; dan b) Surat rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP.
3.	Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor Tingkat Kematangan UKPBJ	Menggunakan hasil data yang ditarik dari aplikasi SIMKU yang diakses melalui http://www.simku.jateng.go.id

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
- b. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
- c. Penataan Ketata laksanaan;
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- f. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
- g. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum;
- h. Optimalisasi evaluasi produk hukum daerah;
- i. Optimalisasi penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
- j. Optimalisasi penataan ketata laksanaan Perangkat Daerah;
- k. Optimalisasi sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Memerlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan Biro di tunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Tabel 2.1.2
Sasaran Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan
2.	Meningkatnya Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Skor Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ
3.	Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor Tingkat Kematangan UKPBJ

2.2 Perjanjian Kinerja 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	25
2.	Meningkatnya Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Skor Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Skor	16
3.	Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor	40
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	Nilai	76
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83
5.	Meningkatnya tata Kelola pengadaan barang atau jasa yang berkualitas	Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Skor	75

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Pada tahun 2025 ini program yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, terdiri dari 2 (dua) program yang tertuang dalam rencana anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Anggaran Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

Program dan Kegiatan tahun 2025 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Selda Provinsi Jambi		
No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran
A	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.785.883.811
I	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	554.826.503
1.	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	101.103.300
2.	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	348.576.103
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	105.147.100
II	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	798.944.010
1.	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	597.260.955
2.	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	99.952.925
3.	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	101.730.130
III	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	432.113.298
1.	Pembinaan Sumber Daya Manusia	84.438.741
2.	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	135.020.022
3.	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	212.654.535
B	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	695.518.470
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	695.518.470
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.956.592
2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	373.561.878
	Jumlah	2.481.402.281

2.3.1 Target Belanja Tahun Anggaran 2025

Menentukan target yang ingin dicapai, target ini merupakan turunan dari sasaran strategis yang terdapat dalam organisasi perangkat daerah. Pengukuran target sebaiknya tidak hanya terbatas pada pencapaian output, tetapi juga di evaluasi bagaimana pencapaian outcome-nya. Evaluasi capaian output biasanya dilakukan dalam tahun yang bersangkutan, sedangkan evaluasi outcome mungkin saja baru akan bisa dievaluasi di beberapa tahun yang akan datang. Evaluasi outcome inilah yang sering kita lupakan, akibatnya pelaksanaan program pemerintah mungkin semakin akuntabel, namun seberapa hasil dari program tersebut dalam jangka panjang tidak pernah di evaluasi.

Melaksanakan rencana sesuai jadwal, Hal ini adalah hal tersulit untuk dilakukan. Pada umumnya di instansi pemerintah akan mengalami keterlambatan penyerapan anggaran. Penyebabnya sangat kompleks, namun pada intinya adalah adanya perubahan rencana yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya. Perubahan rencana sebenarnya dimungkinkan, karena sistem anggaran berprinsip fleksibel. Namun tentunya jika perencanaannya baik perubahan itu tidak akan bersifat massive. Sehubungan hal tersebut target belanja yang terdapat pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah 100 % dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran, kerangka acuan kerja serta dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang tata cara belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.3.1
Target Belanja
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025

No.	Uraian	Target	Persentase
1.	Belanja Barang dan Jasa	2.481.402.281	100 %

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Startegis

Anggaran belanja Tahun 2025 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	Program/Kegiatan	PAGU	REALISASI	EFISIENSI
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	554.826.503	540.992.747	14.942.756 (2,69)
		Pengelolaan Layanan Pengangadaan Secara Elektronik	798.944.010	717.941.737	81.002.273 (10,14)
2.	Meningkatnya Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	432.113.298	384.248.428	47.866.879 (11,08)
3.	Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ				

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diusulkan anggaran pendukung pelaksanaan kegiatan, dari usulan yang diajukan oleh biro pengadaan barang dan jasa, diperoleh alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti yang tercantum pada tabel di atas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja (Indek Tata Kelola Pengadaan/ITKP)

No	Skor	Predikat
1.	100	Istimewa
2.	>90 s.d <100	Sangat Baik
3.	>70 s.d 90	Baik
4.	≥ 50 s.d 70	Cukup
5.	< 50	Kurang

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan	25 (skor)	19,00 (skor)	76 (%)
2.	Meningkatnya Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Skor Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	16 (skor)	16,10 (skor)	100 (%)
3.	Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor Tingkat Kematangan UKPBJ	40 (skor)	40,00 (skor)	100 (%)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	76 (Nilai)	70,05 (Nilai)	90 (%)
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (Nilai)	97 (Nilai)	117 (%)
5	Meningkatnya tata Kelola pengadaan barang atau jasa yang berkualitas	Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	75 (skor)	65,82 (skor)	88 (%)

Dari tabel dapat di jelaskan bahwa pada:

1. Sasaran 1 (satu) meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan target skor kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 25 (dua puluh lima) dengan realisasi skor pada angka 19,00 (Sembilan belas) dengan capaian kinerja 76 % (tujuh puluh enam persen). Target skor tidak tercapai karena kurang optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing OPD lingkup pemerintah provinsi jambi, dimana pada setiap proses pengadaan barang dan jasa PPK harus menyelesaikan pencatatan pada SPSE dan hal ini tidak mereka lakukan. Menindaklanjuti hal dan kondisi ini, Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan desk untuk setiap PPK per-OPD dan mengingatkan PPK melalui surat dan kegiatan sosialisasi.
2. Sasaran 2 (dua) Meningkatnya Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ, pada tahun 2025 target kinerja skor pada angka 16 (enam belas) namun terealisasi pada skor angka 16,10 (enam belas koma sepuluh) dengan capaian kinerja 100% (delapan puluh tiga persen), hal ini terjadi karena pemenuhan jumlah formasi kebutuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa pada biro pengadaan barang dan jasa belum terpenuhi secara penuh, upaya-

upaya untuk pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional telah dilakukan melalui perpindahan jabatan dan perekrutan pegawai baru melalui PPPK dan ASN lainnya yang memenuhi syarat, pada tahun 2025 ini kebutuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan sudah pada angka di atas 50% (lima puluh persen) hal ini tentu dapat meningkatkan realisasi dari target pada kinerja pada tahun berikutnya.

3. Sasaran 3 (tiga), yaitu Meningkatkan Tingkat Kematangan UKPBJ target skor pada angka 40 (empat puluh) dan terealisasi pada skor angka 40 (empat puluh) dengan capaian kinerja 100 % (seratus persen), hal ini terealisasi dengan meningkatnya level kematangan UKPBJ dari level esensi ke level proaktif. Pada saat target kinerja di angka skor 40, level kematangan UKPBJ pada level esensi, dan pada saat pengukuran kinerja dilakukan terdapat peningkatan yang signifikan yaitu naiknya level kematangan UKPBJ ke level proaktif.
4. Sasaran 4 (empat) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja target pada nilai Sakip dan IKM, untuk target Sakip yaitu BB atau dengan nilai 76 (tujuh puluh enam) dan terealisasi masih dalam kategori BB dengan Nilai 70,05 (tujuh puluh komah nol lima) atau dengan persentase 90 % (sembilan puluh persen) sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mentargetkan nilai 83 (delapan puluh tiga) dan terealisasi 97 (Sembilan puluh tujuh) nilai telah melebihi target dengan persentase yaitu 117 % (seratus tujuh belas persen).
5. Sasaran 5 (lima) yaitu Meningkatkan tata Kelola pengadaan barang atau jasa yang berkualitas dengan target (skor) 75 (tujuh puluh lima) dan terealisasi (skor) 65,82 (enam puluh lima koma delapan puluh dua) atau dengan persentase 88 % (delapan puluh delapan persen)

3.2 Evaluasi Kinerja Tahun 2025

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang di jelaskan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis di uraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Kualitas Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa diukur menggunakan indikator Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan. Indikator ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Pengadaan Barang dan Jasa sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan formulasi Indikator Kinerja Utama Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Indikator ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi paket pengadaan dengan jumlah seluruh paket pengadaan di tahun 2025. Dapat disimpulkan bahwa realisasi sesuai target (100%) atau termasuk kategori capaian sangat memuaskan. Sebagai pembanding dengan target jangka menengah tahun 2025.

Indikator Kinerja: Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Pengukuran Realisasi Kinerja atas Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dihitung dengan Formula: Terdiri dari gabungan antara

- SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
 - a. K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai $RUP \geq 50\%$ (lebih dari sama dengan lima puluh persen) s.d 100% (seratus persen), diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP.
 - b. K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai $RUP < 50\%$ (kurang dari lima puluh persen), diberi nilai 0 (nol).
- E- Tendering
 - a. K/L/Pemda sudah menerapkan $> 50\%$ (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) E-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.
 - b. K/L/Pemda sudah menerapkan $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen) E-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).
- E-Purchasing melalui Katalog atau Toko Daring

- a. K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai $\geq$ 50% (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai sesuai persentase capaian.
 - b. K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $<$ 50% (kurang dari lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai 0 (nol).
- NonE-Tendering & NonE-Purchasing
 - a. K/L/Pemda sudah menerapkan $>$ 50% (lebih dari sama dengan lima puluh persen) Non E-Tendering dan Non-E-Purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.
 - b. K/L/Pemda sudah menerapkan $<$ 50% (kurang dari lima puluh persen) NonE-Tendering dan Non-E-Purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).
- E-Kontrak
 - a. K/L/Pemda sudah menerapkan $>$ 20% (lebih besar dari sama dengan dua puluh persen) E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai sesuai persentase capaian.
 - b. K/L/Pemda sudah menerapkan $<$ 20% (kurang dari dua puluh persen) E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikebijakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0 (nol).

Permasalahan atau Kendala yang ditemui dalam pencapaian Sasaran Pemanfaatan Sistem Pengadaan Biro pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 di antaranya:

- **SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)**
K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $\geq$ 50% (lebih dari sama dengan lima puluh persen) s.d 100% (seratus persen), diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP. Untuk informasi Rencana Umum Pengadaan sudah berjalan dengan baik dengan nilai yang cukup tinggi.
- **E- Tendering**
Pada sub indikator ini nilainya sudah maksimal, artinya tidak terdapat permasalahan dan kendala yang signifikan.
- **E-Purchasing melalui Katalog atau Toko Daring**
Pada sub indikator ini terdapat permasalahan karena tidak dapat memenuhi ketentuan untuk di nilai yaitu K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai 0 (nol), kondisi ini tentu mengurangi skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan.
- **NonE-Tendering & NonE-Purchasing**
Pada sub indikator ini terdapat permasalahan karena tidak dapat memenuhi ketentuan untuk dinilai karena K/L/Pemda sudah menerapkan $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen) NonE-Tendering dan Non-E-Purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol). Kondisi ini mengurangi nilai skor pemanfaatan sistem pengadaan. Kondisi eksisting bahwa NonE-Tendering & NonE-Purchasing sudah dilakukan secara sistem hanya saja pencatatannya yang belum diselesaikan oleh para stakeholdernya yaitu PPK kegiatan.
- **E-Kontrak**
Pada sub indikator ini terdapat permasalahan bahwa penguploatan e-kontrak oleh PPK belum sepenuhnya di lakukan oleh PPK untuk setiap kegiatan yang dilakukan sehingga nilai yang diperoleh pada subindikator ini

adalah sebesar 3,00 (tiga koma nol) karena K/L/Pemda yang sudah mengisi e-kotrak pada aplikasi SPSE adalah sebesar 60% (enam puluh persen).

Alternatif Solusi yang telah dilakukan:

Berdasarkan Permasalahan di Atas yang menyebabkan tidak tercapainya antara Target dan Realisasi, Maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Bidang Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Melakukan Peningkatan dan Mengoptimalkan Langkah" Seperti Melakukan Rapat dan Koordinasi Terkait Proses E-Purchasing kepada OPD serta Penyedia dan Pelaku Usaha, Hingga memberikan pendampingan Pengiputan SIRUP ke OPD dan pendampingan penyelesaian tugas PPK pada SPSE".

Tabel 3.2.2
Realisasi Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan	25 (skor)	19,10 (skor)	76

3.2.2 Sasaran Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

Dalam pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa digunakan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu:

Indikator Kinerja: Skor Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ

Pengukuran Realiasi Kinerja atas Skor Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dihitung dengan formula. Untuk tahun 2025 Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung persentase keterisian Personel Lainnya yang bersertifikat Kompetensi terhadap formasi Personel Lainnya yang dapat digambarkan sebagai berikut: Jumlah Personel Lainnya yang Bersertifikat Kompetensi Formasi Personel Lainnya X 100% Selanjutnya, angka persentase keterisian Personel Lainnya yang bersertifikat Kompetensi disebut sebagai keterisian

Persnel Lainnya yang bersertifikat Kompetensi. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dihitung dengan cara:

Keterisian Persen Lainnya yang Bersertifikat Kompetensi dikali (x) dengan bobot.

Permasalahan atau Kendala yang ditemui dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi SDM Biro pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 di antaranya:

1. Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kapasitas pengelola pengadaan barang dan jasa baik pokja pemilihan maupun pengelola SPSE
2. Belum terpenuhinya jumlah formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan sesuai dengan formasi yang sudah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan:

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi terus membuka kesempatan untuk semua pegawai /ASN untuk menjadi JF PPBJ karena kurangnya Formasi JF PPBJ.

Syarat untuk menjadi JF PPBJ ialah Pegawai/ASN yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Sertifikasi Dasar/Level-1.

Tabel 3.2.1
Realisasi Skor Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Skor Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	16 (skor)	16,10 (skor)	100

3.2.3 Sasaran Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ

Dalam pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ digunakan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu:

Indikator Kinerja: Skor Tingkat Kematangan UKPBJ

Pengukuran Realiasi Kinerja atas Skor Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dengan formula:

Bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diwajibkan dalam pembentukan UKPBJ, Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 variabel) dikalikan dengan bobot indikator. Ilustrasi: Jika UKPBJ Provinsi Jambi A telah memenuhi 4 variabel di level Proaktif dari 9 variabel keseluruhan, maka pada tahun 2025 Nilai Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ Provinsi Jambi A = $(4: 9) \times 100 = 44,44$

Permasalahan atau Kendala yang ditemui dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Tingkat Kematangan Biro pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 di antaranya:

Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4(empat) domain yaitu: Kelembagaan, SDM, Proses dan Sistem Informasi. Setiap domain tersebut memiliki variabel masing-masing yaitu:

1. Domain Kelembagaan dengan variabel Pengorganisasian dan variabel Tugas dan Fungsi,
2. Domain SDM dengan variabel Perencanaan SDM dan variabel Pengembangan SDM,
3. Domain Proses dengan variabel Manajemen Pengadaan, variabel Manajemen Penyedia, variabel Manajemen Kinerja dan variabel Manajemen Risiko, dan
4. Domain Sistem Informasi dengan variabel Sistem Informasi.

Pada indikator kinerja untuk skor kematangan UKPBJ tidak terdapat kendala atau permasalahan, hal ini tercermin dari nilai skor kematangan UKPBJ yang berada pada angka maksimal yaitu 40.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan:

Pada indikator kinerja untuk skor kematangan UKPBJ tidak terdapat kendala atau permasalahan, hal ini tercermin dari nilai skor kematangan UKPBJ yang berada pada angka maksimal yaitu 32 artinya setiap evidence kematangan UKPBJ sudah terpenuhi dan sudah diverifikasi oleh LKPP.

Tabel 3.2.2
Realisasi Skor Tingkat kematangan UKPBJ
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor Tingkat Kematangan UKPBJ	40 (skor)	40,00 (skor)	100

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Biro Pengadaan Barang dan Jasa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.481.402.281,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ribu Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) Dengan Realisasi Penyerapan sebesar Rp. 2.328.965.099,- (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau 93,81 % dari total anggaran yang dialokasikan, sehingga adanya penghematan anggaran sebesar: Rp.153.548.282 adapun rincian realisasi belanja sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			
		Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa (Selisih)	%
1	4	8	9	10	11
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	695.518.470	685.782.187	9.736.283	98,60
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.299.502	313.548.667	1.750.835	99,44
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	380.219.068	372.233.520	7.985.548	97,90
B	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
I	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	555.935.503	540.992.747	14.942.756	97.31
1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	101.103.300	93.160.154	7.943.146	92.14
2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	348.576.103	343.023.633	5.552.470	98.41
3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	105.147.100	104.808.960	1.447.140	98.64
II	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	798.944.010	717.941.737	81.002.273	89.86
1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	597.260.955	546.660.951	50.600.004	91.53
2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	99.952.925	75.589.448	24.363.477	75.63
3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	101.730.130	95.691.338	6.038.792	94.06
III	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	432.115.298	384.248.428	47.866.879	88.92
1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	84.440.741	81.724.862	2.715.879	96.78
2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	135.020.022	104.383.483	30636.539	77.31
3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	212.654.535	198.140.083	14.514.452	93.17
TOTAL		2.481.402.281	2.328.965.099	153.548.282	93.81

3.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pendukung kinerja

Sasaran Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.4
*Realisasi atas efektifitas penggunaan sumber daya pendukung kinerja
Biro PBJ Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025*

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Kegiatan	Pagu Anggaran	Serapan Anggaran	Ket (efisiensi)%
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan	20,50	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	555.935.503	540.992.747	14.942.756 (2,69)
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	798.944.010	717.941.737	81.002.273 (10,14)
Meningkatnya Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Skor Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	13,22	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	432.115.298	384.248.428	47.866.879 (11,08)
Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor Tingkat Kematangan UKPBJ	32,04	Banrang dan Jasa			
Rata-rata Efisiensi						1,26

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik dan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa sedangkan untuk sasaran strategis 2 (dua) dan 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa dan Meningkatnya Tingkat Kematangan UKPBJ mendapat alokasi anggaran pada kegiatan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun ke dua dari Rencana Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dari laporan kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025, dapat disimpulkan indikator sasaran strategis yang ditetapkan ada yang belum tercapai dan telah tercapai. capaian target yang tercapai telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode perencanaan jangka menengah.

Dengan capaian tersebut maka diperlukan langkah tindak lanjut berupa penentuan target baru yang mencerminkan kinerja yang lebih tinggi dan perbaikan untuk target yang belum tercapai. Penentuan target tersebut dilakukan melalui mekanisme review rencana strategis perangkat daerah.

Jambi, 22 Desember 2025
Kepala Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Provinsi
Jambi



M. ALI ZAINI, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP.19730729 200012 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

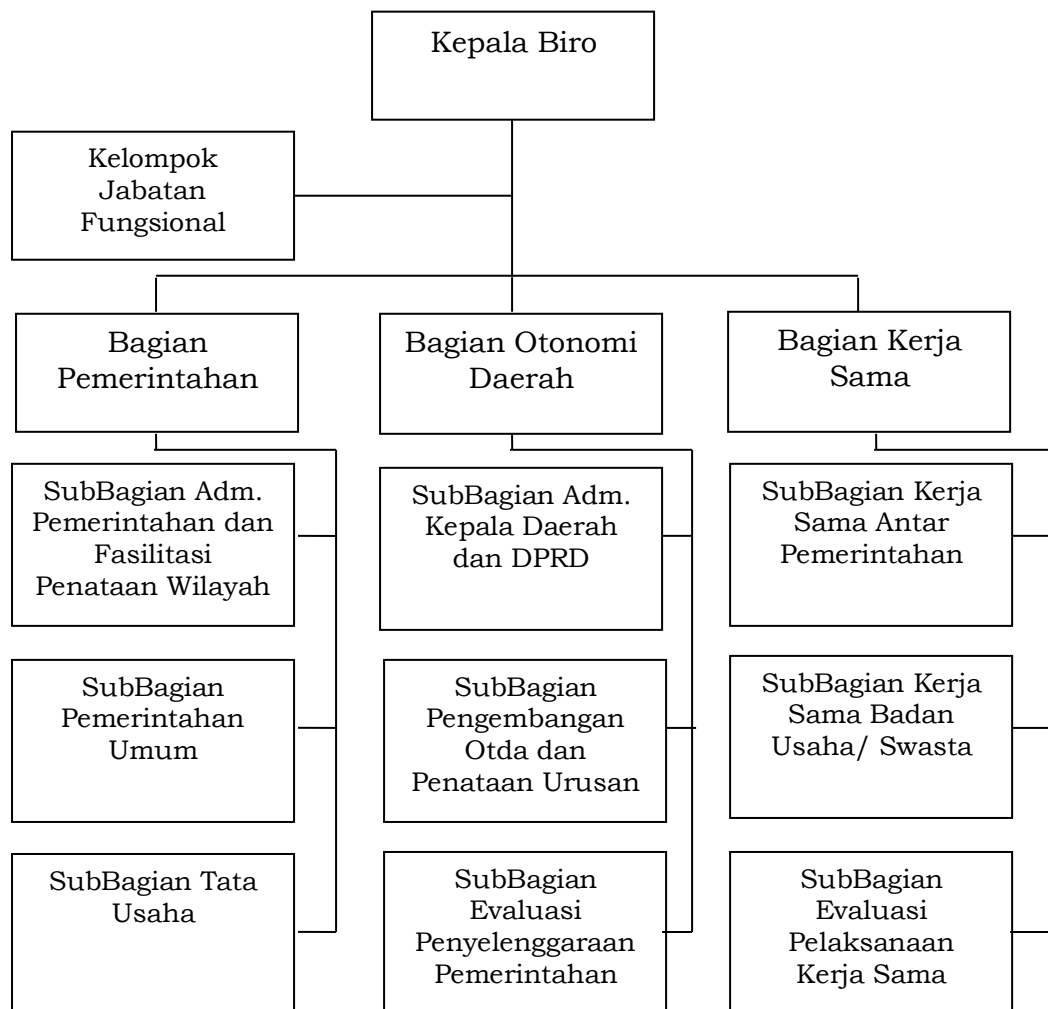
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Mendorong Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di dalam pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jambi nomor 32 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.



1.2 Fungsi dan Tugas

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi Daerah dan kerja sama; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian-Bagian pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

a. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas membantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan

fasilitas penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitas penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitas penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitas penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan fasilitas penataan wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

1. Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah, mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota;
- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintah;

- Menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervii, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi;
- Menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi kecamatan yang dilaksanakan Kabupaten/Kota;
- Menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Menyiapkan bahan penyelesaian aset bekas milik asing/Cina;
- Menyiapkan bahan analisis data tentang pelaksanaan tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan;
- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pemerintah mengenai tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam forum pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
- Melaksanakan pengembangan dan mengkaji rumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan;
- Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang administrasi pertanahan;
- Melaksanakan perencanaan penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis administrasi pertanahan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tujuannya.

2. Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi;

- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kawasan khusus bencana, kebakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- Melaksanakan pengkajian bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LkjIP, LKPJ dan LPPD lingkup biro;
- Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- Melaksanakan pembinaan pegawai ASN; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Bagian Otonomi Daerah

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pengembangan otonomi Daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

1. Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Menyiapkan bahan analisis dan administrasi, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitas administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan otonomi Daerah;
- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan otonomi Daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisis pemetaan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan otonomi Daerah dan Kabupaten/Kota; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Subbagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan, mempunyai tugas :
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi kinerja pemerintah Daerah dan peningkatan kfasitas Daerah;
 - Menyiapkan bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelengga raan Pemerintahan Daerah;
 - Menyiapkan bahan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
 - Menyiapkan bahan pengolahan database Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah skala Daerah;
 - Menyiapkan bahan penyusunan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Melakukan penetapan perencanaan pengembangan kapasitas Daerah;
 - Menyiapkan bahan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah;
 - Menyiapkan bahan implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Daerah;
 - Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembanga kapasitas Kabupaten/Kota;

- Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas Daerah dalam rangka peningkatan daya saing;
- Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPPJ);
- Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan perumusan kebijakan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bagian Kerja Sama

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas membantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Kerja sama mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama ;

- penyiapan bahan pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta, evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
1. Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah, mempunyai tugas:
- mempersiapkan, mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerja sama antar Daerah;
 - menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kerja sama antar Daerah;
 - memfasilitasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan untuk forum-forum kerja sama antar Daerah;
 - melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama antar daerah;
 - melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - memfasilitasi penyusunan draf kerja sama Luar Negri;
 - mempersiapkan data potensi Daerah dalam rangka kerja sama Luar Negri skala Provinsi;
 - menerima, menyusun, mengolah data dan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kerja sama Luar Negri;
 - melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama Luar Negri;

- mengelola administrasi izin ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Negeri;
- mengkaji laporan perjalanan dinas Luar Negeri yang berpotensi untuk dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi;
- menyiapkan bahan dan menyusun konsep rekomendasi izin ke Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alasan penting;
- menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi izin ke Luar Negeri bagi anggota/pimpinan DPRD dengan alasan penting; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Subbagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta, mempunyai tugas:

- mempersiapkan dan mengoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerja sama Badan Usaha/Swasta/pihak ketiga;
- memfasilitasi kerja sama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha;
- melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama Badan Usaha/Swaata/pihak ketiga; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, mempunyai tugas:

- menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta;
- melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/swasta; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi, yang diukur dengan indikator berupa nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi, yang diukur dengan indikator yaitu, Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Meningkatnya kerjasama lintas sektorat dengan Provinsi Jambi berupa Jumlah kerjasama yang difasilitasi baik antar pemerintah maupun kerjasama dengan badan usaha/ swasta.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berupa nilai IKM Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

1.4 Keadaan Pegawai

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ditunjang oleh 37 orang yang terdiri dari :

1. Pejabat Struktural : 13 Orang

- | | | | |
|-----------------------|---|----|-------|
| 2. Pejabat Fungsional | : | - | Orang |
| 3. Pelaksana | : | 11 | Orang |
| 4. Pegawai PTT | : | 12 | Orang |

Dalam hal kesetaraan gender peran pegawai perempuan dan laki-laki di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi tidaklah dibeda-bedakan. Namun demikian dari segi jumlah pegawai laki-laki masih relatif lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan. Dengan perimbangan laki-laki sebanyak 20 (dua puluh tiga) orang (63%) dan perempuan sebanyak 12 (tiga belas) orang (37%).

Adapun perincian Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

- | | | | |
|-----------------------|---|----|-------|
| 1. Strata 3 (S.3) | : | - | Orang |
| 2. Strata 2 (S.2) | : | 14 | Orang |
| 3. Strata 1 (S.1) | : | 13 | Orang |
| 4. Sarjana Muda (D.3) | : | 1 | Orang |
| 5. SLTA | : | 4 | Orang |
| 6. SLTP | : | - | Orang |

Berdasarkan golongan sebagaimana dibawah ini:

- | | | | |
|-----------------|---|----|-------|
| 1. Golongan IV | : | 8 | Orang |
| 2. Golongan III | : | 13 | Orang |
| 3. Golongan II | : | 1 | Orang |
| 4. P3K PW | : | 9 | Orang |
| 5. PTT | : | 2 | Orang |

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Table 1.1
Sarana dan prasarana

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			JUMLAH		
No. Urut	Kode Barang	Regi ster	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Barang	Harga Satuan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Komputer PC	LG	2010	1	10.725.000	10.725.000
2			Komputer	Futura	2005	1	2.300.000	2.300.000
3			Komputer	Samsung	2006	1	3.800.000	3.800.000
4			Komputer	LG	2006	1	2.100.000	2.100.000
5			Komputer	Samsung	2007	1	9.425.000	9.425.000
6			Komputer	Panasonic	2007	1	9.425.000	9.425.000
7			Komputer	LG	2011	1	9.497.000	9.497.000
8			Komputer	HP	2013	1	8.750.000	8.750.000
9			Laptop	Toshiba	2005	1	15.000.000	15.000.000
10			Laptop	Toshiba	2007	1	1.800.000	1.800.000
11			Laptop	Toshiba	2007	1	15.700.000	15.700.000
12			Laptop	Toshiba	2009	1	16.850.000	16.850.000
13			Laptop	Toshiba	2009	1	10.850.000	10.850.000
14			Laptop	Toshiba	2010	2	11.350.000	22.700.000
15			Note Book	Sony	2012	1	9.850.000	9.850.000
16			Laptop	Toshiba	2012	1	9.000.000	9.000.000
17			Laptop	Toshiba	2013	1	8.970.000	8.970.000
18			Komputer	LG	2003	6	5.278.000	31.668.000
19			Komputer	Lenovo	2012	5	9.850.000	49.250.000
20			Komputer PC	Asus	2018	2	8.975.000	17.950.000
21			Komputer	HP	2019	4	12.000.000	48.000.000,00
22			Notebook	HP	2019	3	12.000.000	36.000.000
23			Komputer	HP	2019	1	14.960.000	14.960.000
24			Note Book	Toshiba	2012	1	19.750.000	19.750.000
25	02.09.0		Laptop	Dell	2020	1		

	1.47.47			latitude			12.039.910	12.039.910
26	02.06.0 2.06.03		Komputer	Dell aio optiOlex 5270	2020	1	13.150.000	13.150.000
27	02.06.0 2.06.03		Komputer	Dell aio optiOlex 5270	2020	1	13.150.000	13.150.000
28	02.06.0 2.06.03		Komputer	Acer	2020	1	12.650.000	12.650.000
29	02.06.0 2.06.03		Komputer All In One	Lenovo	2020	1	25.202.000	25.202.000

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada tahun 2025 berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi. Pada tahun anggaran 2025 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.052.241.558 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung APBD Tahun 2025 digunakan untuk membiayai 2 program yang terdiri dari 4 kegiatan dan 12 subkegiatan.

1.7 Sistematika LKj IP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif

untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap

mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2025, Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah menyusun Review Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Sekretariat Daerah merupakan manifestasi komitmen organisasi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

**“Terwujudnya Jambi Maju,
Aman, Nyaman, Tertib,
Amanah dan Profesional
dibawah Ridho Allah SWT”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman

- Jambi Aman** : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1 **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan,** yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
- 2 **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah,** yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
- 3 **Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia,** yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama 5 tahun anggaran adalah : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Awal	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jambi	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,900	Skor/ nilai	2,849	>2,500	>2,600	>2,700	>2,800	>2,900	>2,900

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
2. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Penataan Ketata laksanaan;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
7. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum;
8. Optimalisasi evaluasi produk hukum daerah;
9. Optimalisasi penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
10. Optimalisasi penataan ketata laksanaan Perangkat Daerah;
11. Optimalisasi sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Memerlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas

SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan Biro di tunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jambi meningkat.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
		Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Fasilitasi Kerjasama

2.2 Perjanjian Kinerja 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya kualitas pelayanan public dan Akuntabilitas kinerja	IKM	80 indeks
	Nilai SAKIP	72 Nilai
2. Meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi	Capaian SPM Provinsi Jambi	100 %
3. Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan daerah di Provinsi Jambi	Jumlah Kerja sama yang difasilitasi	9 kali
	Nilai LPPD	2, 900
	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota	88 %

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025 ini program yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari 2 (dua) program yang tertuang dalam rencana anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kerja Anggaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		145.599.199
Kegiatan Administrasi Umum PD		145.599.199
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.388.415
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.690.329
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	53.520.455

	SKPD	
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah		906.642.359
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		304.635.004
1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	172.803.916
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	59.714.000
3	Fasilitasi Penataan Wilayah	72.116.088
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		415.336.651
1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	78.269.960
2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	53.779.776
3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	283.286.915
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		186.670.704
1	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	53.805.894
2	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	52.677.848
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	80.186.962
Jumlah		1.052.241.558

2.3.1 Target Belanja Tahun Anggaran 2025

Menentukan target yang ingin dicapai, target ini biasanya turunan dari sasaran strategis yang terdapat dalam organisasi perangkat daerah. Pengukuran target sebaiknya tidak hanya terbatas pada pencapaian output, tetapi juga dievaluasi bagaimana pencapaian outcome-nya. Evaluasi capaian output biasanya dilakukan dalam tahun yang bersangkutan, sedangkan evaluasi outcome mungkin saja baru akan bisa dievaluasi di beberapa tahun yang akan datang. Evaluasi outcome inilah yang sering kita lupakan, akibatnya pelaksanaan program pemerintah mungkin semakin akuntabel, namun seberapa hasil dan manfaat dari program tersebut dalam jangka panjang tidak pernah di evaluasi.

Melaksanakan rencana sesuai jadwal. Hal ini adalah hal tersulit untuk dilakukan. Pada umumnya di instansi pemerintah akan mengalami keterlambatan penyerapan anggaran. Penyebabnya sangat kompleks, namun pada intinya adalah adanya perubahan rencana yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya. Perubahan rencana sebenarnya dimungkinkan,

karena sistem anggaran berprinsip fleksibel. Namun tentunya jika perencanaannya baik perubahan itu tidak akan bersifat massive.

Sehubungan hal tersebut target belanja yang terdapat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah 100 % dengan berpedoman pada rencana kerja anggaran, kerangka acuan kerja serta dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang tata cara belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.5
Target Belanja

Uraian	Target	Persentase
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.052.241.558	100 %

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Startegis

Anggaran belanja Tahun 2025 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Per Sasaran Startegis Tahun 2025

Sasaran Strategis	Kegiatan/ SubKegiatan	Pagu Anggaran
1. Tersusunnya LKPJ Provinsi Jambi	Pelaksanaan Otonomi Daerah/ Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	283.286.915
2. Menurunnya sengketa batas wilayah administrasi	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan/ Fasilitasi Penataan Wilayah	72.117.088
3. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dengan Provinsi Jambi	Fasilitasi Kerjasama Daerah	186.670.704
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.599.199
5. Akuntabilitas kinerja		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan public dan Akuntabilitas kinerja	IKM	80 indeks	91,25 A	111 %
	Nilai SAKIP	72 Nilai	BB	100%
2. Meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi	Capaian SPM Provinsi Jambi	100 %	91,16 %	91,16 %
3. Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan daerah di Provinsi Jambi	Jumlah Kerja sama yang difasilitasi	9 kali	9 kali	100%
	Nilai LPPD	2,900	2,978	102 %
	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/ Kota	88 %	88 %	100 %

3.2 Evaluasi Kinerja Tahun 2025

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya meningkatnya kualitas pelayanan publik digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : IKM, dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja : IKM

Pengukuran Realiasi Kinerja atas IKM diperoleh melalui Penyebaran kuesioner terhadap berapa responden dan diperoleh Skor IKM = 91,25 (A)

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Skor
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
Skor IKM	76,61 – 88,30(B)	91,25 (A)	111%

3.2.2 Sasarannya meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja : Persentase meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi

Pengukuran Realiasi Kinerja atas Persentase meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi dihitung dengan formula :

Persentase meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi = Persentase meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi yang sudah ditetapkan sebanyak 6 SPM dibagi dengan target yang ditetapkan tahun 2025 x 100%

Sehingga, diperoleh nilai realisasi :

Persentase meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi = $91,15 / 100 \times 100\% = 91,15 \%$

Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja meningkatnya
layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi	100 %	91, 15 %	91, 15 %

3.2.3 Sasaran meningkatnya kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

Indikator Kinerja jumlah kerjasama yang difasilitasi

Dalam pengukuran digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja : Jumlah Kerjasama yang di Fasilitasi Pengukuran Realiasi Kinerja atas jumlah kerjasama yang difasilitasi diperoleh melalui jumlah kerjasama yang telah difasilitasi selama tahun 2025 dan menggunakan Surat Perjanjian Kerjasama.

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Jumlah Kerjasama yang di Fasilitasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Kerjasama yang di Fasilitasi	9 Kali	9 kali	100%

Indikator Kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi

Dalam pengukuran sasaran strategis meningkatnya nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Provinsi Jambi digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi dengan rincian masing-masing indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja : Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi

Pengukuran Realiasi Kinerja atas Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi dihitung dengan formula :

Nilai LPPD Provinsi Jambi = Nilai yang didapatkan Provinsi Jambi dibagi target yang sudah ditetapkan ditahun 2025 x 100%

Sehingga, diperoleh nilai realisasi :

$$= 2,978/2,900 \times 100\% = 102\%$$

Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,900	2,978	102%

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Batas Antar Kabupaten/ Kota

Dalam pengukuran sasaran strategis menurunnya sengketa batas wilayah administrasi digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja : Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota

Pengukuran Realiasi Kinerja atas Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota dihitung dengan formula :

Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota
 = Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dibagi dengan target yang ditetapkan tahun 2025 x 100%

Sehingga, diperoleh nilai realisasi :

Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota
 = 15/ 15 X 100% = 100 %

Tabel 3.8
Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota	88%	88%	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu 2023 dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.9
Perbandingan antara realisasi kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Akuntabilitas	IKM	91, 25	100 %	98, 58 (A)	B
	Nilai SAKIP	BB	100%	BB	B

kinerja					
Meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi	Capaian SPM Provinsi Jambi	100 %	91,16 %	-	-
Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan daerah di Provinsi Jambi	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (>2,800 Th. 2024)	2,978	103 %	3.023	3.023
	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota	15 Permendagri	100 %	15 Permendagri	15 Permendagri
	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	9 kerjasama	100 %	27 kerjasama	30 kerjasama

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja IKM tahun 2025 **sama** dengan tahun sebelumnya.
- 2) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Capaian SPM Provinsi Jambi tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- 3) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi tahun 2025 **lebih rendah** dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 4) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota tahun 2025 **sama** dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 5) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Jumlah kerjasama yang difasilitasi tahun 2025 **lebih rendah** dari tahun sebelumnya.

ANALISIS ATAS CAPAIAN KINERJA

SASARAN I : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja atas Indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2025 menggunakan data survey kepuasan masyarakat yang melakukan kunjungan atau pelayanan urusan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama tahun 2025 dengan jumlah responden yang mengisi aplikasi indeks kepuasan masyarakat berjumlah 122 responden, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.10

Capaian Kinerja IKM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
IKM	76,61 – 88,30(B)	91,25 (A)	111%

2. Indikator Kinerja: Nilai SAKIP

Capaian kinerja atas Nilai SAKIP merupakan sebuah upaya untuk mengetahui tingkat implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan dalam mendorong peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, ada pun capaian indikator kinerja nilai SAKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Capaian Kinerja IKM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
IKM	70 – 80 (BB)	71, 40 (BB)	100%

SASARAN II : MENINGKATNYA LAYANAN PEMENUHAN SPM PROVINSI JAMBI

Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jambi

Capaian kinerja atas Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jambi sebagai berikut:

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sebesar 99, 53 %
2. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebesar 100 %
3. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sebesar 80,68 %
4. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat sebesar 100 %
5. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Transtibumlinmas sebesar 100 %
6. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebesar 73,43 %

Rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jambi dengan cara menghitung akumulasi semua capaian urusan dibagi dengan 6 urusan wajib pelayanan dasar dikalikan 100 persen sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian SPM Provinsi Jambi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
SPM Provinsi Jambi	100	91,16 %	91,16 %

SASARAN III : MENINGKATNYA KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF

1. Indikator kinerja Jumlah Kerja Sama yang di Fasilitas

Capaian kinerja Jumlah Kerja Sama yang di Fasilitas tahun 2025 sebagai berikut:

2. MoU antara Pemprov Jambi dan Unja tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
3. MoU antara Pemprov Jambi dan UGM tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
4. MoU antara Pemprov Jambi dan Unpad tentang Penyelenggaraan Tridharman Perguruan Tinggi
5. MoU antara Petrochina Internasional Jabung Ltd dan Pemprov Jambi tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah melalui Dana tanggung jawab sosial perusahaan
6. NK antara Pemprov Jambi dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dan Pencegahan Perkawinan Anak
7. NK antara Kejaksaan Tinggi Jambi dan Pemprov Jambi tentang Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana
8. PKS RSJD Kol. Inf. H. M. Syukur Jambi dan Fakultas Kedokteran Gigi UGM tentang Pengiriman Dokter Gigi

untuk menempuh pendidikan magister di magister ilmu kedokteran gigi fakultas kedokteran gigi UGM

9. PKS antar BPKPD Prov Jambi dan Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang Penerbitan kartu kredit pemerintah (KKPD)
10. PKS antara BPKPD Prov Jambi dan Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang Transaksi SP2D online dengan SIPD di Provinsi Jambi

Tabel 3.12
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Jumlah
Kerjasama yang di Fasilitas Tahun 2025
6.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Kerjasama yang di Fasilitas	9 Kali	9 kali	100%

2. Indikator Kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi

Capaian Kinerja atas Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi tahun 2025 menggunakan data hasil evaluasi LPPD yang dilakukan oleh Kemendagri atas LPPD Tahun 2023. Adapun capaian kinerja atas jumlah nilai LPPD tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)

Nilai LPPD Pemerintah Provinsi Jambi	2,900	2,978	102%
---	-------	-------	------

Meningkatnya nilai LPPD Provinsi Jambi dikarenakan peningkatan kinerja dimasing-masing organisasi perangkat daerah yang melebihi target indikator kinerja organisasi perangkat daerah dan adanya support dari para kepala perangkat daerah terkait dengan penyediaan data dukung serta data capaian indikator kinerja. Yang penting adanya keselarasan, kerjasama dan koordinasi yang baik antara Tim penyusun dan Tim reviu Aparat Pengendalian Intern Pemerintah sehingga realisasi nilai LPPD Provinsi Jambi melebihi target yang telah ditetapkan.

3. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja atas Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota dihitung dengan formula : membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dikalikan 100%.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase
Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025
(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota	88 % (lima belas Permendagri)	88 % (lima belas Permendagri)	100 %

1. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.15
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2022
1	2	3	4	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Akuntabilitas kinerja	IKM	91,25	100 %	98,58	B	B
	Nilai SAKIP	BB 72,40	100%	BB 72,40	BB	B
Meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi	Capaian SPM Provinsi Jambi	100 %	91, 16 %	-	-	-
Meningkatnya Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	9 kerjasama	100 %	27 kerjasama	12 kerjasama	30 kerjasama
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi (>2,700 Th. 2023)	2.978	102 %	3.023	3.023	2.849
	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota	15 Permendagri	100 %	15 Permendagri	15 Permendagri	15 Permendagri

ANALISIS ATAS KEBERHASILAN/ PENURUNAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Indikator Kinerja IKM

Realisasi atas Indikator Kinerja IKM telah mencapai dengan target yang diperjanjikan. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi selama tahun 2025 terhadap peningkatan IKM adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan dilaksanakan secara efisien dan jelas sesuai dengan SOP yang ada.
- 2) Menerapkan prinsip budaya kerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- 3) Memberikan pelayanan terbaik pada setiap masyarakat yang mempunyai urusan dengan Biro Pemerintahan dan Otda.

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan maka perlu perhatian penuh terhadap peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi layanan pada setiap unit pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Kegiatan seminar, magang, pendidikan dan pelatihan secara berkala harus terprogram secara baik oleh pihak manajemen sehingga setiap petugas punya maklumat yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Indikator Kinerja Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk masa yang akan datang, kami berharap ada peningkatan nilai yang lebih baik lagi tentu dengan komitmen yang kuat semua kepentingan sehingga dapat

bersinergi untuk pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi.

SASARAN MENINGKATNYA LAYANAN PEMENUHAN SPM PROVINSI JAMBI

Indikator Capaian SPM Provinsi

Kewajiban Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah keharusan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi jenis dan mutu pelayanan dasar bagi setiap warga negara secara minimal. Pemerintah daerah wajib menganggarkan, menerapkan, memantau, dan melaporkan pencapaian SPM (target 100%) sebagai prioritas dalam perencanaan anggaran. Capaian SPM Provinsi Jambi tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sebesar 99, 53 %.
2. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebesar 100 %
3. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sebesar 80,68 %.
Provinsi jambi tidak memiliki SPAM (sistem penyediaan air minum) dan SPALD (sistem pengelolaan air limbah domestik), karena masih dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
4. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat sebesar 100 %
5. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Transtibumlinmas sebesar 93, 33 %.

Pemenuhan standar prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP belum semuanya terpenuhi.

6. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebesar 73,43 %.

Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di panti belum sepenuhnya dapat dilayani dalam penyediaan alat bantu, pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ bukti keberadaan keluarga.

Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di dalam panti belum sepenuhnya dapat dilayani dalam bukti kepemilikan Nomor Induk Kependudukan, pemberian pelayanan penelusuran keluarga, dan pemulasaraan.

Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti belum sepenuhnya terpenuhi penyediaan permakanan, pemulangan ke daerah asal.

Perlindungan dan jaminan social pada saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi belum semua nya terpenuhi seperti penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan.

SASARAN MENINGKATNYA LAYANAN PEMENUHAN SPM PROVINSI JAMBI

1. Indikator Kerjasama yang di fasilitasi

Realisasi atas Indikator Kinerja Jumlah Kerjasama yang di Fasilitas telah mencapai dengan target yang diperjanjikan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi selama tahun 2025 terhadap peningkatan Jumlah Kerjasama yang di Fasilitas adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya dorongan dari Gubernur Jambi terkait pelaksanaan kerjasama antar pemerintah dan antar Badan Usaha/ Swasta sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 22 Tahun 2022.
- 2) Sebagai salah satu bentuk penjabaran dari visi misi Gubernur Jambi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat didasarkan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan public serta saling menguntungkan.
- 3) Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah Provinsi Jambi tentang pentingnya peningkatan kerjasama dengan Provinsi Jambi.

2. Indikator Kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi

Realisasi atas Indikator Kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi telah mencapai dengan target yang diperjanjikan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi selama tahun 2025 terhadap peningkatan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi tata cara pengisian data indicator kinerja kunci secara valid dan benar pada Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada satuan kerja perangkat daerah Provinsi Jambi.
- 2) Memberikan pemahaman pada pada perangkat daerah pentingnya bukti pendukung sebagai bahan kelengkapan data pada indicator kinerja kunci perangkat daerah.
- 3) Memperkuat peran kegiatan rapat riview data laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pada tiap perangkat daerah sebelum tim dari pemerintah pusat turun ke daerah.

3. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota

Realisasi atas Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota telah tercapai dengan target yang diperjanjikan. Adapun capaian kinerjanya sebagai berikut:

1. Permendagri Nomor 62 Tahun 2014 tentang batas Kab. Tebo dengan Kab. Tanjab. Barat
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2016 tentang batas Kab. Tebo dengan Kab. Tanjab. Barat
3. Permendagri Nomor 81 Tahun 2016 tentang batas Kab. Tebo dengan Kab. Merangin
4. Permendagri Nomor 82 Tahun 2016 tentang batas Kab. Bungo dengan Kab. Merangin
5. Permendagri Nomor 83 Tahun 2016 tentang batas Kab. Batanghari dengan Kab. Tanjab. Barat
6. Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 tentang batas Kab. Sarolangun dengan Kab. Tebo

7. Permendagri Nomor 85 Tahun 2016 tentang batas Kab. Sarolangun dengan Kab. Batanghari
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2016 tentang batas Kab. Bungo dengan Kab. Kerinci
9. Permendagri Nomor 88 Tahun 2017 tentang batas Kab. Muaro Jambi dengan Kota Jambi
10. Permendagri Nomor 25 Tahun 2019 tentang batas Kab. Kerinci dengan Kota Sungai Penuh
11. Permendagri Nomor 62 Tahun 2019 tentang batas Kab. Merangin dengan Kab. Sarolangun.
12. Permendagri Nomor 66 Tahun 2019 tentang batas Kab. Muaro Jambi dengan Kab. Tanjab. Barat
13. Permendagri Nomor 71 Tahun 2022 tentang batas Kab. Bungo dengan Kab. Tebo
14. Permendagri Nomor 65 Tahun 2022 tentang batas Kab. Batanghari dengan Kab. Tebo
15. Permendagri Nomor 22 Tahun 2022 tentang batas Kab. Muaro Jambi dengan Kab. Tanjab. Timur

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi melalui sudah melaksanakan berbagai langkah strategis terhadap 2 (dua) batas daerah yang belum selesai penataan batas wilayah yaitu:

- Fasilitasi rapat koordinasi dan mediasi antar pemerinatah kabupaten/ kota yang berbatasan
- Verifikasi dan klarifikasi dokumen batas wilayah
- Konsultasi dan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri.

Batas daerah tersebut adalah:

- Segmen batas Kab. Tanjab Barat dengan Kab. Tanjab. Timur, penyelesaian telah di fasilitasi oleh Tim

Penegasan Bada Daerah Provinsi Jambi dengan melakukan mediasi untuk mencapai mufakat penyelesaian batas wilayah tersebut yang hingga saat ini telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk penetapan Permendagri

- Segmen batas Kab. Muaro Jambi dengan Kab. Batanghari masih berproses dalam penetapan Permendagri dan menunggu jadwal fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pendukung kinerja.

Tabel 3.16
Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya pendukung kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Serapan Anggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan public dan Akuntabilitas kinerja	IKM	80 indeks	91,25 A	111 %	145.340.710 (99,82 %)
	Nilai SAKIP	72 Nilai	BB	100%	
Meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi	Capaian SPM Provinsi Jambi	100 %	91,16 %	91,16 %	58.887.000 (99, 11 %)
Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan daerah di Provinsi Jambi	Jumlah Kerja sama yang difasilitasi	9 kali	9 kali	100%	186.463.442 (100 %)
	Nilai LPPD	2, 900	2,978	102 %	281.090.465 (99,7 %)
	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/ Kota	88 %	88 %	100 %	72.116.560 (99,99 %)

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Atas Indikator IKM dan Nilai Sakip penggunaan sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
2. Atas Indikator Capaian SPM Provinsi penggunaan sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
3. Atas Indikator jumlah kerjasama yang difasilitasi penggunaan sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
4. Atas Indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi penggunaan sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.
5. Atas Indikator Persentase penyelesaian batas antar kabupaten/ kota penggunaan sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan rata-rata capaian kinerja yang diperoleh **lebih besar** dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.17
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Ket	Program
Meningkatnya kualitas pelayanan public dan Akuntabilitas kinerja	IKM	80 indeks	91,25 A	Tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prov
	Nilai SAKIP	72 Nilai	BB	Tercapai	
Meningkatnya layanan pemenuhan SPM Provinsi Jambi	Capaian SPM Provinsi Jambi	100 %	91,16 %	Tercapai	Program Pemerintahan dan Otda
Meningkatnya kemampuan penyelenggaraan daerah di Provinsi Jambi	Jumlah Kerja sama yang difasilitasi	9 kali	9 kali	Tercapai	Program Pemerintahan dan Otda
	Nilai LPPD	2, 900	2,978	Tercapai	Program Pemerintahan dan Otda
	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/K ota	88 %	88 %	Tercapai	Program Pemerintahan dan Otda

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan 2 (program) yaitu:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 2 (dua) target indikator kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, kedua indikator tersebut sudah tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama

Daerah serta mempunyai 4 (empat) indikator kinerja, Capaian SPM Provinsi Jambi, Jumlah Kerja sama yang difasilitasi, Nilai LPPD, Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota.

Keberhasilan dari semua indikator tersebut tidak terlepas dari arahan, komitmen kepala perangkat daerah khususnya pada bagian perencanaan, agar selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap program atau kegiatan selalu mempunyai output dan outcome yang harus bisa dipertanggung jawabkan, terukur dan sesuai dengan bukti pendukung.

4. Perbaikan- baikan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut

Rekomendasi evaluasi SAKIP internal yang dilakukan oleh APIP.

Rekomendasi yang diberikan oleh APIP pada laporan kinerja tahun 2024 merupakan perbaikan untuk penyempurnaan dalam laporan kinerja masa yang akan datang. Rekomendasi tersebut telah kami tindak lanjuti dan sudah disampaikan ke Inspektorat Provinsi Jambi, diantara rekomendasi tersebut membutuhkan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jambi terkait dengan perencanaan.

Dalam pelaksanaan evaluasi laporan kinerja tahun 2024 kami selalu berkoordinasi dalam pemenuhan laporan pendukung yang diminta atau memberikan penjelasan terhadap isian laporan kinerja dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk laporan kinerja tahun 2025 ini kami telah berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar meminimalisir rekomendasi ketika riviui terhadap laporan kinerja yang dilakukan oleh APIP.

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 99,35% dari total anggaran yang dialokasikan, adapun rinciannya sebagaimana dibawah ini:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Kegiatan

No	Program/ SubKegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d Desember			Sisa Anggaran (Rp)
			Penyerapan (Rp)	Keua ngan (%)	Fisik (%)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	145.599.199	145.340.710	99,82	100	258.489
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.599.199	145.340.710	99,82	100	258.489
1.	- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	58.388.415	58.388.415	100	100	0
2.	- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	33.690.329	33.671.295	99,94	100	19.034
3.	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.520.455	53.281.000	99,55	100	239.455
	PROGRAM PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH	906.642.359	898.305.137,00			
	Pelaksanaan Tugas Pemerintah	304.635.004	303.768.424	99,72	100	866.580
1	- Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintah	172.803.916	172.764.864	99,98	100	39.052

2	- Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	59.714.000	58.887.000	98,62	100	827.000
3	- Fasilitas Penataan Wilayah	72.117.088	72.116.560	100	100	528
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	415.336.651	410.106.566	98,74	100	5.230.085
5	Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	78.269.960	77.273.201	98,73	100	996.759
6	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	53.779.776	51.742.900	96,21	100	2.036.876
7	Evaluasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan	283.286.915	281.090.465	99,22	100	2.196.450
	Fasilitas Kerjasama Daerah	186.670.704	186.463.442	99,89	100	207.262
8	Fasilitas Kerjasama antar Pemerintahan	53.805.894	53.801.594	99,99	100	4.300
9	Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta	52.677.848	52.532.848	99,72	100	145.000
10	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	80.186.962	80.129.000	99,93	100	57.962
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0	0	0	0	0
	PROGRAM	0,00	0,00	0	0	0,00
1	Kegiatan	0,00	0,00	0	0	0,00
2	Kegiatan	0,00	0,00	0	0	0,00
3	Kegiatan	0,00	0,00	0	0	0,00
JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG		1.052.241.558	1.045.679.142	99,38	100	6.562.416

Pagu anggaran tahun 2025 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi sebesar Rp. 1.052.241.5558,-. Pagu tersebut sudah dipergunakan atau diperuntukan bagi kegiatan dan program yang menjadi prioritas di dalam pelaksanaan tahun 2025 sebagaimana pada table diatas.

Mengenai efisiensi dan efektifas terhadap penggunaan anggaran tahun 2025 sudah dilaksanakan secara maksimal. Jika dibandingkan dengan anggaran pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di tahun sebelumnya tahun ini merupakan pagu terkecil. Namum dalam dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja khususnya pada level kepala perangkat daerah dapat tercapai hingga tahun akhir anggaran serta dapat berjalan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun ke lima dari Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Dari laporan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025, dapat disimpulkan indikator sasaran strategis yang ditetapkan telah tercapai. Bahkan capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir periode perencanaan jangka menengah. Dengan capaian tersebut maka diperlukan langkah tindak lanjut berupa penentuan target baru yang mencerminkan kinerja yang lebih tinggi. Penentuan target tersebut dilakukan melalui mekanisme review rencana strategis perangkat daerah.



2025

LAPORAN KINERJA



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi tahun 2025, Laporan Kinerja (LKj) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKj Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Jambi, 20 Januari 2026

KEPALA BIRO KESRA,



Drs. AMRULSYAH

Pembina (IV/a)

NIP. 197001071991011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat terintegrasi dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikatornya Nilai SAKIP & Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi pada tahun 2024 memperoleh angka sebesar 66.50 dan IKM sebesar 85.22.
2. Sasaran Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan indikatornya Persentase Rekomendasi Kesra yang dilaksanakan. Capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi pada tahun 2025 memperoleh angka 100 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya sinergi setiap level manajemen untuk berkontribusi memecahkan masalah.
2. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan program pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang dapat mendorong pencapaian tujuan secara keseluruhan.
3. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
BAB 1	5
PENDAHULUAN	5
BAB II	16
PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Perencanaan Strategis	16
2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	16
2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	19
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
2.6 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	22
2.7 Target Belanja Tahun Anggaran 2025	24
2.8 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	25
BAB III	26
AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025	27
B. Realisasi Anggaran	35
BAB IV	45
PENUTUP	45

LAMPIRAN

Lampiran 1 Renstra Tahun 2021 - 2026

Lampiran 2 Renstra Tahun 2025 - 2029

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.
2. Mendorong Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

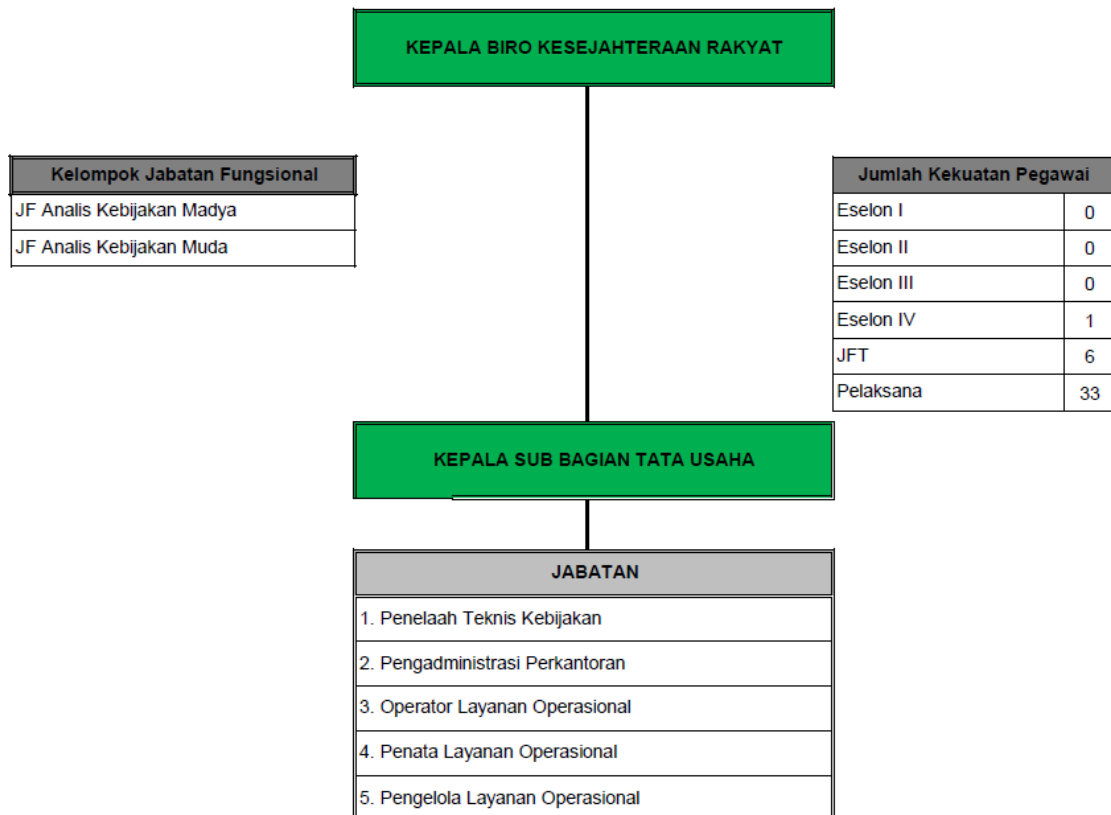
Struktur Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Kesejahteraan Rakyat dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Kesejahteraan Rakyat

PETA JABATAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAMBI



Pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 menggunakan struktur Perda Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Susunan Kesejahteraan Rakyat dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu Biro dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, yang bertugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b. penyiapan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- d. pelayanan administrasi bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
- h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Isu-isu Strategis

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi sebagai institusi harus mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan mengambil tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi terkait dengan fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan perumusan kebijakan bidang bina mental spiritual, kesra non pelayanan dasar dan kesra pelayanan dasar yang terdapat pada instansi teknis baik vertikal maupun perangkat daerah.

Keadaan Pegawai

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi didukung oleh 73 orang yang terdiri dari:

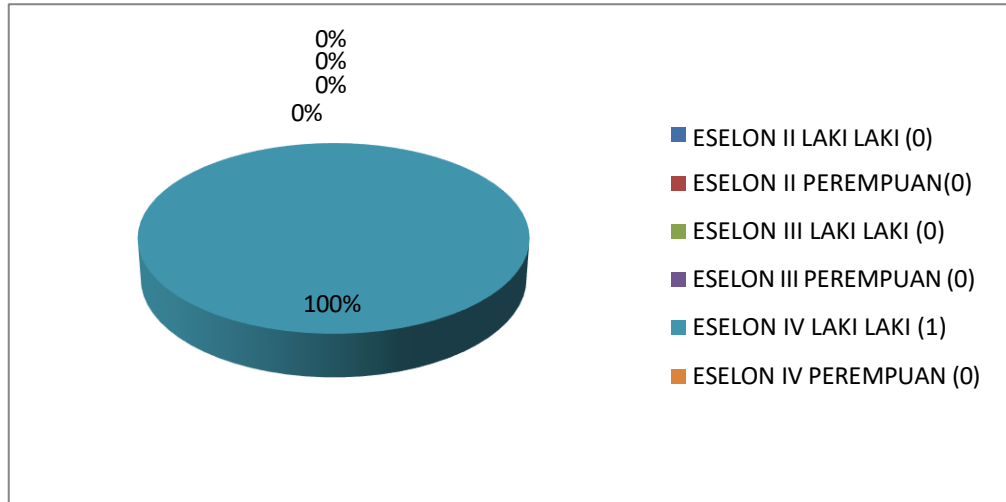
- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Pejabat Struktural | : 1 orang |
| 2. Pejabat Fungsional Tertentu | : 6 orang |
| 3. Pelaksana | : 30 orang |
| 4. Pegawai PTT | : 36 orang |

Dalam hal kesetaraan gender peran pegawai perempuan dan laki-laki di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi tidaklah dibedakan. Namun demikian dari segi jumlah pegawai ASN laki-laki masih relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai perempuan. Dengan perimbangan laki-laki sebanyak 18 (delapan belas) orang (47%) dan perempuan 20 (dua puluh) orang (53%).

Adapun perincian Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi kualifikasi tingkat Pendidikan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Strata 3 (S.3) | : - Orang |
| 2. Strata 2 (S.2) | : 7 Orang |
| 3. Strata 1 (S.1) | : 26 Orang |
| 4. Sarjana Muda (D.3) | : 0 Orang |
| 5. SLTA | : 5 Orang |
| 6. SLTP | : 0 Orang |

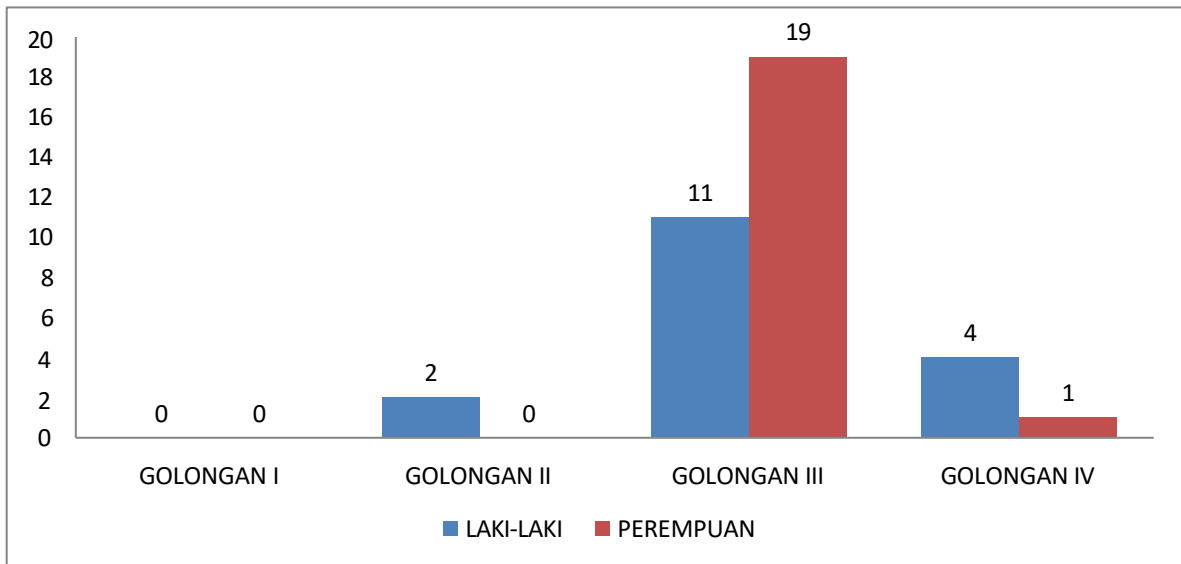
**Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat
Struktural dan Jenis Kelamin
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2025**



Berdasarkan golongan sebagaimana dibawah ini:

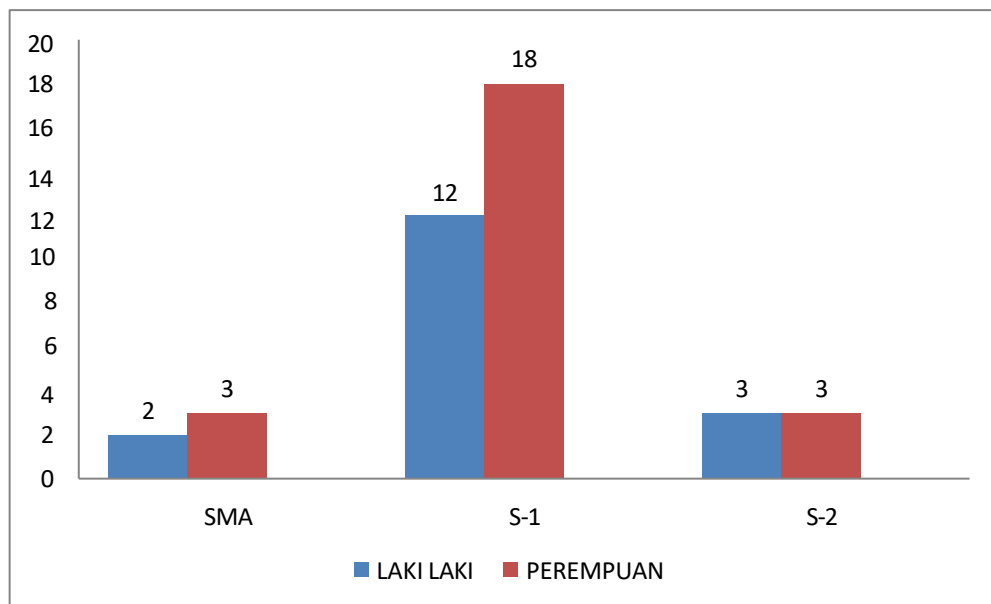
- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Golongan IV | : 5 Orang |
| 2. Golongan III | : 30 Orang |
| 3. Golongan II | : 2 Orang |
| 4. PTT | : 40 Orang |

Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2025



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum sudah cukup proporsional dan diharapkan dapat memberikan kinerja secara maksimal dengan komposisi yang sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

Gambar 1.4. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2025



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 dan Sarjana S2 terkait dengan jabatan fungsional tertentu dan Umum yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional Kesejahteraan Rakyat meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi sejauh ini dirasa belum memadai dan perlu dilengkapi dengan untuk menunjang kinerja sesuai dengan keberadaan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2025**

JENIS BARANG	TU	R. KAR O	TIM KNP D 1 & 2	TIM KNP D 3	TIM YAN DAS	STA F TIM YAN DAS	TIM SAM PRAS	R. KACA	R. BEND	Kelembagaan	total
Kursi Biro		2									2
Kursi sandaran sedang	5	4	6	5	8	4	4	1	1		38
Kursi chitose	1	8	5	2	1	4	7		2		30
Kursi lipat	1	10	2	1	1	5	4	1			25
Kursi kayu			2		1		2	2			7
Kursi putar						1	1	1			3
Kursi tamu		1									1
Kursi rapat		10									10
Meja biro	1	1									2

Meja 1/2 biro	1		1	1			1			1	5
Meja kerja	4	2	10	5	7		13	4	1	3	49
AC	1	3	1	2	4	2	2		1	2	18

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal yang secara pembiayaan berada pada Biro Umum.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi pada tahun 2024 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.312.343.123,- (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 78.312.343.123,- yang didukung oleh 2 program, 5 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut yang Ringkasan Eksekutifnya memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;

2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj/manfaat LKj, Struktur Kesejahteraan Rakyat, Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Jambi serta Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran Kesejahteraan Rakyat yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2025, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen yang terintegrasi dalam Renstra Setda Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Salah satu hal penting terkait periodisasi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi kali ini merupakan penutup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi 2005-2025, disamping RPJMN, RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi.

Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan meningkatnya penegakan menurun, supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman kehidupan bermasyarakat.

Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi,

lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang 44 plural. Renstra Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yaitu:

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan

kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

3. **Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi selama 5 Tahun anggaran adalah: Terwujudnya Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Bersih dan Akuntabel.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Awal	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah serta terkait dengan Biro Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah;
2. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Penataan ketata laksanaan;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Optimalisasi penataan ketata laksanaan Perangkat Daerah;
7. Optimalisasi sarana kerja terutama tata kerja ruang kerja yang belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi atau Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Hal ini juga memerlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Program Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara pegawai atau pimpinan dengan Kesejahteraan Rakyat atau lembaga pemerintahan untuk mencapai target kinerja. PK merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi.

Perjanjian Kinerja memiliki fungsi sebagai:

- Dasar Evaluasi Kinerja
- Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan
- Dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise kinerja
- Dasar untuk menetapkan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja dibuat setiap tahun dan merupakan turunan dari Perencanaan Strategis. PK juga merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sesuai dengan RPJMD 2021-2026			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Implementasi Akuntabilitas Kinerja	– Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Kesra – PREDIKAT AKIP BIRO	84 BB
2.	Meningkatnya Kualitas Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%

2.6 Indikator Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Perjanjian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi tersebut dimanfaatkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program yang selaras dengan RPJMD Provinsi Jambi sebagai indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator*).

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 **Terwujudnya Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional** dibawah ridho Allah SWT dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENAGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	(Jumlah rekomendasi yang disampaikan / rekomendasi yang dilaksanakan) x 100 persen	Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Dokumen SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Jambi	Perangkat Daerah	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
		IKM	Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Biro Kesejahteraan Rakyat oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi		

2.7 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026. Pada Tahun Anggaran 2025 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 87.171.015.149,- (delapan puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh satu juta lima belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

Tabel 2.4

Rencana Kerja Anggaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu
	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	316.664.063
	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.814.063,-
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.146.700,-

2	Penyediaan Bahan Logistik	13.470.000,-
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.907.500,-
4	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.289.863,-
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.850.000,-
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.850.000,-
II. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		76.939.704.097,-
1. Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual		76.939.704.097,-
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	35.683.566.179,-
	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	41.256.137.918,-
2. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		9,633,342,762
1	Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	9,355,141,063
2	Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	191,897,021
3	Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	86,304,678
3. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		281,304,227
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	92,336,145
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja,	80,182,313
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	108,785,769

2.8 Target Belanja Tahun Anggaran 2025

Target ini biasanya turunan dari sasaran strategis yang terdapat dalam Kesejahteraan Rakyat perangkat daerah. Pengukuran target sebaiknya tidak hanya terbatas pada pencapaian output, tetapi juga dievaluasi bagaimana pencapaian outcome-nya. Evaluasi capaian output biasanya dilakukan dalam tahun yang bersangkutan, sedangkan evaluasi outcome mungkin saja baru akan bisa dievaluasi di beberapa tahun yang akan datang. Evaluasi outcome inilah yang sering kita lupakan, akibatnya pelaksanaan program pemerintah mungkin semakin akuntabel, namun seberapa hasil dan manfaat dari program tersebut dalam jangka Panjang tidak perlu dievaluasi secara komprehensif.

Perencanaan sesuai jadwal adalah hal tersulit untuk dilakukan. Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi mengalami keterlambatan penyerapan anggaran. Penyebabnya sangat kompleks, namun pada intinya adalah adanya perubahan rencana yang sebenarnya dimungkinkan, karena sistem anggaran berprinsip fleksibel. Namun pada tahun anggaran 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga diperlukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan efisiensi tersebut.

Sehubungan hal tersebut belanja yang terdapat pada Biro Kesejahteraan Rakyat adalah sepenuhnya berpedoman pada rencana kerja anggaran, kerangka acuan kerja serta dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang tata cara belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 2.5 Target Belanja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2025**

No	Uraian	Target	Prosentasi
1	Belanja Barang dan Jasa	Rp 87.171.015.149,-	100%

2.9 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi**

No.	Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Implementasi Akuntabilitas Kinerja		Rp. 316.664.063,-
2.	Meningkatnya Kualitas Program Kesejahteraan Rakyat		Rp. 86.854.351.086,-
	Jumlah		Rp. 87.171.015.149,-

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara target kinerja pada tahun 2025 dengan yang diperjanjikan kinerjanya pada tahun 2025 untuk Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menguraikan secara detail tentang kinerja aktual Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi sebagai wujud akuntabilitas kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi selama Tahun 2025 yang sudah direncanakan sebelumnya melalui Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang kemudian dituangkan lagi ke dalam kontrak kerja berupa Perjanjian Kinerja (PK) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran kinerja secara umum yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30-50	Kurang

A. Capaian Kinerja Biro Tahun 2025

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi tahun 2025 yang telah disepakati. Pengukuran ini dilakukan secara berkala oleh para pejabat dan staf pengampu masing-masing urusan yang kemudian menjadi bahan penilaian oleh tim penilai akuntabilitas kinerja. Penilaian didasarkan pada pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian kinerja Kesejahteraan Rakyat pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator	Taget	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.	Nilai SAKIP	75	66.50	88.66
		IKM	84	85.22	101.45
2	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Rakyat.	Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100	100	100

**Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Nilai Sakip Biro	51,86	60.55	75	66.50	88,66
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Kesra	81.86	84.96	84	85.22	101.45
2.	Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100	100	100	100	100
dst						

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kesejahteraan Rakyat

NO	INDIKATOR	AWAL RPJMD 2021	CAPAIAN KINERJA		TARGET 2025	Capaian s/d 2025 Terhadap
			2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Nilai Sakip Biro	59.65	68.76	60.55	75	66.50
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Kesra	81.49	82.09	84.96	85	85.22
2.	Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100	100	100	100	100
dst						

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi memiliki (3) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi. Pada tahun 2025, indikator sasaran tersebut telah memenuhi/tidak memenuhi target yang ditetapkan (**tercapai/tidak tercapai $\geq$ 100%**), atau melampaui dari target yang ditetapkan.

Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.

1) Indikator Kinerja : Nilai SAKIP

Realisasi atas indikator kinerja Nilai Sakip di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi **Tidak Tercapai** dengan Target yang di diperjanjikan. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendukung pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi selama 2025 terhadap Nilai SAKIP adalah sebagai berikut :

I. Faktor Penghambat

- a. Belum adanya komitmen bersama untuk bagaimana pencapaian nilai SAKIP yang diwujudkan dengan langkah-langkah strategis;
- b. Beban anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang tinggi banyak yang tidak terkait langsung dengan indikator kinerja;
- c. Belum adanya tersedianya pedoman/buku yang dibutuhkan untuk aspek pengukuran kinerja;
- d. Pelaksanaan evaluasi kinerja belum menyentuh pada aspek-aspek yang terkait langsung dengan penilaian SAKIP; dan
- e. Belum adanya SDM khusus pengelolaan data SAKIP yang mengikuti pelatihan khusus.
- f. Prestasi kerja belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian reward dan punishment.

II. Faktor Pendukung

- a. Adanya dukungan dari Instansi penilai atau yang pengampu penilai SAKIP.
- b. Keberadaan anggaran pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang besar dapat diarahkan/dialihkan untuk konsolidasi internal atau pelaksanaan kegiatan penunjang SAKIP.

2) Indikator Kinerja : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Kesra

Realisasi atas indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi **Tidak Tercapai** dengan Target yang di diperjanjikan.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendukung pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi selama 2025 terhadap Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut :

I. Faktor Penghambat

- a. Belum adanya pedoman berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pada Biro Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pelaksanaan evaluasi belum menyentuh pada aspek-aspek yang terkait langsung dengan penilaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
- c. Belum adanya pelatihan khusus untuk pelayanan yang mengacu pada Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

II. Faktor Pendukung

- a. Adanya dukungan dari Biro pengampu untuk fasilitasi sarana dan prasarana, koordinasi pelaksanaan pelayanan pada Sekretariat Daerah;
- b. Perlunya pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus pada Biro Kesejahteraan Rakyat;
- c. Perlunya pelaksanaan evaluasi yang menyentuh pada aspek-aspek yang terkait langsung dengan penilaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
- d. Perlunya pelatihan khusus untuk pelayanan yang mengacu pada Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Program Kesejahteraan Rakyat.

Indikator Kinerja : Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan

Realisasi atas indikator kinerja Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi **Tercapai sesuai** dengan Target yang diperjanjikan.

I. Faktor Penghambat

- a. Belum adanya keseragaman untuk format rekomendasi kebijakan;
- b. Belum adanya kesepahaman untuk keselarasan tidaklanjut dari rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan; dan
- c. Adanya kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional bagi pejabat pengampu indikator yang belum diikuti oleh adanya acuan baku pelaksanaannya.

II. Faktor Pendukung

- a. Perlunya keseragaman untuk format rekomendasi kebijakan;
- b. Perlunya kesepahaman untuk keselarasan tidaklanjut dari rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan; dan
- c. Adanya kejelasan uraian tugas analis kebijakan/pejabat fungsional yang harus memberikan rekomendasi kebijakan.

B. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Kementerian PAN dan RB)

Kementerian PANRB telah merumuskan visi yang berkomitmen mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden khususnya menuju Indonesia Emas 2045, melalui reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak langsung pada masyarakat. Fokus utamanya yaitu Menciptakan Birokrasi yang ramping, lincah, berintegritas serta berbasis digital/elektronik (digital bureaucracy) untuk mendukung pelayanan publik yang cepat dan professional.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang profesional dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang Berkelas Dunia. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kementerian PANRB merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu:

1. Pelayanan Informasi Berakhlak: Pelayanan yang komunikatif, responsif, proaktif, integratif, dan edukatif.
2. Optimasi Keterbukaan Informasi Publik: Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik.
3. Pelayanan Informasi Komunikatif, Responsif, Proaktif, Terintegratif, dan Informatif: Pelayanan yang efektif dan efisien, serta menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
4. Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik: Menjamin aksesibilitas informasi bagi masyarakat dan unit kerja di KemenPANRB.

Untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian realisasi kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat terhadap sasaran Renstra Biro dan Renstra Kementerian dilakukan review dengan hasil sebagaimana yang disajikan dalam Tabel berikut :

No	Sasaran pada Renstra (Biro Kesejahteraan Rakyat 2025-2029)			Sasaran pada Renstra K/L (Permenpan & RB 2025-2029)		
	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target 2029	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Nilai Akip Biro	75	Tujuan: Terwujudnya Birokrasi yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing	Nilai Pelaksanaan RB Nasional	80
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Implementasi Akuntabilitas Kinerja			Sasaran: Terwujudnya Instansi Pemerintah yang efektif, efisien dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional	71
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Kesra	86.10	Sasaran: Terwujudnya Kualitas Pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik nasional	3.75

Adapun perbaikann yang telah dilakukan sebagai tidaklanjut rekomendasi dalam hasil evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN
1	Menyempurnakan penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Menyesuaikan Dokumen Renja 2024 dan Perubahannya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Dokumen Renja	September s.d. Oktober 2025	Kasubbag Tata Usaha beserta Tim Perencanaan	Selesai
2	Melakukan reviu dan perbaikan rumusan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil sesuai level jabatan dari level jabatan tertinggi hingga ke level oprasional	Melaksanakan rapat dipimpin oleh Kepala Biro Kesra dan Tim perencana dalam melakukan reviu dan perbaikan indikator kinerja yang berorientasi sesuai level jabatan	Dokumen PK dan IKU	September	Kasubbag Tata Usaha beserta Tim Perencanaan	Selesai

3	Menggunakan pohon kinerja dan/atau cascading kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan	Melaksanakan rapat dipimpin Kepala Biro Kesra dengan Tim Perencanaan dalam penyusunan perencanaan kinerja agar selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan	Pohon Kinerja/ Cascading	September	Kasubbag Tata Usaha beserta Tim Perencanaan	Selesai
4	Melakukan pengukuran kinerja dengan tepat waktu serta membuat notulen rapat dan daftar hadir rapat pengukuran kinerja (laporan monev renja triwulan) dan harus selaras dengan E PAKET JAMBI	Melaksanakan rapat Tim Perencanaan dalam melaksanakan pengukuran kinerja	Notulen dan Absensi Rapat	Oktober	Kasubbag Tata Usaha beserta Tim Perencanaan	Selesai
5	Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound)	Menyesuaikan Dokumen Perencanaan agar memenuhi kriteria SMART	Renstra, Renja	Oktober	Kasubbag Tata Usaha beserta Tim Perencanaan	Selesai
6	Menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam perbaikan perencanaan kinerja	Menyesuaikan Perencanaan Kinerja yang sesuai dengan hasil evaluasi kinerja internal	Dokumen laporan kinerja	September s.d. Oktober 2025	Kasubbag Tata Usaha beserta Tim Perencanaan	Selesai
7	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen laporan kinerja; dan	Mengintegrasikan data realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen laporan kinerja	Dokumen laporan kinerja	September s.d. Oktober 2025	Kasubbag Tata Usaha beserta Tim Perencanaan	Selesai

8	Menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sesuai	Menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan disiplin pada Biro Kesra dan mensosialisasikannya melalui surat edaran kepala biro kesra dan setiap apel pagi	Surat Edaran dan Sosialisasi Kebijakan	Oktober s.d. November 2025	Seluruh Pejabat pada Biro Kesra	Selesai
---	---	--	--	----------------------------	---------------------------------	---------

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap sasaran strategis tiap-tiap kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dengan 13 (tiga belas) sub kegiatan yang menjadi sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap indikator yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Implementasi Akuntabilitas Kinerja

I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 314.814.063,- (tiga ratus empat belas juta delapan ratus empat belas ribu enam puluh tiga rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 50,63%. Keluaran (*output*) yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja (*outcome*) terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi, Tersedia Logistik Kantor dalam rangka menyiapkan rapat koordinasi lintas instansi, sektor maupun program terkait, kemudian Tersedia Barang Cetak dan Penggandaan dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi serta melaksanakan rapat koordinasi, konsultasi maupun monitoring dan

evaluasi program ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 61.146.700,- (enam puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 37.937.680,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh enam ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 60,04%. Keluaran (*output*) yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja (*outcome*) terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 13.470.000,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 922.000,- (Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 6,86%. Keluaran (*output*) yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah Penyediaan Logistik Kantor dengan capaian kinerja (*outcome*) terpenuhinya Tersedia Logistik Kantor dalam rangka menyiapkan rapat koordinasi lintas instansi, sektor maupun program terkait.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 42.907.500,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp34.280.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 79,89%. Keluaran (*output*) yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian kinerja (*outcome*) terpenuhinya Tersedia Barang Cetak dan Penggandaan dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.

4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 197,289,863,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran

sebesar Rp. 86.229.010,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu sepuluh rupiah) atau sebesar 43,71%. Keluaran (*output*) yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja (*outcome*) konsultasi maupun monitoring dan evaluasi program ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

II. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) atau sebesar 0%.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Program Kesejahteraan Rakyat

III. Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 76.939.704.097,- (tujuh puluh enam miliar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus empat ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 87.96%. Keluaran (*output*) yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual dan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual dengan capaian kinerja (*outcome*) tercapainya program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi dan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual

Sub kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 35.683.566.179,- (tiga puluh lima miliar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 29.404.051.098,- (dua puluh Sembilan miliar empat ratus empat juta lima puluh satu ribu Sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar 82.40%. Keluaran (*output*) yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual dengan capaian kinerja (*outcome*) terlaksananya Pengelolaan Masjid Agung Al-Falah, Al-Zikro dan Al-Khoirot Jambi, Safari

Ramadhan, Bantuan Rumah Ibadah, Bantuan Pondok Pesantren, Bantuan Santri Tahfiz, Bantuan Tahfiz Dan Kegiatan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

Sub kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 41.256.137.918,- (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 38.272.225.118,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah) atau sebesar 92.77%. Keluaran (*output*) yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual dengan capaian kinerja (*outcome*) terlaksananya MTQ Provinsi Jambi, MTQ Nasional di Kalimantan Selatan, Kegiatan Haji, Bantuan Hibah Ormas Keagamaan, Kegiatan Porsadin.

IV. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan

Dasar

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 9.633.342.762,- (Sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 86.62%. Keluaran (*output*) yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan capaian kinerja (*outcome*) tercapainya program Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan acuan dan pedoman serta mempermudah pelaksanaan kegiatan koordinasi pendidikan dengan instansi terkait. Dana yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 9.355.141.063,- (Sembilan miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu enam puluh tiga rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 8.101.195.152,- (delapan miliar seratus satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 86.60 %. Keluaran (*output*) pada

kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi bidang pendidikan di Provinsi Jambi dan bantuan beasiswa untuk S1, S3 Dalam Negeri dan S3 Luar Negeri dengan capaian kinerja (*outcome*) yang dihasilkan adalah adanya rumusan kebijakan berupa rekomendasi bidang pendidikan dan tersalurkannya dana beasiswa kepada S1 (294 Orang), S2 (51 Orang) S3 Dalam Negeri (101 Orang) di Provinsi Jambi.

2. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan acuan dan pedoman serta mempermudah pelaksanaan kegiatan koordinasi pendidikan dengan instansi terkait. Dana yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 191.897.021,- (seratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 178.937.394,- (seratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau sebesar 93.25 %. Keluaran (*output*) pada kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi bidang kesehatan di Provinsi Jambi dan pembinaan UKS/M di Provinsi Jambi, dengan capaian kinerja (*outcome*) yang dihasilkan adalah adanya rumusan kebijakan berupa rekomendasi bidang kesehatan dan terlaksana pembinaan UKS/M ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

3. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan acuan dan pedoman serta mempermudah pelaksanaan kegiatan koordinasi pendidikan dengan instansi terkait. Dana yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 86.304.678,- (delapan puluh enam juta tiga ratus empat juta enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 64.424.347,- (enam puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 74,65 %. Keluaran (*output*) pada kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi bidang sosial di Provinsi Jambi dan Kegiatan Komda Lansia,

Legiun Veteran, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Peningkatan Semangat Perintisan Kepahlawanan dan Rasa Patriotisme serta Masalah-Masalah Strategis Kemasyarakatan dengan capaian kinerja (*outcome*) yang dihasilkan adalah terlaksananya rapat koordinasi bidang sosial yang menghasilkan rumusan kebijakan berupa rekomendasi bidang Sosial serta bantuan sosial lainnya.

V. Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 281.304.227,- (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 80,52%. Keluaran (*output*) yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar I, Kesra Non Pelayanan Dasar II dan Kesra Non Pelayanan Dasar III dengan capaian kinerja (*outcome*) tercapainya program Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar I, Kesra Non Pelayanan Dasar II dan Kesra Non Pelayanan Dasar III. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman serta mempermudah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Dana yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 92.336.145,- (Sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 86.170.230,- (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 93,32%. Keluaran (*output*) pada kegiatan ini adalah terlaksananya rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan capaian kinerja (*outcome*) yang dihasilkan adalah terlaksananya rapat koordinasi bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang menghasilkan rumusan kebijakan berupa rekomendasi serta kegiatan lainnya.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman serta mempermudah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dana yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp. 80.182.313,- (delapan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 47.515.510,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 59,26%. Keluaran (*output*) pada kegiatan ini adalah terlaksananya rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. dengan capaian kinerja yang dihasilkan adalah terlaksananya rapat koordinasi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menghasilkan rumusan kebijakan berupa rekomendasi serta kegiatan lainnya.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman serta mempermudah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan. Dana yang dianggarkan pada kegiatan ini sebesar Rp.

108.785.769,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 92.828.391,- (Sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar 85,33%. Keluaran (*output*) pada kegiatan ini adalah terlaksananya rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan dengan capaian kinerja (*outcome*) yang dihasilkan adalah terlaksananya rapat koordinasi bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan yang menghasilkan rumusan kebijakan berupa rekomendasi serta kegiatan lainnya.

**Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
Tahun 2025**

No.	Program/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d Desember			Sisa Anggaran (Rp)
			Realisasi	Keu%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	316.664.063	159.368.690	50.33	94.41	157.295.373
1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314,814,063	159,368,690	50.62	94.41	155,445,373
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61,146,700	37,937,680	62.04	100.00	23,209,020
	Penyediaan Bahan Logistik	13,470,000	922,000	6.84	100.00	12,548,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42,907,500	34,280,000	79.89	96.54	8,627,500
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	197,289,863	86,229,010	43.71	91.84	111,060,853
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,850,000	0	0.00	0.00	1,850,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,850,000	0	0.00	0.00	1,850,000
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	86.854.351.086	76.247.347.240	87.78		
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	76,939,704,097	67,676,276,216	87.96	96.92	9,263,427,881

	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	35,683,566,179	29,404,051,098	82.40	93.35	6,279,515,081
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	41,256,137,918	38,272,225,118	92.77	100.00	2,983,912,800
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	9,633,342,762	8,344,556,893	86.62	99.93	1,288,785,869
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	9,355,141,063	8,101,195,152	86.60	100.00	1,253,945,911
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	191,897,021	178,937,394	93.25	100.00	12,959,627
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	86,304,678	64,424,347	74.65	92.65	21,880,331
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	281,304,227	226,514,131	80.52	92.83	54,790,096
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	92,336,145	86,170,230	93.32	96.54	6,165,915
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	80,182,313	47,515,510	59.26	89.48	32,666,803
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	108,785,769	92,828,391	85.33	92.15	15,957,378
Belanja langsung pendukung		87,171,015,149	76,406,715,930	87.65	97.23	10,764,299,219

Belanja tidak langsung			-	-	
Jumlah belanja langsung	87,171,015,149	76,406,715,930	87.65	97.23	10,764,299,219
Total Belanja	87,171,015,149	76,406,715,930	87.65	97.23	10,764,299,219

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pendukung kinerja
Tabel 3.7

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran %	Keterangan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	- Nilai SAKIP - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Kesra	66.50%	159.368.690 67,41%	32,59%
Meningkatnya Kualitas Program kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	65.870.584.509 84,90%	15,10%
Total Efisiensi				47,69%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Atas sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja. penggunaan sumber daya yang digunakan **telah efisien** dikarenakan capaian kinerja yang diperoleh **lebih kecil** Jika dibandingkan dengan persentase serapan anggaran yang digunakan dan adanya arahan efisiensi keuangan dari BPKPD Provinsi Jambi.
- b. Atas Meningkatkan Kualitas Program kesejahteraan rakyat penggunaan sumber daya yang digunakan telah efisien dikarenakan capaian kinerja diperoleh **sesuai target** yang dijanjikan dan jika dibandingkan dengan serapan anggaran masih **lebih rendah** karena anggaran yang besar pada Biro Kesejahteraan Rakyat tidak mempunyai implikasi terhadap indikator kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum kegiatan di Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun akhir dan akan menjadi baseline dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2026-2030. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi”, dengan indikator Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan, realisasi kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi tahun 2025 adalah sebesar 100%
2. Realisasi keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 87.65%, dengan efisiensi anggaran sebesar 12.35%
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program dan kegiatan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan koordinasi untuk keselarasan program dan kegiatan guna mencapai tujuan yang sama.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.

TABEL PERUBAHAN RENSTRA BIRO KESRA SETDA PROVINSI JAMBI PADA RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAMBI
PERIODE 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Program Kesejahteraan Rakyat	4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	64,727,861,147	100%	68,030,486,970	100%	71,663,375,376	100%	75,659,552,624	100%	80,055,347,594	100%	360,136,623,711	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Rekomendasi	6 Rekomendasi	11 Dokumen	61,581,803,375	11 Dokumen	64,569,823,421	-	-	-	-	-	-	22 dokumen	126,151,626,796	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pemenuhan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Bina Mental Spiritual	100%	-	61,581,803,375	-	-	100%	67,856,645,473	100%	71,472,149,729	100%	75,449,204,411	100%	214,777,999,613	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Draft Rekomendasi	3 Draft Rekomendasi	6 Draft Rekomendasi	35,639,783,554	6 Draft Rekomendasi	36,033,601,618	-	-	-	-	-	-	12 Draft Rekomendasi	71,673,385,172	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	15 Unit	-	-	-	-	3 Unit	36,466,801,489	3 Unit	36,943,321,347	3 Unit	37,467,493,191	9 Unit	110,877,616,027	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Draft Rekomendasi	3 Draft Rekomendasi	5 Draft Rekomendasi	25,942,019,821	5 Draft Rekomendasi	28,536,221,803	-	-	-	-	-	-	10 Draft Rekomendasi	54,478,241,624	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	-	-	-	-	2 Lembaga	31,389,843,984	2 Lembaga	34,528,828,382	2 Lembaga	37,981,711,220	6 Lembaga	103,900,383,586		
		4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi	10 Rekomendasi	13 Rekomendasi	2,168,525,766	13 Dokumen	2,385,378,342	-	-	-	-	-	-	26 Dokumen	4,553,904,108	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pemenuhan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pelayanan Dasar	100%	-	-	-	-	100%	2,623,916,176	100%	2,886,307,794	100%	3,174,938,573	100%	8,685,162,543	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Draft Rekomendasi	1 Draft Rekomendasi	3 Draft Rekomendasi	273,063,054	3 Draft Rekomendasi	300,369,359	-	-	-	-	-	-	6 Draft Rekomendasi	573,432,413	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	NA	-	-	-	-	2 Dokumen	330,406,295	2 Dokumen	363,446,925	2 Dokumen	399,791,617	6 Dokumen	1,093,644,837	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen	4 Draft Rekomendasi	5 Draft Rekomendasi	615,979,430	5 Draft Rekomendasi	677,577,373	-	-	-	-	-	-	10 Draft Rekomendasi	1,293,556,803	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	NA	-	-	-	-	2 Dokumen	745,335,110	2 Dokumen	819,868,621	2 Dokumen	901,855,483	6 Dokumen	2,467,059,214		
		4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Draft Rekomendasi	5 Draft Rekomendasi	5 Draft Rekomendasi	1,279,483,282	5 Draft Rekomendasi	1,407,431,610	-	-	-	-	-	-	10 Draft Rekomendasi	2,686,914,892	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	NA	-	-	-	-	2 Dokumen	1,548,174,771	2 Dokumen	1,702,992,248	2 Dokumen	1,873,291,473	6 Dokumen	5,124,458,492	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Rekomendasi	8 Rekomendasi	11 Dokumen	977,532,006	11 Dokumen	1,075,285,207	-	-	-	-	-	-	22 Dokumen	2,052,817,213	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Pemenuhan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Non Pelayanan Dasar	NA	-	-	-	-	100%	1,182,813,727	100%	1,301,095,101	100%	1,431,204,610	100%	3,915,113,438	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Draft Rekomendasi	1 Draft Rekomendasi	3 Draft Rekomendasi	272,188,416	3 Draft Rekomendasi	293,407,258	-	-	-	-	-	-	6 Draft Rekomendasi	565,595,674	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi

		4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	NA	-	-	-	-	2 Dokumen	316,747,983	2 Dokumen	342,422,782	2 Dokumen	370,665,060	6 Dokumen			
		4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Draft Rekomendasi	6 Draft Rekomendasi	5 Draft Rekomendasi	491,329,884	5 Draft Rekomendasi	546,885,706		-		-		-	10 Draft Rekomendasi	1,038,215,590	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	NA	-	-	-	-	2 Dokumen	619,709,160	2 Dokumen	693,680,076	2 Dokumen	775,048,083	6 Dokumen	2,088,437,313	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Draft Rekomendasi	1 Draft Rekomendasi	3 Draft Rekomendasi	214,013,706	3 Draft Rekomendasi	234,992,243		-		-		-	6 Draft Rekomendasi	449,005,949	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	NA	-	-	-	-	2 Dokumen	246,356,584	2 Dokumen	264,992,243	2 Dokumen	285,491,467	6 Dokumen	796,840,294	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Implementasi Akuntabilitas Kinerja	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Kesra	75.29	-	-	-	83	726,563,175	84	760,177,181	85	836,194,899	85	2,322,935,252	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi				
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	PREDIKAT AKIP BIRO	CC	B	593,479,998	B	652,827,998	-	-	-	-	-	75	1,246,307,998	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi				
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	PREDIKAT AKIP BIRO	CC	-	-	-	-	BB	753,603,811	BB	934,921,874	BB	1,757,828,128	BB	-	-	-	-		
		4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Biro	54.54	65	593,479,998	65	652,827,998	-	-	-	-	-	-	-	1,246,307,998	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Biro	54.54	-	-	-	-	75	753,603,811	75	135,000,000	75	878,914,060	75	1,767,517,877	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	4	55,000,000	4	56,000,000	8	111,000,000	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	2	15,000,000	2	17,000,000	4	32,000,000	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.01.04	Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	2	15,000,000	2	18,000,000	4	33,000,000	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.01.06	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	2	25,000,000	2	27,000,000	4	52,000,000	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	1	25,000,000	1	26,000,000	2	51,000,000	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	3 Bagian	100%	571,132,368	100%	628,245,605	-	-	-	-	-	-	100%	2,813,228,496	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Kesra	75.29	-	-	-	-	83	726,563,175	84	770,177,181	85	846,194,899	85	2,342,935,252	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Bagian	40 Jenis	65,590,873	40 Jenis	72,149,960	-	-	-	-	-	-	-	137,740,833	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	-	-	-	-	1 Paket	79,364,956	1 Paket	87,301,451	1 Paket	96,031,597	3 Paket	262,698,004	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.06.04	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Peserta Rapat/tamu/dll	480 Peserta	480 Peserta	33,264,000	480 Peserta	36,590,400	-	-	-	-	-	-	-	69,854,400	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.06.04	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	-	-	-	-	12 Paket	48,701,822	12 Paket	54,274,384	12 Paket	58,701,822	36 Paket	161,678,028	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan	3 Bagian	4 Jenis	55,542,575	4 Jenis	61,096,833	-	-	-	-	-	-	-	116,639,408	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	10 Paket	-	-	-	-	2 Paket	67,206,516	2 Paket	73,927,167	2 Paket	81,319,884	6 Paket	222,453,567	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	416,734,920	2 Kali	458,408,412	-	-	-	-	-	-	-	875,143,332	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	504,249,253	2 Laporan	554,674,175	2 laporan	610,141,596	6 Laporan	1,669,065,028	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.08	Penyedia Jasa Penunjang	Persentase Pemenuhan Pelayanan	3 Bagian	100%	22,347,630	100%	24,582,393	-	-	-	-	-	-	100%	46,930,023	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi			
		4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	3 Bagian	822 Surat	22,347,630	822 Surat	24,582,393	-	-	-	-	-	-	1644 surat	46,930,023	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
		4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	27,040,632	3 Laporan	29,744,695	3 Laporan	32,719,165	9 Laporan	89,504,492	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi			
TOTAL					65,321,341,145			68,683,314,968			72,416,979,187			76,594,474,500			81,813,175,722			361,382,931,702		

Jambi, 2024
Kepala Biro Kesra,

H. SULAIMAN, S.Ag.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721001 200012 1 002

**TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAMBI
PERIODE 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2025)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100%	81,894,071,504	100%	86,598,975,079	100%	90,928,923,833	100%	95,475,370,025	100%	100,249,138,526	100%	105,261,595,452	100%	478,514,002,910	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.01	Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pemenuhan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Bina Mental Spiritual	100%	72,648,071,504	100%	76,280,475,079	100%	80,094,498,833	100%	84,099,223,775	100%	88,304,184,964	100%	92,719,394,212	100%	421,497,776,862	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	3 Unit	32,485,999,584	3 Unit	34,110,299,563	3 Unit	35,815,814,541	3 Unit	37,606,605,268	3 Unit	39,486,935,532	3 Unit	41,461,282,308	3 Unit	188,480,937,21	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.01.02	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	2 Lembaga	40,162,071,920	2 Lembaga	42,170,175,516	2 Lembaga	44,278,684,292	2 Lembaga	46,492,618,506	2 Lembaga	48,817,249,432	2 Lembaga	51,258,111,903	2 Lembaga	233,016,839,64	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.02	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pemenuhan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pelayanan Dasar	100%	8,680,000,000	100%	9,602,500,000	100%	10,082,625,000	100%	10,586,756,250	100%	11,116,094,063	100%	11,671,898,766	100%	53,059,874,072	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	8,250,000,000	2 Dokumen	9,072,500,000	2 Dokumen	9,526,125,000	2 Dokumen	10,002,431,250	2 Dokumen	10,502,552,813	2 Dokumen	11,027,680,453	10 Dokumen	50,131,289,51	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	225,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	288,750,000	2 Dokumen	303,187,500	2 Dokumen	318,346,875	2 Dokumen	334,264,219	10 Dokumen	1,519,548,59	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2 Dokumen	205,000,000	2 Dokumen	255,000,000	2 Dokumen	267,750,000	2 Dokumen	281,137,500	2 Dokumen	295,194,375	2 Dokumen	309,954,094	10 Dokumen	1,409,035,96	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.03	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Pemenuhan Rekomendasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Non Pelayanan Dasar	100%	566,000,000	100%	716,000,000	100%	751,800,000	100%	789,390,000	100%	828,859,500	100%	870,302,475	100%	3,956,351,970	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen	189,000,000	2 Dokumen	239,000,000	2 Dokumen	250,950,000	2 Dokumen	263,497,500	2 Dokumen	276,672,375	2 Dokumen	290,505,994	10 Dokumen	1,320,625,86		
		4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	190,000,000	2 Dokumen	240,000,000	2 Dokumen	252,000,000	2 Dokumen	264,600,000	2 Dokumen	277,830,000	2 Dokumen	291,721,500	10 Dokumen	1,326,151,50	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.04.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	2 Dokumen	187,000,000	2 Dokumen	237,000,000	2 Dokumen	248,850,000	2 Dokumen	261,292,500	2 Dokumen	274,357,125	2 Dokumen	288,074,981	10 Dokumen	1,309,574,60	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Implementasi Akuntabilitas Kinerja	4.01.01	Program Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Kesra 2. PREDIKAT AKIP BIRO	1. 84,96 2. BB	1,217,042,684	1. 85 2. BB	1,255,310,053	1. 85,05 2. BB	1,317,939,870	1. 85,09 2. BB	1,383,565,491	1. 86 2. BB	1,452,336,708	1. 86,10 2. BB	1,524,410,800	1. 86,10 2. BB	6,933,562,922	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Biro	66.50	135,000,000	70.05	140,750,000	72	147,787,50	73	155,176,875	74	162,935,719	75	171,082,50	75	777,732,59	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	55,000,000	2 Dokumen	57,750,000	2 Dokumen	60,637,50	2 Dokumen	63,669,375	2 Dokumen	66,852,844	2 Dokumen	70,195,486	10 Dokumen	319,105,20	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,750,000	2 Dokumen	16,537,50	2 Dokumen	17,364,375	2 Dokumen	18,232,594	2 Dokumen	19,144,223	10 Dokumen	87,028,69	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.01.1.01.04	Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,750,000	2 Dokumen	16,537,50	2 Dokumen	17,364,375	2 Dokumen	18,232,594	2 Dokumen	19,144,223	10 Dokumen	87,028,69	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.01.1.01.06	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25,000,000	2 Laporan	25,750,000	2 Laporan	27,037,50	2 Laporan	28,389,375	2 Laporan	29,808,844	2 Laporan	31,299,286	10 Laporan	142,285,00	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,750,000	1 Laporan	27,037,50	1 Laporan	28,389,375	1 Laporan	29,808,844	1 Laporan	31,299,286	5 Laporan	142,285,00	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Kesra	84.96	1,082,042,684	85	1,114,560,053	85,05	1,170,152,370	85,09	1,228,388,616	86	1,289,400,989	86,10	1,353,328,29	86,10	6,155,830,32	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	198,691,000	1 Paket	208,625,550	1 Paket	219,056,82	1 Paket	230,009,669	1 Paket	241,510,152	1 Paket	253,585,660	5 Paket	1,152,787,85	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	54,274,384	12 Paket	56,988,103	12 Paket	59,701,822	12 Paket	62,415,542	12 Paket	65,129,261	12 Paket	67,842,980	60 Paket	312,077,70	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	97,077,300	2 Paket	107,011,850	2 Paket	112,362,44	2 Paket	117,980,565	2 Paket	123,879,593	2 Paket	130,073,572	10 Paket	591,308,02	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	732,000,000	2 Laporan	741,934,550	2 Laporan	779,031,27	2 Laporan	817,982,841	2 Laporan	858,881,983	2 Laporan	901,826,083	10 Laporan	4,099,656,73	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
		TOTAL							87,854,285,132		92,246,863,703		96,858,935,516		101,761,475,234		106,786,006,212		485,447,565,838	



Provinsi Jambi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SULAIMAN, S.AG
Jabatan : KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI


H. SULAIMAN, S.AG
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 197210012000121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH

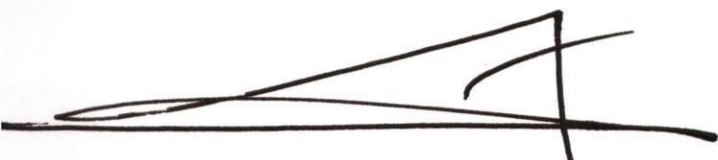
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	IKM	84 Nilai
		Nilai SAKIP	75 Nilai
2	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan	100 Persen

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	88.923.071.504	

Jambi, 31 Januari 2025

GUBERNUR JAMBI

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT


DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI


H. SULAIMAN, S.AG
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 197210012000121002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H. AZHARUDIN, S.Sos. I

Jabatan : Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : DR. H. AL HARIS, S.Sos, MH

Jabatan : Gubernur Jambi

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Mei 2025

Pihak Kedua

GOVERNOR JAMBI,

DR. H. AL HARIS, S.SOS, MH

Pihak Pertama

Plt. KEPALA BIRO KESRA,

H. AZHARUDIN, S.SOS. I

Pembina (IV/a)

NIP. 19800702 200604 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja.	Nilai SAKIP IKM	75 84
2.	Meningkatnya kualitas program kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 86.521.015.149	APBD

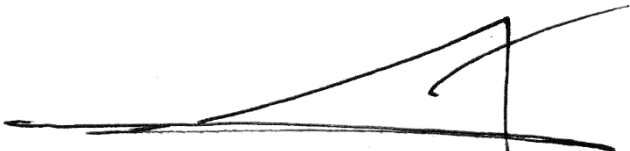
Jambi, Mei 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

GUBERNUR JAMBI,

Plt. KEPALA BIRO KESRA,


DR. H. AL HARIS, S.Sos, MH


H. AZHARUDIN, S.SOS. I
Pembina (IV/a)
NIP. 19800702 200604 1 017



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

LAPORAN KINERJA (LKj)

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROVINSI JAMBI

Mewujudkan tata kelola birokrasi yang profesional, efektif, dan akuntabel dalam mendukung kinerja pimpinan daerah.



AKUNTABEL
Kita bertanggung jawab



PROFESIONAL
Kita bekerja dengan integritas



BERKINERJA
Kita berinovasi untuk hasil yang lebih baik

2025

MELAYANI DENGAN HATI
BEKERJA UNTUK NEGERI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjP Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) Tahun 2025 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Jambi, Januari 2026
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA PROVINSI JAMBI



BUSTANUL ARIPIN, SE., ME
NIP. 19810531 201001 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Jambi. Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mengacu pada Rencana Strategis Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2021–2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sasaran strategis Biro Administrasi Pimpinan dalam Renstra Tahun 2021–2026 difokuskan pada Terwujudnya Kualitas Pimpinan yang Prima dan Akuntabel. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka perlunya strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis (Renstra) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Pengukuran kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja Biro Administrasi Pimpinan berada pada kategori baik. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Dari sisi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, pelaksanaan anggaran Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan prinsip value for money serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat realisasi anggaran secara umum selaras dengan capaian kinerja yang dihasilkan, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja (money follows program).

Evaluasi kinerja menunjukkan adanya beberapa faktor pendukung, antara lain meningkatnya sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah serta

dukungan pimpinan. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi, seperti dinamika kebijakan nasional, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi. Terhadap kendala tersebut, telah dirumuskan langkah-langkah perbaikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Fungsi dan Tugas	2
1.3 Isu-Isu Strategis.....	3
1.4 Keadaan Pegawai.....	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	6
1.6 Keuangan	7
1.7 Sistematika LKj IP.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
1.1 Perencanaan Strategis	9
1.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	9
1.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	11
1.1.3 Strategi dan arah Kebijakan.....	11
1.2 Program dan Kegiatan	12
1.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	14
1.4 Rencana Anggaran Tahun 2025	14
1.4.1 Target Belanja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi	14
1.4.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	15
1.5 Instrumen Pendukung.....	15
1.5.1 Sistem Informasi (aplikasi internal yg diciptakan oleh OPD jika Ada)	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	17
3.3 Bentuk Penyajian Data Kinerja	18
3.4 Realisasi Anggaran.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

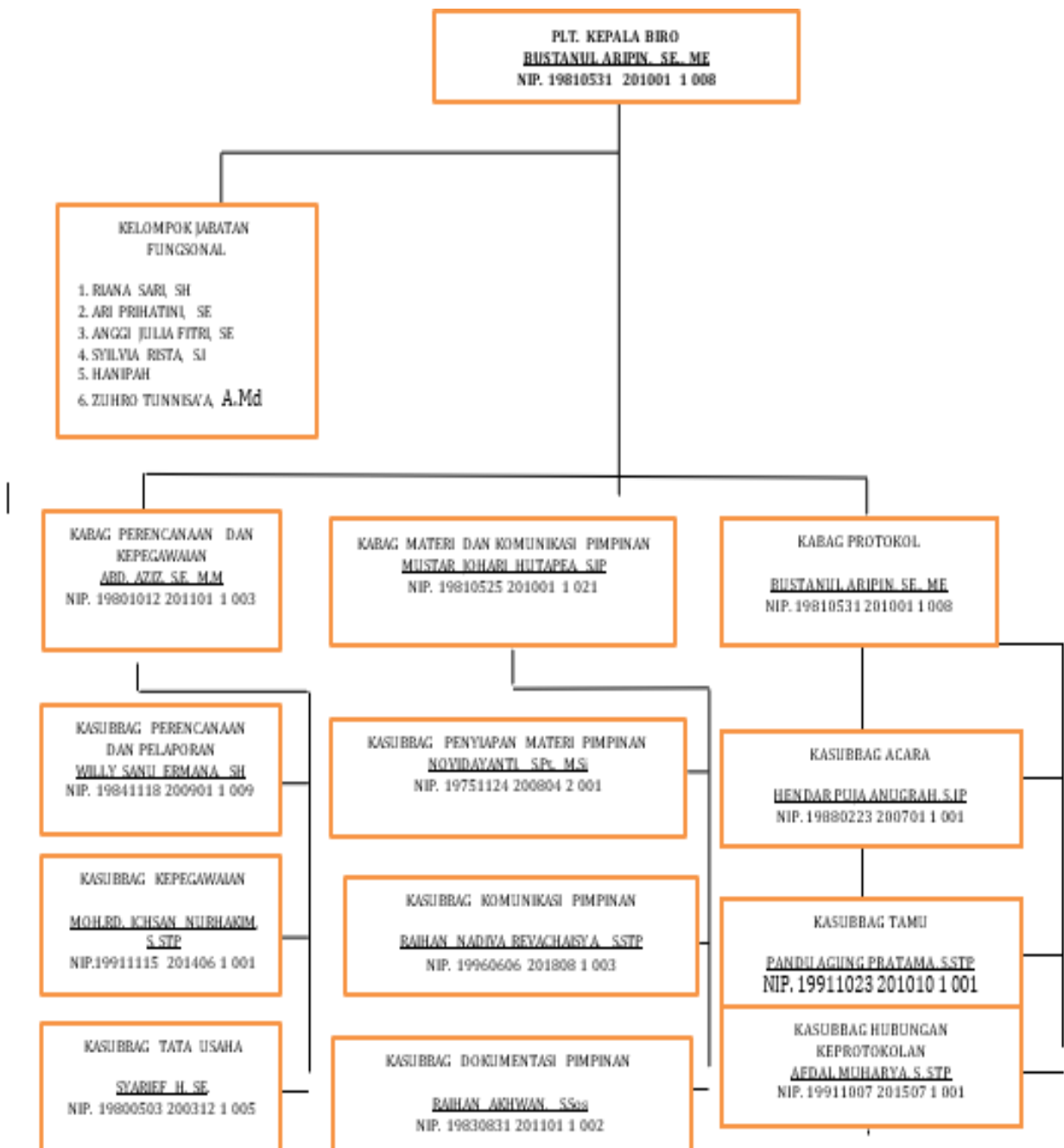
Hal tersebut merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi.
2. Mendorong Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol;
2. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi dengan baik, dengan didukung beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah terpenuhinya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur, dan yang kedua adalah sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sementara itu, dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politisnya dibandingkan proses teknokratisnya.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi tersebut, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu-isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu-isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Berdasarkan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan OPD, ada beberapa hal penting yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan seperti yang tertuang dalam program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Pelayanan Administrasi Kepegawaian berbasis aplikasi, agar memudahkan dalam pengurusan administrasi kepegawaian secara sistematis dan terjadwal seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Pensiun.
2. Penyusunan Standar Pelayanan Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal dalam peningkatan kualitas pelayanan, agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal.
3. Koordinasi bersama Biro-biro lingkup Sekretariat Daerah dalam penyusunan rancangan yang harus ditingkatkan.
4. Pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana perlu diperhatikan agar kinerja pegawai mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
5. Pemenuhan Anggaran secara optimal, agar tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi dapat memenuhi tugas pelayanan secara maksimal.
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada maka Biro Administrasi Pimpinan membuat beberapa strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan serta dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, seperti sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah
2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah dan Keprotokolan
4. Optimalisasi Kualitas dan Pelayanan terhadap Penyiapan Materi, Komunikasi dan Dokumentasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. Optimalisasi kualitas Sumber Daya Aparatur Lignup Sekretariat Daerah

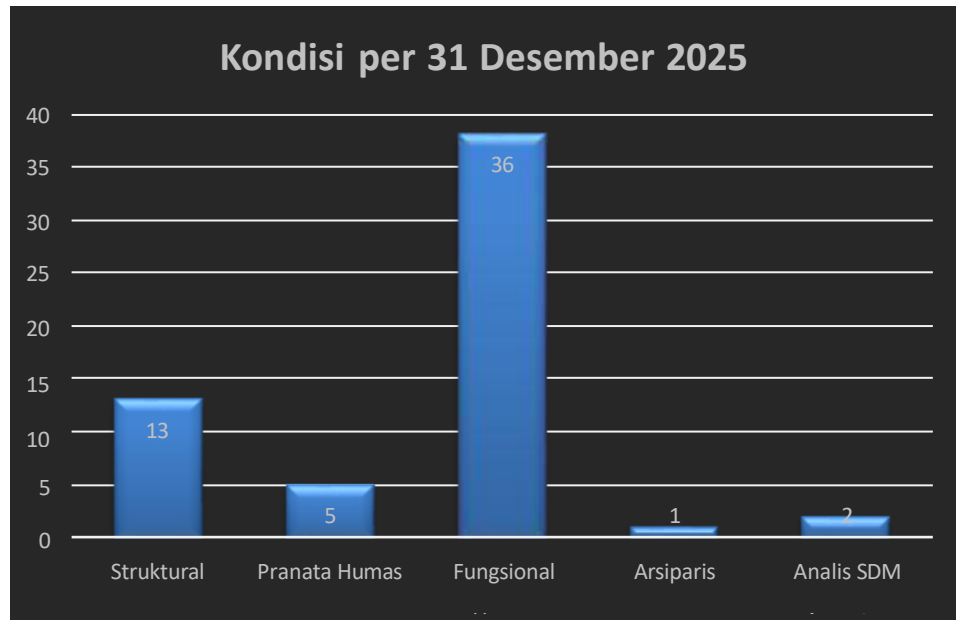
1.4 Sumberdaya Aparatur

Dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang mencakup penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, materi dan komunikasi pimpinan serta protokol, pelaksanaan tugas Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi tersebut di dukung oleh adanya sumber daya yang tersebar dalam Instansi Induk (Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Provinsi Jambi.

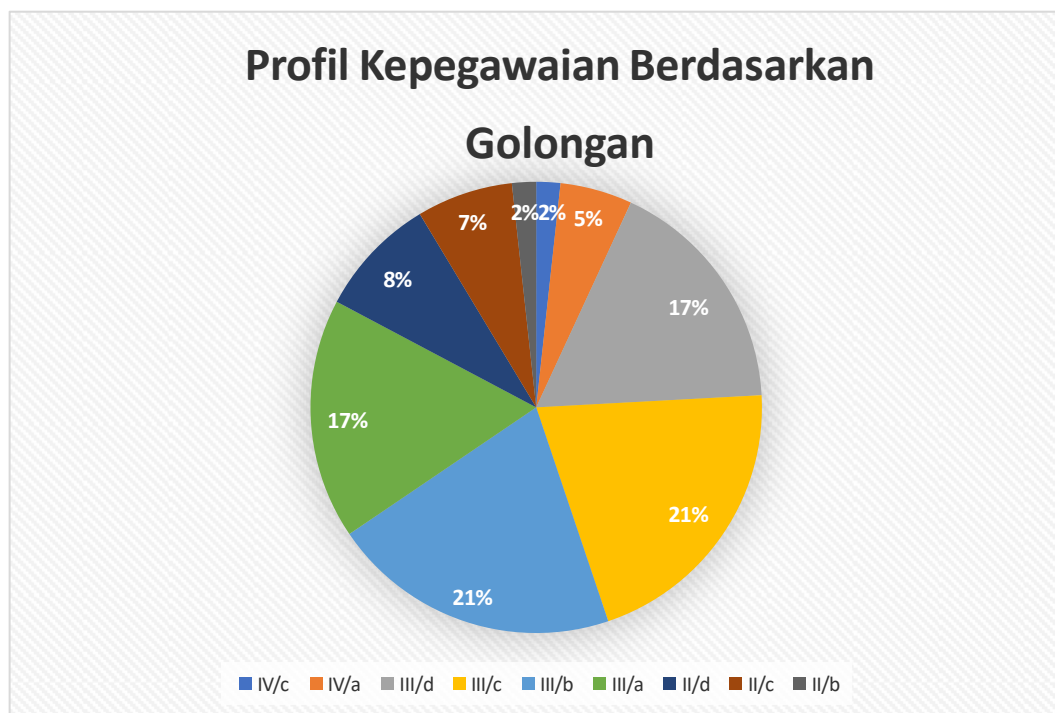
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 59 pegawai yang terdiri 13 pejabat struktural, 5 pejabat Pranata Humas, 39 pejabat fungsional umum, dan 1 arsiparis.

Gambaran Profil Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi tahun 2023 dapat dilihat pada diagram-diagram berikut ini:

Gambar 1.2. Diagram Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025



Gambar 1.3. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025



Berdasarkan diagram 1.3 dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi yang sebagian besar merupakan pegawai golongan III. Pegawai Biro Administrasi Pimpinan yang memiliki pangkat golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III 44 orang dan golongan II 10 orang.

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.4. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025

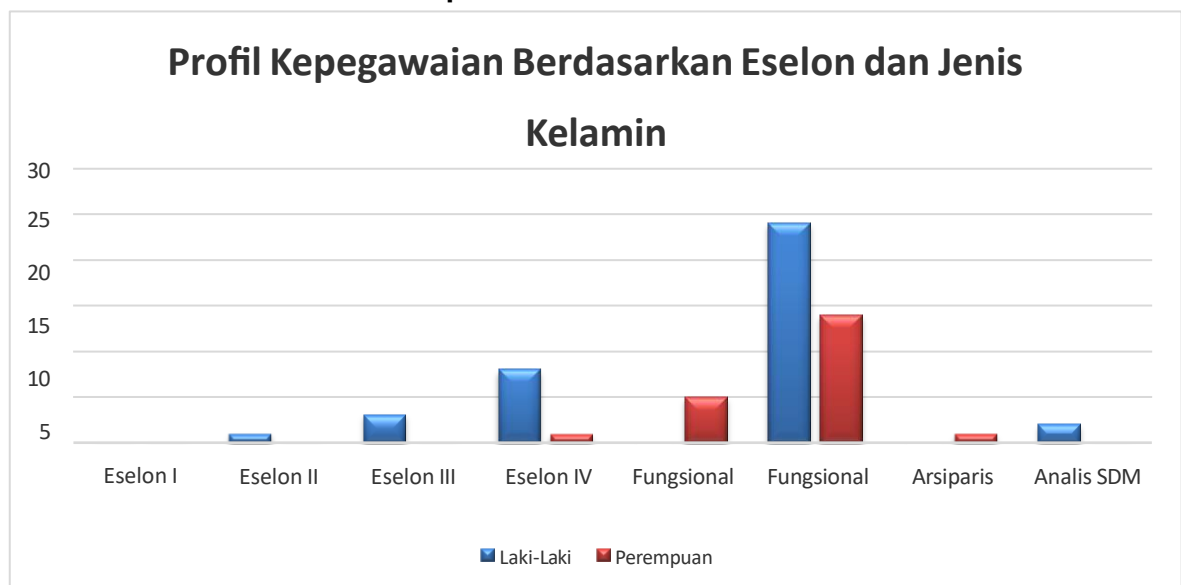


Diagram 1.4 di atas menunjukkan bahwa di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi terdapat ketidakseimbangan gender dimana jabatan struktural (Eselon) diduduki oleh pegawai laki-laki sebanyak 12 orang dan 1 orang perempuan. Sementara itu, yang menduduki jabatan fungsional tertentu adalah 5 pegawai perempuan; fungsional umum sebanyak 24 pegawai laki-laki dan 14 pegawai perempuan; dan arsiparis 1 pegawai perempuan.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai dalam menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, peralatan/alat-alat kantor yang ada di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Komputer	50	Baik
2	Laptop	34	Baik
3	Printer	39	Baik
4	Mesin Photocopy	5	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna mengganti sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi untuk Tahun 2025 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.4.000.335.406,00. Adapun rincian terhadap penggunaandana tersebut adalah sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.000.335.406,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.000.335.406,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.000.335.406,00
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.837.658,00
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.530.000,00
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	18.158.000,00
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.149.658,00
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	166.729.438,00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	980.411.744,00
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	13.870.000,00
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.110.322.958,00
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	1.449.163.608,00
	JUMLAH BELANJA	4.000.335.406,00

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika Laporan yang dianjurkan mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi seperti tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh perangkat daerah.

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 (awal dan perubahan) dan disajikan tabel perjanjian kinerja perangkat daerah. Jelaskan pula apakah ada perbedaan antara target Kinerja pada Renja pada Tahun 2025 dengan yang di Perjanjian Kinerjanya Tahun 2024.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan narasi/deskripsi capaian kinerja perangkat daerah **untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah** sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja Tahun 2025.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun lalu 2024 dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya pendukung kinerja.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Tahun 2025, merupakan masa transisi pemerintah Provinsi Jambi, maka untuk pelaporan perencanaan di bagi menjadi 2 tahap, yaitu masa sebelum transisi (RPJMD 2021-2026) dan masa transisi (RPJMD 2025-2029).

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah (sesuai RPJMD 2021-2026)

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat pembangunan secara menyeluruh di segala bidang yang berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026) sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi 2005-2025. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu: **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional** di bawah Ridho Allah SWT (JAMBI MANTAP)”.

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerinth Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : Terciptanya dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia

maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

- Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatkan iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupam di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat plural.
- Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan misi yakni :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan

tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-governement yang terintegrasi.

2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Misi pertama, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas yang mana sasaran adalah : a. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan b. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.

Misi kedua, yaitu : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah dengan tujuan memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditi unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana sasaran strategis yang dilakukan adalah: a. memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan; b. meningkatkan industri pengolahan; c. meningkatkan peran sektor pariwisata serta IKM pendukung pariwisata; d. memantapkan kualitas pelayanan dasar dan insfrastruktur dasar; e. Meningkatnya kualitas lingkungan; f. Menurunnya tingkat pengangguran; dan g. Meningkatnya ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan.

Misi ketiga, yaitu : memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya, agamis dan berkesetaraan gender yang mana sasaran

strategis adalah: a. meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; b. meningkatnya akses terhadap pendidikan; c. meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya; d. meningkatnya toleransi intra dan antar agama;

Berikut matrik sinergitas visi dan misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi.

Visi: Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Dibawah Ridho Allah SWT”			
Misi : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya pelayanan pimpinan yang berkualitas dan akuntabel	1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		2.Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Setda

Berdasarkan dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Visi ke-1, yaitu: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dengan Tujuan ke-1, yaitu: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

2.1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah (sesuai RPJMD 2025-2029)

RPJMD Provinsi Jambi 2025-2026 ini merupakan tahap awal dari dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 maka Visi Gubernur Jambi pada periode 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT”**.

Jambi MANTAP : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.

Berdaya saing : Ekonomi, Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Berkelanjutan : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut yang ingin dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang selanjutnya dirumuskan menjadi misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

2. **Memantapkan daya saing daerah dan Produktivitas di Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Adaptif;
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah dengan Mengoptimalkan Sektor Unggulan Daerah;
3. Terwujudnya Sistem Perekonomian yang Rendah Karbon Efisien dalam Penggunaan Sumber Daya dan Inklusif secara Sosial;
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Birokrasi yang Transparan, Melayani, Berintegritas dan Berbasis Digital;

2. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah;
3. Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi
4. Terwujudnya Transformasi Ekonomi di Provinsi Jambi
5. Meningkatnya Produktivitas bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata;
6. Terciptanya Ekosistem Inovasi di Provinsi Jambi;
7. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kualitas Lingkungan;
9. Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Laut secara Berkelanjutan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
10. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat; dan
11. Meningkatnya Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat serta Pengarusutamaan Gender.

Matrik Sinergitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 dengan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi

Visi : “MEWUJUDKAN JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT”.			
Misi 1 : “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”.			
Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegrasi dan berbasis digital	Nilai AKIP
			Indeks Kepuasan Masyarakat
			Indeks Keterbukaan Informasi

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (Renstra 2021-2026)

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 maka tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah **Mewujudkan Pelayanan Pimpinan yang berkualitas dan akuntabel**. Pencapaian sasaran strategis Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program. Indikator sasaran perlu ditetapkan agar pencapaian sasaran strategis dapat lebih terukur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut lebih terarah. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target tahunan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Terwujudnya Pelayanan Pimpinan yang Berkualitas dan Akuntabel	1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	74	76	78	80	82
		2.Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Setda	Nilai	66	68	70	72	74

2.1.4 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Renstra (2025-2029)

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta menjawab tantangan pembangunan daerah, Perangkat Daerah menetapkan tujuan strategis sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan. Tujuan ini disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap berbagai program dan kegiatan, serta memastikan sinergi antara kebijakan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Tujuan Perangkat Daerah mencerminkan hasil yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur dalam periode perencanaan, serta menjadi dasar dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, dan target capaian tahunan.

Penetapan tujuan juga mempertimbangkan isu-isu strategis yang relevan, kondisi eksisting, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan atau memperhatikan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, maka Tujuan Rencana Strategis Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Pelayanan Pimpinan yang Berkualitas dan Akuntabel. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel . sebagaimana berikut ini :

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Awal	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Pelayanan Pimpinan yang Berkualitas dan Akuntabel	SAKIP	Nilai	NA	74	76	78	80,1	80,1
		IKM Fasilitasi Keprotokolan	Nilai	NA	84	85	86	88	89
		Keterbukaan Informasi	Nilai	NA	96.8	96.9	97	97,1	97.2

2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menentukan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, strategi yang digunakan adalah strategi organisasi, yang merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan yang saling mengikat/berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi menentukan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Tahun 2021-2026 seperti yang terangkum dalam tabel berikut ini:

**Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Biro Administrasi Pimpinan Setda
Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1. Mengikuti Bimtek SAKIP 2. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja 3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Biro – Biro lingkup Setda secara berkala	1. Seluruh Biro di lingkup Setda Povinsi Jambi wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK dan Laporan Kinerja) tepat waktu
		1. Perbaiki manajemen pelayanan public dilakukan melalui peningkatan kualitas SOP dan Standar Pelayanan Minimal	1. Menentukan Standar Pelayanan Minimal dan SOP di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
		1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan. 2. Memperkuat personel yang mempunyai kompetensi dan komitmen terhadap tugas dan kewajibannya. 3. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan dokumentasi. 4. Peningkatan kualitas SDM dan jumlah jabatan fungsional bidang kehumasan. 5. Peningkatan sarana dan prasarana operasional komunikasi, dokumentasi dan informasi. 6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus kehumasan dengan dukungan dana yang memadai	1. Memenuhi komponen standar pelayanan public dan SOP Pelayanan keprotokolan 2. Evaluasi berkala pelayanan terhadap pelayanan keprotokolan 3. Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana untuk mendukung kinerja pelayanan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait. 5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media kemasyarakatan untuk mempercepat komunikasi, dokumentasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktifitas kerja resmi pimpinan Lembaga pemerintahan sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis instansi sebagaimana tertuang dalam Renstra, RKT, IKU dan serta anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi dasar dalam pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
Tahun 2025 sesuai Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	BB (72)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik terhadap unsur pimpinan daerah	Indeks kepuasan Masyarakat	90

Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Pimpinan yang Berkualitas dan Akuntabel	Predikat SAKIP	BB (74)
		Indeks kepuasan Masyarakat	84
		Keterbukaan Informasi	96,8

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi pada Tahun 2025 adalah berasal dari APBD Murni Provinsi Jambi dengan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **4.000.335.406,00,-** dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. **4.000.335.406,00** dan belanja modal Rp. 0. Selanjutnya dengan mekanisme perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 3.034.283.551,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. **3.034.283.551,-** dan belanja modal Rp.0,-

2.3.1 Target Belanja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi menetapkan target belanja anggaran murni yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi sebesar **4.000.335.406,00,-** dengan rincian belanja operasi sebesar **Rp. 4.000.335.406,00,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 0,-**.

Dan setelah perubahan sebesar Rp. **3.034.283.551,-** dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. **3.034.283.551,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 0,-** sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Target Belanja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi APBD
Perubahan Tahun 2025

No.	Uraian	Target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp. 3.034.283.551	98,79%
3	Belanja Modal	0	-
Jumlah		Rp. 3.034.283.551	

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi, 2025

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis
Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 (periode 2021-2026)

No.	Sasaran	Kegiatan	Anggaran		Persentase
			Belanja Operasi	Belanja Modal	
1	2	6	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.169.051.000,00	Rp.0	98,95%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.85.070.303,00	Rp.0	98,61%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 713.054.888,00	Rp. 0	98,96%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.870.000,00	Rp. 0	100%
		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 693.125.300,00	Rp. 0	97,63%
		Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 1.327.354.872,00	Rp.0	99,29%
Jumlah			RP. 2.997.526.363,00	Rp.0	98,79%

2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi, khususnya dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Instrumen tersebut diwujudkan antara lain melalui pengembangan dan pemanfaatan beberapa sistem informasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan kinerja organisasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan optimal dan tepat guna untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Informasi dan berita terkait Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi tersebut dapat dilihat melalui :

Website : <https://biroadpim.id/>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Biro Adminstrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Biro Adminstrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Adminstrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Biro Adminstrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Capaian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kriteria /Kode warna
1.	Terwujudnya Pelayanan Pimpinan yang berkualitas dan Akuntabel	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	89,88	
		2. Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Setda	Nilai	BB (72)	72,25	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Biro Administrasi Pimpinan memiliki 2 sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja. Dimana masing masing sasaran memiliki satu indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Setda.

Capaian kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memiliki target 90 realisasi 89,88 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang mengindikasikan keberhasilan dalam menjalankan pelayanan publik. Sedangkan indikator kinerja Predikat Akuntabilitas Kinerja AKIP target 72 realisasi 72,25 dengan kategori sangat baik. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang mengindikasikan keberhasilan. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi akan terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola birokrasi reformasi dan pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja.

Sejumlah target indikator kinerja utama yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2025 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang.

Tabel Capaian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda
Provinsi Jambi Tahun 2025 (Periode Renstra 2025-2029)

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kriteria /Kode warna
1.	Terwujudnya Pelayanan Pimpinan yang berkualitas dan Akuntabel	1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	89,88	
			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Setda	Nilai	BB (72)	72,25	
			Keterbukaan Informasi	Nilai	95,5	95,5	

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi menetapkan 3 (tiga) indikator sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis. Pada Tahun 2025, capaian kinerja terhadap ketiga indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Selanjutnya untuk membahas terkait capaian kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi dapat disampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 100%. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN: “MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PELAYANAN PUBLIK”

INDIKATOR :

1. Predikat AKIP
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	89,88	99,86%
2.	Meningkatnya kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Setda	BB (72)	72,25	103,19%

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian realisasi kinerja dengan indikator Nilai SAKIP adalah sebesar 72,25 dengan predikat BB. Sementara itu, capaian realisasi dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Setda mencapai >100%. Untuk realisasi IKM Fasilitas Keprotokolan juga telah melampaui target yang ditetapkan, yakni 99,86%. Rata-rata persentase Capaian Kinerja Tahun 2025 dari empat indikator mencapai >100%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Capaian		Capaian 2025		
			2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,52	84,88	90	89,88	99,86%
2.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat AKIP	69,15	70,01	BB (72)	72,25	103,19%

Pada tabel terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 mengalami peningkatan pada realisasi Nilai SAKIP dari capaian tahun 2024, yakni dari 70,01 menjadi 72,25 dengan predikat BB, dimana hal ini telah melawati nilai target yang ditetapkan di tahun 2025. Begitu juga dengan capaian realisasi dengan indikator Kualitas Pelayanan Publik, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni dari 79,52 menjadi 89,88.

IK : PREDIKAT AKIP

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggungjawab.

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 terkait Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi, terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, meliputi : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; dan 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi memperoleh nilai 72,25 yang menunjukkan dalam kategori BB atau Sangat Baik.

Permasalahan dalam implementasi SAKIP di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi adalah masih kurangnya kesadaran para pengampu kegiatan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan menganalisa faktor pendorong maupun penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

Upaya-upaya yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi untuk meningkatkan predikat AKIP Tahun 2024, yaitu :

1. Melakukan penetapan target kinerja sesuai dengan pemetaan indikator kinerja berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
2. Menginformasikan kepada seluruh staf untuk melakukan

penyusunan Perjanjian Kinerja dengan indikator kinerja yang SMART pada level staf.

3. Mengikuti pendampingan dan reviu dalam perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan oleh Bappeda, Inspektorat, dan Biro Organisasi.
4. Menyusun Rencana Aksi Sasaran/Program/Kegiatan.
5. Melakukan rapat internal rutin untuk mengevaluasi rencana aksi sasaran/program/kegiatan.
6. Menyurati subbagian/bagian untuk melaksanakan evaluasi internal pada unit kerja masing-masing.

IK : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan Instansi Pemerintah, juga instrumen ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik.

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan di Biro Administrasi Pimpinan. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi dengan membentuk tim pelaksana kegiatan SKM. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesional manual dan online berupa barcode yang disebarkan kepada pengguna layanan sebanyak 100 responden.

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik pada Biro Administrasi Pimpinan tahun 2025 diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik sebesar 89,88, sementara 2024 sebesar 84,88 dan realisasi IKM tahun 2023 sebesar 79,52. Artinya, terdapat peningkatan terhadap kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik yang ada di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan karena adanya komitmen yang kuat baik dari pimpinan, para pejabat dan staf untuk terus memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

Laporan IKM 2025 nilai unsur terendah adalah penanganan pengaduan dengan nilai unsur sebesar 2,225, berdasarkan data tersebut, maka permasalahan yang ada adalah penanganan pengaduan. Masyarakat berpendapat belum adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan keluhan, saran dan pendapat masyarakat. Oleh karena itu, untuk yang akan datang, Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jambi akan membuat kotak saran/kanal aduan baik secara online maupun offline yang dapat menampung keluhan, saran dan pendapat masyarakat.

Terlepas dari adanya beberapa permasalahan dalam Pelayanan pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi, dari data diketahui bahwa pelaksanaan Pelayanan sudah berjalan sangat baik. Ada beberapa unsur yang mendapatkan nilai tinggi, tapi ada juga yang bernilai rendah. Untuk unsur-unsur yang nilainya diatas rata-rata, diupayakan untuk tetap dan ditingkatkan. Sedangkan unsur yang masih dinilai kurang harus dilakukan peningkatan dan pemantauan agar bisa dirasakan lebih baik oleh masyarakat. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2026, antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan (unsur prosedur pelayanan).
2. Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent (unsur perilaku petugas).

Sasaran dan IKU Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi berdasarkan Renstra 2025-2029

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 (Periode Renstra 2025-2029)

No.	Sasaran	Indikator	Capaian		Capaian 2025		
			2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,52	84,88	90	89,88	99,86%
		Predikat AKIP	69,15	70,01	BB (72)	72,25	103,19%
		Keterbukaan Informasi	-	-	95,5	95,5	100%

Sejalan dengan implementasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi pada Tahun 2025 melakukan penyesuaian terhadap penetapan sasaran strategis. Penyesuaian tersebut mengakibatkan adanya perbedaan sasaran strategis antara Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2025, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah pada periode awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Penetapan sasaran strategis ini merupakan bentuk penyederhanaan dan pemfokusan kinerja perangkat daerah agar lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

IK : KETERBUKAAN INFORMASI

Indikator Keterbukaan Informasi merupakan salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja” pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun 2025, indikator Keterbukaan Informasi ditetapkan dengan target sebesar 95,5, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai juga sebesar 95,5,

sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100%. Dengan demikian, target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dapat dicapai secara penuh.

Dalam dokumen perencanaan Biro Administrasi Pimpinan, indikator Keterbukaan Informasi memiliki target jangka menengah yang meningkat secara bertahap. Target yang tercantum adalah 96,8 pada tahun 2025, 96,9 pada tahun 2026, 97 pada tahun 2027, 97,1 pada tahun 2028, dan 97,2 pada tahun 2029. Namun demikian, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 periode Renstra 2025–2029, target indikator Keterbukaan Informasi tercantum sebesar 95,5 dan realisasi sebesar 95,5.

Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 perlu menjadi dasar evaluasi dan penyelarasan dokumen perencanaan agar target tahunan, target jangka menengah dan Perjanjian Kinerja memiliki konsistensi dan keterhubung Keberhasilan pencapaian indikator Keterbukaan Informasi sebesar 100% didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen pimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian informasi;
3. Dukungan sumber daya aparatur, khususnya personel yang melaksanakan fungsi komunikasi, dokumentasi dan kehumasan;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung;
5. Koordinasi antarbagian dan pemangku kepentingan;
6. Dukungan anggaran yang memungkinkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan yang jelas.

3.4 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja untuk seluruh kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.997.526.363 (98,79%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.034.283.551. Adapun rincian realisasi anggaran belanja yang dikelola Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 2.997.526.363 (98,79%) dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 3.034.283.551
2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.0 (0%) dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran Belanja Modal sebesar Rp.0

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	90	84,88	94,31%	2.863.432.551,00	2.828.475.363,00	98,89%
			72	72,25	98,61%	170.851.000,00	169.051.000,00	103,19%
Total Belanja						3.034.283.551,00	2.997.526.363,00	98,79%

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun transisi dari Rencana Strategis Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan 2025-2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil Laporan Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Periode 2021-2026

- a. Indikator kinerja untuk Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atau opsi nilai dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh anggaran sebesar Rp. **3.034.283.551,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 2.997.526.363** atau **98,79%**

2. Periode 2025-2029

- a. Pada Indikator Kinerja semula hanya 2 indikator, kemudian bertambah menjadi 3 indikator yaitu Nilai Sakip Setda, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Keterbukaan Informasi.

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti:

- a. Kondisi Sumber Daya Aparatur yang kurang berkompeten dan memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Fasilitas kerja yang kurang memadai (laptop/komputer/printer) sehingga menghambat kelancaran kinerja dan produktifitas pegawai.
- c. Kurangnya sinergi antara bagian dan subbagian
- d. Pengawasan yang masih relatif lemah

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan bimtek sesuai dengan tupoksi
- b. Perlunya penambahan fasilitas kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan sinergi lintas bagian dan sub bagian
- d. Meningkatkan pengawasan oleh atasan langsung secara berjenjang



Pemerintah Provinsi Jambi

**BIRO ORGANISASI SETDA
PROVINSI JAMBI**

**Jl. Jend. A. Yani No. 1
Telanaipura Jambi**

**LAPORAN KINERJA (LKj)
BIRO ORGANISASI SETDA
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi tahun 2025. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintahan selama satu tahun Anggaran. Proses Kinerja Biro Organisasi telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJ Biro Organisasi. Adapun tujuan penyusunan LKJ untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi di masing-masing perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJ juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas di Lingkup Pemerintah.

Akhirnya, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 ini. Kami menyadari Laporan Kinerja (LKj) ini masih perlu penyempurnaan. Walau demikian, Biro Organisasi selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan seperti meningkatkan kompetensi/ kualitas aparatur yang dalam penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi, besar harapan semoga Laporan Kinerja (LKj) ini bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.

Jambi, Januari 2026

LA BIRO ORGANISASI,



Dr. H. M. Thohir, S.Pd., M.Pd

Pembina

NIP. 19830727 201001 1 018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025, merupakan bagian dari rentang waktu implementasi Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jambi yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja (LKj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan gambaran capaian kinerja selama pelaksanaan anggaran Tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

Rencana kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi yang dilaksanakan sesuai dengan Struktur Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi yang membawahi 3 (tiga) Bagian, dan 9 (sembilan) Sub Bagian yang bertanggung jawab melaksanakan rencana kinerja Biro Organisasi Setda yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa hasil capaian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi selama Tahun 2025 telah berhasil mencapai sasaran prioritas yakni pelaksanaan penataan kelembagaan daerah, tatalaksana, pelayanan publik, koordinasi akuntabilitas, anjab dan ABK serta Budaya Kerja lingkup Setda Provinsi Jambi yang ditargetkan, meskipun secara keseluruhan belum dapat dicapai pada Tahun 2025 ini.

Disadari bahwa capaian kinerja dimaksud, baik yang telah berhasil maupun yang masih perlu peningkatan merupakan bahan pelajaran yang sangat berharga dalam peningkatan kinerja unit kerja di jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Berdasarkan analisis atas kinerja Tahun 2025 tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah penting sebagai strategi dalam pemecahan permasalahan pada masa-masa yang akan datang, dan tidak terlepas dari strategi kebijakan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi antara lain :

1. Mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dengan fokus pada koordinasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan secara maksimal.
2. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku, serta ketepatan waktu pelaksanaan.
3. Konsistensi dalam melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, instansi di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak lain dalam melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Tetap memegang teguh azas efisiensi dan efektifitas sumberdaya yang tersedia serta tepat waktu dan sasaran dalam setiap langkah pelaksanaan kebijakan administrasi pemerintahan dan pembangunan di jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	9
D. Komposisi Pegawai.....	10
E. Permasalahan Utama	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1. Perencanaan	13
2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Setda Provinsi Jambi	13
2.1.1 Tujuan	13
2.1.2 Sasaran	14
2.2. Visi dan Misi	14
2.3. Strategi.....	15
2.4. Kebijakan	15
2.5. Perjanjian Kinerja	15
2.6. Program dan Kegiatan	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja Biro	24
B. Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	64
Lampiran	43

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi merupakan unsur staf di jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum. Secara Organisasi, Biro Organisasi Setda ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

BAB I berisi :

- A. Gambaran Umum
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Komposisi Pegawai
- E. Permasalahan Utama
- F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 2, Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Pergub Nomor 25 Tahun 2020 tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah, Biro Organisasi mempunyai fungsi, antara lain :

1. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
2. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
4. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Biro Organisasi dibantu oleh :

- a. Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab.
- b. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
- c. Kepala Bagian Tatalaksana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai fungsi antara lain :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Kelembagaan Provinsi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi;
- e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Analisis Jabatan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
- c. menyusun analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan;
- d. menyusun analisis beban kerja berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;
- e. menyiapkan koordinasi program penyusunan formasi pegawai dan peta jabatan;

- f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan;
- g. mengumpulkan data formasi jabatan, teknis pelaksanaan pemanfaatan hasil analisis jabatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan analisis beban kerja, informasi pegawai dan peta jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. membina penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan Kabupaten/Kota;
- j. membina penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan Kabupaten/Kota; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh biro organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas :

- a. mengkaji dan analisis peningkatan kerja berdasarkan indikator dan 8 (delapan) area perubahan (manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik);
- b. mengoordinasikan peningkatan kinerja berdasarkan indikator 8 (delapan) area perubahan;
- c. membina terhadap 8 (delapan) kelompok kerja area perubahan pada pemerintah Provinsi pemerintah Kabupaten/Kota dan;
- d. melaksanakan fasilitasi dalam verifikasi penilaian peningkatan kinerja 8 (delapan) area perubahan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Akuntabilitas Kinerja, mempunyai tugas:

- a. mengkaji dan analisis di bidang akuntabilitas kinerja;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang akuntabilitas kinerja;
- c. melaksanakan monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sakip Kabupaten/Kota;
- d. menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Budaya Kerja, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan budaya kerja;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan budaya kerja;
- d. memverifikasi bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, bagian tatalaksana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dibidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbaggian Tatalaksana Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbaggian Pelayanan Publik, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan internal dan pelayanan publik;
- c. menyiapkan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur

negara dan Daerah;

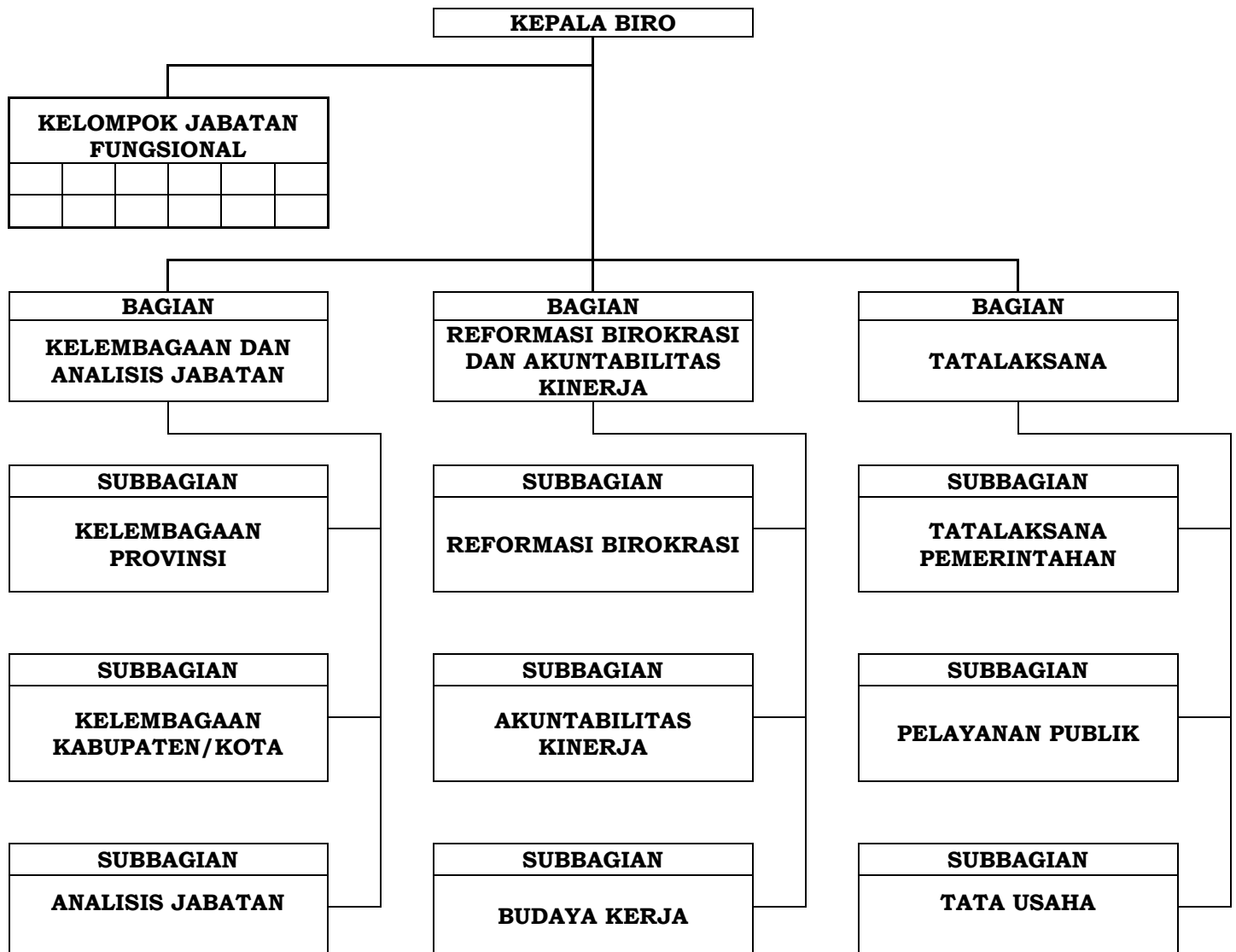
- d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang pelayanan publik;
- e. mengkaji dan analisis pelaksanaan pelayanan publik;
- f. mengelola pengaduan pelayanan publik untuk diproses lebih lanjut;
- g. menyusun standar pelayanan internal dan pelayanan publik;
- h. mengoordinasikan pelayanan dasar;
- i. melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan Daerah;
- j. melaksanakan monitoring di bidang pelayanan publik; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi Jambi, maka Susunan Organisasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) sub bagian.



Kepala Bagian sebagaimana tersebut di atas, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi serta memimpin Sub Bagian yang berada di bawahnya masing-masing. Kepala Bagian mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam merumuskan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan penataan kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana dan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, kepada seluruh

perangkat daerah dalam provinsi Jambi.

D. KOMPOSISI PEGAWAI

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi didukung oleh ASN Sebanyak 32 (tiga puluh dua) Orang dan Pegawai tidak tetap sebanyak 11 (Sebelas) orang, keadaan Pegawai Negeri Sipil sampai dengan Desember 2025 adalah sebagai berikut :

1). Berdasarkan Golongan

Golongan	Orang	%
IV	6	18,75
III	24	75
II	1	3,1
VII	1	3,1
Jumlah	32	100

2). Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Orang	%
Eselon II.b	-	-
Eselon III.a	3	25
Eselon IV.a	9	75
Jumlah	12	100

3). Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Orang	%
S2	7	21,8
S1	21	65,62
DIII	1	3,1
SLTA	2	7
SMP	1	3
Jumlah	32	100

4). Berdasarkan Jabatan dan Diklat Struktural

Golongan	Pim II	Pim III	Pim IV
Eselon II.b	-	-	-
Eselon III.a	-	-	-
Eselon IV.a	-	-	-
Jumlah	-	-	-

5). Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Orang	%
Pria	18	56,25
Wanita	14	43,75
Jumlah	32	100

E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI BIRO ORGANISASI

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Biro Organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi adalah tingginya dinamika perubahan kebijakan dalam peraturan perundang- undangan dalam kebijakan kelembagaan, akuntabilitas kinerja, serta tuntutan masyarakat atas pelayanan publik semakin besar mengikuti perkembangan jaman sehingga perlu kinerja pemerintah yang optimal dalam menyusun kebijakan bidang tersebut.

F. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Biro Organisasi setda Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKJ yang diawali dengan uraian singkat tentang kedudukan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi setda Provinsi Jambi, serta dimuat landasan hukum penyusunan LKJ dan aspek Strategi/ isu strategi, keterkaitan dengan RENSTRA dan RPJMD provinsi Jambi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Visi,Misi,Tujuan merupakan penjabaran Visi biro yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan perajian kinerja biro Organisasi setda provinsi Jambi.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja biro serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan

Perencanaan yang tepat sangat diperlukan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur sebagai upaya menciptakan peningkatan kinerja pelaksanaan pembangunan khususnya pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, dan sebagai acuan dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

BAB II berisi :

- A. Perencanaan
- B. Visi dan Misi
- C. Strategi
- D. Kebijakan

Penjabaran Program dan Kegiatan dimaksud tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi untuk mencapai Visi dan Misi, dalam meningkatkan kinerja aparatur yang ada. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengalokasikan program dan kegiatan yang berkaitan erat dengan Indikator Kinerja Utama Setda Provinsi Jambi yang dikelola Biro-Biro lingkup Setda diarahkan pada tupoksi masing-masing Biro disesuaikan dengan entensitas dan beban kerja masing-masing, agar pencapaian visi dan misi lebih optimal.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Setda Provinsi Jambi

2.1.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Biro Organisasi Setda dalam melaksanakan pembangunan adalah terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, organisasi dan ketatalaksanaan secara berdayaguna dan berhasil guna serta memberikan pelayanan secara teknis administrasi kepada seluruh

jajaran pemerintahan ditingkat Provinsi, dan pelaksanaan koordinasi administrasi pemerintahan pada tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

2.1.2. Sasaran

Sasaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi adalah menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Jambi yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan dan sasaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincih, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

2.2. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi Pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat,

Sebagai upaya menunjang terwujudnya visi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yakni *Terwujudnya Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah ridho Allah SWT.*

Misi Provinsi Jambi yaitu:

- a. Memantapkan Tata kelola Pemerintahan.
- b. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah.
- c. Memantapkan Kualitas sumber Daya Manusia.

Sedangkan Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2025-2029 yaitu: *“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”*

Adapun ketiga Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
- b. Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.
- c. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

2.3. Strategi

Strategi Merupakan Suatu Cara Untuk Merespon Isu Strategis yang dihadapi atau untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan Strategi sebagai suatu cara atau Pola untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Makna strategis dari beberapa ungkapan yang terkandung dalam visi dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan (Keunggulan) Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik serta Pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan efektivitas koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, kerukunan umat beragama.
3. Mewujudkan pelayanan informasi daerah yang berimbang, kokohnya interaksi sosial, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan/teknologi dan inovasi.

2.4. Kebijakan

Kebijakan rencana kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi berupa metode untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang secara garis besarnya diarahkan dapat membantu Sekretaris Daerah dalam rangka perumusan bahan-bahan pembinaan dan kebijakan penyelenggaraan di bidang organisasi, kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik serta Pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing.

2.5. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara pegawai atau pimpinan dengan organisasi atau lembaga pemerintahan untuk mencapai target kinerja. PK merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi.

Perjanjian Kinerja memiliki fungsi sebagai:

- Dasar Evaluasi Kinerja
- Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan
- Dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise kinerja
- Dasar untuk menetapkan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja dibuat setiap tahun dan merupakan turunan dari Perencanaan Strategis. PK juga merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perjanjian kinerja juga merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. dalamnya dituangkan kedalam indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Indikator Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Perjanjian kinerja Biro Organisasi Setda tersebut dimanfaatkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program yang selaras dengan RPJMD Provinsi Jambi sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 **Terwujudnya Jambi lebih Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional** dibawah ridho Allah SWT dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1 Misi 1 (Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026). Memantapkan Tatakelola Pemerintahan.

No	Sasaran	Indikator	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Provinsi Jambi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
		Indeks Pelayanan Publik	1. Permenpan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permenpan No. 29 Tahun 2022 tentang pemantauan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Pedoman Permenpan RB No. 5 Tahun 2023		

			tentang mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
		IKM Provinsi Jambi	Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat		
		Indeks Ber-AKHLAK	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No. 20 Tahun 2021 tentang Core Value ASN Ber-AKHLAK		
		Nilai SAKIP Provinsi Jambi	Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
		Jumlah Kebijakan Mekanisme Sistem kerja	Permenpan No. 07 Tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi		
		Nilai Kematangan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Biro	Survei Eksternal oleh Pihak Ketiga berdasarkan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017	Perangkat Daerah	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
		Nilai SAKIP Biro	Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB		

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yakni **Terwujudnya Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029** dibawah ridho Allah SWT dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2 Misi 1 (Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029). Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

No	Sasaran	Indikator	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik Provinsi Jambi	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB	Perangkat Daerah	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		

Dimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sesuai dengan RPJMD 2021-2026			
No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Provinsi Jambi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	88.05 Nilai
		Indeks Pelayanan Publik	4.01 Indeks
		IKM Provinsi Jambi	88.31 Indeks
		Indeks Ber-AKHLAK	68,3 Indeks
		Nilai SAKIP Provinsi Jambi	70.01 Nilai
		Jumlah Kebijakan Mekanisme Sistem kerja	1 Dokumen
		Nilai Kematangan Daerah	39.4 Nilai
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat AKIP	BB (78,12)
		Nilai IKM	B (81,25)

Perjanjian Kinerja Perubahan sesuai dengan RPJMD 2025-2029			
No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik Provinsi Jambi	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	10.62 Nilai
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	88.05 Nilai

2.6. Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan KUA-PPAS yang diberikan, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi mendapat pagu anggaran sebesar **Rp. 1.754.024.777** dan terdapat Perubahan Anggaran pada APDB sebesar **Rp. 438.761.876,-** jadi alokasi APDB Perubahan Tahun 2025 adalah **Rp. 1.315.262.902,-**. Mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi,

kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Biro Organisasi mempunyai 2 Program, 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 3 Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 118.861.637,-**.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 422.054.289,-**.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 32.660.000,-**.

II. Program Penataan Organisasi meliputi 2 Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 344.895.855,-**
2. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 396.791.120,-**

Berikut gambaran program/keg/sub keg Biro Organisasi beserta tahapan pelaksanaannya.

Program/Keg/Sub Keg	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Tahapan Pelaksanaan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000	72.246.537	1. Menyusun SK Tim Penyusunan RENJA 2. Menyusun Dokumen Renstra/Renja Biro dan Revisi 3. Menyusun Indikator Kinerja Utama dan Revisi. 4. Menyusun Perjanjian Kinerja 5. Menyusun Rencana Aksi 6. Menyusun Pohon Kinerja 7. Menyusun SOP Penyusunan Data Kinerja 8. Melaksanakan Rapat Internal berkaitan dengan perencanaan kinerja 9. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka studi tiru/koordinasi dan sinkronisasi kedalam dan luar daerah dalam rangka sinergitas perencanaan
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.500.000	15.004.000	1. Menyusun RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 2. Menyusun RKA Murni Tahun 2025 3. Melaksanakan rapat penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025 dan RKA Murni Tahun 2026

			4.Melaksanakan Rapat penyusunan RKA Perubahan Tahun 2025 dan RKA Murni Tahun 2026
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20.000.000	17.296.000	1.Menyusun dan mencetak DPA Tahun 2025 2.Menyusun dan mencetak DPA Perubahan Tahun 2025 3.Melaksanakan rapat perencanaan realisasi anggaran 4.Melaksanakan rapat penyusunan DPA Perubahan 5.Penggandaan bahan rapat
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.500.000	6.952.000	1. Menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Biro Tahun 2024. 2. Melaksanakan rapat internal berkaitan dengan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja pertriwulan. 3. Menyusun laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja pertriwulan 4. Penggandaan LKJ, Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja dan bahan rapat.
5) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.418.100	7.363.100	1. Melaksanakan rapat internal pra dan pasca evaluasi kinerja 2. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja 18 (delapan belas) sub kegiatan.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190.000.000	190.000.000	1. Menyediakan Peralatan dan perlengkapan kantor 2. Menyediakan alat/bahan komputer untuk kegiatan kantor 3. Menyediakan Smart TV untuk keperluan presentasi rapat masing-masing bagian 4. Menyediakan Laptop yang terhubung ke Smart TV untuk keperluan presentasi rapat masing-masing bagian 5. Menyediakan kamera digital untuk mendukung pelaporan kinerja.
2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.931.900	20.931.900	Menyediakan peralatan rumah tangga
3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	76.000.000	76.000.000	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran selama 1 Tahun
4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.924.777	135.122.389	1. Melaksanakan pembinaan dan monev dalam rangka pelaksanaan perpanjangan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah bidang kelembagaan. 2. Melaksanakan pembinaan dan monev bidang ketatalaksanaan pelayanan publik dan reformasi birokrasi ke daerah. 3. Menghadiri penyelenggaraan Rapat diluar daerah. 4. Melaksanakan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah. 5. Mendampingi/mewakili pimpinan dalam rangka kunjungan kerja ke daerah.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.750.000	32.660.000	1. Memelihara PC/Laptop 2. Memelihara printer
II. Program Penataan Organisasi			
4. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan			

Analisis Jabatan			
1) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	180.000.000	130.960.600	1. Menyusun SK Tim Fasilitas Penataan Kelembagaan Pprovinsi. 2. Melaksanakan Rakor Penataan UPTD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. 3. Mengevaluasi dan pembinaan terhadap UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Peraturan per Undang- Undangan.
2) Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota	215.000.000	158.772.775	1. Menyusun SK Tim Pembinaan dan Fasilitas Perangkat Daerah Kab/kota Provinsi Jambi. 2. Melaksanakan Rakor Kelembagaan Kabupaten/ Kota. 3. Melaksanakan Pembinaan Kab/Kota.
3) Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	80.000.000	55.162.480	1. Monitoring, evaluasi, sinkronisasi, pembinaan dan koordinasi ke kab/kota. 2. Konsultasi dan koordinasi ke pemerintah pusat. 3. Pelaksanaan Pemetaan Penyusunan Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan berdasarkan Undang-undang ASN, Permen PAN & RB dan Pergub OPD yang terbaru. 4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Jambi. 5. Laporan Akhir Kegiatan.
5. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
1) Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100.000.000	65.333.750	1. Rapat Hasil Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi, rapat teknis implementasi Reformasi Birokrasi dan Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Cetak Buku Road Map Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. 3. Pembinaan Penguatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab/kota. 4. Pembinaan/koordinasi/konsultasi/studi pembelajaran penguatan Reformasi Birokrasi.
2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	160.000.000	121.889.450	1. Rapat Persiapan Penyusunan LKj Provinsi Jambi. 2. Rapat Penyusunan LKj Provinsi Jambi Provinsi (terdiri 1 dan 2). 3. Rapat penyusunan Rancangan Akhir Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. 4. Rapat Koordinasi Peningkatan kualitas SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi. 5. Rapat Asistensi Peningkatan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. 6. Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas SAKIP Kab/kota diwilayah Provinsi Jambi. 7. Pembinaan dalam implementasi SAKIP Pemerintah Kab/kota. 8. Konsultasi dan koordinasi penguatan SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi. 9. Rapat Peningkatan kualitas dan penguatan SAKIP Provinsi Jambi. 10. Evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB.
3) Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	70.000.000	49.793.320	1. Pelaksanaan Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi. 2. Pelaksanaan Workshop Implementasi Budaya Kerja.

			3. Pelaksanaan Koordinasi/konsultasi Penguatan Budaya Kerja. 4. Pelaksanaan Pendampingan dalam rangka penerapan Budaya Kerja Kab/kota. 5. Pelaksanaan Laporan Evaluasi Kegiatan Budaya Kerja.
4) Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana	100.000.000	78.609.825	1. Rapat sosialisasi PMDN 10 dan penyusunan Ranpergub Pakaian Dinas. 2. Rapat Review SOP. 3. Rapat Monitoring Tata Naskah Dinas. 4. Pengadaan Pakaian Dinas. 5. Koordinasi evaluasi Pergub No. 50 Tahun 2011 tentang Standarisasi Sarpras Kerja di lingkup Pemprov Jambi. 6. Rapat Penyusunan Probis. 7. Pendampingan Penyusunan Dokumen Review SOP. 8. Pendampingan Pelaksanaan TND.
5) Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	130.000.000	81.164.775	1. Pembinaan dan Asistensi Kepatuhan Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Jambi. 2. Persiapan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik Tahun 2024. 3. Pembinaan, asistensi dan monitoring dalam rangka peningkatan aspek kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. 4. Pembinaan, asistensi dan monitoring dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada kab/kota di lingkup Provinsi Jambi. 5. Fasilitasi/asistensi Forum Konsultasi Publik Perangkat Daerah. 6. Persiapan dan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.
Total : 2 Program 5 Kegiatan 18 Sub Kegiatan	1.754.024.777	1.315.262.901	

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini akan menguraikan secara detail tentang kinerja aktual Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi sebagai wujud akuntabilitas kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi selama Tahun 2025 yang sudah direncanakan sebelumnya melalui Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang kemudian dituangkan lagi ke dalam kontrak kerja berupa Perjanjian Kinerja (PK) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran kinerja secara umum yang

BAB III berisi :

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30-50	Kurang

A. Capaian Kinerja Biro

Adapun capaian kinerja sasaran Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 terlihat pada form pengukuran kinerja. Untuk itu, berikut ini dilakukan pengukuran tingkat realisasi dan pembahasan akuntabilitas selama Tahun 2025.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3
Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Provinsi Jambi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	88.05 Nilai	88,08	100.03
		Indeks Pelayanan Publik	4.01 Indeks	4.03	100.50
		IKM Provinsi Jambi	88.31 Indeks	88.32	100.01
		Indeks BerAKHLAK	68,3 Indeks	68,1	99.70
		Nilai SAKIP Provinsi Jambi	70.01 Nilai	69.49	99.26
		Jumlah Kebijakan Mekanisme Sistem Kerja	1 Dokumen	1	100
		Nilai Kematangan Daerah	39.4 Nilai	39.4	100
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai IKM Biro	89 Indeks	91.13	102.39
		Nilai SAKIP Biro	78 Nilai	80.50	103.21
3.	Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik Provinsi Jambi	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	10.62 Nilai	Belum Rilis dari Kemenpan RB	Belum Rilis dari Kemenpan RB
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	88.05 Nilai	88,08	100.03

Analisis capaian kinerja utama Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatnya Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Provinsi Jambi

- Tingkat Kepatuhan standar pelayanan publik Pada tahun 2025, indikator Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik berhasil mencapai realisasi sebesar 88,08% dengan target 88,05%. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat organisasi dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan kategorisasi standar, nilai ini menempatkan organisasi pada Zona Hijau (Opini Kepatuhan Tinggi/Tertinggi). Capaian realisasi ini dipengaruhi oleh pemenuhan komponen standar pelayanan secara fisik maupun digital (website/PPID), sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait tarif, waktu penyelesaian, dan alur prosedur.
- Indeks Pelayanan Publik berhasil mencapai realisasi sebesar 4.03, melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebesar 4.01. Dengan tingkat capaian sebesar 100,50%, kinerja organisasi berada pada kategori Sangat Berhasil. Nilai indeks 4.03 ini juga mencerminkan bahwa secara umum kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan telah memenuhi standar mutu yang tinggi (Kategori A- / Sangat Baik). Hal ini dipengaruhi oleh Adanya konsistensi dalam pemutakhiran pelayanan dan standar pelayanan yang melibatkan partisipasi masyarakat (Forum Konsultasi Publik).
- IKM Provinsi Jambi dengan target 88,31% dan realisasi sebesar 88,32% menunjukkan performa yang Sangat Baik karena berhasil memenuhi sekaligus melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan Mendorong pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara elektronik (*e-Survei*) yang berkala dan real-time di setiap loket pelayanan publik OPD untuk mendeteksi penurunan kepuasan secara dini.
- Indeks BerAKHLAK (Core Values ASN) dengan target 68,3% dan realisasi sebesar 68,1% menunjukkan performa yang Baik, namun Tidak Mencapai Target (terdapat *gap* minus sebesar 0,2%). Hal ini disebabkan karena

pada Tahun 2025 Kementerian PAN RB tidak menyelenggarakan survey.

- Nilai SAKIP Provinsi Jambi dengan target Nilai SAKIP sebesar 70,01, Berdasarkan hasil evaluasi formal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), realisasi Nilai SAKIP yang diraih adalah 69,49. Proses penurunan kinerja dari tingkat kepala daerah (RPJMD) ke tingkat Perangkat Daerah (Renstra/Renja) hingga ke kinerja individu di beberapa OPD belum sepenuhnya selaras secara substantif, sehingga beberapa indikator kinerja program belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran strategis makro.
- Jumlah Kebijakan Mekanisme Sistem Kerja dengan target 1 Dokumen dan realisasi sebesar 1 Dokumen menunjukkan performa yang Sempurna (100% Tercapai). Hal ini dipengaruhi oleh Kelancaran proses harmonisasi dokumen kebijakan yang melibatkan Bagian Organisasi, Biro Hukum, serta konsultasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri atau KemenPANRB.
- Nilai Kematangan Daerah ditargetkan sebesar 39,4. Berdasarkan hasil penilaian atau verifikasi formal yang dilakukan oleh KemenPANRB, realisasi yang berhasil diraih berada tepat pada angka 39,4. Dengan tingkat capaian sebesar 100,00%, kinerja organisasi dikategorikan Sangat Berhasil / Tepat Target. Angka ini merefleksikan kelembagaan daerah telah berjalan secara stabil sesuai dengan parameter kapasitas organisasi yang direncanakan.

b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

- Nilai IKM Biro dengan target sebesar 89. Berdasarkan hasil pelaksanaan survei periodik dan rekapitulasi data umpan balik pengguna layanan, realisasi yang berhasil diraih mencapai angka 91,13 dengan nilai capaian 102,39%. Nilai ini diperoleh dari para pengguna layanan yang mengisi kuesioner sepanjang tahun, yang kemudian diolah secara statistik menggunakan standar baku KemenPANRB.
- Nilai SAKIP Biro pada tahun 2025 dengan target 78,00. Berdasarkan hasil

evaluasi internal (oleh Inspektorat) maupun verifikasi eksternal, realisasi Nilai SAKIP yang berhasil diraih adalah 80,50. dengan tingkat capaian 103,21%.

c. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik Provinsi Jambi

- Nilai Komponen Pelaporan kinerja dengan target 10,62, hasil evaluasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) belum dirilis. Mengingat angka realisasi yang belum diterbitkan, maka tingkat capaian kinerja belum bisa dihitung. Namun, secara administratif Biro Organisasi telah menyelesaikan dan menyampaikan dokumen pelaporan kinerja tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

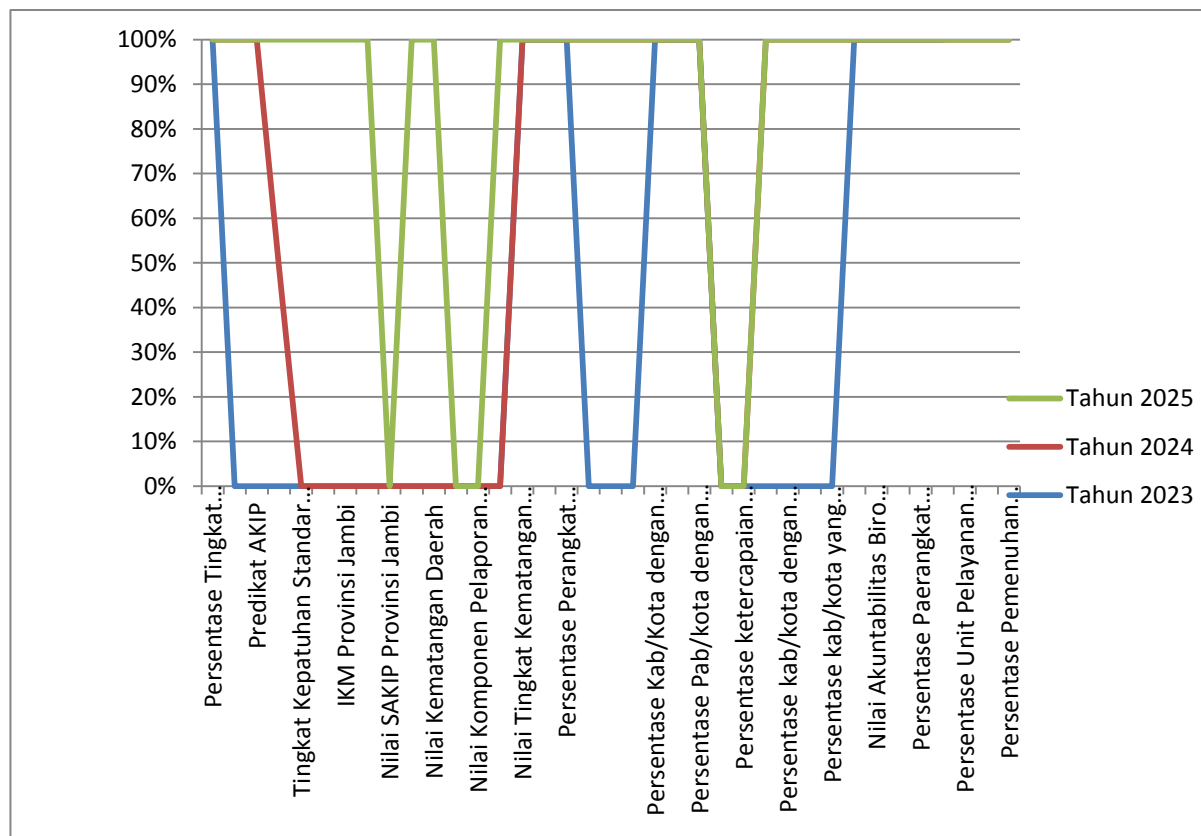
2. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu 2024 dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 5
Perbandingan realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Capaian Kinerja		Capaian 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Tingkat Ketercapaian Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi.	61,23	-	-	-	-
2	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	-	39,37	-	-	-
3	Predikat AKIP	-	80,5	-	-	-
4	Nilai IKM	-	88,94	89	91,13	102
5	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-	-	88,050	88,08	100.03
6	Indeks Pelayanan Publik	-	-	4,01	4,03	100
7	IKM Provinsi Jambi	-	-	88,31	88,32	100
8	Indeks BerAKHLAK	-	-	68,3	68,1	100
9	Nilai SAKIP Provinsi Jambi	-	-	70,01	69.49	99.26
10	Jumlah Kebijakan Mekanisme Sistem Kerja	-	-	1	1	100
11	Nilai Kematangan Daerah	-	-	39,4	39,4	100

12	Nilai IKM Biro	-	-	89	91,13	102
13	Nilai SAKIP Biro	-	-	78	80.50	103.21
14	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	-	-	10,62	Belum rilis oleh KemenpanRB	Belum rilis oleh KemenpanRB
15	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-	-	88,05	88,08	100.03

Selain itu kita juga dapat gambarkan capaian kinerja kedalam diagram sebagai berikut:



2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Biro Organisasi.

Tabel 7
Perbandingan realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian		Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026(%)
			2024	2025		
1.	Tingkat Kematanganan Perangkat Daerah	32,25	39,37	-	-	-
2.	Predikat AKIP	-	80,50	-	-	-

No.	Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian		Target 2026	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026(%)
			2024	2025		
3.	Nilai IKM Biro	80	88,94	91,13	90	101,25
4.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-	-	88,08	88,45	99,58
5.	Indeks Pelayanan Publik	-	-	4,03	3,75	107,46
6.	IKM Provinsi Jambi	-	-	88,32	87,86	100,52
7.	Indeks BerAKHLAK	-	-	68,1	68,05	99,94
8.	Nilai SAKIP Provinsi Jambi	-	-	69,49	70,50	98,56
9.	Jumlah Kebijakan Mekanisme Sistem Kerja	-	-	1	-	-
10.	Nilai Kematangan Daerah	-	-	39,4	37,18	105,9
11.	Nilai SAKIP Biro	65	-	80,50	80,53	99,96
12.	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	-	-	Belum rilis oleh KemenpanRB	-	-

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, ada permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi tahun 2025 antara lain :

- I. Dinamika Kebijakan tentang kelembagaan dan reformasi birokrasi yang begitu cepat, berdampak pada perubahan organisasi.
 - II. Perkembangan teknologi berdampak pada tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan tuntas.
 - III. Prestasi kerja belum sepenuhnya digunakan dalam pemberian reward dan punishment.
- 3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Kementerian PAN dan RB)**

Kementerian PANRB telah merumuskan visi yang berkomitmen mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden khususnya menuju Indonesia Emas 2045, melalui reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak langsung pada masyarakat. Fokus utamanya yaitu

Menciptakan Birokrasi yang ramping, lincah, berintegritas serta berbasis digital/elektronik (digital bureaucracy) untuk mendukung pelayanan publik yang cepat dan professional.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang profesional dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang Berkelas Dunia. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kementerian PANRB merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu:

1. **Pelayanan Informasi Berakhlak:** Pelayanan yang komunikatif, responsif, proaktif, integratif, dan edukatif.
2. **Optimasi Keterbukaan Informasi Publik:** Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik.
3. **Pelayanan Informasi Komunikatif, Responsif, Proaktif, Terintegratif, dan Informatif:** Pelayanan yang efektif dan efisien, serta menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
4. **Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik:** Menjamin aksesibilitas informasi bagi masyarakat dan unit kerja di KemenPANRB.

Untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian realisasi kinerja Biro Organisasi terhadap sasaran Renstra Biro dan Renstra Kementerian dilakukan review dengan hasil sebagaimana yang disajikan dalam Tabel berikut :

No	Sasaran pada Renstra (Biro Organisasi 2025-2029)			Sasaran pada Renstra K/L (Permenpan & RB 2025-2029)		
	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja	Target 2029	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tujuan: Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan melayani	1. Nilai Akip Provinsi Jambi	76,50	Tujuan: Terwujudnya Birokrasi yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing	Nilai Pelaksanaan RB Nasional	80

				Sasaran: Terwujudnya Instansi Pemerintah yang efektif, efisien dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional	71
		2. Indeks Pelayanan Publik	4,12	Sasaran: Terwujudnya Kualitas Pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik nasional	3.75
	Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan publik Provinsi Jambi	1. Nilai komponen pelaporan Kinerja	11.02			
		2. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	90.01			

4. Analisis Penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- a. Berdasarkan capaian kinerja Biro Organisasi tahun 2025 dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran kategori sangat baik, dari 11 (Sebelas) indikator kinerja Utama dan 26 (Dua Puluh Enam) Indikator Pendukung yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025, terdapat 1 (satu) realisasi indikator kinerja yang belum sesuai target sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks BerAKHLAK	68,3	68,1	99,70

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah Survey Indeks ASN BerAKHLAK dengan target 68,3%, tetapi nilai masih 68,1 dikarenakan pada Tahun 2025 Kementerian PAN RB tidak menyelenggarakan survey.

- b. Alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan permasalahan di atas yang menyebabkan terjadinya penurunan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, maka perlu dilakukan siasat perubahan kinerja untuk mengurangi dampak penurunan kinerja dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan membangun sistem monitoring budaya kerja internal yang real-time serta penguatan internalisasi

nilai BerAKHLAK Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan di keluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memaksa pemerintah daerah agar menggunakan anggaran seefektif mungkin tanpa menurunkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi bentuk efisiensi yang dilaksanakan dari sisi realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 1.314.876.949,- (99,97%) dari total anggaran yang dialokasikan artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 385.952,- atau (0,03%) dari total belanja Rp.1.315.262.901,-. Dalam hal ini jika dilihat dari besaran efisiensi yang dilakukan memang sangat kecil akan tetapi jika dibandingkan dengan nilai APBD sebelum perubahan Biro Organisasi telah melaksanakan efisiensi yang cukup signifikan yaitu dari belanja RP.1.754.024.777,- menjadi Rp. 1.315.262.901,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.438.761.876,-.

Dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2025 Biro Organisasi setda Provinsi Jambi secara umum mampu melaksanakan program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Secara lebih rinci pencapaian Program yang menjadi tanggungjawab Biro Organisasi adalah sebagaimana dijelaskan dengan uraian sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang dirancang untuk menyediakan pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan pemenuhan hak-hak aparatur di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Meskipun program ini bersifat pelayanan internal (*internal services*), perannya sangat vital sebagai penggerak utama. Tanpa adanya dukungan administrasi, keuangan, dan aset yang akuntabel melalui program ini, capaian target-target makro reformasi birokrasi Provinsi Jambi seperti Nilai

SAKIP Biro menjadi 80,50 (Predikat A) dan capaian IKM Biro sebesar 91,13 tidak akan dapat dieksekusi secara optimal.

Terdapat 3 kegiatan penunjang yaitu: kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Pada tahun 2025, program ini didukung oleh anggaran sebesar Rp 573.575.926,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 573.290.926,- (99,95%) dan capaian kinerja fisik sebesar 100%.

b. Program Penataan Organisasi

Jika program penunjang berfungsi sebagai mesin internal, maka Program Penataan Organisasi adalah produk utama yang dihasilkan Biro Organisasi untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi. program ini menjadi faktor kunci di balik capaian Nilai Kematangan Daerah (39,4) dan terbitnya Kebijakan Mekanisme Sistem Kerja.

Program ini berkontribusi langsung pada pencapaian indikator kinerja utama (IKU) daerah, terutama dalam mendongkrak Nilai SAKIP Provinsi Jambi dan memastikan target Nilai Kematangan Daerah tercapai 100% (39,4).

Terdapat 2 kegiatan penunjang yaitu: Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dan Kegiatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Program Penataan Organisasi didukung alokasi anggaran sebesar Rp 741.686.975,- dengan realisasi keuangan mencapai 741.586.023,- (99,99%) dan capaian target fisik sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran berjalan linear dengan output kebijakan yang dihasilkan.

8. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya

Dalam rangka mengefektifkan implementasi Akuntabilitas Kinerja, APIP/Inspektorat telah melakukan Evaluasi SAKIP pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi. Beberapa rekomendasi yang diberikan dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Dokumen Rencana Awal Renstra 2025-2029 yang sudah diformalkan harus menggunakan font atau huruf yang sama.
- 2) Dalam menyusun dan memformalkan Dokum Renstra dan Renja Perangkat daerah mempedomani permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata caara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 3) Menggunakan Informasi Capaian Kinerja pada laporan Kinerja sebagai dasar Penentuan Target Kinerja Tahun selanjutnya.
- 4) Menyusun Kebijakan Terkait Pemberian Penghargaan dan sanksi serta melakukan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil pengukuran Kinerja pada lingkup unit kerja.
- 5) Menggunakan Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal Untuk Perbaikan Perencanaan Kinerja dan Mengambil langkah kongkrit terkait Informasi yang disajikan dalam laporan Kinerja
- 6) Melakukan Monitoring dan evaluasi (Monev) Rencana Aksi Triwulan 1,2,3 dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui pimpinan OPD yang telah disertai dengan jadwal Evaluasi yang membut notulensi Rapat Mepedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas, Faktor Penghambat dan Pendorong selaras pada Aplikasi E PAKET JAMBI

Berdasarkan beberapa rekomendasi diatas, maka Biro Organisasi telah melakukan perbaikan secara komprehensif diantaranya:

- 1) Telah menggunakan font atau huruf yang sama dalam penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029
- 2) Telah menyusun Dokumen Renstra dan Renja berpedoman pada permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata caara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- 3) Telah menggunakan informasi laporan capaian kinerja sebagai dasar penentuan target kinerja untuk tahun selanjutnya, dalam Rangka Peningkatan Kinerja Biro Organisasi secara berkelanjutan.
- 4) Telah Menerbitkan Surat No.B/000.8.3/ 160/SETDA.ORG/3.3/VII/2025, tentang teguran atas tidak tercapainya Kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja
- 5) Telah Menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal dan Mengambil langkah kongkrit terkait Informasi yang disajikan dalam laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja
- 6) Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I, II, III dan IV yang disertai dengan Notulen, Absensi, jadwal Evaluasi Dokumentasi rapat Monitoring Rencana Aksi, secara berjenjang oleh Pimpinan Unit Kerja dengan mengetahui Kepala Biro yang mempedomani Peraturan Gubernur Jambi No.30 Tahun 2023 Tentang Tatanaskah Dinas, Faktor Penghambat dan Pendorong selaras pada Aplikasi E PAKET Jambi.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025 Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp. **1.754.024.777,-**, kemudian mengalami efisiensi atas intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar **RP. 1.315.262.901,-** (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Satu rupiah).

Anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Provinsi Jambi dengan komposisi Penggunaan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp. 1.315.262.901,- |
| 2. Belanja Modal | Rp. 0,- |

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya perangkat daerah yang efektif, efisien serta tata kelola birokrasi yang kapabel dan berkinerja tinggi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 573.575.926	Rp. 573.290.926	99.95%
	Program Penataan Organisasi	Rp. 741.686.975	RP. 741.586.023	99.99%
Jumlah Total		Rp.1.315.262.901	Rp.1.314.876.949	99.97%

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran pada tahun 2025 terdapat efisiensi sebesar **Rp.438.761.876,-** atau **33,35%** dimana pagu yang ditetapkan sebesar **1.315.262.901,-** terealisasi sebesar **Rp.1.314.876.949,- (99,97%)**. Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikan sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas yang dioptimalkan.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

BAB IV berisi :
Kesimpulan Hasil Capaian
Kinerja

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 telah dapat dicapai dengan baik, karena tingkat capaian realisasi anggaran telah dicapai di angka **99,97%**. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas program pembangunan bidang kelembagaan dan Anjab, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja lingkup Provinsi Jambi yang dilaksanakan melalui Bagian-Bagian di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi berjalan dengan sangat baik. Hal ini telah menggambarkan bahwa komitmen jajaran Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dalam mendukung perwujudan visi dan misi Jambi, yakni **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien,**

Selanjutnya, secara keseluruhan, capaian kinerja dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2025 akan menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis sebagai upaya memecahkan permasalahan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2025, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi merumuskan langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah (solusi) yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Penetapan aktivitas dalam kegiatan yang lebih fleksibel sehingga perubahan kebijakan tidak berdampak terhadap pencapaian kinerja.
2. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang

berada dalam lingkungan Biro Organisasi Setda dengan pihak-pihak terkait lainnya (*stakeholders*) dalam merumuskan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

3. Mendorong seluruh unit kerja untuk patuh dalam melaksanakan administrasi dengan Sistem/Aplikasi yang telah ada.
4. Komitmen pimpinan yang lebih besar agar mampu mendorong dan mengubah perilaku PNS agar dapat berubah, keluar dari zona nyaman.

Namun demikian, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, sehingga implementasi sistem Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) diharapkan akan lebih baik pada masa mendatang.

Akhir kata, kami segenap Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 mengharapkan agar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

**TABEL PERUBAHAN RENSTRA BIRO ORGANISASI PADA RPJMD PERUBAHAN PROVINSI JAMBI
PERIODE 2022-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang ung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih,Transp aran,dan Akuntabel dengan Penyelenggar aan Publik berkwalitas	Meningkatn ya kualitas Implementa si Akuntabilita s Kinerja	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PREDIKAT SAKIP BIRO	B	363,474,6 30	BB	475,963,00 0	BB	595,000,0 00	BB	850,000,0 00	BB	960,000,0 00	BB	1,040,000, 000	BB	1,040,000,00 0	Biro Organis asi Setda Provins i Jambi
		4.01.01. 1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Biro	65	56,953,50 0	70, 01	102,963,00 0	73,0 0	165,000,0 00	75	200,000,0 00	77	235,000,0 00	79, 40	240,000,0 00	79,4 0	240,000,000	
		01	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	2	37,922,00 0	3	73,000,000	4	100,000,0 00	4	100,000,0 00	4	105,000,0 00	4	130,000,0 00	4 Dok	130,000,000	Biro Organis asi Setda Provins i Jambi
		02	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2	2,192,500	2	9,963,000	2	25,000,00 0	2	30,000,00 0	2	35,000,00 0	2	35,000,00 0	2 Dok	35,000,000	Biro Organis asi Setda Provins i Jambi

		04	3	Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2	7,500,000	2	8,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	2	30,000,000	2	35,000,000	2	Dok	35,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
		06	4	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	5,680,000	2	5,000,000	2	10,000,000	4	15,000,000	4	45,000,000	4	20,000,000	4	Lap	20,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
		07	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	3,659,000	2	7,000,000	4	10,000,000	4	30,000,000	4	20,000,000	4	20,000,000	4	Lap	20,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	80	272,321,130	85	338,000,000	88	380,000,000	88,90	595,000,000	89	660,000,000	90	720,000,000	90	Indeks	720,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
		02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	86,332,838	4	70,000,000	4	10,000,000	4	150,000,000	4	200,000,000	4	220,000,000	4	Paket	220,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
		03	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket peralatan rumah	1	17,026,652	1	20,000,000	1	20,000,000	2	30,000,000	2	35,000,000	2	35,000,000	2	Paket	35,000,000	Biro Organisasi Setda

		LKj Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025																Provinsi Jambi	
		Rumah Tangga	tangga yang disediakan																
	05	3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	41,998,640	2	48,000,000	2	60,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2	65,000,000	2 Paket	65,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
	09	4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	126,963,000	25	200,000,000	35	290,000,000	40	350,000,000	50	360,000,000	60	400,000,000	60 Paket	400,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
	4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	80	34,200,000	85	35,000,000	88	50,000,000	88,90	55,000,000	89	65,000,000	90	80,000,000	90 Indeks	80,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
	03	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	34,200,000	4	35,000,000	4	50,000,000	4	55,000,000	4	65,000,000	4	80,000,000	4 Lap	80,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
Menjadi Institusi Pendorong Terwujudnya Tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis melalui reformasi birokrasi	Meningkatnya Birokrasi yang modren melalui efektifitas dan Efesiensi penyelenggaraan Pemerintah	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	TINGKAT KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH	32,25	1,349,287,370	33,45	680,000,000	34,25	775,000,000	35,75	900,000,000	37,01	1,300,000,000	37,18	1,250,000,000	37,18 Indeks	1,250,000,000	
		4.01.02.1.01	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang ditata Kelembagaannya	75	260,582,400	80	250,000,000	85	300,000,000	90,00	350,000,000	95	500,000,000	100	450,000,000	100 Persen	450,000,000	
				Persentase Kab/Kota yang ditata Kelembagaannya	65	192,846,320	70	280,000,000	75	300,000,000	80	350,000,000	90	450,000,000	100	450,000,000	100 Persen	450,000,000	Biro Organisasi

			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai Dasar Penataan Kepegawaian	50	137,617,500	60,800	150,000,000	75,400,000	100	200,000,000	90	350,000,000	100	350,000,000	100 Persen	350,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	
01	1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	1	260,582,400	1	250,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	1	500,000,000	1	450,000,000	1 Dok	450,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
02	2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota	1	192,846,320	1	280,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	1	450,000,000	1	450,000,000	1 Dok	450,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
03	3	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	1	137,617,500	1	150,000,000	1	175,000,000	1	200,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1 Dok	350,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
4.01.02.1.02		Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Sasaran Strategis RB Genaral	50	142,005,700	53	150,000,000	55	200,000,000	57	225,000,000	71	350,000,000	85,71	400,000,000	85,71 Persen	400,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
			Persentase Perangkat daerah dengan Predikat	50	224,663,000	60	150,000,000	65	175,000,000	69,77	200,000,000	70	325,000,000	73,08	350,000,000	73,08 Persen	350,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi

			Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025														i Jambi	
			SAKIP minimal "BB"	15	111,107,250	20	100,000,000	23	120,000,000	50	140,000,000	60	360,000,000	80	400,000,000	80 Persen	400,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
			Persentase Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang telah menyusun Kebijakan Budaya Kerja	50	69,290,400	60	120,000,000	70	160,000,000	80	180,000,000	90	315,000,000	100	400,000,000	100 Persen	400,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
			Persentase Unit Pelayanan Publik Provinsi Jambi dengan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Baik	60	211,174,800	70	175,000,000	80	190,000,000	85	210,000,000	90	400,000,000	95	400,000,000	95 Persen	400,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
01	1	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	142,005,700	1	150,000,000	1	200,000,000	1	225,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	1 Dok	400,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
02	2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	224,663,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	200,000,000	1	325,000,000	1	350,000,000	1 Dok	350,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

		03	3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	111,107,250	1	100,000,000	1	20,000,000	140,000,000	1	360,000,000	1	400,000,000	1 Dok	400,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
		04	4	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1	69,290,400	1	120,000,000	1	160,000,000	180,000,000	1	315,000,000	1	400,000,000	1 Dok	400,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
		05	5	Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1	211,174,800	1	175,000,000	1	190,000,000	210,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1 Dok	400,000,000	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
		TOTAL						1,712,762,000		1,155,963,000		1,370,000,000	1,750,000,000		2,260,000,000		2,290,000,000		2,290,000,000

KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI JAMBI,

TABEL RENSTRA BIRO ORGANISASI PROVINSI JAMBI

PERIODE 2026-2030

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2024)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang ung Jawab	Loka si
							Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan melayani				Nilai AKIP Provinsi Jambi	68,42		70,50		71,50		73,01		74,60		76,50		76,50 Nilai		Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
				Indeks Pelayanan Publik	3,67		3,75		3,84		3,90		3,94		4,12		4,12 Indeks			
	Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan publik provinsi Jambi			Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	10,39		10,72		10,82		10,92		11,02		11,12		11,12 Nilai			
				Tingkat Kepatuhan standar Pelayanan Publik	85,62		88,45		89,23		89,34		90,01		90,23		90,23 Tingkat			
	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan Akuntabel	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Biro	80,50	422,749,161	80,53	1,248,000,000	80,54	1,497,600,000	80,55	1,797,120,000	80,56	2,156,544,000	80,57	2,587,852,800	80,57 Nilai	2,587,852,800		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Biro (IKM)	88,94		90,00		90,01		90,05		90,07		90,08		90,08 Indeks			
	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi Fisik	100	96,155,190	100	288,000,000	100	345,600,000	100	414,720,000	100	497,664,000	100	597,196,800	100 Persen	597,196,800		
				Persentase Realisasi Keuangan	91,27		93		94		95		96		98		98 Persen			
Tingkat efektifitas dan efesiensi Pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan				100	100		100		100		100		100 Persen							
Persentase Tindak lanjut atas Evaluasi Kinerja				100	100		100		100		100		100 Persen							

Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	01	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	64,467,690		156,000,000	187,200,000	224,640,000	4	269,568,000	4	323,481,600	4 Dok	323,481,600
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	02	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2	7,642,500	2	42,000,000	50,400,000	60,480,000	2	72,576,000	2	87,091,200	2 Dok	87,091,200
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	04	3	Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2	11,500,000	2	42,000,000	50,400,000	60,480,000	2	72,576,000	2	87,091,200	2 Dok	87,091,200
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	06	4	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	5,405,000	4	24,000,000	28,800,000	34,560,000	4	41,472,000	4	49,766,400	4 Lap	49,766,400
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	07	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	7,140,000	4	24,000,000	28,800,000	34,560,000	4	41,472,000	4	49,766,400	4 Lap	49,766,400
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Admistrasi Umum yang dipenuhi	100	293,853,971	100	864,000,000	1,036,800,000	1,244,160,000	1,492,992,000	100	1,791,590,400	100	1,791,590,400	100 Persen	1,791,590,400

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	02	1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	77,529,892	264,000,000	16,800,000	380,160,000	4	456,192,000	4	547,430,400	4	Paket	547,430,400
Tersedianya Peralatan Rumah tangga	03	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	7,560,488	42,000,000	50,400,000	60,480,000	2	72,576,000	2	87,091,200	2	Paket	87,091,200
Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	05	3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2	50,634,100	78,000,000	93,600,000	112,320,000	2	134,784,000	2	161,740,800	2	Paket	161,740,800
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	09	4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	158,129,491	480,000,000	576,000,000	691,200,000	60	829,440,000	65	995,328,000	65	Paket	995,328,000
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	100	32,740,000	96,000,000	115,200,000	138,240,000	100	165,888,000	100	199,065,600	100	Persen	199,065,600
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	03	1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	32,740,000	96,000,000	115,200,000	138,240,000	4	165,888,000	4	199,065,600	4	Lap	199,065,600
Meningkatnya Tata kelola Organisasi	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	37	921,275,617	3,960,000,000	4,752,000,000	5,702,400,000	37,45	6,842,880,000	37,55	8,211,456,000	37,55	Nilai	8,211,456,000

Pemerintahan Daerah				IKM Provinsi Jambi	86,96		87,56		87,88		88,28		88,31		88,40		88.4 Indeks	
				Indeks ASN Berakhlak	68,01		68,05		68,06		68,08		68,09		68,10		68.10 Indeks	
				Persentase Perangkat Daerah Dengan Hasil Penilaian Laporan Kinerja $\geq 9,5$	76,00		80,00		81,00		82,00		83,00		84,00		85 Persen	
				Persentase Pemenuhan Penilaian Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi	80		80		80		80		80		80		80 Persen	
				Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Melaksanakan Ketatalaksanaan Sesuai Aturan	65		69,76		74,41		81,39		93,02		100		100 Persen	
				Persentase Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi	34		54		60		67		87		100		100 Persen	
				Persentase Pemenuhan Aspek Indikator Kinerja Pelayanan Publik	15		50		60		75		80		100		100 Persen	
Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4.01.02.1.01	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang ditata Kelembagaannya	80	138,409,400	89	540,000,000	90	648,000,000	93,00	777,600,000	95	933,120,000	100	1,119,744,000	100 Persen	1,119,744,000	
			Persentase Kab/Kota yang ditata Kelembagaannya	100	174,320,850	100	540,000,000	100	648,000,000	100	777,600,000	100	933,120,000	100	1,119,744,000	100 Persen	1,119,744,000	
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai Dasar Penataan Kepegawaian	90	76,466,500	93	540,000,000	95	648,000,000	97	777,600,000	100	933,120,000	100	1,119,744,000	100 Persen	1,119,744,000	
Terlaksananya Penataan Kelambagaan	01	1	Sub Kegiatan Fasilitasi	Jumlah Dokumen hasil Penataan Kelambagaan	1	138,409,400	1	540,000,000	1	648,000,000	1	777,600,000	1	933,120,000	1	1,119,744,000	1 Dok	1,119,744,000

**LKj Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
Tahun 2025**

Provinsi			Penataan Kelembagaan Provinsi	Perangkat Daerah Provinsi														
LKJ Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025																		
Terlaksananya Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	02	2	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab/Kota	1	174,320,850	1	540,000,000	1	648,000,000	1	777,600,000	1	933,120,000	1	1,119,744,000	1 Dok	1,119,744,000
Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	03	3	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	1	76,466,500	1	540,000,000	1	648,000,000	1	777,600,000	1	933,120,000	1	1,119,744,000	1 Dok	1,119,744,000
Meningkatnya Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.01.02.1.02	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pemenuhan Data dukung Penilaian Kegiatan Utama RB	80	74,130,500	80	480,000,000	80	576,000,000	80	691,200,000	80	829,440,000	80	995,328,000	80 Persen	995,328,000	
			Persentase Pemenuhan Unsur Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	73	137,035,200	73,08	420,000,000	85	504,000,000	90	604,800,000	95	725,760,000	100	870,912,000	100 Persen	870,912,000	
			Persentase Perangkat Daerah yang telah melengkapi unsur penerapan Budaya Kerja	73,6	56,940,000	78,2	480,000,000	80,5	576,000,000	82,8	691,200,000	85	829,440,000	87,4	995,328,000	87,4 persen	995,328,000	
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Peta Proses Bisnis dan SOP	34,88	96,003,467	58,13	480,000,000	69,71	576,000,000	81,39	691,200,000	93,02	829,440,000	100	995,328,000	100 Persen	995,328,000	
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan tata naskah dinas dan pakaian Dinas sesuai aturan	50		60		70		80		80,05		90		100 Persen		
			Persentase Unit Pelayanan Publik Provinsi Jambi dengan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kategori sangat Baik	45	167,969,700	47	480,000,000	58	576,000,000	70	691,200,000	81	829,440,000	86	995,328,000	86 Persen	995,328,000	

LKj Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Tahun 2025																		
Terlaksananya Reformasi Birokrasi	01	1	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	74,130,500	1	480,000,000	1	576,000,000	1	691,200,000	1	829,440,000	1	995,328,000	1 Dok	995,328,000
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	02	2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	137,035,200	1	420,000,000	1	504,000,000	1	604,800,000	1	725,760,000	1	870,912,000	1 Dok	870,912,000
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	03	3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	56,940,000	1	480,000,000	1	576,000,000	1	691,200,000	1	829,440,000	1	995,328,000	1 Dok	995,328,000
Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	04	4	Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	1	96,003,467	1	480,000,000	1	576,000,000	1	691,200,000	1	829,440,000	1	995,328,000	1 Dok	995,328,000
Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	05	5	Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	1	167,969,700	1	480,000,000	1	576,000,000	1	691,200,000	1	829,440,000	1	995,328,000	1 Dok	995,328,000
TOTAL						1,344,024,778		5,208,000,000		6,249,600,000		7,499,520,000		8,999,424,000		10,799,308,800		10,799,308,800

KEPALA BIRO ORGANISASI,

Dr.H.M.THOHIR.S.Pd,M.Pd

NIP. 19830727 201001 1 018

Lampiran II Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (Awal)
Kepala Biro Organisasi

02/06/25 11:37

Laporan Perjanjian Kinerja



Provinsi Jambi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. H.M. THOHIR, S.PD.,M.PD
Jabatan : KEPALA BIRO ORGANISASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI

Pihak Pertama

DR. H.M. THOHIR, S.PD.,M.PD
PEMBINA (IV/A)
NIP. 198307272010011018

02/06/25 11.37

Laporan Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Efektifitas Manajemen Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Provinsi Jambi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	88.05 Nilai
		Indeks Pelayanan Publik	4.01 Indeks
		IKM Provinsi Jambi	88.31 Indeks
		Indeks BerAkhlak	69.5 Indeks
		Nilai SAKIP Provinsi Jambi	70.01 Nilai
		Jumlah Kebijakan Mekanisme Sistem Kerja	1 Dokumen
		Nilai Kematangan Daerah	39.4 Nilai
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai IKM Biro	89 Indeks
		Nilai SAKIP Biro	78 Nilai

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.035.000.000	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	719.024.777	

Jambi, 31 Januari 2025

GOVERNOR JAMBI

HEAD OF ORGANIZATION


DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GOVERNOR JAMBI


DR. H.M. THOHIR, S.PD, M.PD
PEMBINA (IV/A)
NIP. 198307272010011018

Perjanjian Kinerja (Perubahan)
Kepala Biro Organisasi

10/09/25 06:46

Laporan Perjanjian Kinerja



Provinsi Jambi

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. H.M. THOHIR, S.PD.,M.PD
Jabatan : KEPALA BIRO ORGANISASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUDIRMAN, S.H.,M.H
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

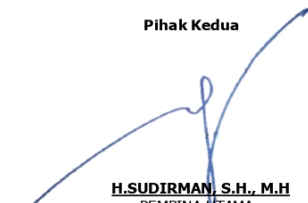
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 10 September 2025

Pihak Kedua


H.SUDIRMAN, S.H., M.H
PEMBINA UTAMA
NIP.19680109 199203 1 002

Pihak Pertama


DR. H.M. THOHIR, S.PD.,M.PD
PEMBINA (IV/A)
NIP. 198307272010011018

10/09/25 06:46

Laporan Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

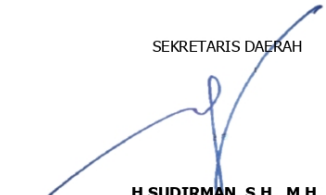
SEKRETARIAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik Provinsi Jambi	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	10,62 Nilai
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan publik	88,05 Nilai

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penataan Organisasi	741.686.975	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	573.575.926	

Jambi, 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH


H.SUDIRMAN, S.H., M.H
PEMBINA UTAMA
NIP.19680109 199203 1 002

KEPALA BIRO ORGANISASI


DR. H.M. THOHIR, S.PD., M.PD
PEMBINA (IV/A)
NIP. 198307272010011018

Lampiran 3

LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA, KEUANGAN DAN KEBIJAKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Triwulan Ke : IV (Empat)
Nama Perangkat : Biro
Daerah : Organisasi

No	Uraian (Program dan Kegiatan)	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)			Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja pertahun		Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Masalah/Kendala	Solusi/Kebijakan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)		s.d Desember	%	Jumlah	Satuan	Triwulan IV	s.d des	%		
1	2	3	4	5	6	7	$8=5/4 \times 100$	9	10	11	12	$13=10/9 \times 100$	14	15
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	719,024,777,00	573,575,926,00	145,448,851	573,575,926,00	573,290,926,00	99,95							
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148,418,100,00	118,861,637,00	29,556,463	118,861,637,00	118,576,637,00	99,76							
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90,000,000	72,246,537	17,753,463	72,246,537	72,246,537	100,00	2	Dok	2	2	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17,500,000	15,004,000	2,496,000	15,004,000	15,004,000	100,00	2	Dok	2	2	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20,000,000	17,296,000	2,704,000	17,296,000	17,296,000	100,00	2	Dok	2	2	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,500,000	6,952,000	2,548,000	6,952,000	6,952,000	100,00	2	Lap	2	2	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,418,100	7,363,100	4,055,000	7,363,100	7,078,100	96,13	4	Lap	4	4	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	537,856,677,00	422,054,289,00	115,802,388	422,054,289,00	422,054,289,00	100,00							
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190,000,000	190,000,000	-	190,000,000	190,000,000	100,00	1	Paket	1	1	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,931,900	20,931,900	-	20,931,900	20,931,900	100,00	1	Paket	1	1	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76,000,000	76,000,000	-	76,000,000	76,000,000	100,00	2	Paket	2	2	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	250,924,777	135,122,389	115,802,388	135,122,389	135,122,389	100,00	30	Lap	30	30	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV

	Konsultasi SKPD													
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,750,000,00	32,660,000,00	90,000	32,660,000,00	32,660,000,00	100,00							
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,750,000	32,660,000	90,000	32,660,000,00	32,660,000	100,00	1	Lap	1	1	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1,035,000,000,00	741,686,975,00	293,313,025	741,686,975,00	741,586,023,00	99,99							
4	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	475,000,000,00	344,895,855,00	130,104,145	344,895,855,00	344,895,855,00	100,00							
	1 Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	180,000,000	130,960,600	49,039,400	130,960,600	130,960,600	100,00	1	Dok	1	1	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	2 Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	215,000,000	158,772,775	56,227,225	158,772,775	158,772,775	100,00	1	Dok	1	1	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	3 Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	80,000,000	55,162,480	24,837,520	55,162,480	55,162,480	100,00	1	Dok	1	1	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
5	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	560,000,000,00	396,791,120,00	163,208,880	396,791,120,00	396,690,168,00	99,97							
	1 Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100,000,000	65,333,750	34,666,250	65,333,750	65,333,750	100,00	1	Dok	1	1	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	2 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	160,000,000	121,889,450	38,110,550	121,889,450	121,888,718	100,00	1	Dok	1	1	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	3 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	70,000,000	49,793,320	20,206,680	49,793,320	49,793,320	100,00	1	Lap	1	1	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	4 Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	100,000,000	78,609,825	21,390,175	78,609,825	78,523,630	99,89	1	Dok	1	1	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	5 Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	130,000,000	81,164,775	48,835,225	81,164,775	81,150,750	99,98	1	Dok	1	1	100	Tidak ada	Terealisasi pada TW I,II,III,dan IV
	JUMLAH	1,754,024,777,00	1,315,262,901,00	438,761,876	1,315,262,901,00	1,314,876,949,00	99,97							

Lampiran 4

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
Dokumen Rencana Awal Renstra 2025-2029 yang sudah diformalkan harus menggunakan font atau huruf yang sama.	Telah menggunakan font atau huruf yang sama dalam penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029	1 Dokumen	Bulan Juli 2025	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	Bulan Juli 2025
Dalam menyusun dan memformalkan Dokum Renstra dan Renja Perangkat daerah mempedomani permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata caara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Telah menyusun Dokumen Renstra dan Renja berpedoman pada permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata caara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	1 Dokumen	Bulan Juli 2025	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	Bulan Juli 2025
Menggunakan Informasi Capaian Kinerja pada laporan Kinerja sebagai dasar Penentuan Target Kinerja Tahun selanjutnya.	Telah menggunakan informasi laporan capaian kinerja sebagai dasar penentuan target kinerja untuk tahun selanjutnya,dalam Rangka Peningkatan Kinerja Biro Organisasi secara berkelanjutan.	1 Laporan	Bulan Juli 2025	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	Bulan Juli 2025
Menyusun Kebijakan Terkait Pemberian Penghargaan dan sanksi serta melakukan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil pengukuran Kinerja pada lingkup unit kerja\	Telah Menerbitkan Surat No.B/000.8.3/160/SETDA.ORG/3.3/VII/2025, tentang teguran atas tidak tercapainya Kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja	1 Laporan	Bulan Juli 2025	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	Bulan Juli 2025
Menggunakan Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal Untuk Perbaikan Perencanaan Kinerja dan Mengambil langkah kongkrit terkait Informasi yang disajikan dalam laporan Kinerja	Telah Menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal dan Mengambil langkah kongkrit terkait Informasi yang disajikan dalam laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja	1 Laporan	Bulan Juli 2025	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	Bulan Juli 2025

Melakukan Monitoring dan evaluasi (Monev) Rencana Aksi Triwulan I,2,3 dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui pimpinan OPD yang telah disertai dengan jadwal Evaluasi yang membut notulensi Rapat Mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas, Faktor Penghambat dan Pendorong selaras pada Aplikasi E PAKET JAMBI	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I,II,III dan IV yang disertai dengan Notulen, Absensi, jadwal Evaluasi Dokumentasi rapat Monitoring Rencana Aksi, secara berjenjang oleh Pimpinan Unit Kerja dengan mengetahui Kepala Biro yang mempedomani Peraturan Gubernur Jambi No.30 Tahun 2023 Tentang Tatanaskah Dinas, Faktor Penghambat dan Pendorong selaras pada Aplikasi E PAKET JAMBI	4 Laporan	Per Triwulan	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	Per Triwulan
---	--	-----------	--------------	--------------------------------------	--------------

Jambi, 12 September 2025
KEPALA BIRO ORGANISASI,



M. THOHR, S.Pd.,M.Pd
Pembina
NIP. 19830727 201001 1 018



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Struktur Organisasi	4
1.2. Tugas dan Fungsi	6
1.3. Isu-Isu Strategis	7
1.4. Keadaan Pegawai	7
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	9
1.6. Keuangan	9
1.7. Sistematisasi LKjIP	10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
2.3. Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	20
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
3.3. Realisasi Anggaran	33

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	
Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026	
Lampiran 3 Matriks Renstra 2025-2029	
Lampiran 4 Perjanjian Kinerja 2025	
Lampiran 5 Perubahan Perjanjian Kinerja 2025	
Lampiran 6 Matrik Tindak Lanjut LHE 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 729 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai instrumen evaluasi kinerja dalam rangka penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada pengelolaan kinerja berbasis hasil (result oriented).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Biro Hukum memiliki peran strategis sebagai unsur staf yang memberikan dukungan substantif di bidang hukum kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah. Peran tersebut meliputi fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan dan pendampingan hukum, serta capaian rencana aksi HAM.

Dinamika regulasi yang terus berkembang, meningkatnya kebutuhan akan produk hukum yang berkualitas, serta tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel menjadi tantangan tersendiri bagi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kinerja yang terencana, terukur, dan berkelanjutan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, serta analisis atas keberhasilan dan kendala yang dihadapi Biro Hukum selama pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis Biro Hukum, sekaligus menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
2. Mendorong Biro Hukum Setda Provinsi Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Hukum Setda Provinsi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro Hukum dibantu oleh beberapa Bagian yang masing-masing memiliki fungsi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara umum, struktur organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi terdiri atas:

1. Kepala Biro Hukum;
2. Bagian Peraturan Perundang-undangan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, harmonisasi, dan evaluasi produk hukum daerah;
3. Bagian Bantuan Hukum, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum, pendampingan hukum, penanganan perkara, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah;
4. Sub Bagian Tata Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Biro Hukum dapat dilihat pada Gambar berikut :



1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyatakan bahwa:

"Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota, dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kab/kota dan bantuan hukum.
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kab/kota dan bantuan hukum.
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kab/kota dan bantuan hukum.;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah **para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan**

program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan.

1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman SKPD pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum.
3. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait/teknis dalam upaya pembinaan HAM serta mengupayakan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas.
4. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan produk hukum daerah guna diklarifikasi.
5. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta SDM sebagai pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

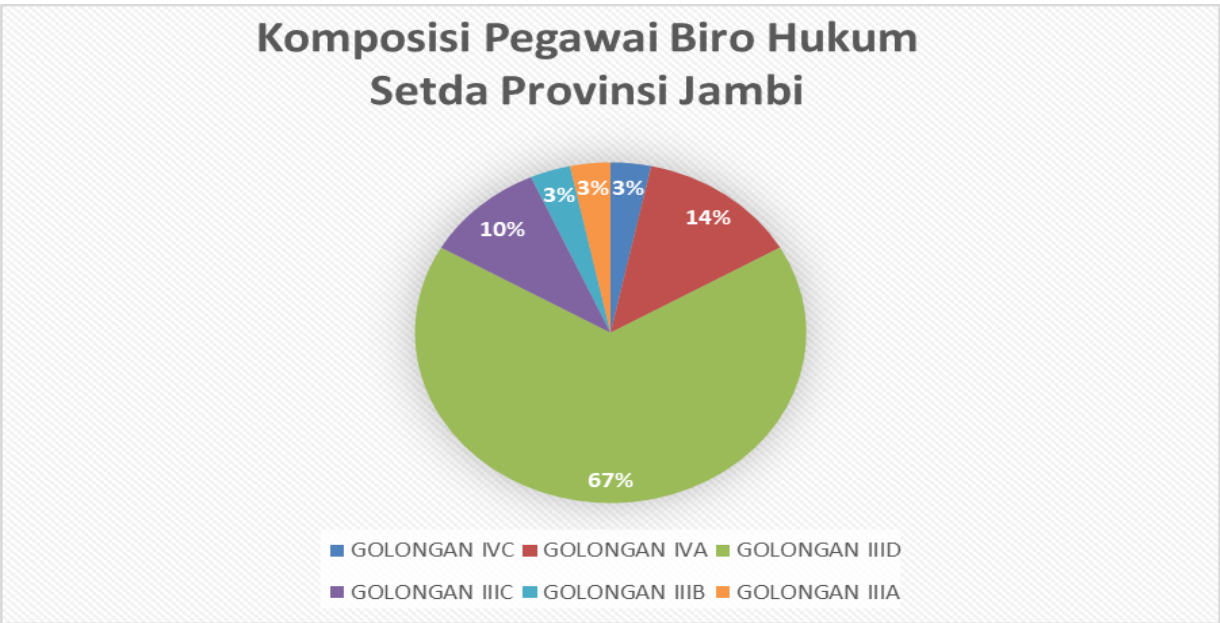
1.4. Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Biro Hukum Setda Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Provinsi Jambi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi didukung oleh

Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 30 (tiga puluh) orang pegawai yang terdiri dari 4 orang Pejabat Struktural, 11 (sebelas) Fungsional Tertentu dan 15 (lima belas) orang staf fungsional umum.

Pada Tabel berikut disajikan kondisi Sumber Daya Aparatur pada Biro Hukum Tahun 2023 berdasarkan Eselonisasi dan Golongan.

Tabel 1.1						
Komposisi Pegawai pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi						
NO	JENIS JABATAN	GOLONGAN PEGAWAI				JUMLAH (orang)
		IV	III	II	I	
1	ESELON II	1	-	-	-	1
2	ESELON III	2	-	-	-	2
3	ESELON IV	1	-	-	-	1
4	FUNGSIONAL TERTENTU	-	10	-	-	10
5	FUNGSIONAL UMUM	2	13	-	-	15
JUMLAH		6	23	-	-	29



1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan computer, alat komunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana Biro Hukum Setda Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Secara lebih rinci sarana dan prasarana yang ada di Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2			
Daftar Sarana dan Prasarana Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun			
NO	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi
1	Alat-alat angkutan		Baik
2	Alat kantor dan rumah tangga		Kurang Baik
3	Alat studio dan alat komunikasi		Baik
4	Bangunan gedung		Baik
5	Jaringan		Baik
6	Buku Perpustakaan		Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki, secara rutin perlu dilakukan pemeliharaan, perbaikan dan pergantian sarana dan prasarana yang tidak dapat berfungsi secara optimal.

1.6. Keuangan

Dukungan dana dan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum Provinsi Jambi pada tahun 2024 berasal dari APBD Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2024 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.057.654.669,- (Dua Milyar Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) untuk mendukung pelaksanaan 2 Program, 5 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu-isu Strategis, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana dan Sistematika Penulisan Lkj.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi serta strategi pemecahan masalah

LAMPIRAN

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan merupakan suatu rangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang tertuang dalam RPJMD. Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Renstra Biro Hukum sendiri dituangkan dalam renstra Sekretaris Daerah untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra Biro Hukum Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025 dan Renstra Perubahan Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagaimana dalam lampiran.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Provinsi Jambi, Sekretariat Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan good governance. Dalam lima tahun ke depan, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan

dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi harus mampu mengantisipasi perubahan multidimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Visi Misi Gubernur Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya.

Visi Pembangunan Provinsi Jambi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yaitu: **“Mewujudkan Jambi MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional) Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT”**.

Jambi Mantap : Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintahan Provinsi

Berdaya saing : Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Berkelanjutan : Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dalam rangka terwujudnya visi pembangunan tersebut, Misi Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ada 3 (tiga) misi yakni :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas di bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumber daya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Biro Hukum sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jambi memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi RPJMD melalui fungsi fasilitasi dan koordinasi hukum. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Setda, khususnya pada Biro Hukum, diwujudkan dalam dukungan terhadap sasaran RPJMD pada aspek tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah.

Dengan demikian, Renstra Biro Hukum yang merupakan salah satu pendukung fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan instrumen operasional untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi,

sehingga tercipta sinergi dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Bertolak dari Visi dan Misi Gubernur Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien maka Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan **“Terwujudnya penataan produk hukum daerah”**.

Untuk mencapai hasil secara nyata Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik untuk kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, maka sasaran yang ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah **“Meningkatnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan Masyarakat”**.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Hukum beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1										
Sasaran Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025-2030										
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	Target Tahunan						Target Akhir Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Permasalahan hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase capaian aksi HAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Prediket AKIP	B	B	BB	BB	BB	BB	A	A
		Nilai IKM	75	80	80	80	80	80	85	85

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang harus dicapai oleh Kepala Biro Hukum, yang diselaraskan dengan Visi dan misi Gubernur Jambi, Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 serta Tugas dan fungsi Biro Hukum dalam penyusunan, fasilitasi, harmonisasi, evaluasi, dan pelayanan di bidang hukum.

Melalui perjanjian kinerja ini, Kepala Biro Hukum bertanggung jawab untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang taat asas, tertib hukum, dan berkepastian hukum.

Pada awal tahun 2025 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi membuat Perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2		
Perjanjian Kinerja Tahun 2025		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	1. Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%
	2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%
	3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	100%
	4. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	100%
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	5. Nilai SAKIP	77
	6. Nilai IKM	80

	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 366.854.669,-	
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Rp. 1.690.800.000,-	

Sehubungan dengan adanya perubahan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, yang berdampak pada penyesuaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan/atau target kinerja, Biro Hukum juga melakukan perubahan Perjanjian Kinerja menyesuaikan dengan perubahan Renstra Biro Hukum. Perubahan Renstra tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan nasional dan daerah, dinamika regulasi, serta hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja agar tetap selaras dan konsisten dengan arah pembangunan daerah dan kebijakan organisasi.

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	1. Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%
	2. Persentase Permasalahan Hukum yang difasilitasi	100%
	3. Persentase Capaian Aksi HAM	100%
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	4. Nilai SAKIP	BB
	5. Nilai IKM	89

	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 241.279.224,-	
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Rp. 1.229.416.350,-	

Penyesuaian dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 meliputi:

1. Penyelarasan kembali sasaran strategis Biro Hukum dengan Renstra hasil perubahan;

2. Penyesuaian indikator kinerja agar lebih relevan, terukur, dan menggambarkan hasil (outcome) pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum;
3. Penyesuaian target kinerja sesuai dengan kemampuan sumber daya, kebijakan anggaran, dan fokus prioritas organisasi.

Perubahan Perjanjian Kinerja ini tidak mengubah komitmen Kepala Biro Hukum terhadap peningkatan kinerja organisasi, namun bertujuan untuk memastikan bahwa target dan indikator yang ditetapkan tetap realistis, akuntabel, serta mampu mencerminkan kinerja Biro Hukum secara lebih tepat.

2.3 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana Kinerja dan Anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2025 serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel. Penyusunan rencana ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan menekankan keterkaitan yang jelas antara sasaran, indikator kinerja, program/kegiatan, dan dukungan anggaran.

Untuk mendukung pencapaian sasaran 1. **Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat**, Biro Hukum merencanakan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi fasilitasi, harmonisasi, dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah, penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jambi baik litigasi maupun non litigasi, penyusunan rencana Aksi HAM, serta penyediaan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dari sisi anggaran, alokasi dana pada sasaran ini difokuskan untuk mendukung kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk hukum dan penyelesaian permasalahan hukum daerah. Penganggaran dilakukan secara selektif dan berorientasi pada hasil, dengan memperhatikan efisiensi

pemanfaatan sumber daya serta optimalisasi capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk Sasaran **2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel**, program dan kegiatan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Biro Hukum. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa Nilai SAKIP dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, Biro Hukum merencanakan kegiatan yang mendukung penguatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini mencakup penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan standar dan prosedur pelayanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat.

Rencana anggaran pada sasaran ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja dan pelayanan publik, dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Penggunaan anggaran diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai SAKIP dan IKM sebagai indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik di Biro Hukum.

Secara keseluruhan, Rencana Kinerja dan Anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 menjadi landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan serta sebagai acuan dalam melakukan evaluasi kinerja.

Adapun Program Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah Program dan kegiatan yang telah diprioritaskan sebagai berikut

Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum

Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitas penyelesaian Masalah Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan

Sub Kegiatan: Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

Sub Kegiatan: Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan RKA SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan DPA SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 dari dana APBD.

Pada Bab ini akan diuraikan hasil capaian indikator utama, evaluasi dan analisis kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, serta pertanggungjawaban dari aspek keuangan yang mempengaruhi capaian kinerja serta permasalahan terkait beserta strategi pemecahan masalah.

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrument pengukuran. Indikator yang menjadi ukuran pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital	Prediket AKIP
		Indeks Kepuasan Masyarakat

Sejalan dengan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi pada periode Tahun 2025-2029, maka sasaran pelayanan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi secara rinci diuraikan pada table berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	Nilai SAKIP	75	77	78	79	80	81	81
			Indeks Kepuasan Masyarakat	87,21	89	89,25	89,5	90	90,25	90,25
2.	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	Persentase produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
			Persentase Permasalahan Hukum yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
			Persentase Capaian Rencana Aksi HAM	90 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Penyusunan dan pengembangan system pengumpulan data Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi didapatkan dari data kinerja yang akurat dari bagian-bagian pada Biro Hukum sendiri, lengkap dan konsisten mengenai pencapaian kinerja organisasi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomian dan efektivitas.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.

Biro Hukum Setda Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing – masing indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 x 100%)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.	1. Persentase produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%
		2. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%
		3. Persentase Capaian Aksi HAM	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4. Nilai SAKIP	77	75	97,40%
		5. Nilai IKM	89	88,89	99,99%

1. Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka Analisa atas perbandingan antara target dan realisasi kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 yaitu :

Sasaran Strategis 1 : MENINGKATNYA HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan produk hukum daerah yang disusun dan difasilitasi oleh Biro Hukum telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Indikator Kinerja 1 : persentase produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

- Persentase Realisasi kinerja dihitung dengan perbandingan jumlah produk hukum provinsi dan kabupaten/kota yang telah difasilitasi

dengan jumlah produk hukum provinsi dan kabupaten/kota yang ditargetkan untuk difasilitasi pada tahun 2025.

Tabel 3.4

Realisasi dan Capaian Kinerja Atas
Produk Hukum Provinsi Yang Difasilitasi pada Tahun 2025

NO.	URAIAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
1	2	3	4	5
1	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang difasilitasi	50	49	98%
2	Jumlah produk hukum penetapan yang difasilitasi	610	900	147%
3	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi	90	112	124%
	Jumlah Persentase	750	727	100%

Berdasarkan tabel diatas, jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi/dievaluasi secara keseluruhan melebihi target kinerja sehingga persentase capaian kinerja dapat dinilai sebesar 100%.

Indikator Kinerja 2 : persentase permasalahan hukum yang difasilitasi

- Pengukuran persentase permasalahan hukum yang difasilitasi dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi dengan jumlah permasalahan hukum yang ditargetkan pada Tahun 2025.

Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Permasalahan hukum yang difasilitasi
Tahun 2025

NO.	Permasalahan hukum	TARGET KINERJA TAHUN 2025	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Permasalahan hukum litigasi	10	10	100%
2	Permasalahan hukum non litigasi dan HAM	5	5	100%
	Jumlah Persentase			100 %

Berdasarkan tabel diatas, jumlah permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintah baik litigasi dan non litigasi seluruhnya difasilitasi, dengan persentase keseluruhan 100%.

Indikator Kinerja 3 : persentase Capaian Rencana Aksi HAM

- Pengukuran persentase capaian rencana aksi HAM dilakukan dengan cara membandingkan antara Rencana aksi HAM yang ditetapkan dengan aksi HAM yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Kinerja Capaian Rencana Aksi HAM
Tahun 2025

NO.	URAIAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Persentasi Capaian Rencana Aksi HAM	100%	100%	100%
	Jumlah Persentase			100 %

Berdasarkan tabel diatas, persentase Capaian Rencana Aksi HAM tahun 2025 telah tercapai dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Strategis 2 : TERWUJUDNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DAN AKUNTABEL

Sasaran strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan mutu pelayanan publik di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Indikator Kinerja 1 : Nilai AKIP

- Pengukuran tingkat capaian kinerja atas Prediket AKIP yang dicapai Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 didapat dari hasil penilaian Inspektorat atas pemenuhan dokumen SAKIP Tahun 2024 pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Nilai capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan realisasi nilai SAKIP yang dicapai dengan Target Nilai SAKIP tahun 2025.

Tabel 3.7

Realisasi dan Nilai SAKIP Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai SAKIP	77	75	97,40%

Dapat dijelaskan disini bahwa untuk realisasi nilai SAKIP tahun 2025 mendekati yang telah ditargetkan, sehingga realisasi capaian kinerja atas indikator Nilai SAKIP adalah 97,40% .

Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di lingkungan Biro Hukum telah berjalan dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai

target yang ditetapkan. Selisih capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran, serta pelaporan kinerja pada periode berikutnya.

Indikator Kinerja 2 : Indek IKM

- Pengukuran tingkat capaian kinerja atas Indeks IKM yang dicapai Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 didapat dari hasil penilaian atas survey kepuasan masyarakat pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi. Nilai capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan realisasi Indeks IKM yang dicapai dengan Target Indeks IKM tahun 2025.

Tabel 3.8

Realisasi dan Nilai IKM Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks IKM	89	88,89	99,99%

Dapat dijelaskan disini bahwa untuk realisasi nilai IKM tahun 2025 hampir mencapai target kinerja, dengan realisasi capaian kinerja atas Indeks IKM adalah 99,99% .

Capaian nilai IKM ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Biro Hukum berada pada kategori **sangat baik**, meskipun masih terdapat ruang peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun 2023

Tabel 3.9

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun sebelum		Capaian Kinerja 2025		
			2023	2024	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.	1. Persentase produk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Penyelesaian Masalah hukum yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase Capaian Rencana Aksi HAM	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	4. Nilai SAKIP	100%	100%	77	74%	97,4%
		5. Nilai IKM	100%	100%	89	88,89%	99,99%

Berdasarkan tabel di atas maka analisis atas capaian kinerja dengan Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 di atas, yaitu :

- 1) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Persentase produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tahun 2025 **sama** dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.
- 2) Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Persentase permasalahan hukum yang difasilitasi tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah **sama**.

- 3) Indikator Kinerja Persentase Capaian Rencana Aksi HAM, merupakan indikator baru yang dirumuskan pada Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2025 dengan capaian kinerja 100%.
- 4) Capaian Kinerja atas Nilai SAKIP tahun 2025 lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dan 2023.
- 5) Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja IKM tahun 2025 lebih rendah 0,01% di bawah capaian tahun 2024.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi

Tabel 3.10

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Indikator Kinerja	Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Tahun sebelum		Target	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%) Kinerja 2025
			2023	2024		
1.	Persentase produk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Penyelesaian Masalah hukum yang difasilitasi	90%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Capaian Rencana Aksi HAM		100%	100%	100%	100%
4.	Nilai SAKIP	65	100%	100%	77	100%
5	Skor IKM	80	100%	100%	89	99,99%

Analisis atas capaian kinerja dengan Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi di atas, yaitu :

- Bila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen renstra pada table di atas menunjukkan tercapainya apa yang menjadi target kinerja dengan nilai 100%.

- Untuk target kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai yang lebih rendah 0,01 dari nilai yang ditargetkan pada akhir periode renstra 2021-2026.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau regional (benchmarking kinerja)

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum nasional tersebut dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Biro Hukum yaitu Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Melalui proses Harmonisasi dan sinkronisasi setiap kebijakan daerah diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan nasional dan arah pembangunan daerah agar tercipta kesatuan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, disharmoni, maupun inkonsistensi antar kebijakan. Kebijakan yang harmonis dan sinkron akan memberikan kepastian hukum, memperjelas arah pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, serta mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan.

Selain itu, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan menjadi landasan penting dalam mewujudkan penataan produk hukum daerah. Kebijakan yang telah terselaraskan akan mempermudah proses perumusan dan penetapan

produk hukum daerah yang berkualitas, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi.

Dengan demikian, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan secara berkelanjutan berkontribusi nyata terhadap tercapainya tujuan perangkat daerah, yaitu terwujudnya penataan produk hukum daerah yang tertib, terintegrasi, dan berdaya guna sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Indikator Kinerja : persentase produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan daerah (level bawah) bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga suatu sumber dari semua sumber hukum, yaitu Pancasila.

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan (sejauh mana ketaatan peraturan perundang-undangan pada asas hirarki dan asas hukum lain).

Tabel 3.11

Data Produk Hukum Daerah Tahun 2025
Hasil Fasilitasi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

No.	PRODUK HUKUM DAERAH	PERATURAN TINGKAT PUSAT	PENJELASAN
1.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.	Perda tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan sebagai amanat peraturan tingkat pusat

		• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum • Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	
2.	PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK	• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan • Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan	Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan tingkat daerah sebagai pelaksanaan amanat peraturan tingkat pusat

Secara keseluruhan pencapaian atas Indikator Kinerja yang menjadi pernyataan kinerja dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Jambi **telah mencapai** target yang diperjanjikan. Namun ada beberapa permasalahan/kendala yang terjadi yang mempengaruhi tercapainya target kinerja, diantaranya:

- 1) Dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah tidak semua produk hukum yang diajukan dapat diselesaikan pada tahun berjalan hal ini disebabkan proses evaluasi dan fasilitasi di pusat (Kemendagri) terkadang melebihi batas waktu;
- 2) Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sering mengalami gangguan sehingga tidak seluruh produk hukum dapat diupload hal ini disebabkan server yang belum maksimal disediakan.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi selama tahun 2024 terhadap peningkatan persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemrakarsa produk hukum;

- 2) Meningkatkan koordinasi tingkat pusat terkait evaluasi dan fasilitasi produk hukum daerah;
- 3) Melaksanakan Rapat koordinasi dengan Bagian Hukum kabupaten/kota terkait permasalahan dalam rangka penyusunan produk hukum kabupaten/kota.
- 4) Memantapkan pelaksanaan monitoring ke kabupaten/kota terhadap pelaksanaan produk hukum hasil evaluasi/fasilitasi.
- 5) Mengajukan penyediaan server yang maksimal untuk menunjang pelaksanaan upload data produk hukum;

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran, Biro Hukum menggunakan sumber dana APBD yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program/Kegiatan. Pagu anggaran pada awal tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.057.654.669,- (Dua Milyar Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), namun pada APBD Perubahan pagu anggaran berkurang menjadi sebesar Rp. 1.470.695.574 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.432.709.276,- atau 97,42% sebagaimana tercatat pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) terlampir.

Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2025 Biro Hukum melaksanakan 2 Program, 5 kegiatan dan 13 Sub kegiatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing-masing kegiatan cukup baik, rata-rata tingkat capaian masing-masing indikator di atas 90%.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 berjalan dengan baik. Seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan pencapaian sasaran kinerja rata-rata di atas 90%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 3.12
Realisasi Keuangan Tahun 2025

No	Program/ SubKegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s.d Desember			Sisa Anggaran (Rp)
			Penyerapan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	241.279.224,00	236.245.706,00	97,91	100,00	5.033.518,00
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.300.000,00	19.200.000,00	90,14	100,00	2.100.000,00
1	Penyusunan dokumen perencanaan	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	100,00	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	0,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00	0,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	3.900.000,00	65,00	100,00	2.100.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.979.224,00	211.045.706,00	98,63	100,00	2.933.518,00
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.145.780,00	43.815.779,00	99,25	100,00	330.001,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.833.444,00	167.229.927,00	98,47	100,00	2.603.517,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	0,00
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	PROGRAM FASILITASI DAN	1.229.416.350,00	1.196.463.570,00	97,32	99,60	32.952.780,00

LKj Biro Hukum Tahun 2025

	KOORDINASI HUKUM					
	Fasilitasi Penyusunan perundang-undangan	508.763.350,00	498.099.300,00	97,90	100,00	10.664.050,00
7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	116.826.200,00	112.846.294,00	96,59	98,00	3.979.906,00
8	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	69.025.000,00	66.674.296,00	96,59	100,00	2.350.704,00
9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	116.356.000,00	113.467.000,00	97,52	100,00	2.889.000,00
10	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	206.556.150,00	205.111.710,00	99,30	100,00	1.444.440,00
	Fasilitasi Bantuan Hukum	720.653.000,00	698.364.270,00	96,91	100,00	22.288.730,00
11	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	634.514.000,00	619.731.690,00	97,67	100,00	14.782.310,00
12	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	86.139.000,00	78.632.580,00	91,29	100,00	7.506.420,00
JUMLAH TOTAL BELANJA		1.470.695.574,00	1.432.709.276,00	97,41	99,80	37.986.298,00

3.3.1 Analisis atas efisien penggunaan sumber daya pendukung kinerja.

Tabel 3.13

Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya pendukung kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2025	Serapan Anggaran(%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.	1. Persentase produk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	1.432.709.276,- (97,42%)	Efisiensi
		2. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	100%		
		3. Persentase Capaian Aksi HAM	100%		
2	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	4. Nilai SAKIP	75		Efisiensi
		5. Skor IKM	88,89		

Berdasarkan table diatas, dapat terlihat bahwa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi berada di bawah nilai anggaran yang disediakan hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi anggaran tercermin dari adanya sisa anggaran sebesar **2,58%**, yang merupakan hasil dari optimalisasi pelaksanaan kegiatan, pengendalian belanja secara ketat, serta penyesuaian terhadap kebutuhan riil dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sisa anggaran tersebut tidak berdampak terhadap pencapaian target kinerja, karena seluruh kegiatan prioritas dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan memberikan hasil yang optimal, hal ini disebabkan adanya komitmen yang tinggi dari masing-masing pemangku dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3.2 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mencapai pernyataan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025, telah dilaksanakan 2 (dua) program, 5 (lima) kegiatan, dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan tersebut mampu menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja Biro Hukum Tahun 2025 terutama didukung oleh program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan **Sasaran Strategis 1**, yaitu meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.14

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket	Program	Kegiatan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat	1. Persentase produk hukum provinsi yang difasilitasi sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	Tercapai	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
	2. Persentase Produk hukum kab/kota yang difasilitasi sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100%	100%	Tercapai	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
	3. Persentase Produk Hukum daerah yang dapat diakses publik	100%	90%	Tercapai	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
	4. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan	100%	100%	Tercapai	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	5. Nilai SAKIP	77	75	Tercapai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6. Skor IKM	89	88,89	Tercapai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan table diatas maka analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah:

1. Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Biro Hukum Tahun 2025 terutama didukung oleh program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan **Sasaran Strategis 1**, yaitu meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan antara lain:

- Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, khususnya pada kegiatan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum daerah. Program ini berperan penting dalam memastikan seluruh rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah telah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan penyelesaian permasalahan hukum daerah, baik melalui bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, pemberian pendapat hukum (legal opinion), maupun pendampingan hukum kepada perangkat daerah. Kegiatan ini secara langsung mendukung capaian indikator persentase permasalahan hukum yang diselesaikan yang berhasil mencapai target 100%.
- Kegiatan pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM), yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Kegiatan ini mendukung terpenuhinya seluruh indikator Aksi HAM sesuai dengan Rencana Aksi HAM (RANHAM), sehingga capaian kinerja pada indikator ini juga mencapai 100%.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- b. Komitmen pimpinan dan dukungan kebijakan yang kuat;
- c. Koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah, kementerian/lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya;

- d. Kompetensi sumber daya manusia aparatur di lingkungan Biro Hukum;
- e. Pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

2. Program dan Kegiatan yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pencapaian Kinerja

Meskipun secara umum kinerja Biro Hukum Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, terdapat beberapa indikator pada **Sasaran Strategis 2**, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Indikator yang belum optimal tersebut antara lain:

- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencapai nilai 75 dari target 77
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai 88,89 dari target 89.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor program dan kegiatan, antara lain:

- a. Masih perlunya penguatan pada kegiatan perencanaan dan pengukuran kinerja yang lebih berbasis hasil (outcome-oriented);
- b. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

Namun demikian, kegiatan pendukung tata kelola pemerintahan tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan, meskipun hasilnya belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

3. Upaya Perbaikan ke Depan

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh APIP/Inspektorat Provinsi Jambi atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) internal. Adapun perbaikan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja dengan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan dan selaras antar kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading);
- Menyempurnakan dan memastikan Perjanjian Kinerja dari level tertinggi sampai terkecil telah disusun dan memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measureable, Achieveable, Relevan, Time Bond) serta memastikan penentuan target kinerja terukur, selaras, dan dapat dicapai;
- Memastikan bahwa perjanjian kinerja tahun 2025 teridentifikasi pada Pohon Kinerja;
- Menyajikan informasi terkait faktor pendorong, penghambat dan upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam laporan monev rencana kerja triwulan;
- Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam pengambilan keputusan dan menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi pada lingkup unit kerja;
- Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan yang dihadapi serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan dilakukan;
- Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya; dan
- Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang dan menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan kinerja.

Melalui berbagai perbaikan tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, sehingga tercipta kinerja yang akuntabel, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) sub kegiatan, telah terlaksana dengan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja pada tingkat sasaran yang rata-rata telah mencapai target yang diharapkan. Keberhasilan ini dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi sumber daya aparatur serta fasilitas yang tersedia pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi serta berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

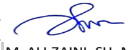
Meskipun secara umum kinerja Biro Hukum telah berhasil dalam melaksanakan semua program dan sasaran yang telah ditetapkan bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak terdapat adanya permasalahan, namun permasalahan dan hambatan dimaksud dapat diatasi dengan upaya dan strategi yang tepat untuk tercapainya tingkat keberhasilan yang optimal.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Biro Hukum Setda Provinsi Jambi ini tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan terutama dalam menganalisis kinerja organisasi, oleh karena itu masukan-masukan positif guna penyempurnaan dan pengembangan sistem Akuntabilitas Publik dilingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi masih sangat diperlukan, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum diharapkan akan lebih baik dan sempurna pada tahun-tahun yang akan datang.

KEPALA BIRO HUKUM

M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda

LAMPIRAN

REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN																		
KEGIATAN BELANJA DAERAH APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025																		
POSISI : DESEMBER 2025																		
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI																		
No	Program / Kegiatan	Nama PPTK	Anggaran APBD			Jenis Belanja				Anggaran Belanja	Realisasi Jenis Belanja				Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
			Murni	Perubahan	Setelah Perubahan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer				
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM																		
1. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan			868.000.000	-359.236.650	508.763.350	508.763.350	0	0	0	508.763.350	498.099.300	0	0	0	498.099.300	97,90	99,54	10.664.050
1	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Ballishshada, SH, MH	230.000.000	-113.173.800	116.826.200	116.826.200	0	0	0	116.826.200	112.846.294	0	0	0	112.846.294	96,59	98,00	3.979.906
2	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Dr. Andyansyah, SH, MH	135.000.000	-65.975.000	69.025.000	69.025.000	0	0	0	69.025.000	66.674.296	0	0	0	66.674.296	96,59	100,00	2.350.704
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Dr. Andyansyah, SH, MH	203.000.000	-86.644.000	116.356.000	116.356.000	0	0	0	116.356.000	113.467.000	0	0	0	113.467.000	97,52	100,00	2.889.000
4	Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Dr. Andyansyah, SH, MH	300.000.000	-93.443.850	206.556.150	206.556.150	0	0	0	206.556.150	205.111.710	0	0	0	205.111.710	99,30	100,00	1.444.440
2. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum			823.000.000	-102.347.000	720.653.000	720.653.000	0	0	0	720.653.000	698.364.270	0	0	0	698.364.270	96,91	100,00	22.288.730
1	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum	Ballishshada, SH, MH	673.000.000	-38.486.000	634.514.000	634.514.000	0	0	0	634.514.000	619.731.690	0	0	0	619.731.690	97,67	100,00	14.782.310
2	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum	Ballishshada, SH, MH	150.000.000	-63.861.000	86.139.000	86.139.000	0	0	0	86.139.000	78.632.580	0	0	0	78.632.580	91,29	100,00	7.506.420
II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																		
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000	-8.700.000	21.300.000	21.300.000	0	0	0	21.300.000	19.200.000	0	0	0	19.200.000	90,14	100,00	2.100.000
1	Sub Kegiatan Penyusunan	Dharma Yanti, SH, MH	6.000.000	-2.700.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	3.300.000	3.300.000	0	0	0	3.300.000	100,00	100,00	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dharma Yanti, SH, MH	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	100,00	100,00	0
3	Koordinasi dan Penyusunan	Dharma Yanti, SH, MH	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	100,00	100,00	0
4	Koordinasi dan Penyusunan	Dharma Yanti, SH, MH	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	100,00	100,00	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dharma Yanti, SH, MH	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	100,00	100,00	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dharma Yanti, SH, MH	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	3.900.000	0	0	0	3.900.000	65,00	100,00	2.100.000
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			326.154.669	-112.175.445	213.979.224	213.979.224	0	0	0	213.979.224	211.045.706	0	0	0	211.045.706	98,63	100,00	2.933.518
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dharma Yanti, SH, MH	76.083.840	-31.938.060	44.145.780	44.145.780	0	0	0	44.145.780	43.815.779	0	0	0	43.815.779	99,25	100,00	330.001
2	Penyelenggaraan Rapat	Dharma Yanti, SH, MH	250.070.829	-80.237.385	169.833.444	169.833.444	0	0	0	169.833.444	167.229.927	0	0	0	167.229.927	98,47	100,00	2.603.517
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.500.000	-4.500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	100,00	100,00	0
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dharma Yanti, SH, MH	10.500.000	-4.500.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	100,00	100,00	0
TOTAL			2.057.654.669	-586.959.095	1.470.695.574	1.470.695.574	0	0	0	1.470.695.574	1.432.709.276	0	0	0	1.432.709.276	97,42	99,84	37.986.298
Keterangan :		Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi														
- Belanja Operasi		1.363.695.574	1.432.709.276	97,42														
- Belanja Modal		0	0															
- Belanja Tak terduga		0	0															
- Belanja Transfer		0	0															
Jumlah		1.363.695.574	1.432.709.276	97,42														
																Plt. Kepala Biro Hukum		
																		
																M. ALI ZAINI, SH, MH		
																Pembina Utama Muda		
																NIP. 19730729 200012 1 002		

TABEL RENSTRA BIRO HUKUM PROVINSI JAMBI																					
PERIODE 2025-2029																					
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Baseline (2025)		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					K	Rp	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		K	Rp			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif	Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital			Indek Reformasi Birokrasi	BB Prediket		BB Prediket		BB Prediket		BB Prediket		BB Prediket		BB Prediket		BB Prediket		Biro Hukum	Provinsi Jambi	
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prediket AKIP	BB Prediket	366.854.669	BB Prediket	389.500.000	BB Prediket	428.450.000	BB Prediket	471.295.000	BB Prediket	518.424.500	BB Prediket	570.266.950	A Prediket	2.844.976.600			
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Indeks		89,25 Indeks		89,5 Indeks		90 Indeks		90,25 Indeks		90,5 Indeks		90,5 Indeks					
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75 Nilai	34.000.000	77 Nilai	34.000.000	78 Nilai	37.400.000	79 Nilai	41.140.000	80 Nilai	45.254.000	81 Nilai	49.779.400	81 Nilai	674.613.550			
01		1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	5.500.000	4 Dok	6.050.000	4 Dok	6.655.000	4 Dok	7.320.500	4 Dok	30.525.500			
02		2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.500.000	2 Dok	6.050.000	2 Dok	6.655.000	2 Dok	7.320.500	2 Dok	30.525.500			
03		3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.000.000	2 Dok	5.500.000	2 Dok	6.050.000	2 Dok	6.655.000	2 Dok	7.320.500	2 Dok	30.525.500			
04		4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.600.000	2 Dok	7.260.000	2 Dok	7.986.000	2 Dok	8.784.600	2 Dok	36.630.600			
05		5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.000.000	2 Dok	6.600.000	2 Dok	7.260.000	2 Dok	7.986.000	2 Dok	8.784.600	2 Dok	36.630.600			
		06	6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	6 Dok	7.000.000	6 Dok	7.000.000	6 Dok	7.700.000	6 Dok	8.470.000	6 Dok	9.317.000	6 Dok	10.248.700	6 Dok	42.735.700		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Pelayanan Publik	01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum	89 Indeks	326.854.669	89,25 Indeks	345.000.000	89,5 Indeks	379.500.000	90 Indeks	417.450.000	90,25 Indeks	459.195.000	90,5 Indeks	505.114.500	90,5 Indeks	2.106.259.500			
02		1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	92.113.000	3 paket	95.000.000	3 paket	104.500.000	3 paket	114.950.000	3 paket	126.445.000	3 paket	139.089.500	3 paket	579.984.500			
05		2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-			
06		3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	10 Paket	-	10 Paket	-	10 Paket	-	10 Paket	-	10 Paket	-	10 Paket	-	10 Paket	-			
09		4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	234.741.669	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	275.000.000	12 Laporan	302.500.000	12 Laporan	332.750.000	12 Laporan	366.025.000	12 Laporan	1.526.275.000			
01.1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum	88 Indeks	6.000.000	89 Indeks	10.500.000	89 Indeks	11.550.000	89 Indeks	12.705.000	90 Indeks	13.975.500	90 Indeks	15.373.050	90 Indeks	64.103.550				
		01	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	6.000.000	1 Lap	10.500.000	1 Lap	11.550.000	1 Lap	12.705.000	1 Lap	13.975.500	1 Lap	15.373.050	1 Lap	64.103.550		

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2025

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian
1.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja dengan menggambarkan hubungan yang berkesinambungan dan selaras antar kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)	Menyusun <i>pohon kinerja</i> yang menggambarkan keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran individu	Dokumen CSF, Pohon Kinerja, dan Cascading Kinerja	September 2025	Tim Penyusun Dokumen Perencanaan	Selesai (September 2025)
2.	Menyempurnakan dan memastikan Perjanjian Kinerja dari level tertinggi sampai terkecil telah disusun dan memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measureable, Achievable, Relevan, Time Bond) serta memastikan penentuan target kinerja terukur, selaras, dan dapat dicapai	Melakukan reviu dan penyesuaian PK tahun 2026 agar lebih terukur dan realistis dengan target yang selaras antar level.	Dokumen Perjanjian Kinerja	September 2025	Kepala Bagian pada Biro Hukum	Selesai (September 2025)
3.	Memastikan bahwa perjanjian kinerja tahun 2025 teridentifikasi pada Pohon Kinerja	Memperbarui <i>pohon kinerja</i> dan memastikan keterpaduan target antar jabatan	Dokumen Pohon kinerja	September 2025	Tata Usaha	Selesai (September 2025)
4.	Menyajikan informasi terkait faktor pendorong, penghambat dan upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam laporan monev rencana kerja triwulan	Menambahkan format analisis faktor pendorong, penghambat, dan upaya perbaikan pada laporan monev triwulanan.	Dokumen Laporan Monev Triwulan	Setiap Triwulan	Tim Penyusun Laporan Monev	Proses
5.	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya	Menggunakan hasil capaian dan evaluasi kinerja tahun berjalan sebagai dasar penentuan target Renja berikutnya.	Dokumen Renja 2026	September 2025	Tim Penyusun Dokumen Renja	Selesai (Oktober 2025)
6.	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang dan menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan kinerja	Melaksanakan evaluasi internal kinerja di setiap bagian secara periodik dan mendokumentasikan hasilnya untuk perbaikan.	Dokumen Evaluasi Internal	Setiap Triwulan	Tim Evaluasi Internal Kinerja	Proses

Plt. KEPALA BIRO HUKUM



M. ALI ZAINI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002



Provinsi Jambi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ALI ZAINI, S.H., M.H.
Jabatan : PLT. KEPALA BIRO HUKUM

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 30 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI

M. ALI ZAINI, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 197307292000121002

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	100 Persen
		Persentase Permasalahan Hukum yang difasilitasi	100 Persen
		Persentase Capaian Rencana Aksi HAM	100 Persen
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Indeks
		Nilai SAKIP	77 Prediket

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	219.979.224	
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1.122.416.350	

Jambi, 30 September 2025

GOVERNUR JAMBI

PLT. KEPALA BIRO HUKUM



DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GOVERNUR JAMBI



M. ALI ZAINI, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 197307292000121002



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) Tahun 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Biro Umum Setda Provinsi Jambi
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi selama Tahun 2025, serta sebagai wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta analisis terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai tingkat akuntabilitas kinerja Biro Umum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi kinerja serta bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan informasi dan masukan dalam pengambilan kebijakan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga LKjIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dapat memberikan

manfaat dan menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2026
KEPALA BIRO UMUM,

MUHAMMAD HARIR KHODARAL SP
Pembina Utama Muda
NIP.19710424 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.1.1 Struktur Organisasi	2
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.1.3 Keadaan Pegawai	4
1.1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana	6
1.1.5 Ruang Lingkup Pelayanan dan Dukungan	7
1.1.5 Sistematika Pelaporan Kinerja	7
1.2 Keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah	9
1.2.1 Visi Kepala Daerah	9
1.2.2 Misi Kepala Daerah	9
1.2.3 Peran Strategis Perangkat Daerah	10
1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	11
1.3.1 Tujuan Strategis Perangkat Daerah	11
1.3.2 Sasaran Strategis Perangkat Daerah	11
1.4 Strategi dan Arah Kebijakan	12
1.5 Permasalahan Utama (Strategic Issues)	12
1.6 Tantangan dan Peluang	13
1.7 Isu Strategis	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)	17
2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	17
2.3 Kesesuaian Target Renja dengan Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
LAMPIRAN	

BAB 1

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi seperti tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh Perangkat Daerah.

1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan penetapan Renstra 2025-2029, maka teraepat penyesuaia dan di akomodir dealam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan kinerja Perangkat Daerah disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra 2021-2026 yang digunakan pada masa transisi .

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Umum Setda Provinsi Jambi
2. Mendorong Biro Umum Setda Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Umum Setda Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.

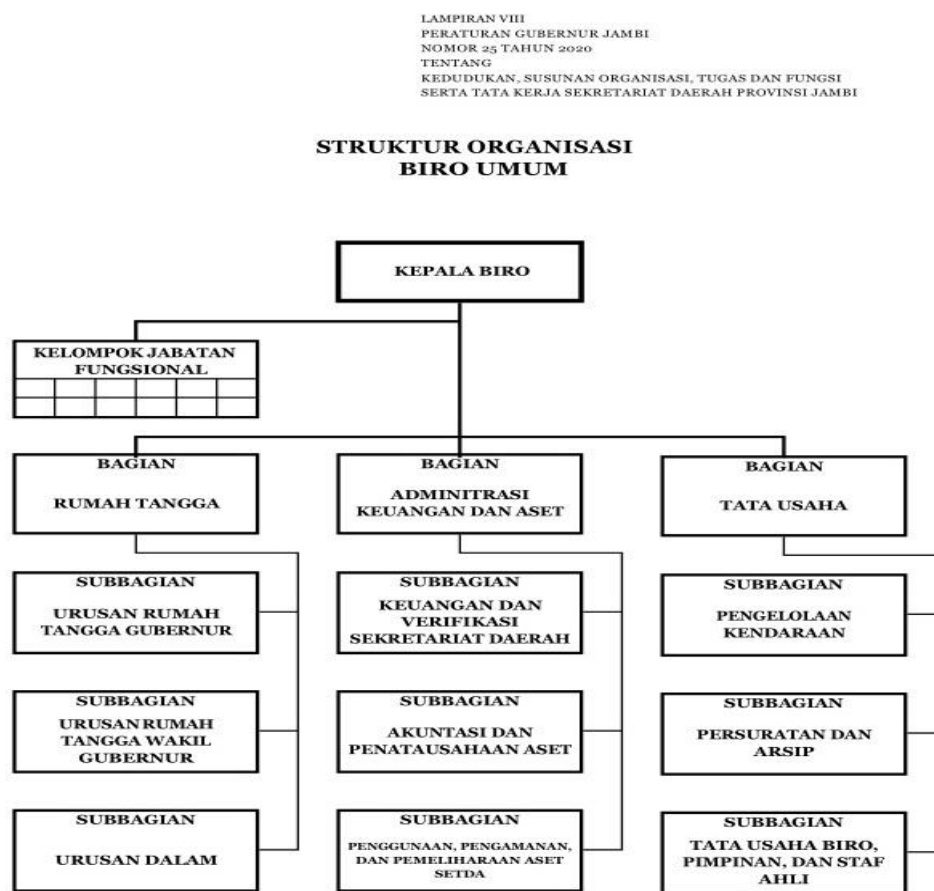
1.1.1 Struktur Organisasi

Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Biro Umum Setda Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Biro Umum Setda Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

Biro Umum Setda Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Umum Setda Provinsi Jambi



GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR



1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 25 Tahun 2020 Tanggal 30 Juni 2020 tentang Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Biro Umum Setda Provinsi Jambi mempunyai membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Biro Umum Setda Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
2. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Umum Setda Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Biro Umum Setda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah Faktor Intern, dan yang kedua adalah Ekstern.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup seluruh sector. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah Faktor Politik.

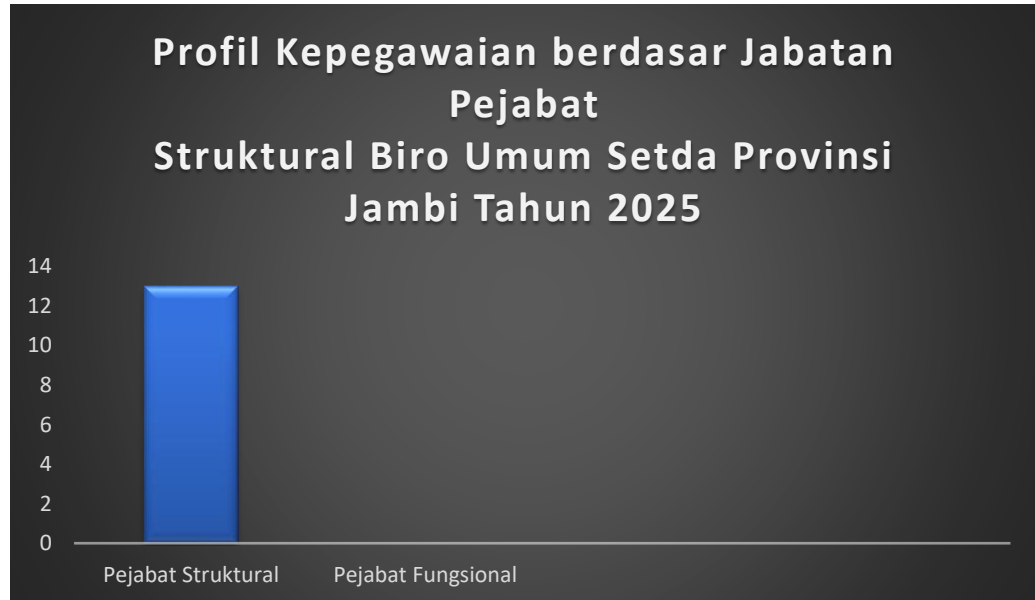
Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Biro Umum Setda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Umum Setda selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.1.3 Keadaan Pegawai

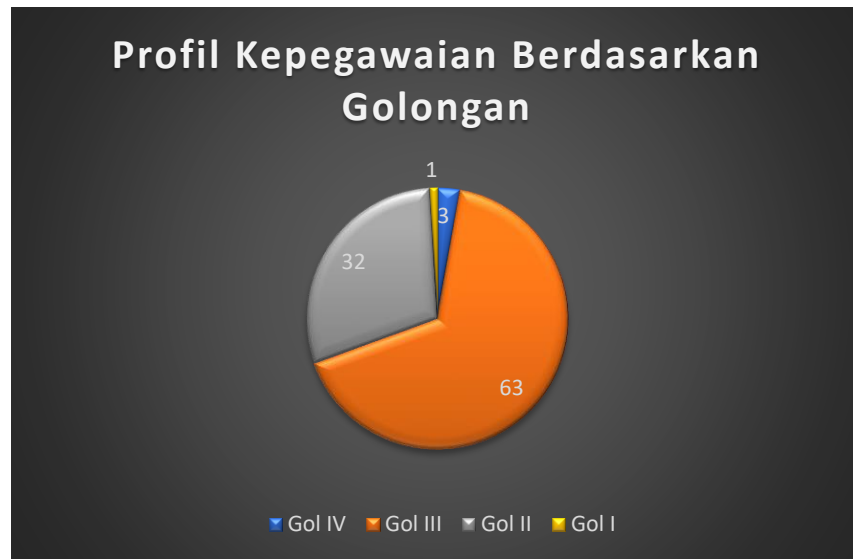
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Biro Umum Setda Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Jambi. Biro Umum Setda Provinsi Jambi di dukung sumberdaya yang tersebar dalam Instansi Induk (Biro Umum Setda).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Biro Umum Setda Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 108 PNS dan 4 Orang PPPK yang terdiri 13 orang pejabat struktural, yang terbagi di Instansi Induk (Biro Umum Setda Provinsi Jambi). Profil Kepegawaian Biro Umum Setda Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut:

Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025



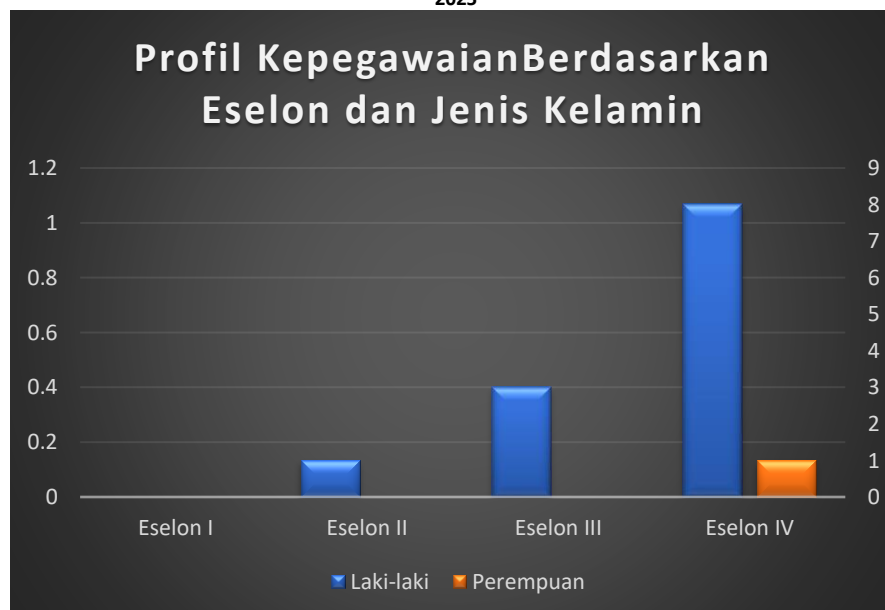
Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Biro Umum Setda Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Biro Umum Setda sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

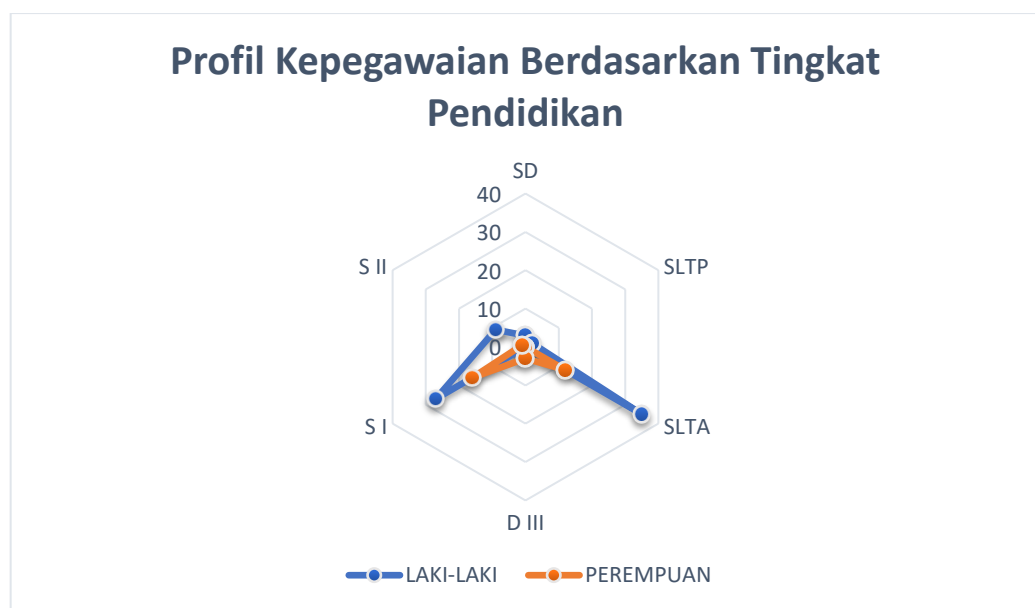
Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Biro Umum Setda Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Biro Umum Setda Provinsi Jambi sudah/belum (sesuaikan dengan kondisi OPD masing-masing) mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon, Profil kepegawaian Biro Umum Setda Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.5. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi Pegawai di Biro Umum Setda Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 dan SLTA terkait dengan jabatan yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana.

1.1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Biro Umum Setda Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Biro Umum Setda Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Biro Umum Setda Provinsi Jambi Tahun 2025

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan	Keterangan/ Kondisi
1	Alat-alat besar	11	Unit	Baik
2	Alat-alat angkutan	480	Unit	Baik
3	Alat kantor dan rumah tangga	9.443	Unit	Baik
4	Alat studio dan alat komunikasi	447	Unit	Baik
5	Bangunan gedung	52	Unit	Baik
6	Jaringan	29	Unit	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Biro Umum Setda Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.1.5 Ruang lingkup pelayanan dan dukungan yang diberikan kepada perangkat lain

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan fungsi pelayanan dan dukungan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Ruang lingkup pelayanan tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jambi.

1.1.6 Sistematisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematisasi penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Setda Provinsi Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

- Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya



1. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum perangkat daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi seperti tujuan dan sasaran sebagaimana penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh perangkat daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 (awal dan perubahan) dan sajikan tabel perjanjian kinerja perangkat daerah. Jelaskan pula apakah ada perbedaan antara target kinerja pada renja pada tahun 2025 dengan yang di perjanjikan kinerjanya pada tahun 2025 di awal tahun maupun perubahannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan narasi/deskripsi atas capaian kinerja perangkat daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan mengenai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dilihat dari realisasi anggaran yang terserap dibandingkan dengan kinerja yang dicapai sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN



1.2 Keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1 Visi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 adalah *“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT.”* Visi ini mencerminkan arah pembangunan daerah yang menekankan pada kemajuan daerah secara berkelanjutan, terciptanya rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, serta terselenggaranya pemerintahan yang tertib, berintegritas, dan profesional.

Visi tersebut menjadi pedoman utama dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Seluruh perangkat daerah, termasuk Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, berperan mendukung pencapaian visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui peningkatan kualitas layanan internal pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1.2.1 Misi Kepala Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah Provinsi Jambi, telah ditetapkan sejumlah misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026. Dari keseluruhan misi tersebut, **Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi** secara langsung mendukung dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan misi yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan. Misi Kepala Daerah yang menjadi tanggung jawab Biro Umum adalah:

“Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.”

Pelaksanaan misi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan rumah tangga, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan. Peran Biro Umum sebagai unit pendukung strategis diarahkan untuk memastikan tersedianya lingkungan kerja yang tertib, aman, dan nyaman guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah.



Dengan mendukung misi ini, Biro Umum berkontribusi dalam meningkatkan profesionalisme aparatur dan kualitas tata kelola internal pemerintahan daerah, sehingga mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jambi.

1.2.3 Peran Strategis Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah pendukung dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi. Peran strategis tersebut dijalankan melalui penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan rumah tangga, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan yang menjadi fondasi bagi kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Dalam mendukung pencapaian Visi ***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT”***, Biro Umum berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja pemerintahan yang tertib, aman, dan nyaman, sehingga seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dukungan tersebut secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan misi Kepala Daerah dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui peningkatan kualitas layanan internal, optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana, serta penguatan tata kelola organisasi, Biro Umum memastikan terselenggaranya sistem kerja pemerintahan yang profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, Biro Umum berperan sebagai enabler utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jambi.



1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1.3.1 Tujuan Strategis Perangkat Daerah

Tujuan strategis *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Transparan, Dan Akuntabel Dengan Pelayanan Publik Yang Berkualitas”* bagi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi diwujudkan melalui penguatan peran sebagai unit pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Biro Umum berperan dalam memastikan terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan rumah tangga, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan secara tertib, profesional, dan akuntabel.

Melalui penyediaan layanan internal yang efektif dan efisien, Biro Umum mendukung terciptanya sistem kerja pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, sehingga perangkat daerah dapat memberikan pelayanan publik secara optimal. Dengan demikian, peran Biro Umum menjadi bagian integral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jambi

1.3.2 Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Sasaran strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi merupakan penjabaran operasional dari tujuan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Sasaran strategis ini dirumuskan untuk memastikan bahwa peran Biro Umum sebagai unit pendukung penyelenggaraan pemerintahan dapat terukur dan berorientasi pada hasil.

- a. **Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran**, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien.
- b. **Meningkatnya kualitas pengelolaan rumah tangga dan lingkungan perkantoran**, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, tertib, dan nyaman.
- c. **Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran**, sebagai penunjang utama operasional pemerintahan daerah.
- d. **Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola internal Biro Umum**, dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.



Pencapaian sasaran strategis tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Biro Umum dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara tidak langsung melalui penyediaan layanan internal pemerintahan yang profesional dan berkelanjutan

1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menetapkan strategi dan arah kebijakan yang difokuskan pada penguatan peran sebagai unit pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Strategi dan arah kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan internal, efektivitas tata kelola, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara efisien dan akuntabel.

Strategi yang ditempuh Biro Umum meliputi peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran melalui penataan sistem kerja yang lebih tertib dan profesional, penguatan pengelolaan rumah tangga dan lingkungan perkantoran yang aman dan nyaman, serta optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar kebutuhan operasional. Selain itu, dilakukan penguatan tata kelola internal melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam setiap proses pelayanan.

Arah kebijakan Biro Umum diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan internal pemerintahan, pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jambi.

1.5 Permasalahan Utama (Strategic Issues)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah pendukung, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menghadapi beberapa permasalahan strategis yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya serta belum sepenuhnya terstandarisasinya proses pelayanan. Kondisi ini berpotensi menurunkan



efektivitas dukungan Biro Umum terhadap kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah lain.

Selain itu, pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi pemenuhan standar kebutuhan, pemeliharaan, maupun pemanfaatan aset. Hal tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan kinerja aparatur.

Permasalahan strategis lainnya adalah belum optimalnya integrasi perencanaan kinerja dengan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan hasil (outcome) yang diharapkan. Di samping itu, perumusan indikator kinerja dan target kinerja masih memerlukan penyempurnaan agar lebih terukur dan relevan dengan tugas dan fungsi Biro Umum.

Selanjutnya, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial belum dilakukan secara optimal, sehingga proses perbaikan kinerja berkelanjutan belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini diperkuat dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi SAKIP dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara keseluruhan berdampak pada pencapaian sasaran strategis Biro Umum, sehingga memerlukan penanganan yang terencana dan terintegrasi melalui penguatan strategi, arah kebijakan, dan pengelolaan kinerja yang berkelanjutan.

1.6 Tantangan dan Peluang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah pendukung, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan internal pemerintahan yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akuntabel, seiring dengan penguatan reformasi birokrasi dan implementasi SAKIP.

Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana perkantoran, menjadi tantangan dalam memenuhi standar pelayanan yang optimal. Tantangan lainnya adalah perlunya peningkatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, agar pelaksanaan kegiatan Biro



Umum lebih berorientasi pada hasil (outcome). Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi juga menuntut kemampuan adaptasi organisasi yang cepat dan tepat.

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Biro Umum untuk meningkatkan kinerja organisasi. Komitmen pimpinan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi peluang strategis dalam mendorong perbaikan sistem kerja dan peningkatan kualitas layanan internal.

Peluang lainnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan administrasi, yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akurasi pelayanan. Selain itu, penguatan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah memberikan peluang bagi Biro Umum untuk meningkatkan kualitas dukungan layanan internal pemerintahan secara terpadu.

Dalam rangka menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, Biro Umum mulai menerapkan serta merencanakan berbagai inovasi dan pendekatan baru, antara lain:

1. Peningkatan standar pelayanan administrasi perkantoran melalui penataan prosedur kerja yang lebih tertib dan terukur;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran;
3. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja, sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam implementasi SAKIP dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Melalui penerapan inovasi dan pendekatan baru tersebut, Biro Umum diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jambi.



1.7 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mengidentifikasi beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unit pendukung pemerintahan.

Isu strategis utama yang dihadapi adalah belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang diberikan kepada perangkat daerah, yang ditandai dengan perlunya peningkatan standar pelayanan, efektivitas proses kerja, serta ketepatan waktu layanan. Kondisi ini berimplikasi pada kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Isu strategis lainnya adalah pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran yang belum sepenuhnya efektif dan efisien, baik dalam aspek perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, maupun pemanfaatan aset. Hal tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan kerja yang belum optimal dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur.

Selanjutnya, integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program dan kegiatan Biro Umum lebih berorientasi pada hasil (outcome) dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Di samping itu, penyempurnaan indikator dan target kinerja masih menjadi isu penting untuk meningkatkan kualitas pengukuran dan akuntabilitas kinerja.

Isu strategis berikutnya adalah pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dan pengawasan yang belum optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja berkelanjutan. Hal ini berkaitan erat dengan kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi SAKIP dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel yang masih perlu ditingkatkan.

Berbagai isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 (awal dan perubahan) dan sajikan tabel perjanjian kinerja perangkat daerah. Jelaskan pula apakah ada perbedaan antara target kinerja pada renja pada tahun 2025 dengan yang di perjanjikan kinerjanya pada tahun 2025 di awal tahun maupun perubahannya

Pada bab ini diuraikan ringkasan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan pada awal tahun serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Perjanjian kinerja tersebut merupakan dokumen komitmen kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai bentuk penugasan untuk mewujudkan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, khususnya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penugasan yang memuat komitmen kinerja antara pimpinan perangkat daerah dengan pimpinan yang lebih tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Perjanjian Kinerja menjadi instrumen utama dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja.

Perjanjian Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun sebagai wujud komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan sarana dan prasarana, serta dukungan operasional lainnya bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021–2025, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja (Renja) Biro Umum Tahun 2025. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini mencerminkan kesinambungan dan keselarasan antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada awal tahun disusun berdasarkan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Dalam perjanjian kinerja tersebut tercantum sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta dukungan anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran dimaksud. Seluruh target kinerja pada perjanjian kinerja awal tahun pada prinsipnya mencerminkan target kinerja yang telah dirumuskan dalam Renja Tahun 2025.

Secara umum, indikator dan target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal) telah selaras dengan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	76.1 Nilai
		Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah / Sekda yang difasilitasi	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Indeks

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	126.083.646.912	-

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan dan dinamika kebijakan pembangunan daerah, pada Tahun 2025 dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja melalui Perjanjian Kinerja Perubahan. Perubahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, antara lain penyesuaian kebijakan strategis pemerintah daerah, hasil evaluasi kinerja semesteran, serta perubahan alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 pada dasarnya tidak mengubah sasaran strategis utama Perangkat Daerah, namun terdapat penyesuaian pada beberapa indikator kinerja dan/atau target kinerja agar lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kondisi aktual serta kemampuan sumber daya yang tersedia.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	76.5 Nilai
		Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah / Sekda yang difasilitasi	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	129.584.193.391	-

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perubahan

2.3 Kesesuaian Target Kinerja Renja dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil telaah terhadap target kinerja yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (awal), dapat disimpulkan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja awal tahun merupakan penjabaran langsung dari target kinerja Renja Tahun 2025.

Adapun pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, terdapat beberapa penyesuaian target kinerja dibandingkan dengan Renja awal, yang disebabkan oleh:

1. Perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
2. Penyesuaian pagu anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja pada semester berjalan;
4. Upaya peningkatan kualitas pengukuran kinerja agar lebih akurat dan akuntabel.

Penyesuaian tersebut dilakukan tanpa mengurangi substansi dan arah pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah, serta tetap berpedoman pada prinsip akuntabilitas

kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, baik pada awal tahun maupun perubahannya, tetap selaras dengan dokumen perencanaan dan menjadi dasar dalam pengukuran, pemantauan, serta pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENJA TAHUN 2025	TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025 (AWAL)	TARGET PERJANJIAN KINERJA 2025 (PERUBAHAN)	KET
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	76.5 Nilai	76.1 Nilai	76.5 Nilai	Target perubahan disesuaikan dengan peningkatan kinerja
		Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah / Sekda yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	Tidak ada perubahan target
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Indeks	81 Indeks	81 Indeks	Tidak ada perubahan target

No	PROGRAM	ANGGARAN Awal	ANGGARAN Perubahan	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	126.083.646.912	129.584.193.391	

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan narasi/deskripsi atas capaian kinerja perangkat daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan narasi dan deskripsi atas capaian kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan sasaran strategis ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja***. Sasaran strategis ini merupakan salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis tersebut dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun berjalan. Indikator kinerja tersebut dirancang untuk mengukur secara kuantitatif dan kualitatif tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja diperoleh melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkala dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir periode pelaporan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja organisasi, capaian kinerja sasaran strategis ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja*** secara umum menunjukkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan pada beberapa indikator menunjukkan capaian yang melampaui target. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam aspek kualitas pelayanan publik, perangkat daerah telah melaksanakan berbagai upaya perbaikan dan inovasi pelayanan, antara lain melalui penyederhanaan

prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan standar pelayanan. Upaya-upaya tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu layanan, serta peningkatan aksesibilitas dan transparansi pelayanan publik. Dengan demikian, kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menunjukkan tren yang semakin membaik dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, dalam aspek akuntabilitas kinerja, perangkat daerah terus melakukan penguatan sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang selaras, pelaksanaan pengukuran kinerja yang terukur, serta penyampaian laporan kinerja yang tepat waktu dan berkualitas menjadi faktor pendukung dalam peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Capaian kinerja pada aspek ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan komitmen seluruh unit kerja terhadap pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun secara umum capaian kinerja sasaran strategis ini menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, serta tantangan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Terhadap hal tersebut, perangkat daerah telah melakukan analisis atas penyebab ketidaktercapaian serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja* mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hasil capaian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Tahun 2025 disajikan melalui perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir tahun pelaporan. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja organisasi.

Target kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, serta Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada awal tahun. Target tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Sementara itu, realisasi kinerja merupakan hasil nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025 yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja organisasi, secara umum realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian yang baik apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sebagian besar indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran strategis mampu mencapai target, bahkan pada beberapa indikator menunjukkan capaian yang melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perencanaan kinerja yang disusun telah cukup realistis dan didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif.

Namun demikian, terdapat pula beberapa indikator kinerja yang realisasinya belum sepenuhnya mencapai target Tahun 2025. Ketidaktercapaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan, serta faktor eksternal yang berada di luar kendali organisasi. Terhadap indikator-indikator tersebut, organisasi telah melakukan analisis penyebab ketidaktercapaian guna menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode selanjutnya.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 juga menunjukkan adanya variasi tingkat capaian antar indikator. Indikator dengan capaian tinggi umumnya didukung oleh kejelasan perencanaan, ketersediaan sumber daya yang

memadai, serta koordinasi yang efektif antar unit kerja. Sementara itu, indikator dengan capaian yang lebih rendah menjadi perhatian khusus bagi organisasi untuk dilakukan penguatan, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan proses bisnis, maupun optimalisasi dukungan anggaran dan sarana prasarana.

Hasil perbandingan target dan realisasi kinerja ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja organisasi secara keseluruhan selama Tahun 2025. Informasi tersebut tidak hanya digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja organisasi, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial serta penyusunan rencana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dengan demikian, capaian kinerja organisasi Tahun 2025 yang disajikan melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi atas capaian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja organisasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

a. Target Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	76.5 Nilai	76.5 Nilai	100 %
		Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah / Sekda yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81 Indeks	81 Indeks	100 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah telah berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Seluruh indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur pencapaian sasaran strategis menunjukkan realisasi sebesar 100 persen dari target yang ditentukan.

Capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa perencanaan kinerja yang disusun telah realistis, terukur, dan selaras dengan kebutuhan organisasi, serta didukung oleh

pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran telah berhasil direalisasikan secara optimal melalui koordinasi yang baik antar unit kerja, pemanfaatan sumber daya secara maksimal, serta komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian kinerja sebesar 100 persen ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian dan monitoring kinerja telah berjalan dengan baik, sehingga setiap potensi hambatan yang muncul dapat diantisipasi dan diselesaikan secara tepat waktu. Selain itu, dukungan kebijakan pimpinan serta kesesuaian antara program, kegiatan, dan anggaran turut berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja.

Dengan tercapainya target dan realisasi kinerja secara penuh pada Tahun 2025, perangkat daerah telah menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik serta mampu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Capaian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu (2024)

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu (2023,2024)

No	Indikator	Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian 2025		
		2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	BB (74,05)	BB (74,25)	BB (76,01)	BB (75,05)	98,67
2	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah / Sekda yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	A (92,19)	A (84,44)	A (85,5)	A (85)	99,24

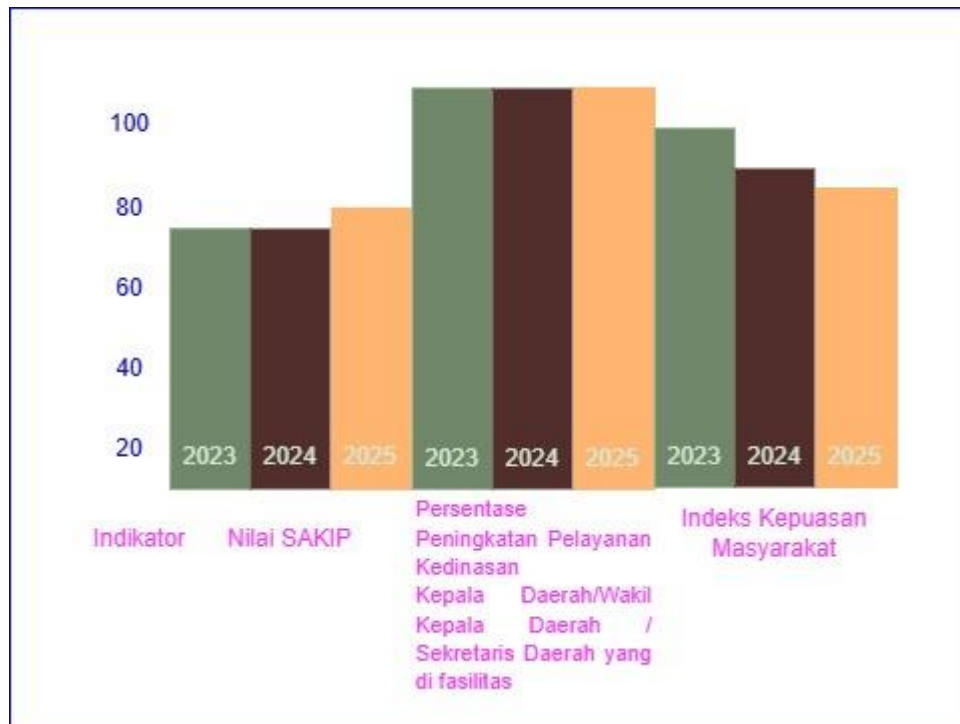


Diagram Realisasi kinerja serta capaian kinerja

Perkembangan kinerja selama periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil, baik dari sisi akuntabilitas kinerja maupun kualitas pelayanan publik.

Pada indikator Nilai SAKIP, capaian kinerja mengalami peningkatan bertahap. Pada Tahun 2023, Nilai SAKIP berada pada kategori BB (74,05), kemudian meningkat menjadi BB (74,25) pada Tahun 2024. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada Tahun 2025 dengan realisasi sebesar BB (75,05). Tren ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

Untuk indikator Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekda yang difasilitasi, kinerja menunjukkan kondisi sangat konsisten dan optimal. Sejak Tahun 2023 hingga Tahun 2025, capaian selalu berada pada angka 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh pelayanan kedinasan telah difasilitasi secara menyeluruh dan berkesinambungan tanpa adanya penurunan kinerja.

Sementara itu, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan dinamika capaian. Pada Tahun 2023, IKM berada pada kategori A (92,19), kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi A (84,44). Namun demikian, pada Tahun 2025 terjadi perbaikan kembali dengan capaian A (85,00). Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan kualitas pelayanan publik sebagai respons terhadap hasil evaluasi pada tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja selama Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa organisasi mampu menjaga konsistensi pelaksanaan pelayanan utama, sekaligus melakukan perbaikan bertahap pada aspek akuntabilitas dan kepuasan masyarakat. Hal ini menjadi landasan positif dalam mendorong peningkatan kinerja yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

c. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Tercepat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Indikator	Awal RPJMD 2021	2023	2024	Target 2025	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
1	Nilai SAKIP	CC (60,10)	BB (74,05)	BB (74,25)	BB (76,01)	98,67
	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah / Sekda yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (70,11)	A (92,19)	A (84,44)	A (85,5)	99,24

Perkembangan kinerja organisasi selama periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 menunjukkan arah perbaikan yang berkelanjutan, baik pada aspek akuntabilitas kinerja, konsistensi pelayanan kedinasan, maupun kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada indikator Nilai SAKIP, kondisi awal pada Tahun 2021 (Awal RPJMD) berada pada kategori CC dengan nilai 60,10. Seiring dengan pelaksanaan program dan penguatan sistem manajemen kinerja, capaian ini mengalami peningkatan yang signifikan pada

Tahun 2023 menjadi BB (74,05) dan kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi BB (74,25). Pada Tahun 2025, Nilai SAKIP ditargetkan mencapai BB (76,01), dengan realisasi sampai tahun berjalan telah mencapai 98,67% dari target akhir Tahun 2026. Tren ini menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan.

Selanjutnya, indikator Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah yang difasilitasi menunjukkan kinerja yang sangat konsisten dan optimal. Sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2025, capaian indikator ini senantiasa berada pada angka 100%, dan ditargetkan tetap terjaga hingga Tahun 2026. Kondisi ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memastikan seluruh pelayanan kedinasan pimpinan daerah terlaksana secara penuh, tepat waktu, dan tanpa penurunan kualitas layanan.

Sementara itu, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), kondisi awal pada Tahun 2021 berada pada kategori B dengan nilai 70,11. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi kategori A (92,19), yang menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, pada Tahun 2024 nilai IKM mengalami penurunan menjadi A (84,44). Penurunan ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan layanan, sehingga pada Tahun 2025 capaian IKM kembali meningkat menjadi A (85,5). Hingga tahun berjalan, capaian IKM telah mencapai 99,24% dari target yang ditetapkan sampai dengan Tahun 2026, yang menandakan adanya perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi ekspektasi masyarakat.

Secara keseluruhan, perkembangan kinerja selama periode Tahun 2021–2026 menunjukkan bahwa organisasi mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja secara bertahap, menjaga konsistensi pelayanan strategis, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi. Capaian ini menjadi modal yang kuat dalam mendukung pencapaian target akhir RPJMD Tahun 2026 dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan di masa mendatang.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis Kinerja dan Faktor Penyebab

Berdasarkan perbandingan kinerja tahun 2023, 2024, dan target tahun 2025, secara umum seluruh indikator menunjukkan tren kinerja yang positif dan stabil, dengan capaian yang mendekati bahkan memenuhi target yang ditetapkan.

1. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP mengalami peningkatan signifikan dibandingkan awal RPJMD 2021 yang berada pada kategori CC (60,10), kemudian meningkat menjadi BB (74,05) pada 2023 dan BB (74,25) pada 2024. Target tahun 2025 sebesar BB (76,01) telah tercapai sebesar 98,67%. Keberhasilan ini disebabkan oleh:

- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja dan keselarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.
- Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- Pembinaan dan pendampingan penyusunan SAKIP secara berkelanjutan.

2. Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekda yang Difasilitasi Indikator ini menunjukkan capaian 100% secara konsisten dari awal RPJMD hingga tahun 2024 dan tetap sesuai dengan target 2025. Keberhasilan ini didukung oleh:

- Perencanaan agenda dan koordinasi lintas perangkat daerah yang efektif.
- Ketersediaan sumber daya pendukung yang memadai.
- Standar operasional pelayanan kedinasan yang telah berjalan dengan baik.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) IKM meningkat dari kategori B (70,11) pada awal RPJMD menjadi A (92,19) pada 2023, meskipun mengalami penurunan pada 2024 menjadi A (84,44), namun tetap berada pada kategori sangat baik dan mendekati target 2025 sebesar A (85,5) dengan capaian 99,24%. Penurunan kecil pada tahun 2024 disebabkan oleh:

- Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
- Masukan dan keluhan masyarakat yang lebih kritis terhadap kecepatan dan kemudahan layanan.

Alternatif Solusi dan Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, beberapa alternatif solusi dan langkah perbaikan telah dilakukan, antara lain:

- Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.
- Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pendampingan teknis terkait manajemen kinerja dan pelayanan publik.
- Optimalisasi digitalisasi pelayanan guna meningkatkan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas layanan.
- Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat sebagai bahan perbaikan berkelanjutan terhadap prosedur dan kualitas pelayanan.

e. Analisis Atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Pendukung Kinerja

Penggunaan sumber daya pendukung kinerja yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan sistem dan teknologi informasi telah dimanfaatkan secara efektif dan optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pada seluruh indikator yang ditetapkan.

Dari sisi sumber daya manusia, efektivitas terlihat melalui meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja. Aparatur yang terlibat telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai peran masing-masing, didukung oleh pembagian kerja yang jelas dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah. Hal ini tercermin pada peningkatan Nilai SAKIP serta konsistensi pelayanan kedinasan yang mencapai 100%.

Pada aspek pengelolaan anggaran, alokasi dan realisasi anggaran telah diselaraskan dengan prioritas program dan kegiatan pendukung kinerja. Penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik. Efektivitas ini ditunjukkan dengan capaian kinerja

yang tinggi, dimana sebagian besar indikator mendekati atau mencapai target yang ditetapkan tanpa pemborosan sumber daya.

Dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan fasilitas kerja dan penunjang pelayanan telah memadai dan dimanfaatkan secara maksimal. Fasilitas tersebut mendukung kelancaran pelayanan kedinasan pimpinan daerah serta pelaksanaan tugas administratif dan koordinatif, sehingga tidak terdapat hambatan signifikan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pendukung juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja, khususnya dalam proses perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Digitalisasi layanan dan sistem pengelolaan data kinerja membantu meningkatkan ketepatan waktu, akurasi informasi, serta transparansi, yang berdampak positif terhadap peningkatan Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Secara keseluruhan, efektivitas penggunaan sumber daya pendukung kinerja tercermin dari tingginya capaian indikator kinerja, konsistensi hasil, serta minimnya kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Optimalisasi sumber daya yang telah dilakukan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja dan menjadi dasar untuk peningkatan kinerja yang berkelanjutan di tahun berikutnya

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pencapaian pernyataan kinerja pada periode evaluasi didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang secara umum telah **selaras dengan tujuan dan sasaran strategis** serta dilaksanakan secara efektif. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang sebagian besar menunjukkan hasil optimal dan mendekati target yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang menunjang **keberhasilan pencapaian kinerja**, khususnya pada peningkatan **Nilai SAKIP**, antara lain kegiatan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah, serta pembinaan dan pendampingan implementasi SAKIP. Kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan

dan penguatan akuntabilitas kinerja, sehingga mampu mendorong peningkatan nilai SAKIP dari tahun ke tahun.

Keberhasilan pencapaian indikator **persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekda yang difasilitasi** didukung oleh program fasilitasi pimpinan daerah dan kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Perencanaan agenda kerja yang sistematis, dukungan administratif yang memadai, serta sinergi antar unit kerja menjadi faktor utama yang memastikan seluruh pelayanan kedinasan dapat difasilitasi secara optimal sesuai target.

Sementara itu, pencapaian **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang berada pada kategori sangat baik juga ditunjang oleh program peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain kegiatan evaluasi standar pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Meskipun demikian, terdapat penurunan nilai IKM pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kegiatan peningkatan kualitas layanan belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan ekspektasi masyarakat, terutama terkait kecepatan layanan dan kemudahan akses informasi.

Adapun faktor yang berpotensi menjadi **kendala atau keterbatasan** dalam pencapaian kinerja antara lain masih perlunya penguatan inovasi pelayanan dan peningkatan konsistensi kualitas layanan pada seluruh unit pelayanan. Namun demikian, kendala tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja secara keseluruhan, karena sebagian besar indikator tetap berada pada kategori baik hingga sangat baik.

Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan upaya perbaikan melalui penajaman program dan kegiatan, khususnya dengan memperkuat orientasi hasil (outcome), meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan langkah tersebut, program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung pencapaian pernyataan kinerja pada periode selanjutnya.

g. Perbaikan-Perbaikan Yang Telah Dilakukan Perangkat Daerah Sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Dalam Hasil Evaluasi Sakip Internal Yang Telah Dilakukan Oleh Apip/Inspektorat

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP internal yang telah dilakukan oleh APIP/Inspektorat, Perangkat Daerah telah melaksanakan berbagai langkah perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pada aspek **perencanaan kinerja**, telah dilakukan penyempurnaan dokumen perencanaan dengan memperkuat keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan. Indikator kinerja telah ditinjau kembali agar lebih relevan, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome), serta selaras dengan indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah dan indikator kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan **pengukuran dan pelaporan kinerja**, Perangkat Daerah telah melakukan perbaikan kualitas data kinerja melalui penataan mekanisme pengumpulan dan verifikasi data, serta peningkatan ketepatan waktu pelaporan. Selain itu, penyusunan laporan kinerja telah disempurnakan dengan analisis capaian kinerja yang lebih komprehensif, termasuk analisis penyebab keberhasilan atau kendala serta upaya tindak lanjut yang dilakukan.

Pada aspek **monitoring dan evaluasi**, telah diperkuat pelaksanaan monitoring kinerja secara berkala dengan melibatkan unit terkait. Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai dasar pengambilan keputusan, penyesuaian program dan kegiatan, serta perbaikan strategi pencapaian sasaran kinerja.

Dari sisi **penguatan sumber daya manusia**, telah dilakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan, pendampingan teknis, dan koordinasi intensif terkait implementasi SAKIP. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen aparatur dalam menerapkan manajemen kinerja secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, Perangkat Daerah juga telah menindaklanjuti rekomendasi dengan meningkatkan **pemanfaatan teknologi informasi** dalam mendukung pengelolaan kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan. Pemanfaatan sistem informasi kinerja ini membantu meningkatkan akurasi data, efisiensi proses, serta transparansi dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP internal oleh APIP/Inspektorat menunjukkan komitmen Perangkat Daerah dalam memperbaiki tata kelola kinerja. Langkah-langkah tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kinerja yang lebih optimal pada periode selanjutnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu instrumen utama dalam menilai **akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**, khususnya dalam mengukur tingkat **efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya** untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam **Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025**. Analisis realisasi anggaran dilakukan dengan membandingkan antara **anggaran setelah perubahan, realisasi keuangan, realisasi fisik, serta capaian kinerja** dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025, total anggaran setelah perubahan sebesar **Rp129.584.193.391,00** dengan realisasi belanja sebesar **Rp122.820.688.334,00** atau mencapai **94,78 persen**, sedangkan realisasi fisik juga tercatat sebesar **94,78 persen**. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah secara optimal.

Pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, realisasi anggaran secara umum berada pada kategori tinggi. Kegiatan yang mendukung fungsi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, termasuk penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, terealisasi sebesar **100 persen**, yang menunjukkan terjaminnya kesinambungan siklus perencanaan dan penganggaran. Selain itu, kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah, seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penatausahaan dan pelaporan keuangan, terealisasi pada kisaran **95–100 persen**, sehingga mampu menjamin kelancaran operasional dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Realisasi anggaran pada **Administrasi Barang Milik Daerah** mencapai **98,47 persen**, yang mencerminkan tertibnya pelaksanaan kegiatan pengamanan, penatausahaan, serta



rekonsiliasi dan pelaporan aset daerah. Sisa anggaran yang terjadi lebih disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi pemanfaatan aset yang telah tersedia, tanpa mengurangi kualitas output yang dihasilkan.

Sementara itu, pada **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, realisasi anggaran tercatat sebesar **88,52 persen**. Realisasi yang belum maksimal pada beberapa kegiatan, seperti penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta peralatan rumah tangga, disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan riil dan efisiensi belanja. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berdampak terhadap pencapaian kinerja, karena kegiatan utama tetap dapat dilaksanakan secara efektif.

Realisasi belanja modal, khususnya pada kegiatan **pengadaan kendaraan dinas jabatan**, mencapai **94,78 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan sisa anggaran yang berasal dari hasil efisiensi harga pengadaan. Pada sisi lain, kegiatan **administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** terealisasi sebesar **95,29 persen**, yang mencerminkan dukungan anggaran yang memadai terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan daerah.

Pada program **pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan**, realisasi anggaran mencapai **92,33 persen**. Beberapa kegiatan pemeliharaan gedung, sarana, dan prasarana menunjukkan realisasi di bawah 100 persen, yang disebabkan oleh penyesuaian volume pekerjaan dan efisiensi pelaksanaan, tanpa mengurangi fungsi dan kondisi aset dalam mendukung pelayanan dan operasional Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan, analisis realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan adanya **keselarasan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja**, serta terdapat **deviasi positif** dimana capaian fisik dan output kegiatan tetap tinggi meskipun terdapat sisa anggaran. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip **anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting)** dan **value for money**, sebagaimana ditekankan dalam evaluasi SAKIP oleh APIP/Inspektorat dan Kementerian PAN dan RB.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan **APBD Murni** yang selanjutnya mengalami penyesuaian melalui **APBD Perubahan**, guna mengakomodasi dinamika kebijakan, kebutuhan riil organisasi,

serta optimalisasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Perubahan anggaran tersebut tetap mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada tingkat **program**, penyesuaian anggaran dari murni ke perubahan dilakukan untuk memperkuat dukungan terhadap **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, khususnya dalam menjamin kelancaran fungsi administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan daerah, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah. Perubahan anggaran pada tingkat program tidak mengubah tujuan dan sasaran strategis, melainkan menyesuaikan kebutuhan belanja agar lebih efektif dan efisien.

Pada tingkat **kegiatan**, perubahan anggaran dilakukan melalui penambahan atau pengurangan alokasi pada kegiatan tertentu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran semester berjalan. Beberapa kegiatan mengalami peningkatan alokasi anggaran karena meningkatnya kebutuhan operasional dan penyesuaian volume pekerjaan, seperti kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, serta fasilitasi kerumahtanggaan pimpinan daerah. Sebaliknya, terdapat kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran akibat efisiensi pelaksanaan, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta penyesuaian terhadap kondisi riil lapangan.

Pada tingkat **sub kegiatan**, penyesuaian anggaran dari murni ke perubahan dilakukan secara lebih spesifik dan teknis, antara lain melalui:

- Penyesuaian kebutuhan belanja operasional dan belanja jasa,
- Efisiensi pada sub kegiatan yang output-nya dapat dicapai dengan biaya lebih rendah,
- Realokasi anggaran antar sub kegiatan dalam satu kegiatan untuk menjaga ketercapaian output dan outcome.

Beberapa sub kegiatan, seperti penyusunan dokumen perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan, serta fasilitasi pelayanan kedinasan, tetap dipertahankan dengan alokasi yang memadai dan direalisasikan secara optimal. Sementara itu, sub kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang, pemeliharaan, dan operasional mengalami penyesuaian anggaran yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dan efisiensi belanja.

Secara keseluruhan, perubahan anggaran dari murni ke perubahan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja. Sebaliknya, penyesuaian tersebut justru meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan memastikan bahwa alokasi belanja benar-benar mendukung pencapaian target kinerja. Hal ini tercermin dari realisasi keuangan dan fisik yang tinggi serta capaian output kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dari APBD Murni hingga APBD Perubahan telah dilaksanakan secara **adaptif, terukur, dan akuntabel**, serta selaras dengan prinsip **anggaran berbasis kinerja** sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyesuaian anggaran yang dilakukan menjadi bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

Kegiatan 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, penyesuaian anggaran dari APBD Murni ke APBD Perubahan dilakukan secara terbatas dan bersifat teknis. Perubahan anggaran difokuskan untuk memastikan kelancaran penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Pada tingkat kegiatan dan sub kegiatan, alokasi anggaran tetap diarahkan untuk mendukung kesinambungan siklus perencanaan dan penganggaran. Seluruh sub kegiatan pada program ini dapat direalisasikan secara optimal dengan capaian fisik dan keuangan yang tinggi, sehingga tidak terdapat dampak negatif terhadap pencapaian kinerja.

Kegiatan 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mengalami penyesuaian anggaran dari APBD Murni ke APBD Perubahan sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan operasional pengelolaan keuangan. Penyesuaian tersebut terutama terjadi pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan. Pada tingkat sub kegiatan, perubahan anggaran dimaksudkan untuk menyesuaikan kebutuhan riil pembayaran belanja pegawai dan mendukung ketepatan

waktu penyusunan laporan keuangan. Secara keseluruhan, perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja dan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan realisasi yang tinggi dan akuntabel.

Kegiatan 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pada Program Administrasi Barang Milik Daerah, perubahan anggaran dilakukan melalui penyesuaian alokasi pada kegiatan pengamanan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan pelaporan barang milik daerah. Penyesuaian anggaran dari murni ke perubahan lebih bersifat efisiensi, seiring optimalisasi pemanfaatan aset yang telah tersedia. Pada tingkat sub kegiatan, beberapa alokasi disesuaikan dengan kebutuhan aktual tanpa mengurangi kualitas output. Program ini tetap mampu mendukung tertib administrasi aset dengan capaian kinerja yang optimal.

Kegiatan 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami perubahan anggaran yang relatif signifikan dari APBD Murni ke APBD Perubahan. Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan operasional perkantoran, termasuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik, serta penyelenggaraan rapat dan koordinasi. Pada tingkat kegiatan dan sub kegiatan, perubahan anggaran juga mencerminkan efisiensi belanja, khususnya pada pengadaan barang yang dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan persediaan yang tersedia. Meskipun terjadi penyesuaian anggaran, seluruh kegiatan utama tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, perubahan anggaran dari APBD Murni ke APBD Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan prioritas pengadaan, khususnya pengadaan kendaraan dinas jabatan. Penyesuaian anggaran mempertimbangkan hasil evaluasi kebutuhan serta efisiensi harga pengadaan. Pada tingkat sub kegiatan, perubahan anggaran tidak mempengaruhi target output, karena pengadaan tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana dan mendukung kelancaran operasional Perangkat Daerah.



Kegiatan 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian anggaran dari murni ke perubahan terutama pada kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan riil jasa penunjang seperti jasa kebersihan, keamanan, dan layanan pendukung lainnya. Pada tingkat sub kegiatan, penyesuaian tersebut bertujuan menjaga kualitas layanan dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi. Program ini tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Kegiatan 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah, perubahan anggaran dari APBD Murni ke APBD Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan volume dan prioritas pekerjaan pemeliharaan. Beberapa kegiatan pemeliharaan gedung, sarana, dan prasarana mengalami penyesuaian alokasi berdasarkan kondisi fisik aset dan hasil evaluasi lapangan. Pada tingkat sub kegiatan, perubahan anggaran diarahkan untuk memastikan aset tetap berfungsi optimal tanpa melakukan belanja yang tidak diperlukan. Penyesuaian tersebut tidak menghambat pencapaian kinerja pelayanan.

Kegiatan 8. Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Program Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengalami perubahan anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan operasional kedinasan pimpinan daerah. Penyesuaian pada tingkat kegiatan dan sub kegiatan dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan agenda dan intensitas kegiatan pimpinan daerah. Meskipun terjadi perubahan alokasi anggaran, seluruh kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.



Kegiatan 9. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Pada Program Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, perubahan anggaran dari APBD Murni ke APBD Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan operasional rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah. Penyesuaian anggaran pada tingkat sub kegiatan dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual, termasuk efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Program ini tetap mampu mendukung operasional dan pelayanan kerumahtanggaan secara optimal.

BAB 4

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penyusunan LKjIP ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi melalui pengelolaan kinerja yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Secara umum, hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa capaian kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 berada pada kategori baik. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan telah mampu mendukung pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja, dengan didukung oleh pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja.

Pelaksanaan kinerja Biro Umum pada Tahun 2025 juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Biro Umum sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Sasaran strategis tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum, dukungan kerumahtanggaan pimpinan daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah, Biro Umum berperan penting dalam memastikan kelancaran operasional Sekretariat Daerah dan mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan tingkat serapan yang tinggi dan sejalan dengan capaian kinerja yang diraih. Sisa anggaran yang terjadi lebih disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan riil,

serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Kondisi tersebut tidak berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja, namun justru mencerminkan penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja dan value for money sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan evaluasi SAKIP.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi menyadari bahwa pencapaian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari proses berkelanjutan dalam periode pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, capaian yang telah diraih akan menjadi dasar evaluasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Beberapa tantangan yang masih dihadapi, seperti perlunya peningkatan konsistensi kualitas pelayanan, penguatan pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur, akan menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan kinerja selanjutnya.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari APIP/Inspektorat serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan manajemen kinerja. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, penyempurnaan indikator kinerja agar lebih berorientasi pada outcome, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan.

Ke depan, hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan kinerja Tahun 2026, sebagai bagian dari implementasi Renstra Biro Umum Tahun 2025–2029. Fokus peningkatan kinerja akan diarahkan pada penguatan dukungan administrasi dan kerumahtanggaan yang profesional, peningkatan efektivitas pelayanan internal Sekretariat Daerah, serta pengelolaan sumber daya yang semakin efisien dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan Biro Umum dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Provinsi Jambi.

Dengan tersusunnya LKjIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 ini, diharapkan laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi instrumen pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan bagi organisasi. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan



daerah dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Provinsi Jambi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel